



Kabupaten
Tana Tidung

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kabupaten Tana Tidung

TAHUN 2027





BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai :

- a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
- c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
- d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan II Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 terdiri atas :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, Proyek Strategis Nasional, dan program kerja prioritas nasional;
- e. Program Strategis Nasional; dan
- f. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA;

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; DAN

BAB VIII: PENUTUP.

- (3) Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

- c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program perangkat daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan nasional dan/atau daerah, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - e. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, mencakup program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat; dan/atau
 - f. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2027.
- (6) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada: a. peraturan daerah tentang RPJMD; dan b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II yang dapat bersifat prognosis.
- (7) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang belum terakomodir;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD Tahun 2027.
- (2) Rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan fasilitasi dengan melampirkan:
 - a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan II; dan
 - c. daftar isian fasilitasi rancangan peraturan bupati tentang perubahan RKPD Tahun 2027.

Pasal 8

Aparat pengawasan internal Pemerintah melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Bupati mengenai Perubahan RKPD Tahun 2027 ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli Tahun 2027.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan peraturan bupati tentang perubahan RKPD Tahun 2027 beserta matriks hasil penyempurnaan kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati ditetapkan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
- c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan
- d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Tahun 2027.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Juli 2026
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



HERSONSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026 NOMOR 35

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBARvii

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 11

1.3 Hubungan Antar Dokumen 14

1.4 Maksud dan Tujuan 15

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... 17

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... 19

2.1 Gambaran Capaian Kinerja Daerah..... 19

2.1.1 Aspek Pelayanan Umum..... 19

2.1.2 Aspek Daya Saing Daerah 120

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2025..... 123

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 132

2.4 Isu Strategis 137

2.5 Pokok Pikiran DPRD 151

2.6 Inovasi Daerah 175

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 192

3.1 Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal..... 192

3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027 192

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.....196

3.1.3 Ekonomi Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 203

3.2 Keuangan Daerah..... 243

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 245

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 261

3.2.3 Analisis Pembiayaan..... 279

3.3. Kerangka Pendanaan 281

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja..... 282

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... 289

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 292

4.1 Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagai Acuan Pembangunan Daerah Tahun 2027293

4.1.1 Arah Pembangunan Nasional Tahun 2027 294

4.1.2 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.. 299

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027302

4.3 Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027310

4.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Tana Tidung..... 311

4.3.2 Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung..... 315

4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027320

4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027330

4.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027337

BAB V RENCANA KERJA..... 380

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 705

BAB VII PENUTUP..... 729

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pendidikan.....	21
Tabel 2. 2 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	23
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kesehatan	26
Tabel 2. 4 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	29
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	32
Tabel 2. 6 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	35
Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	37
Tabel 2. 8 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40
Tabel 2. 9 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	42
Tabel 2. 10 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	45
Tabel 2. 11 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Sosial	48
Tabel 2. 12 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial.....	50
Tabel 2. 13 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Tenaga Kerja	52
Tabel 2. 14 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	55
Tabel 2. 15 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	57
Tabel 2. 16 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	60
Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63
Tabel 2. 18 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kebudayaan	65
Tabel 2. 19 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Penanaman Modal	68
Tabel 2. 20 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	70
Tabel 2. 21 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perhubungan	72
Tabel 2. 22 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pangan	75
Tabel 2. 23 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pertanahan.....	77
Tabel 2. 24 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup	80
Tabel 2. 25 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	82
Tabel 2. 26 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Persandian.....	85
Tabel 2. 27 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Statistik	88

Tabel 2. 28 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	91
Tabel 2. 29 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perpustakaan ...	93
Tabel 2. 30 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kearsipan.....	96
Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pertanian	98
Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pariwisata	101
Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan.....	103
Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perdagangan ...	105
Tabel 2. 35 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perindustrian .	106
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perencanaan dan Keuangan	109
Tabel 2. 37 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pengadaan	112
Tabel 2. 38 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.....	114
Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Manajemen Keuangan	115
Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Transparansi dan Pelayanan Publik	118
Tabel 2. 41 Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan.....	120
Tabel 2. 42 Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan	121
Tabel 2. 43 Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Tahun 2025	124
Tabel 2. 44 Rekapitulasi Capaian Anggaran OPD Tahun 2025.....	126
Tabel 2. 47 Permasalahan Pokok Per Urusan Kabupaten Tana Tidung	135
Tabel 2. 48 Daftar Usulan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	152
Tabel 2. 49 Daftar Inovasi Daerah	175
Tabel 3. 1 Komponen IPM	206
Tabel 3. 2 Angkatan Kerja.....	217
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama	218
Tabel 3. 4 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2021-2025.....	224
Tabel 3. 5 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2021-2025	228
Tabel 3. 6 Pertumbuhan PDRB ADHK 2021-2025	232
Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.....	236
Tabel 3. 8 Pedoman Pengukuran Gini Rasio	240
Tabel 3. 9 Target Indikator Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 ...	242
Tabel 3. 10 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025	247
Tabel 3. 11 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025	249

Tabel 3. 12 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah).....	252
Tabel 3. 13 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025.....	256
Tabel 3. 14 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (Dalam Juta Rupiah)	259
Tabel 3. 15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah).....	261
Tabel 3. 16 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025	263
Tabel 3. 17 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	265
Tabel 3. 18 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	267
Tabel 3. 19 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	269
Tabel 3. 20 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	271
Tabel 3. 21 Proporsi Belanja Kab. Tana Tidung Tahun 2023 – 2025.....	273
Tabel 3. 22 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025	280
Tabel 3. 23 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	284
Tabel 3. 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	291
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029	305
Tabel 4. 2 Penyandingan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	318
Tabel 4. 3 Prioritas, Sasaran, dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	326
Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	328
Tabel 4. 5 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas/Fokus Pembangunan, dan Arah Kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	332
Tabel 4. 6 Keselarasan Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	335
Tabel 4. 7 Prioritas Program Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	340
Tabel 4. 8 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Tana Tidung terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Tahun 2027	347
Tabel 4. 9 Kegiatan Prioritas Utama dan Dukungan Program serta Kegiatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.....	352
Tabel 4. 10 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	357

Tabel 4. 11 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027..... 363

Tabel 4. 12 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten Tahun 2027 Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027..... 368

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027..... 381

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.... 705

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 ... 706

Tabel 6.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 706

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 .. 708

Tabel 6.5 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 711

Tabel 6.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027..... 726

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen	15
Gambar 2. 1 Perumusan Isu Strategis RKPD Tahun 2027.....	147
Gambar 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia	204
Gambar 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan IPM (2021-2025)	205
Gambar 3. 3 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan).....	208
Gambar 3. 4 Persentase Kemiskinan.....	209
Gambar 3. 5 Persentase Kemiskinan.....	211
Gambar 3. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	213
Gambar 3. 7 Indeks Keparahan Kemiskinan	215
Gambar 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka	219
Gambar 3. 9 PDRB Kabupaten Tana Tidung 2021-2025 (miliar rupiah).....	222
Gambar 3. 10 PDRB Per Kapita Kab. Tana Tidung 2021-2025 (Juta Rupiah)	223
Gambar 3. 11 PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025 (Dalam Miliar Rupiah)	227
Gambar 3. 12 Distribusi PDRB ADHK 2025.....	230
Gambar 3. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung.....	231
Gambar 3. 14 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara	235
Gambar 3. 15 Laju Inflasi	238
Gambar 3. 16 Indeks Gini.....	240
Gambar 3. 17 Perkembangan Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)	249
Gambar 3. 18 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)	254
Gambar 3. 19 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025	263
Gambar 3. 20 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tana Tidung.....	265
Gambar 3. 21 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025	267
Gambar 3. 22 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025.....	269
Gambar 3. 23 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 – 2025	271
Gambar 3. 24 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025.....	275
Gambar 3. 25 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025.....	276
Gambar 3. 26 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025	278

Gambar 4. 1 Program Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 308

Gambar 4. 2 Tema dan Fokus Pembangunan 2027..... 313

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses strategis yang disusun untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik serta menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Proses ini menjadi tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan pemanfaatan potensi serta sumber daya yang dimiliki. Melalui perencanaan yang terencana dan sistematis, diharapkan permasalahan pembangunan daerah dapat ditangani secara efektif, kapasitas dan daya saing Kabupaten Tana Tidung dapat ditingkatkan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Dalam konteks perencanaan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta rencana program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Dokumen ini menjadi penghubung antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan proses penganggaran tahunan, serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, serta tetap memperhatikan arah kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, hingga penetapan melalui peraturan kepala daerah. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 yang telah ditetapkan merupakan hasil dari proses perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan terintegrasi. Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), guna menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antarwilayah, antarsektor, antarurusan pemerintahan, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta strategis melalui evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, penilaian kondisi dan capaian urusan pemerintahan, identifikasi isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan ini juga memperhatikan keterbatasan sumber daya dan kemampuan pendanaan daerah, sehingga menghasilkan prioritas pembangunan dan program yang realistis dan terukur.

Pendekatan partisipatif menekankan keterlibatan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbang dan forum perangkat daerah, sehingga perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, pendekatan politis diwujudkan melalui keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dilakukan untuk memastikan keselarasan RKPD dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Di sisi lain, pendekatan bawah-atas (bottom-up) dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat dari tingkat

desa hingga kabupaten, sehingga program pembangunan yang dirumuskan benar-benar berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 juga diterapkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, yang menekankan keterpaduan penanganan isu pembangunan lintas sektor, fokus pada tema dan prioritas utama, serta perencanaan berbasis lokasi yang didukung data spasial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pembangunan. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang telah disusun secara komprehensif, sistematis, dan terintegrasi, serta menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Kepmendagri No. 050-5889/2021 mengenai hasil

- verifikasi, validasi, inventarisasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2045; dan
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

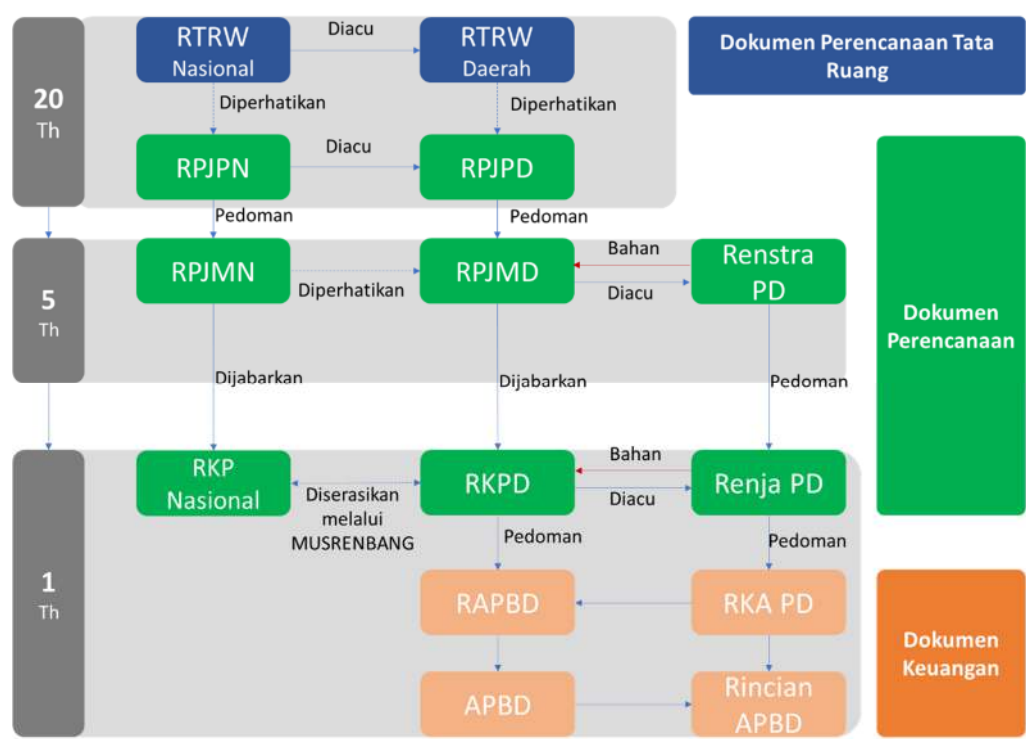
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Terdapat beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkaitan dengan RKPD ini yaitu

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Rencana Kerja Pemerintah Nasional
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung

Berikut penggambaran keterkaitan antar dokumen dengan RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2027:



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, integratif, dan berbasis kinerja. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, serta menjadi pedoman

dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, prioritas, serta program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah Tahun 2027.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun sebagai instrumen awal untuk mengarahkan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik, dan terintegrasi. Dokumen ini menjadi tahapan awal dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan, sasaran, serta indikasi program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
2. Menjadi pedoman awal dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan di Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2027.
3. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun pihak terkait lainnya, dalam menyelaraskan peran dan kontribusi untuk mewujudkan arah pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029.
4. Berfungsi sebagai tolok ukur awal dalam menilai capaian kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Menjadi dasar pengukuran kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati.
6. Digunakan sebagai bahan awal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat agar selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
7. Menjadi acuan awal dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2027, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2027.

1.5 Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat tentang latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rancangan RKPD Kabupaten Tana Tidung.

2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab II memuat tentang gambaran umum kondisi pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027. Pembahasan meliputi evaluasi capaian kinerja daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis daerah, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, inovasi daerah. Bab ini menjadi landasan analitis dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan daerah.

3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab III menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi kondisi ekonomi nasional, kondisi ekonomi provinsi, arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2027. Selain itu dijelaskan juga tentang arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab IV menjelaskan tentang arah pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan meliputi arah pembangunan nasional dan provinsi sebagai acuan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta targetnya, tema dan fokus pembangunan Tahun 2027, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan

pembangunan, serta program prioritas yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan dan diselaraskan dengan kebijakan nasional maupun provinsi.

5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah Tahun 2027 beserta kebutuhan pendanaannya. Penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan, serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, target nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan kebutuhan pembangunan tematik sesuai karakteristik daerah.

6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI ini menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2027 yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan target kinerja dilakukan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja pembangunan daerah.

7. BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Capaian Kinerja Daerah

Gambaran capaian kinerja daerah menyajikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tana Tidung sebagai dasar untuk menilai tingkat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pembangunan, mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, serta mengenali berbagai permasalahan dan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, serta evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama periode 2023–2025. Adapun evaluasi terhadap capaian program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025 disajikan secara lebih rinci dalam Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target kinerja daerah pada RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.

2.1.1 Aspek Pelayanan Umum

Subbab ini menyajikan gambaran capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, pilihan, dan penunjang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan dasar dan pelayanan publik kepada masyarakat. Penyajian capaian kinerja difokuskan pada hasil pelaksanaan pembangunan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai representasi tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2025. Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029.

Selain itu, subbab ini juga menyajikan perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama periode Tahun 2023–2025. Penyajian data selama tiga tahun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tren

pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sekaligus mengidentifikasi peningkatan maupun tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Analisis terhadap capaian SPM menjadi bagian penting dalam mengevaluasi tingkat pemenuhan hak dasar masyarakat serta efektivitas penyediaan layanan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, capaian kinerja IKU, IKD, dan SPM tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi isu strategis, merumuskan arah kebijakan, serta menetapkan prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2027. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Bagi Kabupaten Tana Tidung, peningkatan kualitas pendidikan memiliki arti yang sangat strategis sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika pembangunan Kalimantan Utara.

Karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung yang memiliki persebaran penduduk relatif tidak merata, jarak antarkawasan yang cukup berjauhan, serta kondisi aksesibilitas yang masih beragam menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas hasil belajar, tetapi juga pada upaya mewujudkan pemerataan akses layanan pendidikan yang bermutu, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta penguatan tata kelola pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan selama Tahun 2025. Pengukuran kinerja tersebut tidak hanya menjadi instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) selanjutnya menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan bidang pendidikan, mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan yang masih dihadapi, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada tahun-tahun berikutnya. Adapun capaian IKU dan IKD urusan pemerintahan bidang pendidikan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Pendidikan	Indeks	67
2	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	100
3	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	91,79
4	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	100
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	82,73
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,60
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,30
8	Rata-Rata Nilai Assesmen Literasi	Nilai	64,56
9	Rata-Rata Nilai Assesmen Numerasi	Nilai	56,82
10	Persentase kab/kota mencapai standar kompetensi minimum asesmen nasional - Literasi Membaca	%	36,48
11	Persentase kab/kota mencapai standar kompetensi minimum asesmen nasional - Numerasi	%	40,00
12	Persentase satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum asesmen nasional - Literasi Membaca	%	48,00
13	Persentase satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum asesmen nasional - Numerasi	%	47,00

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
14	Persentase Toilet SD/SMP dalam Kondisi Baik	%	62,76
15	Persentase Ruang Kelas SD/SMP dalam Kondisi Baik	%	44,44

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar telah relatif baik. Hal ini tercermin dari Indeks Pendidikan yang mencapai 67, didukung oleh 100 persen anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 91,79 persen anak usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, serta 100 persen anak usia 7–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 82,73 persen, yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP.

Capaian partisipasi pendidikan tersebut turut mendukung indikator hasil pembangunan pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,60 tahun, yang menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Tana Tidung memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas. Di sisi lain, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk baru mencapai 9,30 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah pertama. Perbedaan antara HLS dan RLS menunjukkan adanya peluang peningkatan tingkat pendidikan masyarakat pada masa mendatang melalui upaya mempertahankan keberlanjutan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.

Meskipun akses pendidikan telah menunjukkan capaian yang baik, kualitas hasil pembelajaran masih memerlukan perhatian. Rata-rata nilai asesmen literasi mencapai 64,56, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai asesmen numerasi sebesar 56,82. Kondisi tersebut sejalan dengan capaian kabupaten yang memenuhi standar kompetensi minimum Asesmen Nasional, yaitu 36,48 persen pada literasi membaca dan 40,00 persen pada numerasi. Pada tingkat satuan pendidikan, 48,00 persen sekolah telah mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca dan 47,00 persen mencapai standar kompetensi minimum numerasi. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa meskipun kemampuan dasar peserta didik telah berkembang, peningkatan mutu pembelajaran, khususnya pada penguasaan kompetensi dasar literasi dan numerasi, masih perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kualitas sarana dan prasarana pendidikan juga masih perlu ditingkatkan sebagai penunjang proses pembelajaran. Pada tahun 2025, 62,76 persen toilet SD/SMP berada dalam kondisi baik, sedangkan ruang kelas SD/SMP yang berada dalam kondisi baik baru mencapai 44,44 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak masih memerlukan peningkatan, terutama melalui rehabilitasi dan peningkatan kualitas ruang kelas agar mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih optimal.

Secara umum, capaian Urusan Pendidikan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah berhasil memperluas akses pendidikan pada berbagai jenjang dan meningkatkan peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi literasi dan numerasi, peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan masih perlu menjadi fokus pembangunan agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Penyajian data secara runtut selama tiga tahun dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan tingkat pemenuhan pelayanan dasar, mengidentifikasi kecenderungan peningkatan maupun tantangan yang masih dihadapi, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang pendidikan Tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun		
			2023	2024	2025
1	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	87,47	80,85	100
2	Partisipasi Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	87,49	91,6	91,79
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	79,66	80,02	82,73
4	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	7,15	24,7	100
5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	-	87,47	100
6	Pendidikan Dasar	%	-	-	91,79
7	Pendidikan Kesetaraan	%	-	-	100
8	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Orang	-	-	1100
9	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berprestasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SD/MI	Orang	-	-	3522
10	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs	Orang	-	-	1589
11	Jumlah Pendidikan Kesetaraan (Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar)	Orang	-	-	38

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan akses layanan pendidikan pada hampir seluruh jenjang. Peningkatan paling signifikan terjadi pada partisipasi anak usia 5–6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang meningkat dari 87,47 persen pada tahun 2023, sempat menurun menjadi 80,85 persen pada tahun 2024, kemudian mencapai 100 persen pada tahun 2025. Demikian pula partisipasi anak usia 7–18 tahun dalam pendidikan kesetaraan yang meningkat secara bertahap dari 7,15 persen pada tahun 2023 menjadi 24,70 persen pada tahun 2024 dan mencapai 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perluasan akses layanan pendidikan bagi kelompok sasaran yang sebelumnya belum sepenuhnya terjangkau.

Pada jenjang pendidikan dasar, capaian partisipasi relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Partisipasi anak usia 7–15 tahun dalam pendidikan dasar meningkat dari 87,49 persen pada tahun 2023 menjadi 91,60 persen pada tahun 2024 dan 91,79 persen pada tahun 2025. Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama juga mengalami peningkatan dari 79,66 persen menjadi 80,02 persen, kemudian mencapai 82,73 persen pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian anak usia sekolah, khususnya pada jenjang SMP, yang belum sepenuhnya terlayani sehingga memerlukan upaya untuk meningkatkan keberlanjutan pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

Pada tahun 2025, indikator SPM menunjukkan bahwa layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan telah mencapai 100 persen, sedangkan layanan Pendidikan Dasar mencapai 91,79 persen. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal telah optimal pada PAUD dan pendidikan kesetaraan, sementara layanan pendidikan dasar masih memerlukan peningkatan agar seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.

Cakupan pelayanan tersebut didukung oleh jumlah sasaran yang memperoleh layanan pada tahun 2025, yaitu 1.100 anak usia 5–6 tahun yang mengikuti PAUD, 3.522 anak usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI, 1.589 anak usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SMP/MTs, serta 38 peserta pendidikan kesetaraan pada kelompok usia 7–18 tahun. Jumlah penerima layanan tersebut memberikan gambaran mengenai skala pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap jenjang pendidikan.

Secara umum, capaian SPM Bidang Pendidikan menunjukkan bahwa pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Tana Tidung terus mengalami perbaikan, terutama pada peningkatan akses PAUD dan pendidikan kesetaraan yang telah memenuhi target secara penuh. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan partisipasi pada jenjang pendidikan dasar, khususnya pendidikan

menengah pertama, sehingga pemenuhan standar pelayanan minimal dapat semakin merata dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

B. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan kesehatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga pada upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkesinambungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karakteristik Kabupaten Tana Tidung yang memiliki wilayah dengan persebaran penduduk relatif tidak merata serta kondisi aksesibilitas yang berbeda antarwilayah menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan upaya promotif dan preventif sebagai langkah utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan selama Tahun 2025. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kesehatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang kesehatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Kesehatan	Indeks	83
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	50
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	88,59
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas (usia lanjut) mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
11	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
12	Persentase pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	%	100
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	%	100
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	%	100
15	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,64
16	Prevalensi Stunting (Pendak dan Sangat Pendek) pada Balita	%	12,1
17	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Kasus	2
18	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	Kasus	14
19	Angka Kesakitan	%	10,5
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	42,07
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	42
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,65

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator Urusan Kesehatan Tahun 2025, pembangunan kesehatan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyediaan layanan kesehatan dasar. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kesehatan yang mencapai 83, didukung oleh capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah mencapai 100 persen pada sebagian besar kelompok sasaran, meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, lanjut usia, serta pelayanan bagi penderita hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, dan kelompok berisiko HIV. Selain itu, cakupan

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 99,65 persen, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan telah tersedia secara luas. Kondisi tersebut turut mendukung capaian Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 73,64 tahun.

Meskipun akses pelayanan kesehatan telah menunjukkan capaian yang baik, beberapa indikator hasil kesehatan masih memerlukan perhatian. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar baru mencapai 88,59 persen, lebih rendah dibandingkan pelayanan ibu bersalin yang telah mencapai 100 persen, sehingga peningkatan kualitas pelayanan sejak masa kehamilan masih perlu diperkuat. Di samping itu, prevalensi stunting masih sebesar 12,1 persen, sementara Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat 2 kasus dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 14 kasus. Pada pengendalian penyakit menular, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis sebesar 42,07 persen dengan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sebesar 42 persen, yang menunjukkan bahwa upaya deteksi dini dan keberhasilan pengobatan masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, angka kesakitan sebesar 10,5 persen mengindikasikan bahwa beban penyakit di masyarakat masih perlu terus ditekan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkesinambungan.

Secara umum, capaian Urusan Kesehatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah berhasil menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui tingginya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional. Ke depan, pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, penguatan pengendalian penyakit menular khususnya tuberkulosis, serta peningkatan mutu layanan kesehatan rujukan, sehingga capaian pelayanan kesehatan yang telah baik dapat diikuti dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang wajib diperoleh setiap warga negara. Pemenuhan SPM kesehatan menjadi instrumen utama dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Pelaksanaan SPM kesehatan di Kabupaten Tana Tidung mencakup dua

kelompok utama, yaitu bidang kesehatan masyarakat serta bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Fokus utama diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pada seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif hingga lanjut usia, serta penguatan deteksi dini dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan selama periode Tahun 2023–2025. Penyajian data secara berkelanjutan dimaksudkan untuk melihat perkembangan kinerja pelayanan dasar, mengidentifikasi peningkatan maupun kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang kesehatan Tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 4 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
A	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	90,48	53,43	88,29
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	85,45	97,81	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	87,77	65,47	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	86,21	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	100	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	-	-	365
8	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	-	-	412
9	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	-	-	392
10	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	-	-	2358
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	-	-	5513
12	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	-	-	1285
B	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	73,77	67,25	100
2	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	63,35	73,63	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	80,87	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	88,68	n/a	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	13.063	12.463	11.794
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	4.171	5.084	1.543
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	499	523	482
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	27	39	47
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Orang	372	545	470
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Orang	705	748	843

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Pada tahun 2025, hampir seluruh indikator pelayanan dasar telah mencapai 100 persen, baik pada kelompok Kesehatan Masyarakat maupun Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun pada beberapa indikator sempat terjadi fluktuasi capaian pada tahun 2024.

Pada kelompok Kesehatan Masyarakat, pelayanan kesehatan ibu bersalin meningkat dari 85,45 persen pada tahun 2023 menjadi 97,81 persen pada tahun 2024 dan mencapai 100 persen pada tahun 2025. Pola yang sama juga terlihat pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada tahun 2024, serta pelayanan kesehatan balita yang kembali mencapai 100 persen setelah sebelumnya berada pada 86,21 persen. Sementara itu, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan usia lanjut mampu dipertahankan pada capaian 100 persen. Berbeda dengan indikator lainnya, pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat cukup signifikan dari 53,43 persen pada tahun 2024 menjadi 88,29 persen pada

tahun 2025, namun masih memerlukan peningkatan agar seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan sesuai standar sejak masa kehamilan. Pada tahun 2025, pelayanan kesehatan tersebut telah menjangkau 365 ibu hamil, 412 ibu bersalin, 392 bayi baru lahir, 2.358 balita, 5.513 anak usia pendidikan dasar, dan 1.285 lanjut usia.

Pada kelompok Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, seluruh indikator pelayanan telah mencapai 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan pada pelayanan kesehatan usia produktif, penderita hipertensi, orang terduga tuberkulosis, serta kelompok berisiko HIV dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan pelayanan bagi penderita diabetes melitus dan orang dengan gangguan jiwa berat secara konsisten telah memenuhi standar pelayanan. Meskipun jumlah sasaran pelayanan mengalami dinamika, seperti pelayanan usia produktif yang menurun dari 13.063 orang pada tahun 2023 menjadi 11.794 orang pada tahun 2025, maupun peningkatan jumlah sasaran pada kelompok orang dengan gangguan jiwa berat dan kelompok berisiko HIV, pemerintah daerah tetap mampu memenuhi target pelayanan sesuai standar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan jumlah sasaran tidak memengaruhi capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Secara umum, capaian SPM Bidang Kesehatan menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Tana Tidung semakin merata dan mampu dipertahankan pada tingkat yang optimal. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil masih perlu menjadi perhatian agar kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat terjaga sejak masa kehamilan hingga persalinan. Ke depan, pemerintah daerah juga perlu mempertahankan capaian pelayanan pada kelompok penyakit prioritas dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga seiring dengan perubahan jumlah sasaran pelayanan, sehingga peningkatan akses pelayanan kesehatan dapat diikuti dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya guna. Infrastruktur merupakan salah satu

fondasi utama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, memperkuat pelayanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan infrastruktur memiliki arti yang sangat penting mengingat karakteristik wilayah yang memiliki persebaran permukiman, pusat kegiatan, dan kawasan pengembangan yang masih terus berkembang. Kondisi tersebut memerlukan dukungan jaringan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, drainase, sanitasi, serta penataan ruang yang mampu meningkatkan keterhubungan antarwilayah sekaligus mendukung pelayanan publik dan aktivitas perekonomian masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan aspek ketahanan terhadap kondisi lingkungan, efisiensi pemanfaatan ruang, serta keselarasan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang selama Tahun 2025. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor infrastruktur terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing wilayah, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	73,98
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	55,15

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
3	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian & mitigasi banjir	%	0,01
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	%	0,01
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	20,13
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	58
7	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,42
8	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	91
9	Persentase Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	41,99
10	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	17,02
11	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	33
12	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	15,84
13	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan perpipaan terlindungi	%	74,92
14	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	%	100
15	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%	0
16	Persentase Debit Air yang Terpelihara	%	100
17	Persentase Ketaatan Ruang dengan RTRW	%	96,74
18	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	%	0
19	Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	20
20	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	18,88
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	79,42

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan pada penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang. Hal tersebut tercermin dari Indeks Infrastruktur Dasar yang mencapai 73,98 dan Indeks Konektivitas Wilayah sebesar 55,15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan infrastruktur juga didukung oleh tingginya kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah mencapai 100 persen, rasio kepatuhan IMB sebesar 91 persen, serta ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW sebesar 96,74 persen. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telah diikuti dengan penerapan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang relatif baik.

Pada penyediaan layanan dasar, akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman menunjukkan capaian yang cukup baik. Persentase penduduk yang memperoleh akses air minum mencapai 74,92 persen, dengan 58 persen rumah tangga memperoleh layanan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sedangkan 79,42 persen rumah tangga telah memperoleh layanan sanitasi aman atau pengolahan air limbah domestik. Selain itu, kapasitas air baku sebesar 20 m³/detik dan persentase debit air yang terpelihara mencapai 100 persen menjadi dukungan penting dalam menjaga keberlanjutan penyediaan air bersih. Meskipun demikian, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan masih sebesar 18,88 persen, yang menunjukkan bahwa pengembangan jaringan perpipaan perkotaan masih perlu ditingkatkan untuk memperluas cakupan pelayanan.

Di sisi lain, beberapa indikator infrastruktur dasar masih memerlukan perhatian. Kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 41,99 persen, sementara rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi sebesar 20,13 persen dengan kondisi jaringan irigasi yang baik sebesar 15,84 persen. Upaya perlindungan kawasan permukiman dari risiko bencana juga masih terbatas, yang tercermin dari perlindungan kawasan rawan banjir dan perlindungan kawasan sepanjang pantai yang masing-masing baru mencapai 0,01 persen. Selain itu, persentase tenaga operator, teknisi, dan analis bersertifikat kompetensi sebesar 17,02 persen, rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi sebesar 33 persen, serta penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang belum terealisasi masih menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan infrastruktur.

Secara umum, capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menjaga kualitas tata kelola pembangunan infrastruktur, khususnya dalam aspek penyediaan layanan dasar air minum, sanitasi, dan penataan ruang. Namun demikian, peningkatan kualitas jaringan jalan, irigasi, infrastruktur pengendalian banjir, perlindungan kawasan pesisir, pengembangan jaringan

air minum perpipaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat ketahanan infrastruktur, serta mendukung pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar infrastruktur yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi, dan aksesibilitas jalan. Pemenuhan SPM ini menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pelaksanaan SPM PUPR di Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada penyediaan layanan air minum yang layak, pengelolaan air limbah domestik yang aman, serta peningkatan kemantapan jalan sebagai penunjang konektivitas wilayah. Upaya ini diharapkan mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah capaian indikator SPM bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Tana Tidung:

Tabel 2. 6 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (SPAM)	%	69,28	74,41	74,92
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	%	74,41	n/a	79,92
3	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	55,15	55,15	41,99
4	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum (SPAM) Sehari-hari	Orang	n/a	n/a	1440
5	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	n/a	n/a	120

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Pada aspek penyediaan layanan dasar, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meningkat secara bertahap dari 69,28

persen pada tahun 2023 menjadi 74,41 persen pada tahun 2024 dan mencapai 74,92 persen pada tahun 2025. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik (SPALD) juga menunjukkan peningkatan, dari 74,41 persen pada tahun 2023 menjadi 79,92 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Di sisi lain, tingkat kemantapan jalan kabupaten menunjukkan tren yang menurun. Setelah berada pada angka 55,15 persen pada tahun 2023 dan 2024, capaian tersebut menurun menjadi 41,99 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan jalan agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga serta mampu mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Pada tahun 2025, pelayanan dasar tersebut telah menjangkau 1.440 orang yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum melalui SPAM dan 120 orang yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD. Jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar terus dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat, meskipun cakupan layanan masih perlu diperluas agar semakin banyak penduduk yang memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar yang layak.

Secara umum, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan bahwa pelayanan dasar air minum dan sanitasi di Kabupaten Tana Tidung terus mengalami peningkatan, sementara kualitas infrastruktur jalan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu diarahkan pada perluasan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi, disertai peningkatan kemantapan jalan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan, sehingga pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dapat meningkat secara seimbang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan sebagai

bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan perumahan yang layak huni serta kawasan permukiman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman memiliki arti strategis seiring dengan perkembangan kawasan permukiman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak. Karakteristik wilayah yang masih berkembang serta persebaran permukiman yang tidak merata memerlukan penyediaan infrastruktur permukiman yang mampu menjamin kualitas lingkungan hunian, mengurangi kesenjangan pelayanan dasar, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman diarahkan tidak hanya pada penyediaan rumah layak huni, tetapi juga pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai serta penanganan kawasan yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman selama Tahun 2025. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor perumahan terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman, kesehatan masyarakat, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Rasio rumah layak huni	%	65

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100
3	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	54,59
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	67,41
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100
6	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	57,09
7	Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	%	41
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	73,67

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan dalam penyediaan hunian dan pelayanan dasar permukiman. Hal tersebut tercermin dari rasio rumah layak huni yang mencapai 65 persen, didukung oleh 73,67 persen rumah tangga yang telah memperoleh akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, seluruh warga negara korban bencana telah memperoleh rumah layak huni dan 100 persen kawasan perumahan telah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan dasar pada kawasan perumahan telah berjalan dengan baik dalam mendukung kualitas lingkungan permukiman.

Upaya peningkatan kualitas permukiman juga terlihat dari 67,41 persen Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah ditangani serta 54,59 persen kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare yang telah memperoleh penanganan. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mengurangi kawasan yang tidak memenuhi standar kelayakan. Namun demikian, persentase luasan kawasan kumuh masih mencapai 57,09 persen, yang mengindikasikan bahwa penanganan kawasan kumuh masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kualitas lingkungan permukiman.

Di sisi lain, persentase sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas baru mencapai 41 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa

meskipun penyediaan PSU pada kawasan perumahan telah terpenuhi, kualitas sarana dan prasarana permukiman secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan. Penguatan kualitas infrastruktur permukiman menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan kawasan hunian, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan dasar di lingkungan permukiman.

Secara umum, capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak serta memperluas penanganan kawasan permukiman. Ke depan, pembangunan perlu difokuskan pada percepatan penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman, serta perluasan penanganan rumah tidak layak huni, sehingga kualitas lingkungan permukiman dapat meningkat secara merata dan mendukung terwujudnya kawasan hunian yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Selain diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga dilakukan melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan tolok ukur pemenuhan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan sehat, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana maupun yang menempati kawasan permukiman dengan kualitas lingkungan yang masih memerlukan penanganan. Pemenuhan SPM menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kualitas permukiman yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pemenuhan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan selama periode Tahun 2023–2025. Penyajian data secara berkelanjutan dimaksudkan untuk menggambarkan perkembangan tingkat pelayanan dasar, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Tana Tidung.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
1	Rasio rumah layak huni	%	85,29	63,13	65
2	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	%	0	0	100
3	Fasilitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemda	%	n/a	n/a	100
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	2	6,37	54,59
5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	39,4	41,85	67,41
6	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	59,1	100

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada sebagian besar indikator pelayanan. Pada tahun 2025, beberapa indikator telah mencapai 100 persen, meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah daerah, serta perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Kondisi tersebut menunjukkan semakin optimalnya pemenuhan pelayanan dasar di bidang perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan prioritas.

Upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat juga tercermin dari persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani, yang meningkat dari 39,40 persen pada tahun 2023 menjadi 41,85 persen pada tahun 2024 dan mencapai 67,41 persen pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang telah ditangani meningkat secara signifikan dari 2,00 persen pada tahun 2023 menjadi 6,37 persen pada tahun 2024 dan mencapai 54,59 persen pada tahun 2025. Peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan

bahwa pemerintah daerah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui rehabilitasi rumah dan penanganan kawasan kumuh secara bertahap.

Di sisi lain, rasio rumah layak huni mengalami penurunan dari 85,29 persen pada tahun 2023 menjadi 63,13 persen pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 65,00 persen pada tahun 2025. Meskipun telah menunjukkan perbaikan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat masih memerlukan perhatian. Namun demikian, capaian 100 persen pada penyediaan PSU serta layanan bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kawasan permukiman tidak hanya diarahkan pada aspek fisik rumah, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur dasar dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang memerlukan penanganan khusus.

Secara umum, capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar di Kabupaten Tana Tidung terus mengalami perbaikan, terutama dalam penanganan rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta penyediaan hunian bagi kelompok sasaran prioritas. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara lebih merata, disertai percepatan penanganan kawasan kumuh dan penguatan kualitas lingkungan permukiman, sehingga pelayanan dasar di bidang perumahan dapat mendukung terwujudnya permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum menjadi prasyarat penting bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya berorientasi pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga pada peningkatan kapasitas

perlindungan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi gangguan ketenteraman maupun bencana.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas wilayah di tengah dinamika pembangunan daerah. Karakteristik wilayah yang terus berkembang, didukung oleh peningkatan aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan permukiman masyarakat, memerlukan sistem penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang responsif, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, penguatan kapasitas perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi wilayah yang tertib, aman, dan tangguh. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi urusan ini dalam mendukung stabilitas daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dan investasi.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Angka Kriminalitas (Per 100.000 Penduduk)	Nilai	59
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	106,77
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	697
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	697

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
8	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	4,77
11	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3)	%	100
12	Presentase Penurunan Pelanggaran Perda	%	25
13	Presentase Penurunan Gangguan Trantimbang	%	90
14	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,60
15	Persentase Realisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	%	75
16	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Poin	73,6
17	Presentasi Menurunnya Frekuensi Kebakaran	%	5
18	Respon time Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Menit	4,77
19	Persentase Dokumen Kebencanaan yang telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	%	33,33
20	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	%	100
21	Laju Penurunan Pelanggaran Perda	%	14,28
22	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya	%	90,01

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kondisi yang relatif baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut tercermin dari 100 persen gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, 100 persen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan, serta 100 persen penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Upaya tersebut diikuti dengan tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang mencapai 100 persen, penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 90 persen, penurunan pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 25 persen, serta laju penurunan pelanggaran Peraturan Daerah sebesar 14,28 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketenteraman masyarakat telah berjalan secara efektif.

Kondisi keamanan masyarakat juga tercermin dari angka kriminalitas sebesar 59 per 100.000 penduduk serta 90,01 persen penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di lingkungan tempat tinggalnya. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban memberikan dampak terhadap persepsi rasa aman masyarakat, meskipun upaya pencegahan tindak kriminal tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pada aspek penanggulangan bencana, 697 orang telah memperoleh layanan informasi rawan bencana dan jumlah yang sama memperoleh layanan pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana, sehingga cakupan pelayanan mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan edukasi dan kesiapsiagaan telah menjangkau seluruh sasaran yang ditetapkan. Namun demikian, Indeks Risiko Bencana masih berada pada angka 106,77, sedangkan Indeks Ketahanan Daerah baru mencapai 0,60 poin. Selain itu, realisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebesar 75 persen dan dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku baru mencapai 33,33 persen, sehingga penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan, dan dokumen kebencanaan masih menjadi aspek yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 0 persen mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 tidak terjadi bencana yang memerlukan pelayanan tersebut.

Pada layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja menunjukkan hasil yang baik. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah mencapai 100 persen dengan waktu tanggap penanganan kebakaran dan non-kebakaran rata-rata 4,77 menit, yang juga tercermin pada indikator response time kejadian kebakaran dan non-kebakaran sebesar 4,77 menit. Selain itu, Indeks Penanggulangan Kebakaran mencapai 73,60 poin, disertai penurunan frekuensi kejadian kebakaran sebesar 5 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan kebakaran telah mampu memberikan respons yang cepat terhadap kejadian darurat sekaligus mendukung upaya pengurangan risiko kebakaran.

Secara umum, capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan pada aspek penegakan peraturan, pemeliharaan ketenteraman masyarakat, kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan kebakaran telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, penguatan kapasitas penanggulangan bencana, peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta penyempurnaan dokumen kebencanaan masih perlu menjadi perhatian agar sistem perlindungan masyarakat dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tangguh terhadap bencana. Pemenuhan SPM ini mencakup aspek penegakan peraturan daerah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Pelaksanaan SPM pada urusan ini di Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan ketenteraman, kebakaran, dan bencana. Upaya ini menjadi penting dalam mendukung stabilitas daerah serta perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pemenuhan pelayanan dasar pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan selama periode Tahun 2023–2025. Penyajian data secara berkelanjutan dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelayanan dasar, mengidentifikasi kemajuan maupun tantangan yang masih dihadapi, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
1	Penertiban dan penegakan perda	%	100	99,44	100
2	Pelayanan Ketenteraman & Ketertiban Umum (penegakan Perda & Perkada)	%	-	n/a	100
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	90	100	100
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	95	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	-	n/a	100

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2025, seluruh indikator SPM telah mencapai 100 persen, yang mencerminkan terpenuhinya target pelayanan dasar pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, penanggulangan bencana, serta pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum, penertiban dan penegakan Peraturan Daerah tetap terjaga pada tingkat yang tinggi, yaitu 100 persen pada tahun 2023, sedikit menurun menjadi 99,44 persen pada tahun 2024, kemudian kembali mencapai 100 persen pada tahun 2025. Selain itu, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga mencapai 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi penegakan regulasi dan penyelenggaraan ketenteraman umum telah dilaksanakan secara optimal sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Pada aspek penanggulangan bencana, kualitas pelayanan juga mengalami peningkatan. Pelayanan informasi rawan bencana meningkat dari 90 persen pada tahun 2023 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Sementara itu, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara konsisten mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan kembali mencapai 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

pemerintah daerah mampu menjaga keberlangsungan pelayanan dasar pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari penyampaian informasi, upaya kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban apabila diperlukan.

Pada aspek pelayanan kebakaran dan penyelamatan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non-kebakaran telah mencapai 100 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kedaruratan telah memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga masyarakat memperoleh jaminan pelayanan yang cepat dan sesuai ketentuan dalam menghadapi kondisi darurat akibat kebakaran maupun kejadian non-kebakaran.

Secara umum, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah memenuhi standar pelayanan dasar pada seluruh aspek pelayanan utama. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta menjaga kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan penanganan keadaan darurat agar tetap efektif, responsif, dan berkelanjutan.

F. Sosial

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memiliki peran strategis dalam mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial daerah. Pelayanan sosial diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat, khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan korban bencana dan keadaan darurat sosial. Dengan demikian, urusan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan sosial memiliki arti strategis mengingat karakteristik wilayah yang terus berkembang serta adanya dinamika sosial ekonomi masyarakat yang memerlukan perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, lanjut usia,

penyandang disabilitas, anak terlantar, korban bencana, dan kelompok masyarakat lainnya yang memerlukan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pembangunan bidang sosial diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan sosial diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok sasaran. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang sosial, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi urusan sosial dalam mendukung penurunan tingkat kerentanan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang sosial Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100
3	Persentase PPKS yang Terlayani	%	100
4	Persentase KPM yang masuk dalam mandiri dan siap digraduasi	%	15,1
5	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100
6	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100
7	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	%	100
8	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan

Urusan Sosial di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial telah mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan dasar. Hal tersebut tercermin dari 100 persen Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial telah menjangkau kelompok rentan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sehingga kebutuhan dasar mereka dapat dipenuhi melalui layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pada aspek perlindungan sosial, 100 persen korban bencana alam dan sosial telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar pada saat maupun setelah masa tanggap darurat. Selain itu, 100 persen Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah memperoleh pelayanan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah mandiri dan siap digraduasi baru mencapai 15,10 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan sosial menuju kemandirian ekonomi masyarakat telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar semakin banyak keluarga penerima bantuan yang mampu keluar dari ketergantungan terhadap program bantuan sosial. Peningkatan kapasitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan akses terhadap sumber-sumber penghidupan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan indikator tersebut.

Secara keseluruhan, 100 persen penerima manfaat telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, yang menunjukkan bahwa pelayanan sosial di Kabupaten Tana Tidung telah mampu memenuhi standar pelayanan kepada kelompok sasaran. Ke depan, selain mempertahankan cakupan pelayanan bagi kelompok rentan, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan sosial yang berorientasi pada peningkatan kemandirian masyarakat, sehingga pelayanan sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mampu meningkatkan

kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Berikut kondisi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Bidang Urusan Sosial tahun 2023-2025.

Tabel 2. 12 Capaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun		
			2023	2024	2025
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100	n/a	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	n/a	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan & Pengemis) di Luar Panti	%	100	n/a	100
5	Perlindungan & Jaminan Sosial saat & setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	n/a	100
6	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	n/a	n/a	8
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	Orang	n/a	n/a	5
8	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Orang	n/a	n/a	88
9	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandang pengemis terlantar di luar panti	Orang	n/a	n/a	5
10	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten	Orang	n/a	n/a	50

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada kelompok masyarakat rentan. Seluruh indikator rehabilitasi sosial dasar, meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial (gelandangan dan pengemis), serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, telah mencapai 100 persen pada tahun 2025. Beberapa indikator juga telah mempertahankan capaian tersebut sejak tahun 2023, menunjukkan bahwa pelayanan dasar di bidang sosial dapat diselenggarakan secara berkelanjutan sesuai standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut tercermin pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok sasaran pelayanan. Pada

tahun 2025, pelayanan rehabilitasi sosial telah menjangkau 8 orang penyandang disabilitas terlantar, 5 orang anak terlantar, 88 orang lanjut usia terlantar, serta 5 orang gelandangan dan pengemis di luar panti. Selain itu, 50 orang korban bencana alam dan sosial telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan perlindungan dan jaminan sosial. Jumlah penerima manfaat tersebut menggambarkan sasaran pelayanan yang dilayani pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan riil kelompok rentan di Kabupaten Tana Tidung.

Konsistensi capaian 100 persen pada seluruh jenis pelayanan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh sasaran yang menjadi kewenangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi sosial tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan layanan, tetapi juga memastikan setiap kelompok rentan memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang berlaku.

Secara umum, capaian SPM Bidang Urusan Sosial menunjukkan bahwa pelayanan dasar bagi kelompok rentan di Kabupaten Tana Tidung telah terlaksana secara optimal. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai, sekaligus memperkuat upaya pendataan, asesmen kebutuhan, dan pemberdayaan sosial agar pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung peningkatan kemandirian dan kesejahteraan penerima manfaat.

2.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, adaptif terhadap perkembangan dunia kerja,

serta memiliki daya saing yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penyelenggaraan urusan tenaga kerja juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan bidang ketenagakerjaan memiliki arti penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, jasa, dan sektor-sektor potensial lainnya. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan investasi daerah, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sistem informasi pasar kerja guna mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi pembangunan ketenagakerjaan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat, penurunan pengangguran, dan penguatan perekonomian daerah.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 13 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,68
2	Rasio Kewirausahaan	%	2,19
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,69

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	40
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,8
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	82,14
7	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	100
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	59,71
9	Tingkat Kesejahteraan Transmigran	%	65,22
10	Rasio Penduduk Yang Bekerja Terhadap Lapangan Pekerjaan	%	73,69
11	Presentase Transmigran Mandiri	%	93,07
12	Angkatan Kerja	Orang	15.422
13	Penduduk Usia Kerja	Orang	20.928
14	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Orang	403

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada pada angka 3,68 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 73,69 persen. Dari total 20.928 penduduk usia kerja, terdapat 15.422 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif telah berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, rasio penduduk yang bekerja terhadap lapangan pekerjaan juga mencapai 73,69 persen, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan kesempatan kerja relatif mampu menyerap angkatan kerja di daerah.

Di sisi lain, penguatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masih memerlukan perhatian. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi baru mencapai 0,80 persen, sedangkan persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja sebesar 40 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi tenaga kerja dan implementasi perencanaan ketenagakerjaan masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada tahun 2025, tercatat 403 pencari kerja berhasil ditempatkan, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja, meskipun

peningkatan kualitas layanan penempatan dan pelatihan kerja masih diperlukan.

Dalam aspek hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, 82,14 persen perusahaan telah menerapkan tata kelola ketenagakerjaan yang layak, meliputi penyusunan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit, penyusunan struktur dan skala upah, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, 100 persen pekerja bukan penerima upah dan/atau pekerja rentan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong hubungan industrial yang lebih baik sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang rentan.

Pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, rasio kewirausahaan mencapai 2,19 persen, yang menunjukkan masih terbatasnya proporsi pelaku usaha dibandingkan jumlah penduduk. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 59,71 persen, yang mencerminkan masih adanya ruang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Di bidang transmigrasi, tingkat kesejahteraan transmigran mencapai 65,22 persen, dengan 93,07 persen transmigran telah mandiri. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemandirian masyarakat transmigran, meskipun peningkatan kesejahteraan ekonomi masih perlu terus didorong.

Secara umum, capaian Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi pasar kerja di Kabupaten Tana Tidung relatif kondusif dengan tingkat pengangguran yang rendah, partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi, serta perlindungan sosial ketenagakerjaan yang telah menjangkau seluruh kelompok pekerja rentan. Namun demikian, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kewirausahaan, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, serta optimalisasi perencanaan dan penempatan tenaga kerja masih perlu menjadi fokus pembangunan untuk mendukung terciptanya tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing.

B. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Layanan ini memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan hak sipil masyarakat. Fokus utama pembangunan pada urusan ini meliputi peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), serta akta pencatatan sipil, termasuk akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah juga menjadi perhatian penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi.

Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator administrasi kependudukan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas layanan pencatatan sipil. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,13
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	95,89
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,57
4	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai SOP	%	86,9
5	Persentase Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	%	100
6	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	66,58
9	Wajib KTP	Orang	18.599
10	Penduduk Ber-KTP	Orang	18.295
11	Rasio Ketergantungan Usia >65 Tahun	%	4,42
12	Jumlah Total Penduduk	Orang	30.315

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kinerja yang baik dalam penyediaan layanan administrasi kependudukan. Hal ini tercermin dari 99,13 persen wajib KTP elektronik yang telah melakukan perekaman. Dari 18.599 orang wajib KTP, sebanyak 18.295 orang telah memiliki KTP elektronik, yang menunjukkan bahwa cakupan kepemilikan identitas penduduk telah mendekati seluruh sasaran. Capaian tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung ketertiban administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai layanan publik.

Pada aspek kepemilikan dokumen kependudukan, 95,89 persen anak usia 0–17 tahun kurang satu hari telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 99,57 persen. Selain itu, 100 persen akta kematian dan 100 persen akta perkawinan telah diterbitkan bagi masyarakat yang melaporkan peristiwa kependudukannya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan peristiwa penting telah berjalan dengan baik, sehingga sebagian besar penduduk telah memiliki dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan sebagai dasar memperoleh berbagai layanan publik.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang memerlukan peningkatan. Persentase dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) mencapai 86,90 persen, sedangkan persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi masyarakat yang melaporkan baru mencapai 66,58 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan secara umum telah baik, namun masih diperlukan optimalisasi proses pelayanan agar seluruh permohonan dokumen dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data, 100 persen data profil kependudukan telah disusun dan dipublikasikan. Dengan jumlah penduduk mencapai 30.315 jiwa dan rasio ketergantungan penduduk usia di atas 65 tahun sebesar 4,42 persen, data kependudukan yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik dan dinamika penduduk.

Secara umum, capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menyediakan layanan administrasi kependudukan dengan cakupan yang tinggi, terutama pada perekaman KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, serta pencatatan peristiwa penting. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar operasional prosedur serta mendorong peningkatan cakupan pencatatan seluruh peristiwa kependudukan agar tertib administrasi kependudukan dapat terwujud secara lebih optimal.

C. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada peningkatan kemandirian desa, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong desa sebagai subjek pembangunan yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Fokus utama pembangunan meliputi peningkatan status perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM), pengentasan desa tertinggal, peningkatan jumlah desa mandiri, serta penguatan tata kelola keuangan dan aset desa. Selain itu, pengembangan produk unggulan desa, peningkatan partisipasi kelembagaan desa, serta penguatan kerja sama antar desa juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berbasis desa.

Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam peningkatan status desa, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa secara menyeluruh. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 15 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Jumlah Status Desa Mandiri	Jumlah	11
2	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	100
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	28,57
4	Persentase Desa yang mengalami kenaikan status Desa	%	9,52
5	Persentase Desa dengan laporan Keuangan dan Aset Yang Akuntabel	%	34,38
6	Persentase Desa yang sudah memiliki produk unggulan	%	40,62
7	Persentase partisipasi kelembagaan Desa yang aktif dalam Pembangunan	%	55,56
8	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	%	66,67
9	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lemabaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100
10	Jumlah Desa	Jumlah	32
11	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan kualitas pembangunan desa. Dari 32 desa yang ada, sebanyak 11 desa telah berstatus Desa Mandiri. Selain itu, 100 persen desa tertinggal telah dientaskan, disertai peningkatan status desa mandiri sebesar 28,57 persen dan 9,52 persen desa mengalami kenaikan status. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

Pada aspek tata kelola pemerintahan desa, 34,38 persen desa telah memiliki laporan keuangan dan pengelolaan aset yang akuntabel. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa masih perlu diperkuat agar seluruh desa mampu menerapkan tata kelola keuangan dan aset sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, 100 persen fasilitasi penataan desa telah terlaksana, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengembangan potensi ekonomi dan kelembagaan desa juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebanyak 40,62 persen desa telah memiliki produk unggulan desa, yang mencerminkan mulai berkembangnya

potensi ekonomi lokal sebagai salah satu penggerak pembangunan desa. Sementara itu, 55,56 persen kelembagaan desa berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan 66,67 persen fasilitasi kerja sama desa telah terlaksana. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi antardesa terus berkembang, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterlibatan kelembagaan desa dalam proses pembangunan.

Pada aspek pelestarian nilai sosial dan budaya, 100 persen fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat telah dilaksanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap penguatan peran lembaga adat sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan desa yang memperhatikan karakteristik sosial, budaya, dan kearifan lokal.

Secara umum, capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Tana Tidung terus mengalami kemajuan, terutama dalam peningkatan status desa, pengentasan desa tertinggal, serta penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengembangan produk unggulan desa, perluasan kerja sama antardesa, dan peningkatan partisipasi kelembagaan desa dalam pembangunan masih perlu menjadi fokus pembangunan agar kemandirian dan daya saing desa dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, serta penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pembangunan di bidang ini diarahkan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi. Dengan demikian, pembangunan yang responsif gender tidak hanya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, tetapi juga

memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki arti penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan berbagai bentuk kerentanan, serta pemenuhan hak anak menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta meningkatkan kualitas hidup perempuan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperkuat perlindungan anak, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam penyelenggaraan pembangunan. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi urusan ini terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, serta terwujudnya pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	81,81
2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,29
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	13,26%

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100%
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	59,06%
6	Rasio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000)	%	9,49%
7	Persentase Anak Yang Berperan serta dalam Pembangunan	%	200
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100
9	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	83,75

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Hal tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencapai 81,81, menunjukkan bahwa capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,29, yang menggambarkan masih terdapat kesenjangan gender pada beberapa dimensi pembangunan sehingga upaya pengarusutamaan gender perlu terus diperkuat.

Implementasi kebijakan yang responsif gender juga terus didorong melalui Anggaran Responsif Gender (ARG) yang mencapai 13,26 persen dari belanja langsung APBD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perspektif gender telah mulai diintegrasikan dalam proses penganggaran daerah, meskipun ruang untuk memperluas penerapan anggaran responsif gender pada berbagai program dan kegiatan masih terbuka guna meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.

Pada aspek perlindungan perempuan dan anak, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang baik dalam penyediaan layanan bagi korban kekerasan. Sebanyak 100 persen perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah memperoleh layanan komprehensif, demikian pula 100 persen anak korban kekerasan telah ditangani oleh instansi terkait. Selain itu, 83,75 persen Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) telah memperoleh layanan komprehensif.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan perlindungan telah berjalan, meskipun cakupan layanan bagi AMPK masih perlu ditingkatkan agar seluruh anak yang membutuhkan perlindungan dapat memperoleh layanan secara menyeluruh.

Di sisi lain, indikator kejadian kekerasan masih memerlukan perhatian. Rasio kekerasan terhadap perempuan tercatat sebesar 59,06, sedangkan rasio kekerasan terhadap anak mencapai 9,49 per 10.000 anak. Meskipun layanan penanganan korban telah tersedia, keberadaan kasus kekerasan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran lembaga perlindungan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Partisipasi anak dalam pembangunan juga menunjukkan capaian yang tinggi, yang tercermin dari persentase anak yang berperan serta dalam pembangunan sebesar 200 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa keterlibatan anak dalam berbagai forum atau kegiatan pembangunan telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah.

Secara umum, capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. Namun demikian, penguatan pengarusutamaan gender, perluasan cakupan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih perlu menjadi fokus pembangunan agar kualitas perlindungan dan kesetaraan gender dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

E. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, serta peningkatan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Fokus utama pembangunan meliputi

peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan skala usaha mikro, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran. Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) juga menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal.

Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator urusan koperasi dan UMKM menunjukkan dinamika yang cukup beragam, dengan beberapa indikator menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi UMKM secara optimal. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	18,52
2	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	2,18
3	Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Volume Usaha	%	9,6
4	Persentase Koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha	%	16,67
5	Persentase IKM Yang Mengalami Peningkatan Omset	%	6,31
6	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	5,47
7	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,18

Sumber: BPS, Portal Satu Data, dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan adanya perkembangan dalam penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Hal tersebut tercermin dari 18,52 persen usaha mikro yang telah bertransformasi dari sektor informal menjadi sektor formal. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha telah memiliki legalitas dan kelembagaan usaha yang lebih baik, sehingga berpeluang memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pendampingan, maupun pengembangan usaha.

Dari sisi kontribusi terhadap perekonomian daerah, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 2,18 persen. Sementara itu, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 0,18

persen, yang menunjukkan bahwa peran koperasi dan UMKM dalam pembentukan perekonomian daerah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan skala usaha, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar masih perlu terus didorong agar kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

Pada aspek perkembangan usaha, 9,60 persen usaha mikro mengalami peningkatan volume usaha, sedangkan 16,67 persen koperasi mengalami peningkatan volume usaha dengan pertumbuhan volume usaha koperasi mencapai 5,47 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja koperasi relatif lebih baik dibandingkan usaha mikro dalam meningkatkan aktivitas usahanya. Namun demikian, proporsi pelaku usaha yang mengalami peningkatan volume usaha masih perlu diperluas melalui penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, serta akses terhadap pembiayaan dan pemasaran.

Di sektor industri kecil, 6,31 persen Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami peningkatan omzet. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian IKM telah mampu meningkatkan kinerja usahanya, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Penguatan daya saing produk, peningkatan kualitas produksi, pemanfaatan teknologi, dan perluasan jaringan pemasaran menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan usaha yang lebih merata di kalangan pelaku IKM.

Secara umum, capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2025 menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan usaha, perkembangan koperasi, serta peningkatan kinerja usaha telah mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, kontribusi koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah, peningkatan volume usaha pelaku UMKM, serta pertumbuhan omzet industri kecil masih perlu terus diperkuat agar sektor koperasi dan UMKM dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan memiliki peran strategis dalam melestarikan warisan budaya, memperkuat identitas daerah, serta mengembangkan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Kebudayaan tidak hanya dipandang

sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai modal sosial yang mampu memperkuat kohesi masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Oleh karena itu, pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara berkelanjutan dengan tetap menghormati keberagaman budaya yang dimiliki daerah.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan kebudayaan memiliki arti penting mengingat daerah ini memiliki kekayaan adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, serta nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Tidung dan berbagai komunitas lainnya. Pelestarian kebudayaan menjadi bagian penting dalam menjaga jati diri daerah di tengah perkembangan globalisasi, sekaligus memperkuat karakter masyarakat dan mendorong pemanfaatan potensi budaya sebagai salah satu sumber pembangunan daerah. Penguatan ekosistem kebudayaan juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya serta mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melestarikan objek pemajuan kebudayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta memperkuat kelembagaan dan ekosistem kebudayaan. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kebudayaan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi kebudayaan terhadap penguatan identitas daerah, pembangunan karakter masyarakat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Kebudayaan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	65

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58
3	Presentase Plestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	%	89,5
4	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	100
5	Persentase Peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	%	15,05

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam upaya pelestarian warisan budaya dan pengembangan ekosistem kebudayaan daerah. Hal tersebut tercermin dari 100 persen warisan budaya yang telah dilestarikan serta 89,50 persen objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang telah memperoleh upaya pelestarian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset budaya daerah telah menjadi sasaran kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, maupun pembinaan sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya daerah.

Pada aspek pelestarian cagar budaya, 65 persen cagar budaya telah berhasil dilestarikan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya konservasi terhadap aset cagar budaya telah berjalan, meskipun masih terdapat sebagian cagar budaya yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penguatan inventarisasi, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan cagar budaya menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya sebagai sumber pengetahuan, identitas daerah, sekaligus potensi pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Secara lebih luas, Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 58, yang menggambarkan tingkat pembangunan kebudayaan daerah pada berbagai dimensi, seperti pelestarian budaya, ekspresi budaya, ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, hingga tata kelola kebudayaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas ekosistem kebudayaan melalui penguatan peran masyarakat, pelaku budaya, komunitas adat, serta dukungan terhadap pengembangan aktivitas kebudayaan secara berkelanjutan.

Upaya pelestarian budaya juga mulai diikuti oleh meningkatnya pemanfaatan ruang-ruang budaya oleh masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah sebesar 15,05 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan minat masyarakat terhadap aktivitas seni, sejarah, dan kebudayaan daerah, sehingga dapat menjadi modal penting dalam memperkuat apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Secara umum, capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menjaga keberlangsungan pelestarian warisan budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pelestarian cagar budaya, meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan secara menyeluruh, serta mendorong pemanfaatan aset budaya sebagai bagian dari penguatan identitas daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

G. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan dunia usaha, serta peningkatan daya saing daerah. Penanaman modal merupakan salah satu instrumen utama dalam menggerakkan aktivitas ekonomi karena mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif, meningkatkan produktivitas, memperluas basis usaha, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, pembangunan bidang penanaman modal diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, promosi investasi, serta penguatan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penanaman modal memiliki arti penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategis wilayah sebagai modal pembangunan ekonomi. Berbagai potensi pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan sektor unggulan lainnya memerlukan dukungan investasi agar dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah

daerah terus berupaya meningkatkan daya tarik investasi melalui penguatan pelayanan perizinan berusaha, penyediaan informasi peluang investasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung berkembangnya investasi di daerah.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi investasi, kualitas pelayanan perizinan, kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas fasilitasi penanaman modal. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Penanaman Modal

No	Indiaktor	Satuan	Realisasi 2025
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	%	-0,08%
2	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1,21
3	Realisasi Nilai Investasi PMA	Rupiah	Rp.363.267.087.457
4	Realisasi Nilai Investasi PDMN	Rupiah	Rp.874.469.593.556
5	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	27,54
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	31,38

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa aktivitas investasi masih memberikan kontribusi terhadap pembentukan modal daerah, meskipun pertumbuhan investasi belum mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari persentase peningkatan investasi yang mengalami kontraksi sebesar 0,08 persen, sehingga menunjukkan bahwa realisasi investasi pada tahun 2025 relatif stagnan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan masih perlunya upaya

untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui penguatan iklim usaha, kemudahan berusaha, serta promosi potensi investasi daerah.

Meskipun pertumbuhan investasi mengalami penurunan, nilai realisasi investasi pada tahun 2025 tetap mencapai Rp1,21 triliun, yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp363,27 miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp874,47 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi masih didominasi oleh PMDN, sehingga investasi domestik menjadi penopang utama aktivitas penanaman modal di Kabupaten Tana Tidung. Di sisi lain, kontribusi PMA juga menunjukkan adanya kepercayaan investor asing terhadap potensi ekonomi daerah, meskipun porsinya masih lebih kecil dibandingkan investasi dalam negeri.

Dari sisi pencapaian target, realisasi investasi baru mencapai 27,54 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi investasi, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan realisasi investasi melalui percepatan perizinan, penguatan promosi investasi, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kepastian berusaha bagi investor.

Kontribusi investasi terhadap aktivitas ekonomi daerah tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 31,38 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa investasi tetap berperan dalam pembentukan aset tetap dan penambahan kapasitas produksi daerah, sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan nilai investasi menjadi penting agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung masih mampu menarik realisasi investasi dalam jumlah yang cukup besar, terutama dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun demikian, pertumbuhan investasi yang masih mengalami kontraksi serta rendahnya capaian terhadap target investasi menunjukkan perlunya penguatan strategi promosi investasi, peningkatan kemudahan berusaha, dan optimalisasi potensi unggulan

daerah agar realisasi investasi dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

H. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada peningkatan peran pemuda sebagai agen pembangunan serta peningkatan prestasi olahraga daerah. Pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian pemuda dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, pembangunan olahraga difokuskan pada peningkatan prestasi atlet, pembinaan cabang olahraga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi daerah, tetapi juga untuk mendorong pola hidup sehat dan produktif di masyarakat.

Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan dinamika yang cukup beragam, dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator, namun juga terdapat fluktuasi yang menunjukkan perlunya penguatan program secara berkelanjutan. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 20 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan
Kepemudaan dan Olahraga**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12,57
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	7,88
3	Persentase Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan	%	8,65
4	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	%	10,3
5	Jumlah Medali yang Diperoleh Cabor Tingkat Provinsi atau Nasional	Medali	78
6	Partisipasi Aktif Masyarakat Berolahraga	Orang	1.500
7	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	64
8	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	8,92
9	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	%	28,57

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan perkembangan dalam upaya meningkatkan kapasitas pemuda serta prestasi olahraga daerah. Hal tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencapai 64 poin, yang menunjukkan tingkat pembangunan pemuda pada berbagai dimensi, meliputi pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi, kepemimpinan, dan kesetaraan. Capaian ini menjadi gambaran umum mengenai kondisi pembangunan kepemudaan yang terus berkembang, meskipun masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek.

Pada aspek pemberdayaan pemuda, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mencapai 12,57 persen, sedangkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 7,88 persen. Selain itu, persentase peningkatan peran pemuda dalam pembangunan mencapai 8,65 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemuda mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi maupun pembangunan daerah, namun tingkat partisipasinya masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas, kewirausahaan, kepemimpinan, serta ruang partisipasi bagi pemuda agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.

Pada bidang olahraga, pembinaan prestasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebanyak 10,30 persen cabang olahraga berhasil meraih prestasi, dengan total 78 medali yang diperoleh pada kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. Selain itu, 28,57 persen atlet merupakan atlet berprestasi, sedangkan 8,92 persen atlet asal Kabupaten Tana Tidung berhasil masuk ke dalam pemusatan latihan daerah tingkat provinsi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan olahraga telah mampu menghasilkan atlet yang berprestasi dan memiliki daya saing pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun peningkatan kualitas pembinaan dan perluasan pembinaan pada berbagai cabang olahraga masih perlu terus dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam olahraga juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2025 tercatat 1.500 orang berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Capaian ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas olahraga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan kebudayaan

olahraga di lingkungan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pembinaan olahraga secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam menjaring bibit-bibit atlet potensial.

Secara umum, capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga melalui penguatan pembangunan pemuda, peningkatan prestasi atlet, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Namun demikian, peningkatan keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi dan organisasi kemasyarakatan, perluasan pembinaan atlet, serta penguatan ekosistem olahraga dan kepemudaan masih perlu menjadi fokus pembangunan agar kontribusi pemuda dan prestasi olahraga daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

I. Perhubungan

Pembangunan urusan perhubungan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta kualitas pelayanan transportasi yang andal dan terjangkau. Transportasi memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama pembangunan meliputi peningkatan aksesibilitas antar wilayah, penguatan sistem transportasi yang aman dan tertib, serta peningkatan kualitas layanan angkutan umum. Selain itu, upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan peningkatan keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator urusan perhubungan menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dengan beberapa indikator menunjukkan peningkatan pada aspek keselamatan dan pelayanan transportasi.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	0,12
2	Rasio Kejadian Kecelakaan Per 3000 (Tiga Ribu) keberangkatan	%	10
3	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	%	10
4	Persentase Desa Yang Terhubung dengan Transportasi Umum Layak	%	62
5	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan upaya yang cukup baik dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi serta keselamatan penyelenggaraan angkutan. Hal tersebut tercermin dari 62 persen desa yang telah terhubung dengan layanan transportasi umum yang layak. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah desa telah memperoleh akses terhadap layanan transportasi umum, sehingga mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan antarwilayah. Namun demikian, masih terdapat desa yang belum terlayani sehingga perluasan jangkauan pelayanan transportasi umum masih menjadi perhatian.

Pada aspek keselamatan transportasi, 100 persen perusahaan angkutan umum telah memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggara angkutan umum telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan dalam penyelenggaraan transportasi.

Kondisi tersebut didukung oleh indikator keselamatan lalu lintas yang menunjukkan penurunan angka kecelakaan sebesar 10 persen. Sementara itu, rasio kejadian kecelakaan per 3.000 keberangkatan tercatat sebesar 10, yang memberikan gambaran mengenai tingkat kejadian kecelakaan dalam penyelenggaraan layanan transportasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan transportasi telah memberikan hasil, meskipun pengendalian risiko kecelakaan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan disiplin berlalu lintas, pemenuhan standar keselamatan kendaraan, serta penguatan pengawasan operasional angkutan.

Dari sisi pelayanan transportasi, kinerja lalu lintas kabupaten tercatat sebesar 0,12. Nilai tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi operasional lalu lintas di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi efektivitas sistem transportasi daerah. Peningkatan kinerja lalu lintas perlu didukung melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif, serta pengembangan layanan angkutan umum yang menjangkau lebih banyak wilayah.

Secara umum, capaian Urusan Perhubungan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menjaga kualitas penyelenggaraan transportasi, terutama dalam penerapan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum dan penurunan angka kecelakaan. Namun demikian, perluasan cakupan pelayanan transportasi umum ke seluruh desa serta peningkatan kinerja lalu lintas masih perlu menjadi fokus pembangunan guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, dan mendukung konektivitas wilayah.

J. Pangan

Pembangunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengendalian inflasi, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan bidang pangan diarahkan pada penguatan sistem pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan diversifikasi pangan lokal, pengawasan keamanan pangan, serta penguatan distribusi dan stabilisasi pasokan pangan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan pangan memiliki arti penting mengingat daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian pangan. Penguatan ketahanan pangan daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada kemampuan menjaga kelancaran distribusi, memperkuat cadangan pangan, mengembangkan

konsumsi pangan berbasis potensi lokal, serta memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dengan demikian, pembangunan bidang pangan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Pangan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan keamanan pangan masyarakat. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor pangan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan pemerintahan bidang Pangan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pangan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	62,35
2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,2
3	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	13,58
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	96,97
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,13

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Pangan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mencapai 62,35, yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan daerah berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah telah terbentuk, namun masih memerlukan peningkatan untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pada aspek kualitas konsumsi pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 83,20. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat telah mengarah pada konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi, meskipun belum sepenuhnya mencapai pola konsumsi ideal. Di sisi lain, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih sebesar 13,58 persen, yang mengindikasikan bahwa sebagian penduduk masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas konsumsi pangan perlu terus dilakukan melalui penguatan edukasi gizi, peningkatan akses terhadap pangan bergizi, serta pengembangan diversifikasi pangan lokal.

Dari sisi ketersediaan pangan, cadangan pangan pemerintah kabupaten telah mencapai 96,97 persen dari kebutuhan yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kapasitas yang cukup baik dalam menyediakan cadangan pangan sebagai antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, maupun potensi gangguan pasokan pangan. Ketersediaan cadangan pangan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, persentase daerah rentan rawan pangan tercatat sebesar 3,13 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung berada pada kondisi yang relatif aman terhadap kerawanan pangan, meskipun masih terdapat wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, upaya penanganan kerawanan pangan perlu terus diarahkan secara lebih terfokus melalui penguatan sistem kewaspadaan pangan, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, serta pengembangan produksi pangan lokal sesuai dengan karakteristik wilayah.

Secara umum, capaian Urusan Pangan Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah memiliki kondisi ketahanan pangan yang cukup baik, didukung oleh ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang memadai dan tingkat kerawanan pangan yang relatif rendah. Namun demikian, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, serta penguatan ketahanan pangan pada wilayah yang masih rentan perlu terus menjadi fokus

pembangunan guna mewujudkan ketahanan pangan daerah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

K. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada pengelolaan pemanfaatan tanah yang tertib, berkeadilan, dan sesuai dengan peruntukan tata ruang. Urusan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pembangunan, investasi, serta kepentingan umum. Fokus utama pembangunan meliputi pengendalian pemanfaatan tanah sesuai izin lokasi, penyediaan tanah untuk fasilitas umum dan kegiatan penanaman modal, penyelesaian sengketa pertanahan, serta peningkatan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, upaya penyediaan tanah untuk masyarakat dan reforma agraria juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan. Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator urusan pertanahan menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dengan beberapa indikator telah mencapai capaian optimal, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek tertentu.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pertanahan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Luas Tanah Sesuai Peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan (KKPR)	%	66,08
2	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	0,93
3	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	16,11
4	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	60
5	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	40

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Pertanahan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada penguatan tata kelola pertanahan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kepastian hukum atas tanah, pengamanan aset pemerintah daerah, serta dukungan terhadap pelaksanaan reforma agraria. Berbagai upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, mendukung kelancaran pembangunan, serta menciptakan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pada aspek pengendalian pemanfaatan tanah, luas tanah yang telah sesuai dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mencapai 66,08 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan tanah telah mengacu pada ketentuan tata ruang yang berlaku, sehingga mendukung tertib pemanfaatan ruang serta meminimalkan potensi konflik penggunaan lahan. Penguatan implementasi KKPR menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, kegiatan ekonomi, maupun investasi dapat berlangsung secara selaras dengan kebijakan penataan ruang daerah.

Pada aspek pengamanan aset pertanahan pemerintah daerah, persentase hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah yang telah ditetapkan mencapai 60 persen, sedangkan persentase hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah tercatat sebesar 0,93 persen sesuai indikator yang digunakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses legalisasi dan pengamanan aset tanah pemerintah daerah masih perlu terus dipercepat agar seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum yang kuat. Kepastian status hukum atas tanah pemerintah daerah merupakan prasyarat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara efektif dan akuntabel.

Pada aspek pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan informasi pertanahan, luas tanah yang berpotensi menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk ditindaklanjuti melalui kegiatan redistribusi tanah mencapai 16,11 persen. Selain itu, persentase bidang tanah yang telah dipetakan secara lengkap dan berkualitas dalam satu desa atau kelurahan mencapai 40 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

daerah telah melakukan langkah awal dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria dan penyediaan basis data pertanahan yang lebih lengkap. Peningkatan kualitas data spasial pertanahan menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan Pertanahan telah menghasilkan capacity berupa penguatan pengendalian pemanfaatan tanah, legalisasi aset pemerintah daerah, serta pengembangan data pertanahan yang lebih tertib. Berbagai upaya tersebut diharapkan menghasilkan outcome berupa meningkatnya kepastian hukum atas tanah, semakin tertibnya pemanfaatan ruang, berkurangnya potensi konflik pertanahan, serta semakin kuatnya dukungan sektor pertanahan terhadap pembangunan daerah. Ke depan, pembangunan bidang pertanahan perlu difokuskan pada percepatan legalisasi aset pemerintah daerah, penyelesaian pemetaan bidang tanah secara lengkap, penguatan implementasi KKPR, serta optimalisasi pelaksanaan reforma agraria. Dengan tata kelola pertanahan yang semakin baik, diharapkan proses pembangunan, investasi, dan penyediaan pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung dapat berlangsung secara lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

L. Lingkungan Hidup

Pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tana Tidung diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pembangunan meliputi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengelolaan kualitas air dan udara, peningkatan tutupan lahan, serta pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam periode tahun 2021–2025, capaian indikator urusan lingkungan hidup

menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	78,14
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,26
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks	79,85
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	91,04
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100
6	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	%	7,71
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	46
8	Persentase Pelaku Usaha dan atau Kegiatan Baik Pemerintah dan Non Pemerintahan Yang Memenuhi Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100
9	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	67,5
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	1,75

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kondisi kualitas lingkungan yang relatif baik. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 78,14, yang didukung oleh Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 91,04, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 79,85, serta Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63,26. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara dan tutupan lahan berada pada kondisi yang baik dan menjadi faktor utama dalam menopang kualitas lingkungan hidup daerah. Sementara itu, kualitas air masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan komponen lainnya, sehingga pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara menyeluruh.

Pada aspek tata kelola lingkungan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta peraturan perundang-

undangan lingkungan hidup mencapai 100 persen. Selain itu, 100 persen pelaku usaha dan/atau kegiatan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, telah memenuhi persyaratan kelayakan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembinaan, pengawasan, dan penerapan regulasi lingkungan yang mendukung upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar 7,71 persen selama tahun 2025.

Pada aspek pengelolaan persampahan, capaian masih menunjukkan ruang yang perlu ditingkatkan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencapai 46, dengan 67,50 persen sampah telah berhasil ditangani. Namun demikian, timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baru mencapai 1,75 persen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih didominasi oleh kegiatan pengumpulan dan penanganan akhir, sementara pengolahan melalui fasilitas pengolahan sampah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, penguatan penerapan prinsip pengurangan dan daur ulang sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Secara umum, capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menjaga kualitas lingkungan melalui kondisi udara dan tutupan lahan yang baik serta tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan yang sangat tinggi. Namun demikian, peningkatan kualitas air dan penguatan sistem pengelolaan persampahan, khususnya dalam aspek pengolahan sampah, masih perlu menjadi fokus pembangunan untuk mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berdaya dukung tinggi.

M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang seimbang melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan tidak hanya diarahkan pada

pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak reproduksi, pembinaan keluarga sepanjang siklus kehidupan, serta pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan antara dinamika pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan dasar dan pembangunan wilayah. Penguatan program keluarga berencana, pembinaan keluarga, serta pengembangan kampung keluarga berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendukung terciptanya bonus demografi yang produktif pada masa mendatang.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, memperluas akses pelayanan keluarga berencana, serta memperkuat pembangunan keluarga. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi pembangunan kependudukan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satun	Realisasi 2025
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,9
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> /mCPR)	%	99,88
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,12

No	Indikator	Satun	Realisasi 2025
4	Presentase Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga	%	1,2
5	Persentase Ketentraman Keluarga	%	82,8
6	Persentase Kemandirian Keluarga	%	78
7	Persentase Kebahagiaan Keluarga	%	55,2
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,53
9	Kepadatan Penduduk	%	7,47
10	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	%	72,10

Sumber: Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam pengendalian fertilitas dan pembangunan keluarga. Hal tersebut tercermin dari Total Fertility Rate (TFR) sebesar 1,9, yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya berada pada tingkat yang relatif terkendali. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk masih mencapai 2,53 persen, sehingga pengendalian pertumbuhan penduduk tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar selaras dengan daya dukung wilayah dan kapasitas penyediaan pelayanan dasar. Sementara itu, kepadatan penduduk sebesar 7,47 menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Tana Tidung masih relatif rendah.

Pada aspek pelayanan keluarga berencana, persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) mencapai 99,88 persen, yang menunjukkan tingginya cakupan penggunaan metode kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur. Namun demikian, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih sebesar 17,12 persen, yang mengindikasikan masih terdapat pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan tetapi belum memperoleh akses atau belum memanfaatkan pelayanan keluarga berencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan pelayanan telah tinggi, pemerataan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana masih perlu terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Pada aspek pembangunan keluarga, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mencapai 72,10, didukung oleh persentase ketenteraman keluarga

sebesar 82,8 persen dan persentase kemandirian keluarga sebesar 78 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga telah memiliki kondisi yang cukup baik dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan mandiri. Sementara itu, persentase kebahagiaan keluarga tercatat sebesar 55,2 persen, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas pengasuhan dan kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 1,2 persen yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga dibandingkan periode sebelumnya.

Secara umum, capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah mampu menjaga tingkat fertilitas pada level yang terkendali, memperluas pemanfaatan kontrasepsi modern, serta meningkatkan kualitas pembangunan keluarga. Namun demikian, penurunan angka unmet need, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masih perlu menjadi fokus pembangunan agar tercipta keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan mampu mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

N. Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan informasi pemerintah daerah melalui perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan semakin berkembangnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi data pemerintah, serta menjamin keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, pembangunan bidang persandian diarahkan pada penguatan tata kelola keamanan informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pengamanan sistem elektronik, serta penguatan manajemen risiko keamanan siber.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penyelenggaraan urusan persandian memiliki arti penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan

yang aman, andal, dan berkelanjutan. Penguatan keamanan informasi tidak hanya bertujuan melindungi dokumen dan data strategis pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa sistem informasi pemerintahan mampu beroperasi secara aman dari berbagai potensi ancaman siber. Dengan demikian, pembangunan bidang persandian menjadi salah satu pendukung utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis digital.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Persandian diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan keamanan informasi, memperkuat tata kelola persandian, meningkatkan kapasitas keamanan siber, serta mendukung implementasi SPBE yang aman dan andal. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi sektor persandian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Persandian Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Persandian

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	42,05
2	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	386

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Persandian di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk memperkuat keamanan informasi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital pemerintahan. Penguatan keamanan informasi menjadi aspek yang semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga

diperlukan tata kelola keamanan informasi yang mampu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah.

Pada aspek tata kelola keamanan informasi, Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Kabupaten Tana Tidung mencapai 386 pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah membangun fondasi tata kelola keamanan informasi melalui penerapan kebijakan, kelembagaan, manajemen risiko, pengamanan aset informasi, serta penguatan pengelolaan keamanan sistem elektronik. Indeks KAMI menjadi indikator penting yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan keamanan informasi, sehingga semakin baik nilai yang dicapai akan semakin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko kebocoran data, gangguan layanan, maupun ancaman siber terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Penguatan tata kelola tersebut berkontribusi terhadap Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah yang mencapai 42,05 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar tingkat perlindungan terhadap informasi strategis pemerintah dan sistem elektronik dapat semakin optimal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, penguatan pengamanan infrastruktur teknologi informasi, penerapan standar keamanan informasi secara konsisten, serta peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan sistem elektronik menjadi faktor penting untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan Persandian telah menghasilkan capacity berupa meningkatnya kematangan tata kelola keamanan informasi sebagaimana tercermin pada capaian Indeks KAMI. Kapasitas tersebut menjadi dasar dalam mendorong outcome berupa meningkatnya tingkat keamanan informasi pemerintah sebagai prasyarat terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, dan berkelanjutan. Ke depan, pembangunan bidang Persandian perlu difokuskan pada peningkatan maturitas keamanan informasi, penguatan tata kelola keamanan siber, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme mitigasi risiko dan respons insiden keamanan informasi. Dengan semakin kuatnya sistem

keamanan informasi, pemerintah daerah akan memiliki ketahanan digital yang lebih baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan terpercaya.

O. Statistik

Penyelenggaraan Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik memiliki peran strategis dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam era transformasi digital pemerintahan, statistik sektoral tidak lagi dipandang sebagai sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar informasi yang valid, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, penguatan penyelenggaraan statistik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penyediaan data sektoral yang terintegrasi antar perangkat daerah. Data yang berkualitas akan mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pengalokasian sumber daya pembangunan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan bidang statistik diarahkan pada penguatan tata kelola data, peningkatan kualitas statistik sektoral, integrasi data pembangunan, serta peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Statistik diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat kematangan tata kelola statistik sektoral, kualitas penyediaan data, serta pemanfaatan data dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi statistik terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Statistik Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Statistik

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah	34
2	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah	34
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,8
4	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan Kepada Wali Data berdasarkan Kesepakatan Forum satu data daerah	%	100

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Statistik di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan peran yang semakin penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data (evidence-based governance). Penguatan statistik sektoral tidak hanya diarahkan pada penyediaan data yang berkualitas, tetapi juga pada peningkatan pemanfaatan data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, statistik menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

Pada aspek pemanfaatan data statistik, seluruh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tana Tidung telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, serta 34 OPD telah memanfaatkan data statistik dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa data statistik telah menjadi bagian integral dalam siklus pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya budaya pengambilan keputusan berbasis data, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil daerah.

Keberhasilan pemanfaatan data tersebut didukung oleh Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang mencapai 2,8 pada Tahun 2025. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di

Kabupaten Tana Tidung telah berkembang menuju tata kelola statistik yang lebih baik melalui penguatan koordinasi, peningkatan kualitas data, penerapan standar statistik, serta pengelolaan data sektoral yang semakin terintegrasi. Penguatan penyelenggaraan statistik menjadi fondasi penting dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Pada aspek tata kelola data, persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada Wali Data berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah telah mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah melaksanakan kewajiban penyampaian data sesuai mekanisme tata kelola Satu Data Daerah. Tingginya tingkat kepatuhan ini menjadi capacity yang sangat penting dalam menjamin konsistensi, integrasi, dan interoperabilitas data antarperangkat daerah, sehingga mampu mengurangi duplikasi data, meningkatkan kualitas informasi pembangunan, serta memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan Statistik telah menghasilkan capacity berupa tata kelola data yang semakin baik melalui implementasi Satu Data Daerah dan tingginya kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik. Kapasitas tersebut mendorong output berupa meningkatnya kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang tercermin pada capaian Indeks Pembangunan Statistik, serta menghasilkan outcome berupa optimalnya pemanfaatan data statistik oleh seluruh perangkat daerah dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Ke depan, pembangunan bidang Statistik perlu difokuskan pada peningkatan maturitas penyelenggaraan statistik sektoral, penguatan kualitas metadata dan interoperabilitas data, pengembangan sistem informasi statistik yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang statistik. Dengan tersedianya data yang semakin berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal, proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tana Tidung diharapkan semakin adaptif, akurat, dan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

P. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan melalui pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan informasi publik, penyelenggaraan layanan digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, pemanfaatan teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat keterbukaan informasi publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan infrastruktur digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, urusan Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan digital, memperluas akses informasi publik, memperkuat tata kelola pemerintahan digital, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi di seluruh perangkat daerah. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi transformasi digital terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 28 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	93
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	93
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	2,86
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	9,41
5	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	9,08
6	Indeks SPBE	Indeks	3,25
7	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	90,4
8	Persentase Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	%	12,46

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kemajuan dalam penguatan infrastruktur digital dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut tercermin dari 93 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, serta 93 persen Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah memiliki dukungan infrastruktur jaringan yang memadai sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan digital dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Meskipun demikian, pemanfaatan ekosistem pemerintahan digital masih memerlukan penguatan. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) baru mencapai 2,86 persen, sedangkan layanan publik yang diselenggarakan secara daring dan terintegrasi baru sebesar 9,41 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur jaringan belum sepenuhnya diikuti dengan integrasi sistem informasi dan

transformasi proses bisnis antarperangkat daerah. Oleh karena itu, pengembangan interoperabilitas aplikasi, integrasi layanan digital, serta percepatan implementasi arsitektur SPBE masih perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dari aspek tata kelola pemerintahan digital, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,25, dengan peningkatan indeks SPBE sebesar 12,46 persen dibandingkan periode sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan tata kelola, manajemen, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Di sisi lain, Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai 90,40, yang mencerminkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan informasi publik secara terbuka dan akuntabel. Namun demikian, persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah baru mencapai 9,08 persen, sehingga efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar informasi publik yang tersedia dapat menjangkau lebih banyak sasaran.

Secara umum, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah memiliki fondasi infrastruktur digital yang baik serta tingkat keterbukaan informasi publik yang tinggi. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi layanan digital antarperangkat daerah, dan efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat masih perlu menjadi fokus pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Q. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan yang berkualitas, pengembangan koleksi pengetahuan, serta perluasan akses masyarakat terhadap sumber-sumber informasi. Dalam perspektif pembangunan daerah, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi pustaka, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning), penguatan literasi informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperluas akses literasi, serta memperkuat budaya membaca sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pengembangan perpustakaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nonformal, penguatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Melalui penyediaan layanan perpustakaan yang inklusif, inovatif, dan mudah diakses, pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya budaya belajar sepanjang hayat yang mampu mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, memperkuat budaya literasi, serta memperluas pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan sekaligus memberikan gambaran mengenai kontribusi perpustakaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Perpustakaan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	57,84
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	6,16
3	Persentase perpustakaan daerah yang ber SNP	%	6

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmen dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan, penguatan kelembagaan perpustakaan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pengetahuan. Perpustakaan tidak

hanya berfungsi sebagai penyedia koleksi bacaan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan.

Sebagai indikator utama pembangunan literasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025 mencapai 6,16. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat telah berjalan dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPLM mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem literasi melalui penyediaan layanan perpustakaan, peningkatan akses terhadap bahan bacaan, serta penguatan budaya belajar di masyarakat. Peningkatan nilai indeks ini menjadi indikator penting bahwa perpustakaan telah mulai berkontribusi terhadap pembangunan manusia melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk memperoleh, memahami, dan memanfaatkan informasi.

Capaian tersebut didukung oleh tingkat kegemaran membaca masyarakat yang mencapai 57,84. Nilai tersebut menunjukkan bahwa budaya membaca di masyarakat telah berkembang, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan minat baca melalui perluasan akses layanan perpustakaan, pengembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan literasi digital, serta penyelenggaraan berbagai program pembudayaan gemar membaca. Penguatan budaya membaca menjadi faktor penting karena merupakan prasyarat bagi peningkatan kemampuan literasi masyarakat secara berkelanjutan.

Pada aspek penguatan kelembagaan perpustakaan, persentase perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) mencapai 6 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya standardisasi layanan perpustakaan telah dimulai, namun masih memerlukan percepatan agar semakin banyak perpustakaan memenuhi standar nasional dalam aspek koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, serta tata kelola. Peningkatan jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP menjadi capacity penting untuk menjamin terselenggaranya layanan perpustakaan yang berkualitas dan mampu mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan Perpustakaan telah menghasilkan capacity berupa penguatan kualitas kelembagaan perpustakaan melalui penerapan Standar Nasional Perpustakaan. Kapasitas tersebut mendukung output berupa penyelenggaraan layanan perpustakaan yang lebih berkualitas, yang selanjutnya mendorong outcome berupa meningkatnya kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi yang tercermin pada capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Ke depan, pembangunan bidang Perpustakaan perlu difokuskan pada percepatan pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, peningkatan kualitas layanan dan koleksi perpustakaan, pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta penguatan budaya membaca melalui kolaborasi dengan satuan pendidikan, komunitas literasi, dan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya budaya literasi, diharapkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tana Tidung akan meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

R. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan memiliki peran strategis dalam menjamin tersedianya arsip yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah diakses sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga merupakan memori kelembagaan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perlindungan hak keperdataan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelestarian sejarah pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, pembangunan bidang Kearsipan diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola arsip melalui penguatan sistem kearsipan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada seluruh perangkat daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi yang sah, mendukung efektivitas administrasi pemerintahan, serta menjaga keberlanjutan memori kelembagaan daerah.

Dalam kerangka pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip, kepatuhan penyelenggaraan kearsipan, serta efektivitas pengelolaan arsip sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pemerintahan. Capaian indikator tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program bidang kearsipan serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan. Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah urusan pemerintahan bidang Kearsipan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	76,47
2	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	35,89

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025, penyelenggaraan urusan Kearsipan di Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk memperkuat tata kelola arsip sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Arsip memiliki fungsi strategis sebagai sumber informasi, alat bukti yang sah, serta memori kelembagaan yang mendukung proses administrasi, pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan kearsipan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sebagai indikator outcome utama, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional mencapai 76,47 persen pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar arsip yang dihasilkan oleh perangkat daerah telah tersedia untuk mendukung proses administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan fungsi pengawasan

dan pertanggungjawaban. Ketersediaan arsip yang memadai menjadi prasyarat penting dalam menjamin kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyediakan bukti autentik dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan.

Pencapaian tersebut didukung oleh Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah yang mencapai 35,89. Nilai indeks tersebut menggambarkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada perangkat daerah, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan tersebut menjadi output penting yang menunjukkan sejauh mana tata kelola arsip telah diterapkan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan pengawasan kearsipan mencerminkan capacity pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan arsip melalui pembinaan, pengawasan, serta penguatan tata kelola arsip di seluruh perangkat daerah. Penguatan kapasitas tersebut menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sehingga arsip dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber informasi pemerintahan, alat bukti administrasi, serta memori kelembagaan yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan Kearsipan telah menunjukkan perkembangan dalam memperkuat tata kelola arsip sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Capacity berupa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan menghasilkan output berupa meningkatnya kualitas tata kelola arsip pada perangkat daerah, yang selanjutnya mendorong outcome berupa meningkatnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, pembangunan bidang Kearsipan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip, penguatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, serta peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip. Dengan demikian, arsip akan semakin berperan sebagai instrumen akuntabilitas, sumber informasi yang terpercaya, serta memori kelembagaan

yang mendukung tata kelola pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2.1.1.3 **Urusan Pemerintah Pilihan**

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu bidang urusan:

A. Pertanian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pertanian

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,41%
2	Persentase jumlah Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	96,97%
3	Peningkatan produksi tanaman pangan	57,70%
4	Peningkatan produksi hortikultura	-29,40%
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan	36, 62%
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	0%
7	Kontribusi Kategori Pertanian (distribusi)	23,41%
8	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	23,41%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang capaian indikator kinerja pada bidang urusan pertanian, kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Indikator yang ditampilkan mencakup pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengendalian penyakit hewan menular strategis, serta kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian daerah.

Indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 2,41%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas masih mengalami pertumbuhan positif dan

tetap menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Tana Tidung. Pertumbuhan sebesar 2,41% mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi yang tetap bergerak pada subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan infrastruktur produksi, akses distribusi hasil pertanian, ketergantungan terhadap kondisi cuaca, fluktuasi harga komoditas, serta belum meratanya penerapan teknologi pertanian modern.

Pada indikator persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, realisasi tahun 2025 mencapai 96,97%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah sudah mendekati target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi penting karena cadangan pangan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah, terutama untuk menghadapi potensi gangguan pasokan, bencana, gejolak harga, maupun situasi darurat lainnya. Dengan capaian yang mendekati 100%, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga ketersediaan pangan daerah.

Selanjutnya, indikator peningkatan produksi tanaman pangan menunjukkan realisasi sebesar 57,70%. Angka ini merupakan capaian yang cukup menonjol dan menunjukkan adanya peningkatan produksi pada komoditas tanaman pangan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini dapat menjadi indikasi membaiknya aktivitas produksi pangan, baik melalui peningkatan hasil panen, perluasan produksi, maupun dukungan program sarana produksi pertanian. Capaian ini perlu terus diperkuat karena tanaman pangan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, stabilitas pasokan, dan kemandirian pangan daerah.

Namun demikian, indikator peningkatan produksi hortikultura menunjukkan realisasi negatif sebesar -29,40%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produksi hortikultura mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian karena subsektor hortikultura memiliki potensi dalam mendukung diversifikasi pangan, peningkatan pendapatan petani, dan pengembangan ekonomi lokal. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan produksi hortikultura antara lain keterbatasan sarana produksi,

pola budidaya yang belum optimal, gangguan iklim, keterbatasan akses pasar, serta belum kuatnya rantai distribusi produk hortikultura.

Di sisi lain, indikator peningkatan produksi komoditas peternakan terealisasi sebesar 36,62%. Capaian ini menunjukkan perkembangan positif pada subsektor peternakan. Peningkatan produksi peternakan menjadi penting karena berkontribusi terhadap penyediaan sumber protein hewani, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Agar capaian ini dapat berkelanjutan, diperlukan dukungan terhadap kesehatan hewan, penyediaan pakan, pembinaan kelompok peternak, penguatan kelembagaan usaha peternakan, serta peningkatan akses pemasaran produk peternakan.

Adapun indikator persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis tercatat sebesar 0%. Capaian ini perlu dijelaskan dan diverifikasi lebih lanjut, karena dapat memiliki beberapa makna. Angka 0% dapat menunjukkan belum adanya wilayah yang dinyatakan terkendali, belum optimalnya intervensi pengendalian penyakit hewan menular strategis, atau dapat pula berkaitan dengan kondisi tidak adanya kasus yang menjadi dasar perhitungan indikator. Oleh karena itu, indikator ini perlu didukung dengan penjelasan teknis dari perangkat daerah terkait agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru dalam dokumen perencanaan.

Dari sisi kontribusi ekonomi, indikator Kontribusi Kategori Pertanian (distribusi) terealisasi sebesar 23,41%. Angka ini menunjukkan bahwa kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki porsi yang cukup besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung. Dengan kontribusi sebesar 23,41%, sektor ini masih menjadi salah satu sektor utama yang menopang perekonomian daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pertanian dalam arti luas memiliki peran strategis, baik sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, maupun basis penghidupan masyarakat.

Indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku juga tercatat sebesar 23,41%. Capaian ini memperkuat gambaran bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi signifikan terhadap total PDRB daerah atas dasar harga berlaku. Namun demikian, karena nilai pada indikator ini sama dengan indikator kontribusi kategori pertanian, maka perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap definisi dan sumber data kedua indikator

tersebut. Apabila keduanya menggunakan basis perhitungan yang sama, maka indikator dapat berpotensi tumpang tindih. Namun apabila berbeda, perlu dijelaskan perbedaannya, misalnya apakah indikator pertama menggunakan distribusi kategori pertanian secara umum, sedangkan indikator kedua secara spesifik menjelaskan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku.

B. Pariwisata

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pariwisata

No	Indikator	Realisasi 2025
1	LPE Sektor Rekreasi dan Budaya	20,31%
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-71,43%
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	-6,41%
4	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	0%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan pariwisata, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya merata. Beberapa indikator memperlihatkan perkembangan positif, khususnya pada LPE sektor rekreasi dan budaya. Namun demikian, indikator kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, masih menunjukkan kontraksi. Selain itu, investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum juga belum menunjukkan pertumbuhan.

Indikator LPE sektor rekreasi dan budaya pada tahun 2025 terealisasi sebesar 20,31%. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor rekreasi dan budaya masih mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat menggambarkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi, budaya, event daerah, serta aktivitas pendukung pariwisata lainnya. Namun, pertumbuhan ini perlu dibaca secara hati-hati karena belum tentu mencerminkan peningkatan menyeluruh pada seluruh aspek pariwisata. LPE sektor rekreasi dan budaya lebih menunjukkan pertumbuhan nilai tambah ekonomi pada subsektor

tersebut, bukan secara langsung menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan.

Di sisi lain, indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menunjukkan realisasi sebesar -71,43%. Angka ini menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya tarik dan keterjangkauan Kabupaten Tana Tidung bagi wisatawan luar negeri masih perlu diperkuat. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara antara lain keterbatasan promosi wisata pada pasar internasional, aksesibilitas menuju destinasi, kesiapan amenities, keterbatasan paket wisata, serta belum optimalnya jejaring kerja sama promosi dengan pelaku industri pariwisata di tingkat provinsi maupun nasional.

Selanjutnya, indikator persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota juga menunjukkan realisasi negatif sebesar -6,41%. Penurunan ini menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan domestik ke Kabupaten Tana Tidung belum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penurunannya tidak sedalam wisatawan mancanegara, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian karena wisatawan nusantara merupakan pasar utama yang lebih realistis untuk dikembangkan dalam jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, penguatan promosi wisata domestik, penyelenggaraan event daerah, peningkatan kualitas destinasi, serta pengembangan paket wisata berbasis alam, budaya, dan kearifan lokal menjadi penting untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara.

Adapun indikator persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum tercatat sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 belum terdapat pertumbuhan investasi yang tercatat pada sektor pendukung utama pariwisata tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan penting karena sektor pariwisata sangat bergantung pada ketersediaan akomodasi, restoran, rumah makan, kafe, transportasi, dan layanan pendukung lainnya. Rendahnya investasi dapat membatasi peningkatan kualitas layanan wisata, memperlambat pengembangan destinasi, serta

mengurangi kemampuan sektor pariwisata dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi ekonomi, khususnya terlihat dari pertumbuhan LPE sektor rekreasi dan budaya sebesar 20,31%. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan investasi sektor pendukung pariwisata. Penurunan wisatawan mancanegara sebesar -71,43% dan wisatawan nusantara sebesar -6,41% menunjukkan bahwa penguatan sisi permintaan wisata masih menjadi pekerjaan penting. Sementara itu, investasi sektor akomodasi, makan, dan minum yang masih 0% menunjukkan perlunya strategi untuk menarik minat pelaku usaha dan investor dalam mengembangkan fasilitas pendukung pariwisata.

C. Kelautan dan Perikanan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Realisasi 2025
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	8.942,560 Ton
2	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	104,77%
3	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	39,65 Kg/Kap/Tahun

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan kelautan dan perikanan, kinerja sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup positif. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama, yaitu jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya, produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta angka konsumsi ikan masyarakat.

Indikator jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2025 terealisasi sebesar 8.942,560 ton. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih menjadi salah satu sektor produktif yang

berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah, ketahanan pangan, serta penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Produksi tersebut berasal dari aktivitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berkembang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung yang memiliki potensi sumber daya perairan, baik perairan sungai, pesisir, maupun kawasan budidaya.

Selanjutnya, indikator produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan realisasi sebesar 104,77%. Angka ini mengindikasikan bahwa kinerja produksi perikanan tangkap dan budidaya telah melampaui ukuran kinerja yang ditetapkan. Capaian di atas 100% menunjukkan adanya kinerja positif dalam pemanfaatan potensi perikanan daerah, baik melalui aktivitas penangkapan ikan maupun pengembangan budidaya perikanan. Hal ini juga mencerminkan bahwa sektor perikanan memiliki peluang untuk terus diperkuat sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi lokal.

Sementara itu, indikator angka konsumsi ikan Kabupaten Tana Tidung tahun 2025 terealisasi sebesar 39,65 kg/kapita/tahun. Angka ini menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat dalam satu tahun. Konsumsi ikan menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan potensi produksi perikanan yang cukup besar, peningkatan konsumsi ikan masyarakat perlu terus didorong melalui edukasi gizi, promosi gemar makan ikan, peningkatan ketersediaan produk perikanan, serta penguatan distribusi hasil perikanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator urusan kelautan dan perikanan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung. Produksi perikanan yang mencapai 8.942,560 ton dan capaian produksi perikanan tangkap serta budidaya sebesar 104,77% menunjukkan bahwa potensi kelautan dan perikanan daerah mampu dimanfaatkan secara cukup baik. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, kualitas produk, akses pasar, pengolahan hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya perairan.

D. Perdagangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perdagangan

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81,17%
2	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	2

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang capaian indikator kinerja pada bidang urusan perdagangan, kinerja urusan perdagangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya dalam aspek tertib ukur dan stabilitas harga antarwilayah. Indikator yang ditampilkan mencakup persentase alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya atau UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku, serta Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten.

Indikator persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku terealisasi sebesar 81,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan di Kabupaten Tana Tidung telah memiliki tanda tera sah yang berlaku. Kondisi ini penting karena UTTP yang telah ditera menjadi salah satu instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian ukuran, dan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan. Dengan capaian sebesar 81,17%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan kemetrologian legal telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang peningkatan agar seluruh alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha dapat memenuhi ketentuan tera dan tera ulang secara berkala.

Capaian tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong tertib niaga dan tertib ukur di pasar, toko, tempat usaha, maupun pusat aktivitas perdagangan lainnya. Penguatan layanan tera dan tera ulang perlu terus dilakukan karena ketepatan alat ukur sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dalam aktivitas jual beli.

Semakin tinggi persentase UTTP bertanda tera sah, maka semakin besar pula jaminan bahwa transaksi perdagangan berlangsung secara adil dan sesuai standar.

Selanjutnya, indikator Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten menunjukkan realisasi sebesar 2. Indikator ini menggambarkan tingkat variasi atau perbedaan harga komoditas antarwilayah dalam kabupaten. Nilai koefisien variasi yang rendah menunjukkan bahwa perbedaan harga antarwilayah relatif terkendali, sehingga distribusi barang dan stabilitas harga dapat dikatakan cukup baik. Dalam konteks perdagangan daerah, stabilitas harga antarwilayah menjadi penting karena berkaitan dengan keterjangkauan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi barang, serta pengendalian inflasi daerah.

Realisasi koefisien variasi harga sebesar 2 mengindikasikan bahwa disparitas harga antarwilayah di Kabupaten Tana Tidung relatif tidak terlalu tinggi. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam distribusi barang, ketersediaan pasokan, serta pemantauan harga di tingkat daerah. Namun demikian, stabilitas harga tetap perlu dijaga secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas strategis dan kebutuhan pokok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pasokan, biaya distribusi, cuaca, dan kondisi geografis wilayah.

E. Perindustrian

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 35 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perindustrian

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	LPE Kategori Industri Pengolahan	9,43%
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/ kota	16,67%
3	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	99,46%
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	25,54%
5	Pencapaian dari setiap sasaran Pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan Pembangunan industri daerah tahunan	40,95%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan perindustrian, kinerja sektor perindustrian Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup beragam. Beberapa indikator memperlihatkan capaian positif, terutama pada pertambahan jumlah industri kecil dan menengah serta realisasi investasi sektor industri. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum tersedia datanya, serta beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta pencapaian sasaran pembangunan industri daerah.

Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2025 sebesar 9,43%.. LPE kategori industri pengolahan merupakan indikator penting karena menggambarkan pertumbuhan nilai tambah sektor industri dalam struktur perekonomian daerah. Indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota terealisasi sebesar 16,67%. Capaian ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Tana Tidung. Pertumbuhan IKM menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi lokal karena sektor ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas produksi masyarakat, memperluas basis usaha daerah, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Namun demikian, peningkatan jumlah IKM perlu diikuti dengan penguatan kualitas usaha, legalitas, kapasitas produksi, akses pembiayaan, kemampuan pemasaran, serta pendampingan teknis agar pertumbuhan IKM tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

Selanjutnya, indikator persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor mencapai 99,46%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki porsi yang sangat dominan dalam realisasi investasi daerah pada tahun 2025. Kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai peluang strategis bagi Kabupaten Tana Tidung untuk mendorong penguatan sektor industri sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Tingginya kontribusi investasi sektor industri perlu diarahkan agar mampu memberikan dampak yang lebih luas, terutama terhadap hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat, dan penguatan rantai pasok daerah.

Meskipun demikian, dominannya investasi sektor industri juga perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola investasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi industri yang masuk tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang, pengendalian dampak lingkungan, pemenuhan perizinan, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta keterhubungan dengan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Dengan demikian, investasi sektor industri tidak hanya meningkatkan nilai investasi secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara nyata bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Pada indikator persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 25,54%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku IKM dalam pelaporan melalui SIINas masih relatif rendah. Rendahnya kepatuhan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan, rendahnya literasi digital, belum optimalnya pendampingan teknis, atau masih terbatasnya kapasitas pelaku IKM dalam mengakses dan menggunakan sistem pelaporan berbasis digital. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena data SIINas berperan penting dalam mendukung pembinaan, pengawasan, perencanaan, dan pengambilan kebijakan sektor industri.

Sementara itu, indikator pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah yang dihitung dengan membandingkan target dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan terealisasi sebesar 40,95%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran pembangunan industri daerah telah berjalan, namun belum optimal. Angka tersebut mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam pencapaian target pembangunan industri, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi lintas perangkat daerah, maupun dukungan terhadap pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan penajaman sasaran pembangunan industri agar lebih terukur, realistis, dan sesuai dengan potensi unggulan daerah.

2.1.1.4 Urusan Penunjang

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, yaitu bidang urusan:

A. Perencanaan dan Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan perencanaan dan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Perencanaan dan Keuangan

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	26,43%
2	Rasio PAD	5,03%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,138
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	89,84%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP
7	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	26,43%
8	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	57,07%
9	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	46,37%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan perencanaan dan keuangan, kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup beragam. Indikator yang disajikan mencakup aspek pengelolaan belanja pegawai, kemampuan Pendapatan Asli Daerah, pengawasan internal, struktur belanja daerah, opini laporan keuangan, belanja urusan wajib pelayanan dasar, serta alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik.

Pada indikator Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 26,43%. Angka ini menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan terhadap total belanja daerah masih berada pada proporsi tertentu dalam struktur belanja APBD. Indikator ini penting untuk menilai efisiensi belanja birokrasi, khususnya dalam memastikan bahwa belanja

pegawai tidak terlalu membebani ruang fiskal daerah. Dengan rasio tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap perlu menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, belanja pelayanan publik, belanja modal, serta belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Selanjutnya, indikator Rasio PAD terealisasi sebesar 5,03%. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih cukup bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal daerah perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas layanan pendapatan, digitalisasi sistem penerimaan, serta penggalan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber PAD baru.

Pada aspek pengawasan internal, indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercatat sebesar 3,138, sedangkan indikator Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada nilai 3. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah telah berada pada tingkat yang cukup baik. Maturitas SPIP menggambarkan sejauh mana pengendalian internal telah diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, reviu, evaluasi, dan pemberian assurance terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Indikator Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer expenditures terealisasi sebesar 89,84%. Angka ini menunjukkan proporsi belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer terhadap total belanja daerah. Capaian tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar belanja daerah digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, dan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya di luar komponen belanja transfer. Hal ini penting untuk melihat ruang belanja yang secara langsung dapat dikelola pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Pada indikator Opini Laporan Keuangan, Kabupaten Tana Tidung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP menjadi indikator penting dalam menunjukkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah, kepatuhan terhadap regulasi, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Indikator Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total Belanja APBD tahun N terealisasi sebesar 57,07%. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh realisasi belanja daerah diarahkan untuk mendukung urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Proporsi belanja ini penting karena pelayanan dasar merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, indikator Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar 46,37%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari struktur belanja daerah dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Capaian ini menjadi penting bagi Kabupaten Tana Tidung mengingat pemerataan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan utama dalam memperkuat konektivitas wilayah, akses pelayanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara keseluruhan, capaian indikator pada bidang urusan perencanaan dan keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung telah memiliki fondasi tata kelola keuangan dan pengawasan yang cukup baik, terutama ditunjukkan melalui opini WTP, maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP. Namun demikian, masih terdapat tantangan penting yang perlu diperkuat, khususnya rendahnya rasio PAD sebesar 5,03% yang menunjukkan perlunya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, pengelolaan belanja daerah perlu terus diarahkan agar semakin efektif,

efisien, dan berdampak langsung terhadap pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Pengadaan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Pengadaan

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56
2	Pemanfaatan sistem pengadaan	18,93
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa (SDM PBJ)	15,00

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan pengadaan, kinerja urusan pengadaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 diukur melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pemanfaatan sistem pengadaan, serta kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Ketiga indikator tersebut menggambarkan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan sistem digital, dan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Indikator Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 35,56. Capaian ini menggambarkan tingkat kesiapan kelembagaan UKPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa secara lebih terstruktur, profesional, dan sesuai ketentuan. Tingkat kematangan UKPBJ menjadi aspek penting karena pengadaan barang/jasa tidak hanya berkaitan dengan proses administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas belanja daerah, ketepatan waktu pelaksanaan program, efisiensi anggaran, serta pencapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, penguatan kelembagaan UKPBJ perlu terus dilakukan melalui peningkatan tata kelola, standardisasi proses kerja, penguatan fungsi layanan pengadaan, serta peningkatan kapasitas organisasi.

Selanjutnya, indikator Pemanfaatan sistem pengadaan terealisasi sebesar 18,93. Indikator ini menunjukkan sejauh mana sistem pengadaan berbasis elektronik telah digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem pengadaan menjadi penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tertib administrasi dalam proses pengadaan. Penggunaan sistem seperti SPSE, SIRUP, e-katalog, dan aplikasi pendukung pengadaan lainnya dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pengadaan, meningkatkan keterbukaan informasi, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pengadaan.

Namun demikian, nilai pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 18,93 menunjukkan bahwa optimalisasi sistem pengadaan masih perlu menjadi perhatian. Penguatan pemanfaatan sistem pengadaan dapat dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perangkat daerah dalam menginput rencana pengadaan, penggunaan katalog elektronik, percepatan proses pengadaan secara digital, peningkatan integrasi data pengadaan, serta pendampingan teknis kepada perangkat daerah. Dengan pemanfaatan sistem yang semakin baik, proses pengadaan diharapkan dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.

Indikator Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) menunjukkan realisasi sebesar 15,00. Capaian ini menggambarkan kondisi kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan teknis, pemahaman regulasi, maupun kemampuan dalam mengoperasikan sistem pengadaan. SDM PBJ memiliki peran strategis karena keberhasilan proses pengadaan sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian pada indikator SDM PBJ menunjukkan perlunya penguatan kompetensi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas aparatur pengadaan yang memiliki sertifikasi kompetensi, memperkuat pelatihan teknis pengadaan, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta mendorong profesionalisasi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Penguatan SDM PBJ

sangat penting untuk mengurangi risiko keterlambatan pengadaan, kesalahan prosedur, rendahnya kualitas dokumen pengadaan, serta potensi permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

Secara keseluruhan, kinerja urusan pengadaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan bahwa fungsi pengadaan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan, digitalisasi sistem, dan kompetensi aparatur. Tingkat kematangan UKPBJ sebesar 35,56 menunjukkan perlunya penguatan tata kelola kelembagaan pengadaan. Pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 18,93 mengindikasikan perlunya peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan. Sementara itu, nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sebesar 15,00 menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur pengadaan masih menjadi agenda penting.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 38 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	88,65%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel 2.54 tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kinerja bidang ini pada tahun 2025 ditunjukkan melalui indikator Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%), dengan batasan bahwa pegawai yang dihitung adalah PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2025, indikator tersebut terealisasi sebesar 88,65%.

Realisasi sebesar 88,65% menunjukkan bahwa sebagian besar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, di luar kelompok guru dan tenaga kesehatan, telah memiliki tingkat pendidikan yang relatif memadai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian ini menjadi gambaran penting mengenai kualitas sumber daya aparatur, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan

keuangan, pengawasan, serta pelaksanaan urusan teknis pada perangkat daerah.

Tingginya rasio ini juga mengindikasikan bahwa kapasitas dasar aparatur dari sisi latar belakang pendidikan sudah cukup baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Aparatur dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan dan pelaporan, mengelola program dan kegiatan, memanfaatkan teknologi informasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Namun demikian, capaian pendidikan formal aparatur perlu tetap diikuti dengan peningkatan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Hal ini penting karena kualitas aparatur tidak hanya ditentukan oleh jenjang pendidikan, tetapi juga oleh kesesuaian kompetensi dengan jabatan, pengalaman kerja, kemampuan teknis, penguasaan teknologi digital, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, coaching, mentoring, serta penguatan jabatan fungsional perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

D. Manajemen Keuangan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan manajemen keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan Manajemen Keuangan

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	18,60%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	75,44%
3	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	27,87%

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan manajemen keuangan, kinerja manajemen keuangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang perlu dibaca dari tiga aspek utama, yaitu deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD, deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, serta rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Ketiga indikator tersebut menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pelaksanaan belanja, kemampuan merealisasikan pendapatan asli daerah, maupun pengendalian sisa anggaran.

Indikator deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun 2025 tercatat sebesar 18,60%. Angka ini menunjukkan adanya selisih antara anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi belanja yang terlaksana pada tahun berjalan. Dengan kata lain, realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencapai total anggaran belanja yang direncanakan. Deviasi ini perlu menjadi perhatian karena semakin besar deviasi belanja, semakin besar pula potensi anggaran yang belum terserap untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Namun demikian, deviasi belanja tidak selalu dapat dimaknai sebagai kinerja yang buruk. Deviasi dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti efisiensi pelaksanaan kegiatan, perubahan kebutuhan belanja, keterlambatan proses pengadaan, penyesuaian jadwal pekerjaan fisik, kendala administrasi, perubahan kebijakan, atau kondisi teknis di lapangan. Oleh karena itu, angka 18,60% perlu dianalisis lebih lanjut untuk membedakan apakah deviasi tersebut berasal dari efisiensi anggaran atau dari belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, indikator deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD tercatat sebesar 75,44%. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD. Capaian ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan adanya kinerja pendapatan daerah yang lebih baik dari proyeksi awal. Deviasi positif PAD dapat menggambarkan adanya peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.

Tingginya deviasi positif PAD juga menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan target PAD tahun berikutnya. Jika realisasi PAD secara konsisten melampaui target secara signifikan, maka target PAD perlu dikalibrasi agar lebih realistis, proporsional, dan mencerminkan potensi aktual daerah. Dengan demikian, perencanaan pendapatan daerah dapat menjadi lebih presisi dan mendukung penguatan kemandirian fiskal daerah.

Indikator rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya tercatat sebesar 27,87%. Angka ini menunjukkan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya memiliki porsi sebesar 27,87% terhadap total belanja APBD tahun sebelumnya. Rasio ini penting karena menggambarkan seberapa besar sisa anggaran yang terbentuk dari pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dibandingkan dengan kapasitas belanja daerah. Semakin besar rasio sisa anggaran, semakin besar pula kebutuhan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, serta efektivitas realisasi program.

Rasio sebesar 27,87% menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengendalian sisa anggaran. Sisa anggaran dapat disebabkan oleh efisiensi belanja, sisa kontrak, kegiatan yang tidak terlaksana, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, atau penerimaan pembiayaan yang belum seluruhnya digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu memperkuat kualitas perencanaan, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala.

Secara keseluruhan, kinerja urusan manajemen keuangan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan adanya capaian positif pada sisi pendapatan, ditandai dengan realisasi PAD yang melampaui target dan menghasilkan deviasi positif sebesar 75,44%. Namun demikian, dari sisi belanja dan pengendalian sisa anggaran, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Deviasi belanja sebesar 18,60% dan rasio anggaran sisa sebesar 27,87% menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran agar belanja daerah dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

E. Transparansi dan Pelayanan Publik

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan transparansi dan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 40 Capaian Indikator Kinerja Pada Bidang Urusan
Transparansi dan Pelayanan Publik**

No.	Indikator	Realisasi 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	108,5
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	99,10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,51
4	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	89,64

Sumber: Portal Satu Data dan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel di atas tentang Capaian Indikator Kinerja pada bidang urusan transparansi dan pelayanan publik, kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum, indikator-indikator tersebut menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan realisasi sebesar 108,5. Capaian ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, perbaikan manajemen aparatur, serta peningkatan efektivitas kelembagaan. Reformasi birokrasi menjadi aspek penting karena berperan dalam membangun pemerintahan yang lebih profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, angka 108,5 perlu diverifikasi kembali apakah merupakan nilai indeks murni atau persentase capaian terhadap target, karena pada umumnya indeks memiliki batas skala tertentu.

Selanjutnya, indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja terealisasi sebesar 99,10. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan sangat baik. Nilai tersebut

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kinerja, menetapkan indikator kinerja, melaksanakan program dan kegiatan, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun pelaporan kinerja secara terstruktur. Akuntabilitas kinerja yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap program dan anggaran yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, realisasi tahun 2025 mencapai 86,51. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik berada pada kategori yang cukup baik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah telah mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat, baik dari sisi prosedur pelayanan, ketepatan waktu, kompetensi petugas, sarana prasarana, maupun kemudahan akses layanan. Meskipun demikian, peningkatan kepuasan masyarakat tetap perlu terus dilakukan melalui perbaikan standar pelayanan, digitalisasi layanan, peningkatan responsivitas petugas, penyederhanaan prosedur, dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.

Sementara itu, indikator penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan realisasi sebesar 89,64. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mencegah praktik maladministrasi pelayanan publik telah berjalan cukup baik. Maladministrasi dalam pelayanan publik dapat berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan, atau pelayanan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, capaian ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi prosedur layanan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator pada bidang urusan transparansi dan pelayanan publik menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memiliki arah perbaikan tata kelola pemerintahan yang cukup kuat. Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 99,10 dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,51 menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan kinerja, serta kualitas pelayanan

publik telah berjalan cukup baik. Selain itu, penilaian maladministrasi sebesar 89,64 menunjukkan adanya upaya untuk menjaga pelayanan publik agar tetap sesuai dengan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

2.1.2 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat melalui kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta pola pengeluaran rumah tangga. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah pengeluaran per kapita, baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan.

Besaran dan komposisi pengeluaran per kapita dapat memberikan gambaran mengenai daya beli, pola konsumsi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan pengeluaran dari waktu ke waktu dapat dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi, perubahan kebutuhan rumah tangga, serta perkembangan harga barang dan jasa. Sementara itu, perbandingan antara pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat digunakan untuk melihat perubahan struktur konsumsi masyarakat. Perkembangan rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Tana Tidung menurut kelompok makanan dan bukan makanan selama periode 2023–2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan

Kelompok Makanan	Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan (Rupiah)		
	2023	2024	2025
Padi-padian	95.243	109.482	111.705
Umbi-umbian	10.376	11.249	12.882
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	118.905	126.377	133.872
Daging	49.713	51.342	52.186
Telur dan susu	51.847	53.543	67.496
Sayur-sayuran	72.776	80.814	89.867
Kacang-kacangan	13.907	15,393	17.065
Buah-buahan	28.843	44.342	50.934
Minyak dan Kelapa	17.915	19.707	24.013
Bahan minuman	23.621	25.095	30.606
Bumbu-bumbuan	22.145	28.172	32.923
Konsumsi lainnya	19.789	18.417	22.296

Makanan dan minuman jadi	192.734	181.115	223.861
Rokok	111.415	102.104	106.268
Jumlah	829.229	866.152	975.976

Sumber: BPS Kab.Tana Tidung, 2026

Tabel 2. 42 Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan

Kelompok Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)		
	2023	2024	2025
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	483.132	516.813	575.009
Aneka barang dan jasa	184.698	196.928	208.851
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	34.183	31.495	34.183
Barang yang tahan lama	42.990	57.732	74.144
Pajak, pungutan, dan asuransi	70.871	68.336	77.061
Keperluan pesta dan upacara	26.778	12.969	43.274
Jumlah	842.652	884.273	1.012.523

Sumber: BPS Kab. Tana Tidung, 2026

Berdasarkan Tabel Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Makanan dan Tabel Rata-rata Pengeluaran Menurut Kelompok Bukan Makanan, terlihat bahwa pola pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan. Rata-rata pengeluaran kelompok makanan meningkat dari Rp829.229 per kapita per bulan pada tahun 2023 menjadi Rp975.976 pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 17,7 persen dalam dua tahun. Sementara itu, rata-rata pengeluaran kelompok bukan makanan meningkat dari Rp842.652 menjadi Rp1.012.523, atau tumbuh sekitar 20,2 persen. Peningkatan tersebut mengindikasikan bertambahnya kebutuhan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perubahan pola konsumsi, serta penyesuaian terhadap perkembangan harga barang dan jasa.

Pada kelompok makanan, komponen pengeluaran terbesar secara konsisten berasal dari makanan dan minuman jadi, ikan/udang/cumi/kerang, padi-padian, dan rokok. Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi meningkat dari Rp192.734 pada tahun 2023 menjadi Rp223.861 pada tahun 2025, menunjukkan kecenderungan meningkatnya konsumsi makanan siap saji atau konsumsi di luar rumah. Pengeluaran untuk ikan, udang, cumi, dan kerang juga mengalami kenaikan

dari Rp118.905 menjadi Rp133.872, sedangkan pengeluaran untuk padi-padian meningkat dari Rp95.243 menjadi Rp111.705. Selain itu, peningkatan yang cukup besar juga terjadi pada kelompok telur dan susu, buah-buahan, serta sayur-sayuran, yang mencerminkan semakin beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Di sisi lain, pengeluaran untuk rokok mengalami fluktuasi, yaitu menurun pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat menjadi Rp106.268 pada tahun 2025, meskipun masih menjadi salah satu komponen pengeluaran makanan yang cukup besar.

Pada kelompok bukan makanan, komponen pengeluaran terbesar secara konsisten adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga, yang meningkat dari Rp483.132 pada tahun 2023 menjadi Rp575.009 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terkait hunian, utilitas, dan fasilitas rumah tangga masih menjadi beban pengeluaran utama masyarakat. Komponen besar lainnya adalah aneka barang dan jasa, yang meningkat dari Rp184.698 menjadi Rp208.851, mencerminkan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan dan barang penunjang kehidupan sehari-hari. Pengeluaran untuk barang tahan lama juga mengalami peningkatan cukup tinggi, dari Rp42.990 menjadi Rp74.144, mengindikasikan meningkatnya kemampuan maupun kebutuhan rumah tangga dalam memperoleh barang-barang dengan umur pakai lebih panjang. Sementara itu, pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara cenderung berfluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023.

Apabila dibandingkan antara kedua kelompok pengeluaran tersebut, terlihat bahwa sejak tahun 2023 rata-rata pengeluaran bukan makanan telah sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluaran makanan, dan selisih tersebut semakin besar pada tahun 2025. Pada tahun 2025, rata-rata pengeluaran bukan makanan mencapai Rp1.012.523, sedangkan pengeluaran makanan sebesar Rp975.976. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung mulai didominasi oleh kebutuhan nonpangan, terutama untuk perumahan, fasilitas rumah tangga, barang tahan lama, dan berbagai jasa. Pergeseran tersebut umumnya mencerminkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena proporsi pengeluaran rumah tangga tidak lagi

didominasi oleh kebutuhan pangan, melainkan semakin banyak dialokasikan untuk kebutuhan hidup yang lebih beragam dan bersifat penunjang kualitas hidup. Meski demikian, fenomena ini juga perlu dicermati sebagai indikasi meningkatnya biaya hidup, khususnya pada sektor perumahan dan jasa, sehingga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan program RKPD merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program-program yang dijalankan oleh berbagai OPD di pemerintahan daerah. Proses ini melibatkan pengukuran dan analisis capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Capaian kinerja OPD sendiri menunjukkan sejauh mana kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh OPD berhasil memenuhi indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang seringkali mencakup aspek-aspek seperti kepuasan masyarakat, kualitas layanan, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Melalui evaluasi pelaksanaan program, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh, memahami penyebab-penyebab dari varian tersebut, dan mengambil langkah-langkah korektif untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari pelaksanaan program. Evaluasi ini juga berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya publik, sekaligus mendukung keputusan-keputusan strategis dalam pengembangan kebijakan dan alokasi sumber daya untuk masa mendatang.

Data berikut ini menggambarkan evaluasi kinerja tahunan dari berbagai OPD di Kabupaten Tana Tidung, yang meliputi berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pemerintahan lokal. Tabel ini menyajikan persentase pencapaian kinerja masing-masing OPD 1 tahun terakhir yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu Sangat Rendah (SR) untuk capaian sampai dengan 50 persen, Rendah (R) untuk capaian lebih dari 50 persen sampai dengan 65 persen, Sedang (S) untuk capaian lebih dari 65 persen sampai dengan 75 persen, Tinggi (T) untuk capaian lebih dari 75 persen sampai dengan 90 persen, dan Sangat Tinggi (ST) untuk capaian lebih dari 90

persen. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja setiap OPD terhadap target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi OPD yang telah menunjukkan kinerja optimal maupun yang masih memerlukan penguatan, perbaikan, dan intervensi lebih lanjut. Dengan memonitor kinerja secara berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkomitmen untuk transparansi dan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 2. 43 Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja 2025	
		%	P
1	Dinas Pendidikan	100	ST
2	Dinas Kesehatan	96,75	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman	95,92	ST
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91,67	ST
5	Dinas Lingkungan Hidup	95,18	ST
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99,93	ST
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,08	ST
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107,32	ST
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	95,02	ST
10	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	99,92	ST
11	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	101,45	ST
12	Dinas Perhubungan	97,89	ST
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	97,08	ST
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,35	ST
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	96,39	ST
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	100	ST
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98,91	ST
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95,25	ST
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	ST
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	ST
21	Satuan Polisi Pamong Praja	97,92	ST
22	Bagian Umum	94,30	ST
23	Bagian Pemerintahan	94,30	ST
24	Bagian Administrasi Pembangunan	94,30	ST
25	Bagian Hukum	94,30	ST
26	Bagian Organisasi	94,30	ST
27	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	94,30	ST
28	Sekretariat DPRD	97,27	ST
29	Kecamatan Sesayap	99,99	ST
30	Kecamatan Sesayap Hilir	100	ST
31	Kecamatan Tana Lia	25,93	SR
32	Kecamatan Betayau	100	ST
33	Kecamatan Muruk Rian	98,02	ST
34	Inspektorat Kabupaten	100	ST

**P = Predikat*

Berdasarkan Tabel di atas tentang Rekapitulasi Capaian Kinerja OPD Tahun 2025, secara umum kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari 34

perangkat daerah yang ditampilkan dalam tabel, sebagian besar memperoleh predikat ST atau Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada mayoritas perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Capaian kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nilai sebesar 107,32%. Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa realisasi kinerja perangkat daerah tersebut melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga mencatat capaian di atas 100%, yaitu sebesar 101,45%. Kondisi ini menggambarkan adanya kinerja yang cukup kuat pada sektor pelayanan perizinan, investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Beberapa perangkat daerah juga mencatat capaian tepat 100%, antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, dan Inspektorat Kabupaten. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah tersebut mampu merealisasikan target kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Perangkat daerah lainnya juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi, umumnya berada pada rentang 91% hingga 99%. Beberapa di antaranya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,93%, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebesar 99,92%, Kecamatan Sesayap sebesar 99,99%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 98,91%, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 98,08%, Kecamatan Muruk Rian sebesar 98,02%, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 97,92%, dan Dinas Perhubungan sebesar 97,89%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah mampu menjaga konsistensi pelaksanaan kinerja dengan baik.

Meskipun demikian, terdapat satu perangkat daerah yang capaiannya jauh lebih rendah dibandingkan perangkat daerah lainnya, yaitu Kecamatan Tana Lia dengan capaian sebesar 25,93% dan predikat SR. Capaian ini menjadi perhatian khusus karena berada jauh di bawah rata-rata capaian OPD lainnya. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, keterbatasan dukungan sumber daya, permasalahan

administrasi, keterlambatan realisasi kegiatan, atau belum optimalnya pencapaian target kinerja pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut.

Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja dari 34 OPD adalah sekitar 95,38%. Namun, apabila capaian Kecamatan Tana Lia yang sangat rendah dikeluarkan sebagai nilai ekstrem, rata-rata capaian OPD lainnya berada pada kisaran 97,49%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik, dengan satu catatan penting berupa perlunya pembinaan dan pendampingan terhadap OPD yang capaiannya masih rendah.

Capaian kinerja yang tinggi pada sebagian besar perangkat daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja telah berjalan cukup efektif. Namun demikian, capaian yang tinggi tetap perlu diikuti dengan evaluasi kualitas output dan outcome agar kinerja yang dicapai tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik, pembangunan wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel 2. 44 Rekapitulasi Capaian Anggaran OPD Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Capaian Anggaran 2025	
		%	P
1	Dinas Pendidikan	72,78	S
2	Dinas Kesehatan	92,48	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Pemukiman	91,48	ST
4	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59,59	R
5	Dinas Lingkungan Hidup	97,83	ST
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93,38	ST
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	93,64	ST
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,08	ST
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	97,91	ST
10	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	95,72	ST
11	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	93,48	ST
12	Dinas Perhubungan	97,37	ST
13	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	91,88	ST
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	91,48	ST
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	97,63	ST
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	88,28	T
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54,94	R
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,47	ST

No.	Perangkat Daerah	Capaian Anggaran 2025	
		%	P
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94,39	ST
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,39	S
21	Satuan Polisi Pamong Praja	97,05	ST
22	Bagian Umum	88,51	T
23	Bagian Pemerintahan	88,51	T
24	Bagian Administrasi Pembangunan	88,51	T
25	Bagian Hukum	88,51	T
26	Bagian Organisasi	88,51	T
27	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	88,51	T
28	Sekretariat DPRD	94,12	ST
29	Kecamatan Sesayap	96,43	ST
30	Kecamatan Sesayap Hilir	98,48	ST
31	Kecamatan Tana Lia	93,75	ST
32	Kecamatan Betayau	98,67	ST
33	Kecamatan Muruk Rian	98,30	ST
34	Inspektorat Kabupaten	52,68	R

**P = Predikat*

Berdasarkan Tabel di atas tentang Rekapitulasi Realisasi Anggaran OPD Tahun 2025, tingkat realisasi anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan capaian yang cukup beragam. Dari 34 perangkat daerah yang tercantum, sebagian besar OPD berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), sementara beberapa OPD lainnya berada pada kategori Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R). Secara umum, rata-rata realisasi anggaran OPD Tahun 2025 berada pada kisaran 88,82%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah secara keseluruhan relatif berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa perangkat daerah dengan serapan anggaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kelompok perangkat daerah dengan realisasi anggaran sangat tinggi mendominasi tabel. Sebanyak 22 OPD memperoleh predikat Sangat Tinggi (ST), antara lain Dinas Kesehatan sebesar 92,48%, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 91,48%, Dinas Lingkungan Hidup sebesar 97,83%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 93,38%, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 93,64%, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 94,08%, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar 97,91%, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebesar 95,72%, serta Dinas Perhubungan sebesar 97,37%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah mampu melaksanakan anggaran secara optimal sesuai dengan rencana kerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran tertinggi ditunjukkan oleh Kecamatan Betayau dengan capaian sebesar 98,67%, diikuti oleh Kecamatan Sesayap Hilir sebesar 98,48%,

Kecamatan Muruk Rian sebesar 98,30%, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar 97,91%, serta Dinas Lingkungan Hidup sebesar 97,83%. Tingginya realisasi anggaran pada OPD tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan relatif berjalan lancar, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan administrasi, pengadaan, maupun penyerapan belanja. Namun demikian, realisasi anggaran yang tinggi tetap perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kualitas output dan manfaat kegiatan agar serapan anggaran benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Selain itu, terdapat 7 OPD dengan predikat Tinggi (T), yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sebesar 88,28%, serta beberapa bagian pada Sekretariat Daerah seperti Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat yang masing-masing mencapai 88,51%. Capaian pada kategori tinggi menunjukkan bahwa realisasi anggaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar capaian serapan dapat semakin optimal.

Sementara itu, terdapat 2 OPD dengan predikat Sedang (S), yaitu Dinas Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 72,78% dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 70,39%. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian anggaran yang belum terserap secara optimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penyesuaian pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, kendala teknis di lapangan, keterlambatan proses pengadaan, atau kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai jadwal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor penyebab rendahnya serapan pada perangkat daerah tersebut.

Adapun perangkat daerah dengan predikat Rendah (R) terdiri atas Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 59,59%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 54,94%, serta Inspektorat Kabupaten sebesar 52,68%. Ketiga OPD ini perlu menjadi perhatian khusus karena tingkat realisasi anggarannya berada jauh di bawah mayoritas perangkat daerah lainnya. Rendahnya realisasi anggaran dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, kesiapan administrasi, pengadaan barang/jasa, perubahan kebutuhan

belanja, maupun kendala pelaksanaan teknis. Namun demikian, rendahnya realisasi juga perlu dianalisis lebih rinci untuk membedakan antara efisiensi anggaran dengan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Rincian Rekapitulasi Nilai Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Perangkat Daerah Berdasarkan Program Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam Lampiran Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Adapun ringkasan hasil evaluasinya diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan program Tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan hasil yang cukup beragam. Pada satu sisi, terdapat sejumlah perangkat daerah dan program yang telah mencapai bahkan melampaui target kinerja, yang tercermin dari dominannya predikat Sangat Tinggi (ST) pada beberapa urusan pelayanan dasar, penunjang pemerintahan, administrasi, kependudukan, keuangan, pengawasan, serta sebagian urusan kewilayahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada beberapa bidang, pelaksanaan program telah berjalan efektif, didukung oleh kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan yang relatif baik.

Di sisi lain, hasil rekapitulasi capaian kinerja per program (Lampiran) juga memperlihatkan bahwa masih terdapat cukup banyak program yang memperoleh predikat Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Capaian yang rendah tersebut umumnya terlihat pada program-program yang indikatornya menunjukkan realisasi sama dengan target namun tetap belum masuk kategori optimal, serta terutama pada indikator-indikator yang capaian kinerjanya masih 0. Pola ini tampak pada beberapa urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perdagangan, perumahan, serta sebagian fungsi penunjang pada sekretariat dan beberapa perangkat daerah lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan daerah pada Tahun 2025 bukan hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada aspek pengukuran, pelaporan, validitas data, dan kesinambungan dukungan pelaksanaan di level perangkat daerah.

Apabila dicermati lebih lanjut, perangkat daerah yang bergerak pada fungsi pelayanan administratif dan tata kelola pemerintahan cenderung

menunjukkan capaian yang lebih stabil. Hal ini tercermin dari capaian indikator seperti nilai AKIP perangkat daerah, kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, layanan administrasi, serta sejumlah indikator koordinasi dan fasilitasi pemerintahan yang pada banyak perangkat daerah telah mencapai predikat tinggi hingga sangat tinggi. Sebaliknya, pada program-program substantif yang memerlukan dukungan teknis lapangan, pengumpulan data sektoral, perubahan perilaku masyarakat, atau pembangunan infrastruktur dan layanan yang lebih kompleks, capaian kinerjanya masih cenderung fluktuatif. Dengan demikian, hasil rekapitulasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kinerja administratif dan kinerja substantif pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan RKPD Tahun 2027.

Secara substantif, hasil capaian Tahun 2025 dapat menjadi dasar evaluasi bahwa perencanaan pembangunan daerah ke depan perlu diarahkan pada dua fokus utama. Pertama, mempertahankan dan mereplikasi praktik baik pada program-program yang telah menunjukkan capaian sangat tinggi, agar tetap konsisten dan berkelanjutan. Kedua, melakukan pembenahan secara lebih terarah terhadap program-program dengan predikat rendah dan sangat rendah, terutama melalui penguatan kualitas perencanaan, ketepatan penetapan target, penguatan basis data kinerja, peningkatan kapasitas pelaksana program, serta pengendalian dan monitoring yang lebih intensif. Dengan demikian, rekapitulasi capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai gambaran hasil pelaksanaan program, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk merumuskan prioritas perbaikan kinerja perangkat daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.

Selanjutnya, selain menelaah capaian kinerja program, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025 juga perlu dilihat dari aspek realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Analisis ini penting untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penyerapan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan sejauh mana keselarasan antara capaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan Tabel Rekapitulasi Nilai Capaian Anggaran Perangkat Daerah Berdasarkan Program Tahun 2025 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel rekapitulasi realisasi anggaran perangkat daerah berdasarkan program Tahun 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kinerja yang relatif baik, meskipun masih terdapat variasi capaian antar urusan, perangkat daerah, dan program. Sebagian besar perangkat daerah mencatat tingkat realisasi anggaran pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah didukung oleh penyerapan anggaran yang cukup optimal. Kondisi ini tampak pada sejumlah urusan strategis, seperti bidang kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perhubungan, komunikasi dan informatika, perpustakaan, pariwisata, pertanian, serta unsur kewilayahan yang mayoritas berada pada predikat Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST).

Pada urusan pelayanan dasar, realisasi anggaran juga memperlihatkan kecenderungan positif. Dinas Kesehatan mencatat capaian realisasi anggaran sebesar 93,86% dengan predikat sangat tinggi, sementara urusan kesehatan secara keseluruhan mencapai 92,90%. Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan realisasi anggaran sebesar 91,31%, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman mencapai 96,54%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan fiskal terhadap layanan dasar masyarakat pada dasarnya telah berjalan cukup baik, terutama pada program-program fisik dan layanan publik yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Meski demikian, hasil rekapitulasi capaian anggaran per program (Lampiran) juga memperlihatkan adanya beberapa perangkat daerah atau program yang realisasi anggarannya masih rendah, bahkan sangat rendah. Salah satu yang paling menonjol adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada fungsi keuangan, yang hanya mencapai 54,94% dan berada pada predikat rendah. Di dalamnya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hanya mencapai 49,65% dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 55,93%. Selain itu, terdapat pula beberapa program dengan realisasi 0,00% atau sangat minim, seperti pada sebagian program di unit puskesmas, program perencanaan tenaga kerja, serta beberapa program tertentu pada perangkat daerah lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek perencanaan anggaran, kesiapan pelaksanaan kegiatan, percepatan proses administrasi, maupun pengendalian penyerapan anggaran pada beberapa program.

Jika dilihat secara struktural, pola realisasi anggaran menunjukkan bahwa program penunjang urusan pemerintahan pada banyak perangkat daerah cenderung memiliki serapan yang stabil dan tinggi. Sebaliknya, beberapa program substantif yang berkaitan dengan pemberdayaan, pengembangan kapasitas, pengelolaan tertentu, atau program yang sangat spesifik justru menunjukkan capaian yang lebih bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja rutin dan penunjang kelembagaan relatif lebih mudah terserap, sedangkan belanja program substantif masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Dengan demikian, evaluasi realisasi anggaran Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan tingkat serapan keuangan, tetapi juga memberikan sinyal penting mengenai efektivitas pelaksanaan program dan konsistensi antara perencanaan anggaran dengan kesiapan operasional di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah mampu merealisasikan anggaran dengan cukup baik, namun kualitas penyerapan masih perlu terus ditingkatkan, terutama pada program-program yang realisasinya rendah atau belum berjalan optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, hasil evaluasi realisasi anggaran Tahun 2025 perlu dijadikan dasar untuk memperkuat ketepatan penganggaran, meningkatkan konsistensi antara target kinerja dan alokasi belanja, serta memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam RKPD Tahun 2027 merupakan kelanjutan dari permasalahan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah masih dihadapkan pada enam isu utama, yaitu belum optimalnya daya saing sumber daya manusia menuju masyarakat unggul dan berbudaya, belum optimalnya peningkatan taraf hidup layak dalam pemerataan pengentasan kemiskinan, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan, belum optimalnya pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas, belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, serta

tingginya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan.

Permasalahan daya saing sumber daya manusia masih ditandai oleh keterbatasan kualitas pendidikan, belum meratanya akses layanan pendidikan, serta minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam berinovasi. Di sisi lain, permasalahan kemiskinan masih menjadi isu mendasar, di mana upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya efektif akibat belum optimalnya perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini turut memengaruhi ketimpangan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal, baik dari sisi pemerataan maupun kualitasnya, serta belum sepenuhnya berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur yang belum merata dan belum sepenuhnya berkualitas, sehingga menghambat konektivitas wilayah, akses pelayanan dasar, serta pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, tata kelola pemerintahan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas kebijakan pembangunan. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas pembangunan juga menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang perlu dikelola secara lebih bijaksana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Memasuki tahun 2027, permasalahan pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh dinamika kondisi makro yang menunjukkan adanya perbaikan di beberapa indikator, namun belum sepenuhnya berdampak pada kualitas pembangunan secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan, yang mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat rentan yang mudah terdampak oleh guncangan ekonomi.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang juga mengalami peningkatan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan pada tahun 2025 menandakan bahwa ekonomi daerah masih tumbuh, namun belum cukup kuat dan belum berkualitas dalam menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Meskipun PDRB per kapita terus meningkat, manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, perbaikan rasio ketimpangan menjadi modal positif yang perlu dipertahankan dan diperkuat agar pembangunan daerah semakin inklusif.

Dalam konteks tersebut, permasalahan pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 masih dihadapkan pada tantangan tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Koordinasi antarperangkat daerah dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan masih perlu diperkuat, terutama dalam pemanfaatan data, informasi, hasil penelitian, serta inovasi daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di sisi lain, pengelolaan keuangan dan aset daerah belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah serta perlunya peningkatan efektivitas pengawasan internal dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek kelembagaan dan sumber daya aparatur, reformasi birokrasi, penerapan sistem merit ASN, serta peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur masih memerlukan penguatan. Koordinasi lintas perangkat daerah, kualitas perumusan kebijakan, serta fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, layanan kesekretariatan DPRD, serta pelayanan publik di tingkat kecamatan yang masih belum optimal dalam mendukung kemandirian wilayah.

Permasalahan pembangunan juga terlihat pada sektor pelayanan dasar dan pembangunan manusia. Akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah masih belum merata, disertai belum optimalnya capaian keluarga sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, serta masih relatif tingginya prevalensi penyakit. Di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat, sementara kualitas, produktivitas, dan kompetensi tenaga kerja masih rendah akibat terbatasnya dukungan pelatihan dan peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada sektor ekonomi dan infrastruktur, tantangan pembangunan meliputi belum optimalnya pengembangan UMKM, koperasi, industri kecil, serta produk unggulan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Produksi, produktivitas, dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan masih terbatas, sehingga ketahanan dan kemandirian pangan daerah belum kuat. Selain itu, pemerataan dan kualitas infrastruktur dasar, perumahan dan kawasan permukiman, konektivitas transportasi antarwilayah, serta kepatuhan terhadap tata ruang masih perlu ditingkatkan guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Permasalahan lainnya mencakup pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal, khususnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang, pengelolaan persampahan dan TPA yang ramah lingkungan, serta kapasitas penanggulangan bencana daerah yang masih terbatas. Di bidang komunikasi dan informatika, pengembangan pemerintahan digital, keterbukaan informasi publik, dan layanan statistik sektoral masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, realisasi investasi daerah, kualitas pelayanan perizinan, pengembangan pariwisata, peran pemuda dan olahraga, stabilitas ideologi dan sosial politik, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masih memerlukan perhatian serius agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Berikut adalah rincian permasalahan pokok per urusan Kabupaten Tana Tidung:

Tabel 2. 45 Permasalah Pokok Per Urusan Kabupaten Tana Tidung

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan Pokok
1	Perencanaan, Penelitian, dan Pengendalian Pembangunan	Koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal, didukung keterbatasan data, informasi, serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi.
2	Keuangan Daerah dan Aset	Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal serta tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koordinasi lintas perangkat daerah, kualitas perumusan kebijakan, reformasi birokrasi, serta fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan belum optimal.

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan Pokok
4	Pengawasan dan Akuntabilitas	Penyelenggaraan pengawasan internal dan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas belum optimal.
5	Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur	Profesionalisme, integritas, kompetensi, dan penerapan sistem merit ASN belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.
6	Pendidikan dan Kebudayaan	Akses dan mutu layanan pendidikan belum merata serta pengelolaan, pemajuan, dan pengembangan kebudayaan daerah belum optimal.
7	Kesehatan	Akses dan kualitas layanan kesehatan antarwilayah belum merata, capaian keluarga sehat dan PHBS belum optimal, serta prevalensi penyakit masih relatif tinggi.
8	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	Kondisi sosial masyarakat dan pemberdayaan desa belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
9	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kualitas, produktivitas, dan kompetensi tenaga kerja masih rendah serta dukungan peningkatan keterampilan belum optimal.
10	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Pengembangan UMKM, koperasi, dan produk unggulan daerah belum optimal dalam mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal.
11	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Produksi, produktivitas, pengolahan hasil pertanian dan perikanan belum optimal serta ketahanan dan kemandirian pangan daerah masih lemah.
12	Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Pengembangan pariwisata daerah, peran pemuda, serta pembinaan dan prestasi olahraga belum optimal.
13	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan infrastruktur dasar dan permukiman belum optimal serta kepatuhan terhadap tata ruang masih rendah sehingga berdampak pada kualitas hunian.
14	Perhubungan	Konektivitas dan layanan transportasi antarwilayah belum optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
15	Lingkungan Hidup	Pengawasan pemanfaatan ruang dan aktivitas pembangunan masih lemah serta pengelolaan TPA belum merata dan ramah lingkungan.
16	Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Pelayanan komunikasi, informatika, pemerintahan digital, dan keterbukaan informasi publik belum optimal.
17	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Realisasi investasi daerah masih rendah, kualitas pelayanan perizinan belum optimal, serta minat penanam modal masih terbatas.
18	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta

No	Urusan Pemerintahan	Permasalahan Pokok
	Perlindungan Masyarakat	layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan belum optimal.
19	Penanggulangan Bencana	Kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana daerah belum optimal.
20	Kesatuan Bangsa dan Politik	Stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya daerah belum sepenuhnya kondusif.
21	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tata kelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
22	Perpustakaan dan Kearsipan	Minat baca dan budaya literasi masyarakat masih rendah serta layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan belum optimal.
23	Kesekretariatan DPRD	Tata kelola kesekretariatan DPRD belum optimal dalam mendukung kinerja DPRD yang efektif dan berkualitas.
24	Kewilayahan (Kecamatan)	Kualitas pelayanan publik kecamatan, kapasitas kelembagaan, penyediaan layanan dasar dan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi lokal kewilayahan belum optimal dalam mendorong kemandirian wilayah.

2.4 Isu Strategis

Perumusan isu strategis untuk pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ini termasuk analisis isu strategis yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung untuk periode 2021-2026. Selain itu, proses ini juga memperhatikan dinamika terkini yang teridentifikasi melalui penilaian terhadap performa pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi ini meliputi peninjauan terhadap pencapaian kinerja pembangunan selama periode perencanaan RPJMD, serta mempertimbangkan kondisi saat ini di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

1. Dinamika internasional

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, berbagai isu internasional terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di tingkat nasional maupun global. Perubahan cepat dalam teknologi, ekonomi, politik, dan lingkungan mengharuskan setiap negara untuk beradaptasi dan berkolaborasi demi menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Beberapa isu strategis di panggung internasional, seperti transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pergeseran peran ekonomi kawasan,

hingga transisi energi bersih, menjadi perhatian utama dalam upaya menciptakan tata dunia yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Isu-isu ini tidak hanya memengaruhi kebijakan negara-negara maju tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saingnya.

Dalam sub bab ini, akan dibahas berbagai isu internasional yang relevan, mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Setiap isu mencerminkan tantangan global yang saling terkait dan memerlukan kerja sama antarnegara sebagai solusi yang efektif. Hal ini penting untuk mendukung terciptanya dunia yang lebih terintegrasi, damai, dan sejahtera. Berikut adalah sejumlah isu internasional utama yang menjadi perhatian dalam konteks dinamika global:

a. Transformasi Iptek dalam Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0

Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data, sedangkan *Society* 5.0 berfokus pada transformasi teknologi untuk mendukung keberlanjutan masyarakat manusia.

b. Pergeseran Peran Ekonomi Asia-Pasifik

Wilayah Asia-Pasifik mengalami perubahan peran strategis sebagai pusat ekonomi global. Negara-negara di kawasan ini berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia melalui perdagangan, inovasi, dan investasi.

c. Pasar Terbuka MEA

Pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberikan peluang besar untuk perdagangan barang, jasa, dan tenaga kerja terampil, namun juga menuntut peningkatan daya saing di tingkat regional dan global.

d. Kemitraan Global untuk SDGs

Upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) memerlukan sinergi global dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan.

e. Belt and Road Initiative Forum (BRIF)

Program Belt and Road Initiative (BRI) yang dipimpin Tiongkok terus menjadi perhatian karena dampaknya terhadap infrastruktur, investasi lintas negara, serta penguatan konektivitas di kawasan Eurasia, Afrika, dan sekitarnya.

f. Transisi Energi dan Kerja Sama Energi Terbarukan

Meningkatnya komitmen global untuk transisi menuju energi bersih mendorong kerja sama antarnegara dalam pengembangan energi terbarukan seperti angin, matahari, dan biomassa, yang sekaligus mendukung dekarbonisasi.

g. Keamanan dan Stabilitas Regional Indo-Pasifik

Keamanan kawasan Indo-Pasifik menjadi prioritas dengan meningkatnya ketegangan geopolitik. Stabilitas kawasan diperlukan untuk menjaga perdagangan bebas dan aliansi strategis antarnegara.

h. Pengembangan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan untuk Memberdayakan UMKM

Ekonomi digital membuka peluang pemberdayaan UMKM melalui akses yang lebih baik ke pasar, teknologi, dan layanan keuangan. Inklusi keuangan menjadi kunci dalam memastikan pemerataan manfaat ekonomi.

i. Kerjasama dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Pandemi global menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam memperkuat sistem kesehatan, termasuk produksi vaksin, penyediaan alat kesehatan, dan berbagi pengetahuan untuk mencegah krisis kesehatan di masa depan.

j. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Isu perubahan iklim terus mendesak dunia untuk mengambil tindakan kolektif guna mengurangi dampaknya terhadap ekosistem, sumber daya air, dan ketahanan pangan global.

Setiap isu ini mencerminkan kebutuhan akan kolaborasi lintas negara untuk mewujudkan stabilitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan di tingkat global.

2. Dinamika Nasional

Dalam menghadapi tantangan dan peluang abad ke-21, Indonesia terus berupaya mewujudkan visi pembangunan yang berlandaskan pada semangat kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan. Asta Cita dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mencerminkan komitmen nasional untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, Asta Cita menggarisbawahi delapan prioritas utama yang mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ideologi Pancasila hingga pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan ini tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada pengokohan kemandirian bangsa melalui inovasi, hilirisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Dalam sub bab ini, akan dibahas berbagai dinamika nasional yang menjadi landasan penting dalam merancang masa depan bangsa. Setiap poin Asta Cita RPJMN 2025-2029 menggambarkan prioritas yang saling terintegrasi untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis, sesuai dengan amanat Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.

- a. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
- d. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- e. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- f. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- g. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

3. Isu Strategis RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis ini merupakan respons atas permasalahan pokok yang dihadapi serta menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

- a. Isu strategis pertama adalah produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Ini menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi lokal agar mampu memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki daerah, termasuk sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. Pengembangan ekonomi inklusif juga penting untuk menekan kesenjangan antarwilayah.
- b. Isu kedua berfokus pada transformasi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, dan penyediaan energi baru terbarukan, sebagai bentuk komitmen daerah terhadap keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi. Kalimantan Utara sebagai wilayah dengan kekayaan alam yang tinggi perlu mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan serta membuka peluang investasi hijau dan berbasis sumber daya terbarukan.
- c. Isu strategis ketiga yaitu penguatan SDM yang berkualitas dan peningkatan kohesivitas sosial. Masyarakat Kalimantan Utara memerlukan akses pendidikan dan kesehatan yang merata serta dukungan pengembangan kapasitas, khususnya bagi generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan. Di sisi lain, penguatan kohesi sosial penting dalam menjaga stabilitas sosial, keberagaman, dan inklusi di tengah masyarakat multikultural.
- d. Selanjutnya, konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan menjadi isu keempat yang sangat krusial

mengingat kondisi geografis Kalimantan Utara yang luas dan masih terdapat wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan sangat dibutuhkan untuk mempercepat distribusi pembangunan dan membuka keterisolasian.

- e. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang berkualitas, termasuk pada wilayah perbatasan, menjadi isu strategis kelima. Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemantapan kelembagaan di daerah perbatasan menjadi kunci untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, efisien, dan terpercaya. Hal ini juga selaras dengan posisi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat peran Indonesia di wilayah perbatasan utara Kalimantan.

4. Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029, terdapat berbagai permasalahan dan isu strategis yang perlu diatasi untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi mencakup aspek sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan. Sementara itu, isu strategis mencerminkan tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung terdapat 6 permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya daya saing SDM menuju masyarakat unggul dan berbudaya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat. Pengoptimalan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui tiga aspek, yaitu penguasaan pengetahuan, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan untuk berinovasi. Masih terdapat kendala yang menghambat perwujudan masyarakat yang unggul dan berbudaya, seperti minimnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat serta belum meratanya akses dan sarana prasarana pendidikan. Hal ini menjadi

tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan menciptakan masyarakat yang berbudaya.

- b. Belum optimalnya peningkatan taraf hidup layak dalam pemerataan pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan menjadi masalah yang paling mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Masih tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya serta menciptakan ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Kurang efektifnya pengentasan kemiskinan dapat terjadi karena kurang tepatnya perlindungan terhadap masyarakat miskin serta kurangnya pemberdayaan masyarakat.

- c. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan diperlukan pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan.

- d. Belum optimalnya pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Infrastruktur yang tidak merata dan kurang berkualitas juga dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang merata. Perlunya pemenuhan layanan dasar diperlukan melalui perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas. Hal ini menjadi landasan utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.

- e. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

Kurangnya optimalitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merentang dari serangkaian permasalahan yang mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya publik memperlemah akuntabilitas, sedangkan partisipasi masyarakat yang terbatas dalam proses pembuatan keputusan menyebabkan kebijakan yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan rakyat.

- f. Tingginya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pembangunan

Dalam konteks ini, aktivitas pembangunan, termasuk pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Sedangkan Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam akselerasi pembangunan

Di Kabupaten Tana Tidung, pemanfaatan bonus demografi menjadi pusat perhatian dalam upaya mempercepat pembangunan. Dengan mayoritas penduduknya berusia muda, potensi bonus demografi dianggap sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan bonus demografi juga menimbulkan tantangan dan isu strategis yang perlu diatasi.

- b. Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai budaya ketimuran

Merebaknya konten media sosial yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran di Kabupaten Tana Tidung menjadi isu strategis yang menuntut perhatian serius. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, konten-konten di media sosial seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma budaya lokal.

- c. Akselerasi pengentasan kemiskinan dengan pendekatan sosial budaya

Di Kabupaten Tana Tidung, isu strategis terkait dengan akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosial budaya menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan berbasis agribisnis

Isu strategis terkait transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis agribisnis menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan kehutanan, namun masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan potensi pertanian yang ada. Salah satu

isu utama adalah rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian lokal di pasar regional dan nasional.

e. Peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif

Isu strategis terkait peningkatan pemberdayaan desa yang mandiri dan produktif di Kabupaten Tana Tidung melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, aksesibilitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan konektivitas dan akses terhadap pasar. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan teknologi di desa dapat menghambat kemajuan ekonomi lokal.

f. Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas

Terkait percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas di Kabupaten Tana Tidung memerlukan perhatian yang serius. Pentingnya infrastruktur dasar yang meliputi jaringan jalan yang baik, listrik yang stabil, air bersih, dan sanitasi yang memadai menjadi fokus utama, karena ketidaksempurnaan dalam hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi.

g. Pemerataan digitalisasi pelayanan publik

Pemerataan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung adalah sebuah tantangan penting yang membutuhkan perhatian serius. Dalam era dimana teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, kesenjangan digital antar wilayah dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang efisien dan berkualitas.

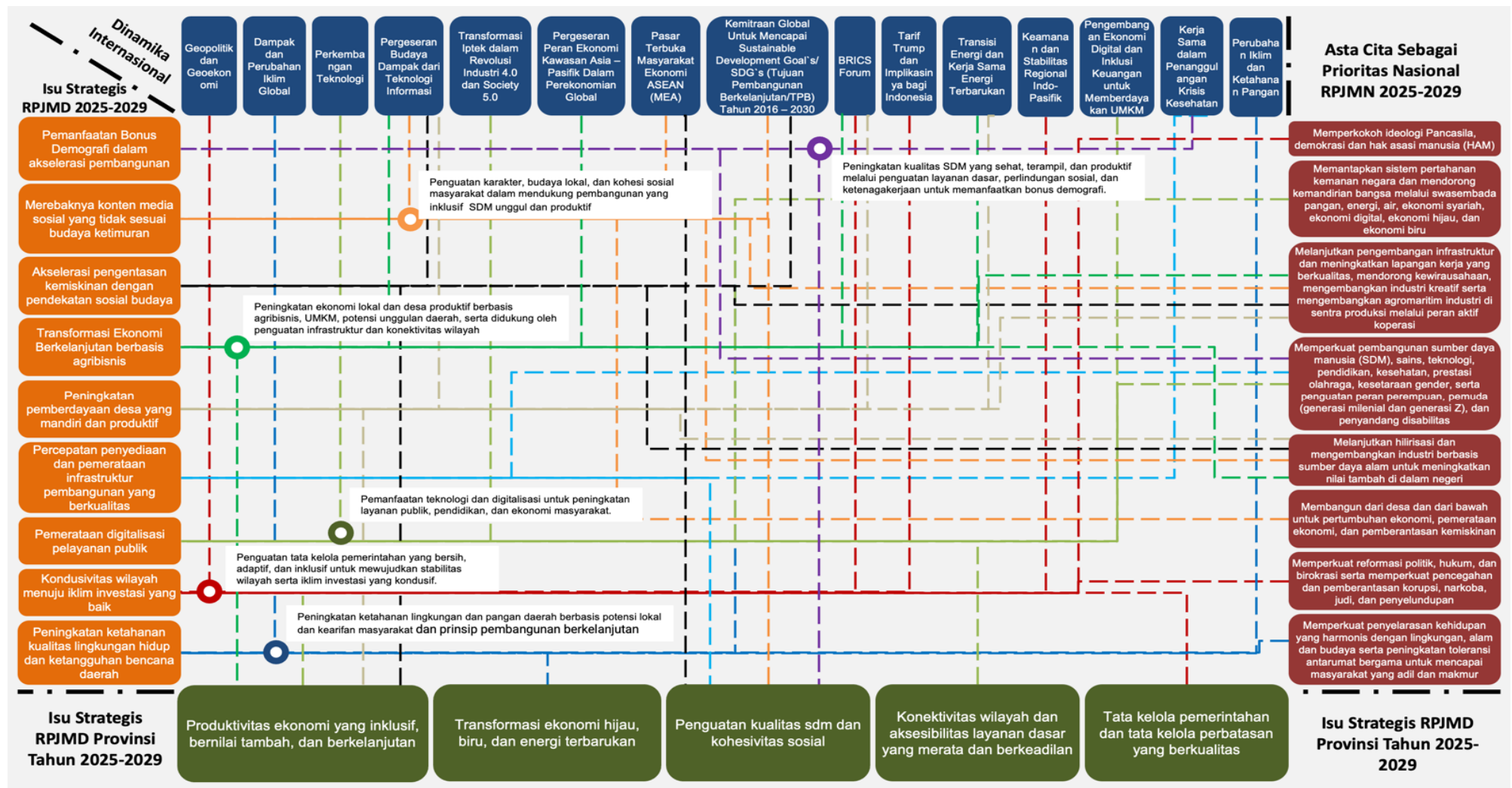
h. Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik

Kondusivitas wilayah menuju iklim investasi yang baik di Kabupaten Tana Tidung adalah sebuah perihal yang sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondusivitas wilayah merujuk pada berbagai faktor yang memengaruhi daya tarik dan kemudahan berinvestasi di suatu daerah.

i. Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana daerah

Peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana di Kabupaten Tana Tidung adalah hal yang memerlukan perhatian serius dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Dengan memahami dan merespons dinamika ini secara strategis, Kabupaten Tana Tidung dapat memposisikan diri sebagai wilayah yang siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pemahaman dan adaptasi terhadap dinamika ini akan menjadi kunci bagi Kabupaten Tana Tidung untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan pada tahun 2026. Berdasarkan isu strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung dan dinamika diatas, dirumuskan isu strategis pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Perumusan Isu Strategis RKPD Tahun 2027

Proses perumusan isu strategis Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, mulai dari isu internasional terkait tren global seperti digitalisasi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim, hingga Asta Cita RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 sebagai arah pembangunan jangka menengah daerah. Telaah ini juga diselaraskan dengan isu strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan konsistensi kebijakan antarwilayah, serta isu-isu utama dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029 yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan lokal. Berdasarkan keseluruhan proses analisis tersebut, dirumuskan enam isu strategis yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027, sebagai berikut:

a. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan inklusif berbasis digitalisasi untuk mewujudkan stabilitas wilayah serta iklim investasi yang kondusif

Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi landasan penting dalam mendorong efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kapasitas kelembagaan, optimalisasi kinerja aparatur, serta belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis digital secara menyeluruh. Kondisi geografis wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas juga memerlukan pendekatan pelayanan publik yang inovatif dan adaptif. Implementasi digitalisasi pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, penguatan tata kelola yang baik juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta kepercayaan investor. Dengan demikian, stabilitas wilayah dan iklim investasi yang kondusif dapat terus terjaga dan ditingkatkan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Peningkatan ketahanan lingkungan dan pangan daerah berbasis potensi lokal, kearifan masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan

Ketahanan lingkungan dan pangan merupakan isu strategis yang sangat relevan dengan karakteristik Kabupaten Tana Tidung yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dan menjadi tumpuan kehidupan

masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, potensi degradasi lingkungan, serta kerentanan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Di sisi lain, ketahanan pangan daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan produksi, diversifikasi pangan lokal, serta penguatan distribusi dan aksesibilitas pangan di seluruh wilayah. Pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu mengedepankan prinsip keberlanjutan agar mampu menjaga daya dukung lingkungan sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

c. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk peningkatan layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat

Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Di Kabupaten Tana Tidung, tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, belum meratanya akses internet, serta masih terbatasnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur. Penguatan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama melalui penguatan UMKM, pemasaran produk lokal secara daring, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi enabler dalam mendorong transformasi ekonomi dan pelayanan di daerah.

d. Penguatan karakter, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan SDM yang unggul dan produktif

Penguatan karakter masyarakat dan pelestarian budaya lokal merupakan aspek penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat fondasi sosial pembangunan. Kabupaten Tana Tidung memiliki

keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang menjadi modal sosial dalam membangun kebersamaan dan harmonisasi masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan arus globalisasi berpotensi mempengaruhi nilai-nilai tersebut, sehingga diperlukan upaya yang konsisten dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Selain itu, kohesi sosial yang kuat menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif, dimana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Penguatan karakter juga diarahkan untuk membentuk SDM yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, etos kerja, serta kepedulian sosial yang tinggi.

e. Peningkatan ekonomi lokal dan desa produktif berbasis agribisnis, UMKM, potensi unggulan daerah, serta didukung oleh penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Pengembangan ekonomi lokal dan desa produktif menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Sektor agribisnis, perikanan, dan UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya di wilayah perdesaan. Namun demikian, pengembangan sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, teknologi, serta pasar. Selain itu, infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan hilirisasi produk, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah. Dengan demikian, potensi unggulan daerah dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

f. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, terampil, dan produktif melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang bonus demografi di Kabupaten Tana Tidung. Meskipun indikator pembangunan manusia menunjukkan tren yang positif, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan,

terutama di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja juga masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi keterampilan maupun daya saing. Penguatan perlindungan sosial juga menjadi penting untuk menjaga ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan SDM perlu dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kualitas layanan dasar, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5 Pokok Pikiran DPRD

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027, diperlukan perhatian terhadap aspek politis serta penerapan pendekatan *bottom-up* yang partisipatif melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Mengacu pada ketentuan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD memiliki peran dalam memberikan saran dan pertimbangan yang dihimpun dari hasil reses serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi salah satu acuan penting dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk dalam penentuan lokasi serta kelompok sasaran, yang harus selaras dengan arah dan tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Selain itu, seluruh usulan yang bersumber dari pokok pikiran DPRD diintegrasikan dalam sistem perencanaan daerah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penyampaian pokok pikiran dilakukan baik melalui sistem tersebut maupun secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan program dan kegiatan yang dihasilkan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta terintegrasi dengan rencana kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Adapun rincian usulan program dan kegiatan yang bersumber dari pokok pikiran DPRD dalam RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Daftar Usulan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
1	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Belum tersedianya sistem drainase yang memadai di RT 06, khususnya di belakang perumahan inhutani, menyebabkan genangan air saat hujan. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi warga sekitar. dengan adanya pembangunan drainase diharapkan dapat memperlancar aliran air dan kualitas lingkungan semakin baik	Jl. Gereja Rt. 06 Belakang Perumahan eks Inhutani Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	meter
2	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan lingkungan pada Gang Anggrek Kebun Sayur di RT 4 Desa Tideng Pale saat ini mengalami penurunan kualitas akibat kerusakan pada lapisan permukaan jalan semenisasi. Dengan lebar ±2 meter dan panjang ±200 meter, jalan ini merupakan akses penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Kerusakan yang terjadi menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata, licin, dan sulit dilalui, terutama pada saat musim hujan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Gg. Anggrek Kebun Sayur Rt. 4 Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	400	M2
3	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Pada segmen jalan dengan panjang ±100 meter dan lebar ±2,5 meter diperlukan kegiatan rehab lanjutan semenisasi guna meningkatkan kualitas akses jalan dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat. Belum dilaksanakannya rehabilitasi lanjutan secara menyeluruh menyebabkan fungsi jalan lingkungan belum optimal, sehingga Kondisi jalan lingkungan pada Gang Graha RT 3 Desa Tideng Pale saat ini belum sepenuhnya memadai, karena	Gg. Graha Rt. 3 Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	250	M2

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		semenisasi yang ada belum terselesaikan secara menyeluruh.				
4	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan lingkungan di belakang Masjid Buang Baru saat ini masih berupa jalan tanah dan belum memiliki lapisan perkerasan yang memadai. Dengan lebar ±2 meter dan panjang ±100 meter, jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat sekitar untuk menunjang aktivitas ibadah dan kegiatan sehari-hari. Pada saat musim hujan, kondisi jalan menjadi becek dan licin, sehingga menyulitkan mobilitas warga serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Desa Buong Baru Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200	M2
5	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Gang Bali yang rusak menyebabkan aktivitas warga setempat terganggu, terutama dalam mobilitas sehari-hari seperti pergi bekerja, sekolah, dan kegiatan sosial. Kondisi gang juga berlubang dan tidak rata menimbulkan risiko keselamatan bagi warga, khususnya anak-anak dan lansia.	Jl. Gunung Harapan RT. 03 Desa Sesayap Gang Bali, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	300	Meter
6	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Jalan Beluan menuju permukiman warga belum ditimbun dan dipadatkan menyulitkan akses warga, terutama saat musim hujan karena menjadi becek dan licin. Akses jalan yang belum layak menghambat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum bagi warga permukiman. Saat hujan turun, jalan menuju permukiman sering tergenang dan berlumpur, sehingga lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak sehat.	Jl. Beluan RT. 01 Desa Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	300	Meter
7	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan Dumai yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga terganggu, baik pejalan kaki maupun kendaraan. Jika belum dilakukan	Jl. Agis Pulak RT.05 Desa Sesayap Gang Dumai, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200	Meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		pengerasan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan, khususnya anak-anak dan lansia. Akses jalan yang belum layak menghambat kegiatan ekonomi dan pelayanan umum bagi warga permukiman.				
8	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Kondisi sungai yang melintasi permukiman warga saat ini mengalami penurunan fungsi akibat pendangkalan, penumpukan sampah rumah tangga, dan limbah domestik. Hal tersebut menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga sering terjadi genangan dan banjir saat musim hujan. Selain itu, sungai yang tercemar menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber penyakit, serta menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Jl. Tani Agis Pulak RT. 05 Desa Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4	Meter
9	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Kondisi paret atau saluran drainase di lingkungan permukiman saat ini mengalami penyumbatan akibat endapan lumpur dan tumpukan sampah. Akibatnya, aliran air tidak berjalan lancar sehingga pada saat hujan turun sering terjadi banjir dan genangan air di sekitar rumah warga. Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi menjadi sumber penyakit dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan berupa pembersihan dan perbaikan saluran dra	Jl. Agis Pulak RT. 05 Desa Sesayap , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter
10	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Akses masyarakat menjadi sulit karena tidak tersedianya jembatan penghubung yang baik, sehingga warga harus menyeberang behati-hati. Kondisi ini sangat berisiko, terutama saat musim hujan ketika debit air meningkat. Selain menghambat aktivitas sehari-hari,	Jl. Umar Ali Basa RT.3 Desa Sepala Dalung, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		ketiadaan jembatan juga menyulitkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.				
11	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi pertanian pada Daerah Irigasi	Jalan lingkungan permukiman warga RT. 05 Desa Sepala Dalung tidak dilengkapi plat decker pada saluran drainase, sehingga saluran air dibiarkan terbuka. Kondisi ini jika hujan terjadi luapan air ke jalan, menimbulkan bau tidak sedap, memicu penumpukan sampah, serta mengganggu kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Selain itu, saluran terbuka juga menghambat akses jalan dan aktivitas warga sehari-hari.	Jl. Tani Desa Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	500	Meter
12	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi dermaga tambatan perahu tambangan saat ini mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan pada struktur utama, lantai dermaga, serta fasilitas penunjang lainnya. Kerusakan tersebut menyebabkan dermaga tidak lagi layak digunakan secara optimal, sehingga menghambat aktivitas transportasi sungai dan penyeberangan masyarakat. Selain itu, kondisi dermaga yang rusak juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jasa perahu tambangan, baik penumpang maupun operator.	Rt. 5 Desa Tideng Pale , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter
13	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh	kondisi Jembatan Gang Serumpun di Desa Tideng Pale RT 6 saat ini mengalami penurunan kualitas dan fungsi akibat kerusakan pada struktur jembatan, lantai jembatan, serta elemen pengaman. Dengan panjang ±120 meter dan lebar ±1,5 meter, jembatan ini merupakan akses utama masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kerusakan yang terjadi mengakibatkan jembatan tidak lagi nyaman dan aman digunakan,	Gg. Serumpun Rt. 6 Desa Tideng Pale , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	180	M2

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		terutama bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua.				
14	Belum memadainya Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan, Dermaga Sungai dan Danau	Akses menuju Makam Jabot di Desa Buong Baru saat ini belum didukung oleh sarana dermaga yang memadai, padahal akses utama masyarakat menuju lokasi tersebut melalui jalur sungai. Kondisi ini menyulitkan masyarakat saat melakukan kegiatan ziarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama pada saat kondisi air pasang maupun surut. Ketiadaan dermaga menyebabkan proses naik turun penumpang dan barang tidak aman serta berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan.	Desa Buong Baru Kecamatan Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	Kegiatan
15	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan masuk menuju Makam Jabot saat ini masih belum memadai karena belum memiliki lapisan perkerasan yang baik. Dengan lebar ±2 meter dan panjang ±60 meter dari pinggir sungai, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk keperluan ziarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada saat kondisi cuaca hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui, sehingga menyulitkan akses masyarakat serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Desa Buong Baru Kecamatan Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	120	M2
16	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Sistem drainase yang ada belum berfungsi secara optimal sehingga sering terjadi genangan air saat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tidak tersedianya saluran drainase yang memadai di beberapa titik menyebabkan air hujan mengalir bebas dan merusak infrastruktur sekitar dan kesehatan lingkungan masyarakat terganggu	RT. 4 Desa Bebatu, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	105	Meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
17	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Apabila musim hujan akses jalan terputus karena aliran air tidak tertata dengan baik. Kerusakan jalan semakin parah, akibat tidak adanya konstruksi penahan dan penutup saluran air. Menghambat pelayanan darurat, seperti kendaraan kesehatan dan keamanan yang sulit melintas.	RT.1 Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	Meter
18	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Drainase yang dibangun tidak tuntas dan tanpa penyelesaian akhir berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur kawasan. pada saat hujan terjadi banjir dan luapan air ke jalan mengakibatkan aktifitas sekolah terganggu dan lingkungan tidak bersih dan sehat.	RT. 3 Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	110	Meter
19	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Halaman masjid dengan luas $\pm 30 \times 30$ meter merupakan area utama yang digunakan oleh jamaah dan masyarakat sekitar untuk aktivitas keagamaan, sosial, serta kegiatan keagamaan lainnya. Kondisi halaman yang belum disemenisasi berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan sekitar masjid dan mengurangi fungsi sarana prasarana pendukung kegiatan ibadah. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi halaman Masjid Fastabikulkhairat melalui pekerjaan semenisasi agar tercipta lingkungan masjid yang nyaman	Rt. 1 Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	300	M2
20	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Sistem drainase di kawasan pelabuhan belum mampu mengalirkan limpasan air hujan secara optimal sehingga sering terjadi genangan yang mengganggu aktivitas bongkar muat bahkan sedimentasi dan penumpukan sampah pada saluran drainase menghambat aliran air.	RT.4 Desa Bebatu, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	105	Meter
21	Belum Optimalnya Pembangunan Sarana,	Semenisasi jalan SMP Desa Teng kudacing retak, pecah, dan permukaan yang mengelupas akibat	Jln SMP Desa Tengku Dacing, Kab. Tana Tidung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200	Meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	kualitas pekerjaan yang kurang baik sehingga menyulitkan warga menggunakan jalan dalam beraktifitas.				
22	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Permasalahan drainase di Jalan RT 2 Desa Sambungan Selatan ditandai dengan tidak tersedianya saluran pembuangan air yang memadai sehingga saat terjadi hujan deras sering timbul genangan di badan jalan dan halaman rumah warga, kondisi ini diperparah oleh sedimentasi dan sampah yang menyumbat aliran air sehingga memperlambat proses pengeringan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi menyebabkan kerusakan jalan dan menurunkan kualitas lingkungan sekitar.	Jl. Lapangan Bola RT. 2 Desa Sambungan Selatan, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	90	Meter
23	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Sering terjadi genangan air saat musim hujan akibat saluran air tidak berfungsi dengan baik di RT. 1 Desa Bandan Bikis. Apabila tidak ditangani secepatnya jalan rusak, licin dan sangat mengganggu aktifitas warga bahkan kesehatan warga terganggu dengan ada genangan air yang bisa tempat pembibitan nyamuk.	RT. 1 Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8	Meter
24	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan depan SD 020 sampai jalan kuburan sangat licin dan becek saat hujan, jalan yang berbukit sangat rawan kecelakaan bagi pengguna kendaraan bermotor yang melintas dan dapat mengancam keselamatan anak2 sekolah. Dengan adanya pengaspalan jalan dapat mempermudah dan memperlanacar akses jalan bagi pelajar dan pengguna jalan lainnya.	Desa Kujau, Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
25	Belum Optimlanya Penyediaan Perlengkapan Jalan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana	Kondisi jalan gelap tidak ada penerangan jalan membahayakan warga yang melintas dan rawan tindak kejahatan, dengan adanya penerangan jalan dapat meminimalisir kecelakaan	Rt. 5, jalan masuk Rt. 1, dan sepanjang jalan masuk kujau dalam. Desa Kujau, Kec.	Dinas Perhubungan	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	dan Prasarana Perlengkapan Jalan	dan hal-hal lainnya yang dapat membahayakan pengguna jalan.	Betayau, Kab. Tana Tidung			
26	Belum Optimalnya sebaran pupuk, pestisida dan Sarana pendukung pertanian dalam kawasan Kab. Tana Tidung	masyarakat sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, harga pupuk yang relatif mahal menyebabkan petani kesulitan untuk memperoleh pupuk yang cukup guna menunjang pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya hasil produksi pertanian serta berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yg bergantung pada sektor pertanian. dengan adanya bantuan pupuk diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pupuk dan meningkatkan hasil pertanian warga	Desa Kujau, Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1	kegiatan
27	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Kondisi belakang bangunan masjid Miftahul Jannah berada di tepi tebing/lereng dan dikhawatirkan akan terjadi longsor yang dapat merusak struktur bangunan masjid, Oleh karena itu diperlukan pembangunan bronjong sebagai penahan tanah guna mencegah terjadinya longsor, memperkuat struktur tanah, serta menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah.	Jl. Trans Kaltimara KM 8 Rt. 7 Desa Tideng Pale. Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
28	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	belum terdapat balai adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung, sehingga fasilitas untuk kegiatan adat skala kabupaten belum representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adat secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan melalui pembangunan Balai Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung dapat menjadi pusat kegiatan adat dan budaya Dayak Bulusu, menjadi tempat musyawarah lembaga	Desa Seludau kec sesayap hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		adat, serta mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak Bulusu di Kabupaten Tana Tidung				
29	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	belum dibangun balai adat dayak lundayeh sehingga fasilitas untuk kegiatan adat belum representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adat secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan melalui pembangunan Balai Adat Dayak Bulusu Kabupaten Tana Tidung dapat menjadi pusat kegiatan adat dan budaya Dayak Lundayeh, menjadi tempat musyawarah lembaga adat, serta mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak Lundayeh di desa Gunawan	desa gunawan kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
30	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Kondisi Jl. Beluan RT. 6 Desa Sesayap saat musim hujan sering tergenang dan meluap ke jalan akibat aliran air tidak lancar mengganggu aktifitas warga yang melintasi jalan, terutama anak-anak sekolah dan lingkungan warga tidak sehat.	Jl. Beluan RT. 6 Desa Sesayap , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	Meter
31	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur jaringan irigasi pertanian pada Daerah Irigasi	Akses jalan menuju lahan pertanian di wilayah jalan Usaha Tani Desa Sepala Dalung saat ini belum dapat dilewati dengan baik karena kondisi jalan yang rusak, sempit, dan berlumpur terutama pada saat musim hujan, sehingga menyulitkan para petani dalam melakukan aktivitas pertanian seperti membawa sarana produksi, mengolah lahan, serta mengangkut hasil panen, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani.	Jl. Usaha Tani Desa Sepala Dalung, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Km
32	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Kondisi Jalan Kuburan Gang Jengkol RT. 5 Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap saat ini mengalami	Jalan Kuburan Gang Jengkol RT. 5 Desa Tideng Pale Timur, kec.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	100	meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	guna menunjang fungsi permukiman	kerusakan dan belum memiliki permukaan jalan yang memadai. serta menjadi becek dan licin terutama pada saat musim hujan. Oleh karena itu, masyarakat mengusulkan perbaikan Jalan Kuburan Gang Jengkol RT. 5 Desa Tideng Pale Timur agar akses jalan menjadi lebih baik, aman, dan nyaman digunakan oleh masyarakat serta dapat mendukung kelancaran aktivitas warga di lingkungan tersebut.	sesayap, Kab. Tana Tidung	Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
33	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Jalan Kuburan Gang Jengkol RT. 5 Desa Tideng Pale Timur saat ini belum memiliki saluran drainase yang memadai. Pada saat musim hujan, sering terjadi genangan air di badan jalan maupun di sekitar pemukiman warga, menyebabkan jalan licin dan rawan kecelakaan. dgn dibangunnya drainase diharapkan memperlancar aliran air hujan, mengurangi genangan air, serta meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman masyarakat.	Jalan Kuburan Gang Jengkol RT. 5 Desa Tideng Pale Timur kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	meter
34	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	saluran drainase yang ada saat ini belum terbangun secara menyeluruh. Sebagian drainase telah dibangun, namun masih terdapat beberapa bagian yang belum tersambung sehingga aliran air hujan tidak dapat mengalir dengan lancar. Kondisi tersebut menyebabkan air hujan sering menggenangi badan jalan terutama pada saat curah hujan tinggi, menyebabkan jalan licin dan becek, dengan lanjutan drainase diharapkan aliran air dapat maksimal, tidak ada genangan air, serta adanya akses yang nyaman untuk warga	Gang Punai Rt. 005 Desa Tideng Pale Timur Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
35	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Kondisi Jalan Setia Budi RT. 4 Kebun Sayur yang tembus ke Jalan Perintis RT. 6 Gang Anggrek Desa Tideng Pale saat	Jalan Setia Budi RT. 4 Kebun Sayur tembus ke Jalan Perintis RT. 6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	guna menunjang fungsi permukiman	ini mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Permukaan jalan tidak rata dan berlubang sehingga pada saat musim hujan jalan menjadi licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda 2, dengan adanya rehab total semenisasi diharapkan akses pengguna jalan aman dan nyaman. (Lebar 2 mtr panjang 200 mtr)	Gang Anggrek Desa Tideng Pale kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
36	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jembatan material kayu yang ada sudah mulai lapuk dan tidak lagi dalam kondisi yang baik sehingga mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, jembatan tersebut merupakan akses penting yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Masyarakat mengusulkan rehabilitasi jembatan agar jembatan menjadi lebih kuat, aman, dan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama (Panjang 120 meter Lebar 1,5 meter)	Gang Majelis RT. 6 desa tideng pale kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
37	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jembatan material kayu yang ada sudah mulai lapuk dan tidak lagi dalam kondisi yang baik sehingga mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar, jembatan tersebut merupakan akses penting yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Masyarakat mengusulkan rehabilitasi jembatan agar jembatan menjadi lebih kuat, aman, dan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama (Panjang 120 meter Lebar 1,5 meter)	Gang serumpun Rt. 6 desa tideng pale kec sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
38	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	belum adanya pembangunan pagar makam kristen, dengan adanya pagar makam diharapkan dapat menjaga keamanan lingkungan sekitar makam dari binatang liar dan hal lainnya.	Rt. 04 desa sebidai kec sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
39	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi Jalan Kuburan Desa Sebidai yang tembus ke KM 3 Kecamatan Sesayap saat ini tdaik memadai, jalan menjadi becek, licin dan sulit dilalui terutama pada saat musim hujan. dengan adanya peningkatan jalan diharapkan kondisi jalan menjadi lebih baik, aman, dan nyaman dilalui oleh masyarakat serta dapat mendukung kelancaran aktivitas dan perekonomian masyarakat sekitar (panjang 2300 meter)	desa sebidai tembus km.3, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
40	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Saat ini Desa Gunawan belum memiliki gedung BPU yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan desa. Kegiatan seperti musyawarah desa, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelatihan, kegiatan kepemudaan masih dilaksanakan di tempat yang terbatas dan kurang memadai. dengan adanya gedung BPU yang baru diharapkan dapat menyediakan sarana pertemuan yang representatif, mendukung kegiatan pemerintahan desa, serta meningkatkan aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat	desa gunawan kec sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
41	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	jaringan Telkom yang sangat lemah dan tidak stabil, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses internet maupun melakukan komunikasi dengan lancar, terutama ketika digunakan untuk kegiatan penting seperti belajar online, pekerjaan, mencari informasi, maupun berkomunikasi dengan	Desa Menjelutung, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Tower

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		keluarga yang berada di luar daerah, karena sinyal yang sering hilang, koneksi yang sangat lambat, serta terkadang tidak bisa digunakan sama sekali, sehingga kondisi ini sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat				
42	Belum Optimalnya Ketersediaanya sistem pengelolaan air minum jaringan perpipaan	Di Desa Menjelutung hingga saat ini masih belum tersedia jaringan air bersih yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, sehingga sebagian besar warga harus mengambil air dari sumber alami seperti sungai, sumur, atau tempat penampungan air hujan yang kualitas dan ketersediaannya sering tidak menentu, terutama pada musim kemarau ketika sumber air mulai berkurang, kondisi ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti memasak, mandi, mencuci, serta	Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Paket
43	Belum Optimlanya Penyediaan Perlengkapan Jalan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	RT. 1 sampai dengan RT. 4 Kebun Sayur Desa Tideng Pale, saat ini masih terdapat beberapa ruas jalan lingkungan yang belum memiliki penerangan jalan yang memadai. Minimnya penerangan jalan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan, terutama bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki. Dengan adanya penerangan jalan diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan serta diharapkan dapat mengantisipasi tindak kejahatan di daerah tersebut	Kebun sayur RT. 1 - RT. 4 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	kegiatan
44	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Jalan Gang Gambut saat ini belum memiliki siring sehingga menyebabkan aliran air tidak tertata dengan baik,	Gang Gambut desa tideng pale timur, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	guna menunjang fungsi permukiman	pada saat musim hujan, air sering meluap dan menggenangi badan jalan serta pekarangan rumah warga, menyebabkan jalan licin dan becek, berbahaya bagi pengguna jalan, dengan adanya penyirangan jalan diharapkan akses jalan menjadi lebih baik, aman dan nyaman bagi pengguna jalan		Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
45	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan lingkungan di Gang Gambut, Desa Tideng Pale Timur saat ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Permukaan telah retak, berlubang, dan sebagian mengalami penurunan sehingga membahayakan pengguna jalan. Pada saat musim hujan, genangan air sering terjadi di beberapa titik yang mempercepat kerusakan jalan dan licin. dengan adanya rehab total semenisasi gang gambut diharapkan akses warga lancar, aman dan nyaman.	Gang gambut desa tideng pale timur kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
46	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	saat ini bangunan Balai Adat Desa Sebawang belum memiliki ukiran atau ornamen khas budaya yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal masyarakat adat. Kondisi ini menyebabkan Balai Adat belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai budaya dan estetika tradisional yang seharusnya menjadi ciri khas bangunan adat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ukiran pada Gedung Balai Adat Desa Sebawang agar dapat memperkuat identitas budaya, nilai estetika, serta mendukung pelestarian budaya adat	desa sebawang kecamatan sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
47	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi Jalan Budi Daya Ikan RT. 03 Desa Sebawang yang menuju dermaga saat ini masih belum seluruhnya disemenisasi. Sebagian ruas jalan masih berupa tanah sehingga pada saat musim	Jalan Budi Daya Ikan RT. 03 Desa Sebawang Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		hujan menjadi licin, becek, dan sulit dilalui. Jalan ini merupakan akses penting bagi warga terutama untuk menuju dermaga. Oleh karena itu diperlukan lanjutan semenisasi jalan agar akses transportasi masyarakat lancar, aman dan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi warga (Panjang 130 mtr, Lebar 3 mtr)				
48	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Saat ini umat Katolik di Desa Seputuk belum memiliki bangunan gereja yang memadai dan representatif untuk melaksanakan kegiatan peribadatan serta kegiatan pembinaan umat. Fasilitas yang digunakan masih terbatas dan belum mampu menampung jumlah umat yang terus bertambah, Oleh karena itu, diperlukan pembangunan Gereja Katolik St. Yohanes Pembaptis di Desa Seputuk sebagai sarana peribadatan yang layak dan meningkatkan kenyamanan umat dalam beribadah (Ukuran gereja Lebar 8 meter dan panjang 16 meter)	desa seputuk kecamatan muruk rian, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
49	Belum Optimalnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Akses layanan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah di Desa Belayan Ari saat ini masih terbatas karena belum tersedianya fasilitas Sekolah Dasar (SD). Menyebabkan sebagian anak harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan pendidikan dasar, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kehadiran dan partisipasi sekolah. Dengan adanya pembangunan SD Filial di Desa Belayan Ari diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dan adanya pemerataan pendidikan dasar.	desa belaian ari kec. muruk rian, Kab. Tana Tidung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
50	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Musholla Nur Kairaat yang terletak di Gang Nuri desa Tideng Pale Timur merupakan salah satu sarana ibadah yang digunakan masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun hingga saat ini musholla tersebut belum memiliki fasilitas WC/toilet, dengan pembangunan WC Musholla Nur Kairaat diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan tempat ibadah serta mendukung kelancaran kegiatan keagamaan warga.	Gang nuri desa tideng pale timur kec sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
51	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Musholla Nur Kairaat yang terletak di Gang Nuri Desa Tideng Pale Timur merupakan salah satu tempat ibadah yang aktif digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun, belum memiliki fasilitas tempat wudu. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan tempat wudu yang layak dan memadai di Musholla Nur Kairaat Gang Nuri Desa Tideng Pale Timur guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam beribadah	Gang Nuri desa Tideng pale Timur kec. sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan
52	Belum memadainya Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan, Dermaga Sungai dan Danau	Pelabuhan desa Sesayap merupakan sarana transportasi air yang sangat penting bagi aktivitas masyarakat, baik untuk mobilitas orang maupun distribusi barang dan hasil usaha masyarakat. Namun, kondisi pelabuhan saat ini sangat tidak memadai dan memprihatinkan, diharapkan dengan adanya Rehab Total Dermaga Sesayap Hilir dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang dan aktifitas	Jalan Aji Putra RT. 4 desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		bongkar muat barang dapat berjalan lancar.				
53	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi Gang Keluarga Sudjana saat ini masih berupa jalan tanah yang belum disemenisasi sehingga pada saat musim hujan menjadi becek dan licin, serta pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi tersebut menyulitkan akses mobilitas warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.	Desa Sebidai, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	400	M2
54	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan dari wilayah Kilo 3 menuju Gereja di Desa Tideng Pale saat ini masih berupa jalan tanah dan belum memiliki lapisan agregat yang memadai. Pada saat musim hujan jalan menjadi berlumpur, licin, dan sulit dilalui oleh kendaraan maupun masyarakat yang hendak beraktivitas, termasuk masyarakat yang menuju tempat ibadah.	Desa Tideng Pale, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
55	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Area pemakaman Nasrani di Desa Sebidai hingga saat ini belum memiliki pagar pembatas yang memadai, sehingga batas area pemakaman tidak jelas dan rawan dimasuki oleh hewan maupun pihak yang tidak berkepentingan. Kondisi ini dapat mengganggu ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat yang berziarah.	Desa Sebidai, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
56	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Jalan TMD RT 01 Desa Tideng Pale merupakan salah satu akses penting bagi aktivitas transportasi warga. Kerusakan jalan juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. dengan adanya perbaikan jalan diharapkan dapat	Jalan TMD Rt 1 desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar akses transportasi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.				
57	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan masuk kantor desa Maning saat ini belum memadai, dengan permukaan jalan yang rusak, tidak rata, dan belum beraspal sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat musim hujan.	Desa Maning Kecamatan Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
58	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Belum optimalnya infrastruktur jalan masuk Desa Periuk yang layak dan mantap menyebabkan terganggunya aksesibilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pelayanan dasar, sehingga diperlukan peningkatan melalui semenisasi atau pengaspalan.	Desa Periuk Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
59	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Umat Katolik di Desa Bebakung hingga saat ini belum memiliki sarana tempat ibadah yang memadai, sehingga kegiatan peribadatan masih dilakukan secara terbatas dan kurang optimal. Kondisi ini menyulitkan umat dalam melaksanakan ibadah secara rutin, tertib, dan nyaman. Oleh karena itu diperlukan pembangunan Gereja Katolik di Desa Bebakung sebagai sarana ibadah yang layak guna mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan umat dalam beribadah.	Desa Bebakung Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
60	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Belum optimalnya kondisi jalan masuk menuju masjid di Desa Kujau menyebabkan terganggunya kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat dalam beribadah, sehingga diperlukan peningkatan melalui pengaspalan jalan.	Desa Kujau Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
61	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Belum optimalnya kondisi Jalan samping Rumah Adat Desa Bebakung menyebabkan terganggunya aksesibilitas masyarakat dan aktivitas di sekitar kawasan tersebut, sehingga diperlukan peningkatan melalui pengerasan atau pengaspalan jalan.	Desa Bebakung Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
62	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi gang masyarakat di Desa Bebakung belum memadai karena masih berupa tanah dan/atau rusak, sehingga menyulitkan aktivitas warga terutama saat musim hujan.	Desa Bebakung Kec. Tana Lia, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
63	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Belum optimalnya kondisi jalan antar Desa Bebakung dan Mendupo yang layak menyebabkan terganggunya konektivitas antar wilayah, aktivitas ekonomi masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar, sehingga diperlukan peningkatan melalui pengerasan jalan.	desa bebakung-mendupo Kecamatan Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
64	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Kondisi di Desa Bebakung belum didukung oleh saluran drainase yang memadai, sehingga pada saat hujan terjadi genangan air di jalan dan lingkungan permukiman. Hal ini diperparah oleh tidak lancarnya aliran air yang menyebabkan lingkungan menjadi becek dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.	Desa Bebakung Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
65	Masih rendahnya aksesibilitas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten	Belum optimalnya ketersediaan plat deker di Desa Bebakung menyebabkan terganggunya konektivitas jalan lingkungan, aktivitas masyarakat, serta akses terhadap layanan dasar, sehingga diperlukan pembangunan plat deker pada titik-titik yang membutuhkan.	Desa Bebakung Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan
66	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Drainase RT. 3 Desa Bandan Bikis belum berfungsi dengan baik karena belum ada lanjutan pembangunan	RT. 3 Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	110	Meter

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
67	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Fungsi Drainase Permukiman yang ada di Gang SMP Desa Bandan Bikis belum berfungsi secara optimal karena belum ada lanjutan pembangunan drainasenya/atau terputus sehingga aliran air tidak lancar dan saat musim hujan terjadi genangan dan meluap ke jalan akibatnya aktifitasnya nak sekolah, warga beraktifitas terganggu bahkan kesehatan.	Gang SMP Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter
68	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Aliran air pembuangan air jalan mushola belum dibuat beton (seadanya) akibatnya saat banjir tanah terkikis dan aliran air tidak lancar dan meluap ke jalan, sehingga jalan licin dan rusak yang dapat mengganggu aktifitas warga dan merusak sistem drainase yang sudah ada.	Jl. Mushola Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	Meter
69	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Drainase yang sudah dibangun di lingkungan Permukiman Gang SMP Desa Bandan Bikis belum berfungsi dengan baik karena belum selesai dan arah pembuangan air paret sumbat sehingga mengganggu aktifitas, dan kesehatan warga. Bila hujan air tergenang dan meluap ke jalan dan sampah, kotoran terbawa ke jalan.	Gang SMP Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter
70	Belum Optimalnya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Drainase belum berfungsi secara optimal karena sumbatnya dan sempitnya aliran air yang mengalir, sehingga merusak badan jalan dan tanah terkikis. Bila hujan air meluap ke lingkungan warga sehingga tidak sehat.	Jl. Mushola Desa Bandan Bikis, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	6	Meter
71	Sungai mengalami pendangkalan, penyempitan, dan pencemaran yang menyebabkan penurunan kapasitas air	Sungai di Desa Sebidai mengalami sedimentasi, penyempitan, dan ditumbuhi vegetasi liar sehingga aliran air tidak lancar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya genangan bahkan banjir saat curah hujan tinggi	Desa Sebidai, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
	serta meningkatkan resiko banjir	serta berpotensi merusak lingkungan dan permukiman warga.				
72	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Akses Jalan Sepukung belum berfungsi dengan baik, sulit dilalui karena belum agregat, saat musim hujan jalan licin, saat musim kemarau berdebu akibat aktifitas masyarakat terganggu dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.	Jl. Sepukung Desa Sesayap, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Km
73	Belum Optimalnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Sesayap sulit mencari ambulance saat antar pasien yang sakit dari puskesmas ke pelabuhan karena terbatasnya transportasi berupa ambulance, sehingga masyarakat harus menyewa mobil seadanya demi kelancaran transportasi.	Desa Ssayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Kesehatan	1	Unit
74	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sistem drainase	Drainase RT.1 Desa Sesayap Induk masih belum berfungsi dengan baik karena aliran air tidak berjalan dengan baik dan tersumbat, saat musim hujan air meluap ke bahu jalan dan mengganggu aktifitas masyarakat bahkan kesehatan masyarakat.	RT. 1 Desa Sesayap Induk, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100	Meter
75	Belum memadainya Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan, Dermaga Sungai dan Danau	Pelabuhan Speed Sesayap tidak nyaman digunakan oleh penumpang karena tidak layak digunakan, infraskstruktur yang terbuat dari kayu sudah rusak dan dapat membahayakan penumpang.	Desa Seaayap Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	Unit
76	Belum Optimalnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD	Kelengkapan sarana mengajar di PAUD belum memadai, perlu dukungan APE Luar dan APE dalam agar dapat meningkatkan mutu / kualitas sekolah.	Sekolah PAUD Desa Sesayap , Kab. Tana Tidung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Paket
77	Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya akibat keterbatasan teknologi, kurangnya pendampingan dan sarana prasarana yang belum memadai	Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap seadanya dengan teknologi yang terbatas, sehingga produktivitas hasil tangkapan rendah dan berdampak langsung pada menurunnya tingkat penghasilan masyarakat nelayan.	Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1	Paket

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
78	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap akibat keterbatasan teknologi, kurangnya pendampingan dan sarana prasarana yang belum memadai	Kelompok nelayan di Desa Bebatu Supa saat ini masih menghadapi keterbatasan sarana penunjang kegiatan penangkapan ikan, khususnya belum tersedianya mesin ketinting yang memadai. Kondisi ini menyebabkan jangkauan penangkapan menjadi terbatas, waktu tempuh melaut lebih lama, serta hasil tangkapan belum optimal. Hal tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan nelayan.	Desa Bebatu Supa Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	10	Unit
79	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur guna menunjang fungsi permukiman	Kondisi jalan di RT. 1 Desa Bebatu Supa saat ini masih belum disemenisasi dan sebagian masih berupa tanah, sehingga pada saat musim hujan menjadi becek, licin, dan sulit dilalui oleh kendaraan maupun masyarakat. Sementara pada musim kemarau jalan menjadi berdebu dan mengganggu kenyamanan. Kondisi ini menghambat mobilitas serta aktivitas sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan semenisasi jalan guna meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.	Desa Bebatu Supa, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	400	M2
80	Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Jalan / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Kondisi penerangan jalan di RT. 1 dan RT. 2 saat ini masih sangat terbatas dan belum memadai, sehingga pada malam hari ruas jalan menjadi gelap dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta meningkatkan risiko gangguan keamanan. Minimnya penerangan juga menghambat aktivitas masyarakat pada malam hari (5 titik)	Desa Bebatu Supa, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	Kegiatan
81	Belum optimalnya penguatan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik	Jemaat GKII di Desa Bebakung hingga saat ini belum memiliki sarana tempat ibadah yang memadai, sehingga kegiatan peribadatan masih dilaksanakan secara terbatas dan	Desa Bebakung Kec. Betayau, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Kegiatan

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	VOLUME	SATUAN
		kurang optimal. Kondisi ini menyulitkan jemaat dalam menjalankan ibadah secara rutin, tertib, dan nyaman. Oleh karena itu diperlukan pembangunan Gereja GKII di Desa Bebakung sebagai sarana ibadah yang layak guna mendukung kegiatan keagamaan serta meningkatkan kenyamanan dan kekhusyukan jemaat dalam beribadah.				
82	Belum memadainya Pembangunan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan, Dermaga Sungai dan Danau	Pelabuhan Dermaga Kecamatan Tana Lia tidak layak pakai, kondisi bangunan tidak rusak dan sangat berbahaya bagi peguna atau arus masuk keluar barang, perlu pembangunan kontruksi beton permanen agar representatif.	Desa Tana Lia Induk, Kab. Tana Tidung	Dinas Perhubungan	1	Paket
83	Belum Optimlanya Ketersedianya sistem pengelolaan sanitasi	Kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan sering terjadinya genangan air saat hujan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat.	Trans Tahap 1 dan Tahap 2, Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200	Meter
84	Masih adanya Rumah Tidak layak Huni dan Belum optimalnya Sarana Pendukung Pada Kawasan Tersebut	Masih ada masyarakat Tana Lia belum memiliki rumah yang layak huni dan dalam 1 rumah tangga masih ada 2 rumah tangga yang bergabung, jika dibiarkan sangat berdampak pada meningkatnya kemiskinan ektrim.	Desa Sambungan, Desa Tana Lia, Desa Tana Lia Barat dan Trans Sambungan , Kab. Tana Tidung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20	Rumah

2.6 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terus mendorong pengembangan inovasi daerah sebagai instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses kerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/2054/K-I/2025, telah ditetapkan 203 inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada berbagai urusan pemerintahan.

Secara umum, inovasi daerah tersebut mencakup berbagai bidang pelayanan, antara lain tata kelola pemerintahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, perikanan, peternakan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat, pariwisata, hingga pelayanan administrasi publik. Keberadaan inovasi tersebut menjadi salah satu modal daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut daftar inovasi pendukung pelayanan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/2054/K-I/2025.

Tabel 2. 47 Daftar Inovasi Daerah

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
1	ANGKUT DAMO (Jemput Sampah)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas pelayanan pengelolaan persampahan melalui sistem penjemputan sampah kepada masyarakat.
2	MISI SAYAP (Mitra Konservasi Sungai Sesayap)	Lingkungan Hidup	Mendorong pelestarian lingkungan melalui penguatan kemitraan masyarakat dalam konservasi Sungai Sesayap.
3	KASI SAYAP (Pekan Konservasi Sungai Sesayap)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup.
4	LAPSI (Layanan Pengaduan Persampahan)	Lingkungan Hidup	Mempermudah penyampaian pengaduan masyarakat terkait pelayanan persampahan secara cepat dan responsif.
5	BERANGKAR GALAH KOTOR (Rapat Koordinasi Gabungan dan Tahunan Lingkungan Persampahan)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan daerah.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
6	BIOPORI (Biopori Sapor)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan resapan air dan mengurangi potensi genangan melalui penerapan teknologi biopori.
7	PULIH (Pusat Layanan Lingkungan Hidup)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan konsultasi di bidang lingkungan hidup.
8	FOKJA KLH	Lingkungan Hidup	Memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan program lingkungan hidup.
9	SI LAPER (Sistem Informasi Layanan Persetujuan Lingkungan)	Lingkungan Hidup	Mempercepat dan meningkatkan transparansi pelayanan persetujuan lingkungan berbasis digital.
10	Forum Peduli Lingkungan Hidup Tana Tidung	Lingkungan Hidup	Mendorong kolaborasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11	SIHENG (Sistem Informasi Perlindungan Lingkungan Hidup)	Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi perlindungan lingkungan hidup.
12	SIHENG (Sistem Informasi Perlindungan Lingkungan Hidup Terpadu)	Lingkungan Hidup	Mengintegrasikan data dan informasi lingkungan hidup untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
13	JALIN LESTARI	Lingkungan Hidup	Memperkuat sinergi dalam pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
14	SINANJANG (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu)	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mempercepat proses pelayanan perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha.
15	SIP (Sistem Izin Praktis)	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menyederhanakan proses perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
16	Welcome in Air Madu	Pariwisata	Meningkatkan daya tarik destinasi wisata daerah melalui pengembangan potensi wisata lokal.
17	GERMADU (Gerakan Masyarakat Terpadu)	Kepemudaan dan Olahraga	Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan pembangunan sosial.
18	BIKRIEMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Kepemudaan dan Olahraga	Mendorong penerapan pola hidup sehat melalui kegiatan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
19	Pelanggaran Berhenti Melalui Perisai Cilik	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap perilaku tertib dan disiplin.
20	Persiapan Protokol Covid-19 Lestari Wisata	Pariwisata	Meningkatkan kesiapsiagaan destinasi wisata dalam penerapan standar kesehatan dan keamanan.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
21	Penerapan Protokol Covid-19 di Penginapan/Hotel C19	Pariwisata	Meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan sektor akomodasi melalui penerapan standar kesehatan.
22	NetX (New Experience Tourism)	Pariwisata	Mengembangkan inovasi promosi destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
23	DETIC (Tidung Smart Tourism)	Pariwisata	Mendukung digitalisasi promosi dan informasi pariwisata daerah.
24	VITA (Virtual Intelligence Tour Tana Tidung)	Pariwisata	Mempermudah akses informasi destinasi wisata melalui teknologi digital.
25	LATANU CAKAP (Layanan Cepat Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
26	Yandu Hi Ku (Pelayanan Terpadu di Hulu Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di wilayah terpencil.
27	CERIA (Cermat, Efisien, Humanis dalam Jemput Bola)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan jemput bola.
28	SILOKTER (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terintegrasi)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengintegrasikan pengelolaan data administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
29	EKIN-ASN (Aplikasi Penilaian Kinerja ASN)	Kepegawaian	Meningkatkan objektivitas penilaian kinerja aparatur sipil negara berbasis elektronik.
30	e-Presensi	Kepegawaian	Meningkatkan disiplin dan akuntabilitas aparatur melalui sistem presensi elektronik.
31	e-Penggajian	Kepegawaian	Meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengelolaan administrasi penggajian ASN secara digital.
32	Penguatan Pemahaman Pengisian e-Kinerja dan Penginputan Target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Kepegawaian	Meningkatkan pemahaman ASN dalam penyusunan dan pengukuran kinerja berbasis sistem elektronik.
33	SIDAK ASN	Kepegawaian	Memperkuat pengawasan dan pembinaan disiplin ASN untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
34	EKIN TPP	Kepegawaian	Mengintegrasikan penilaian kinerja ASN dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai secara objektif.
35	e-CUTI	Kepegawaian	Mempermudah pelayanan administrasi cuti ASN secara

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
			cepat, transparan, dan terdokumentasi.
36	New Normal Protokol Covid-19 (Transportasi Umum)	Perhubungan	Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi umum melalui penerapan protokol kesehatan.
37	PANGKARAN (Strategi Peningkatan Keselamatan di Transportasi Sungai)	Perhubungan	Meningkatkan keselamatan transportasi sungai melalui penguatan pengawasan dan edukasi kepada pengguna jasa transportasi.
38	SIMDALI	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan.
39	INOVA "BERSIH"	Perencanaan Pembangunan	Mendorong budaya kerja inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.
40	e-SIDAK TKT BERSIH	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program pembangunan secara elektronik.
41	e-Sekret (Electronic Sekretariat)	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan efektivitas administrasi perkantoran melalui digitalisasi tata kelola sekretariat.
42	Pengelolaan Administrasi Fisik dan Digitalisasi Dokumen Perencanaan	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan dokumen perencanaan melalui digitalisasi.
43	Penguatan Tata Kelola Pengendalian Data RKA-P melalui Dashboard Litbang	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemantauan pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis data.
44	Optimalisasi Penyusunan dan Pengarsipan Dokumen Perencanaan	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan akses dokumen perencanaan pembangunan daerah.
45	Optimalisasi Data Kepegawaian melalui Penggunaan Fingerprint dan Digitalisasi	Perencanaan Pembangunan	Mendukung pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan terdokumentasi secara digital.
46	Penguatan Dokumentasi Kegiatan melalui Media Digital dan Google Drive	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan keamanan, ketersediaan, dan kemudahan akses dokumentasi kegiatan pembangunan.
47	Optimalisasi Sistem Penghitungan Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan akurasi evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan daerah.
48	Peningkatan Pemahaman Tata Cara Penginputan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan akurat.
49	Laksanakan Ekin Perda	Perencanaan Pembangunan	Mendukung peningkatan akuntabilitas pelaksanaan tugas melalui penerapan sistem kinerja yang terukur.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
50	LABINOV	Perencanaan Pembangunan	Mendorong pengembangan budaya inovasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
51	HASS	Pendidikan	Mendukung pembentukan karakter dan peningkatan budaya belajar peserta didik.
52	AYO SEKOLAH	Pendidikan	Meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah.
53	SIPPRO KAMU PEDAS (Sistem Perencanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah)	Pendidikan	Mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui perencanaan program yang terarah dan berkelanjutan.
54	AdSI	Pendidikan	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi dan layanan pendidikan.
55	MCIS (Manajemen Cagar Budaya)	Pendidikan dan Kebudayaan	Mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai bagian dari penguatan identitas daerah.
56	Optimalisasi Data Ruas Jalan dan Inventaris Jalan di Bidang Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Meningkatkan akurasi data infrastruktur jalan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
57	Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat terkait Alur Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan perumahan sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
58	Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WEBGIS)	Penataan Ruang	Menyediakan informasi spasial yang akurat untuk mendukung perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan.
59	GEBRAK PENTING	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman.
60	Energi SDA (Energi Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pekerjaan Umum	Mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif untuk menunjang keberlanjutan pembangunan.
61	Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam, Nonalam, Bencana Sosial di Kecamatan Betayau	Sosial	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan efektivitas penanganan risiko bencana di tingkat kecamatan.
62	KESULOG (Tong Judi Gue Beli)	Sosial	Memperkuat pelayanan sosial melalui pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
63	Pengaruh Pengawasan dan Pendampingan Teknologi Tepat Guna (P2TG) di Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
64	COMIC (Penyusunan RPJMDes)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan kualitas penyusunan RPJM Desa agar lebih partisipatif, sistematis, dan sesuai ketentuan.
65	SIPINTAR	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan pelayanan pemerintahan desa.
66	MULANDU (Sistem Pelayanan Mandiri)	Sosial	Mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan sosial secara cepat, mudah, dan mandiri.
67	Sigapbos (Sistem Informasi Gabungan Pelayanan Sosial)	Sosial	Mengintegrasikan pelayanan sosial sehingga lebih cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.
68	APeT (Aplikasi Pelayanan Terpadu)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan teknis kepada pelaku usaha pertanian, pangan, dan perikanan.
69	Sikawan (Sistem Pelayanan Kebersihan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan serta pengendalian penyakit ternak.
70	STAR LO SI PRO	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui inovasi layanan yang lebih efektif.
71	KUTUMU SU (Gerakan Cinta Makan Daging dan Telur)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan konsumsi protein hewani sebagai upaya mendukung perbaikan gizi masyarakat.
72	GERPAYANA PEDET (Gerakan Pelayanan Peternakan Kesehatan Hewan Terpadu)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan secara terpadu untuk mendukung produktivitas peternakan.
73	Family Farming dalam Menggerakkan Ketahanan Pangan Keluarga	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mendorong kemandirian pangan keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan.
74	Pembangunan Mina Padi yang Ramah Lingkungan	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui sistem budidaya terpadu yang berkelanjutan.
75	Integrasi Budidaya Burung Walet di Kolam Ikan	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha budidaya.
76	Optimalisasi Informasi Harga Bahan Baku Hewan di Kecamatan Sesayap	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Menyediakan informasi harga yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pelaku usaha peternakan.
77	Bibit F0 Jamur Tiram Putih Berkualitas	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mendukung pengembangan komoditas jamur melalui penyediaan bibit unggul yang berkualitas.
78	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Pupuk Hayati	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mendorong penggunaan pupuk hayati untuk meningkatkan

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
			produktivitas pertanian yang ramah lingkungan.
79	Optimalisasi Pengumpulan Data Produksi Budidaya Ikan	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan akurasi data produksi perikanan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
80	Optimalisasi Penerbitan KUSUKA	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mempermudah legalitas dan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui penerbitan KUSUKA.
81	Optimalisasi Pemberian Identitas pada Peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan ketepatan pendataan peserta asuransi untuk mendukung perlindungan usaha peternakan.
82	Optimalisasi SOP Higienis Pemotongan Ayam	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan keamanan pangan melalui penerapan standar higienis dalam pemotongan unggas.
83	Optimalisasi Data Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Bahan Asal Hewan	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan.
84	Pengawasan Lalu Lintas Hewan melalui Unit Pengolahan Telur (Egg Roll)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mendukung pengawasan distribusi produk peternakan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.
85	Hewan (Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan kualitas pelayanan teknis di bidang kesehatan dan pengelolaan hewan ternak.
86	Penyuluhan Pengetahuan mengenai Materi Penyuluhan melalui Video Pendek	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada petani dan nelayan melalui media digital.
87	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Cara Menjaga Budidaya berdasarkan Manajemen Segar	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha budidaya dalam menerapkan praktik budidaya yang baik.
88	Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System/CSS)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Menjaga mutu hasil perikanan dan memperpanjang umur simpan produk melalui penerapan rantai dingin.
89	POPASI (Pojok Kartu Pelaku Usaha Perikanan)	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mempermudah pelayanan administrasi dan informasi bagi pelaku usaha perikanan.
90	SANGAT YAKIN DAN ULET	Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Mendorong pengembangan sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pemanfaatan potensi lokal.
91	E-KTT	Perpustakaan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
92	Jaringan Infrastruktur Fiber Optik	Komunikasi dan Informatika	Memperluas konektivitas jaringan sebagai pendukung transformasi

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
			digital pemerintahan dan pelayanan publik.
93	Hotspot WiFi Gratis RT Virtual	Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan internet untuk mendukung aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.
94	AKU MAMOLOK	Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan media komunikasi pemerintah daerah.
95	ISIP BEDONI	Komunikasi dan Informatika	Mendukung pengelolaan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
96	SAKRAL (Sarana Komunikasi Radio Alternatif)	Komunikasi dan Informatika	Menyediakan sarana komunikasi alternatif yang andal untuk mendukung koordinasi pemerintahan dan penanganan keadaan darurat.
97	JAGA (Jaringan Digitalisasi Pemerintah dan Masyarakat)	Komunikasi dan Informatika	Memperkuat transformasi digital melalui peningkatan konektivitas antara pemerintah dan masyarakat.
98	MySATU (Smart Tidung)	Komunikasi dan Informatika	Mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis digital dalam satu platform untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat.
99	e-SAKIP	Organisasi	Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara efektif dan terukur.
100	Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah	Organisasi	Mendukung penataan organisasi perangkat daerah melalui penyediaan data kelembagaan yang akurat.
101	Aplikasi SKJ DAKO	Organisasi	Mendukung pemetaan kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan organisasi yang lebih efektif.
102	e-KTB	Organisasi	Meningkatkan efektivitas penyusunan dan pengelolaan ketatalaksanaan birokrasi.
103	SIBAPER	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
104	SIMPEB MAP	Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung pengelolaan barang milik daerah secara tertib, akuntabel, dan efisien.
105	Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
106	SIPATDA (Sistem Pendapatan Daerah)	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
			melalui sistem informasi terintegrasi.
107	SIM SPPD	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan efisiensi administrasi perjalanan dinas secara elektronik.
108	Ruang Pelayanan PDRD	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah melalui pelayanan yang lebih nyaman dan terpadu.
109	Pembayaran PBB melalui Rekening Bank	Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempermudah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui sistem pembayaran non-tunai.
110	PAKNI LUNTAS PAJAK	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan pelayanan yang lebih inovatif.
111	SIBAPER	Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung pengelolaan administrasi keuangan secara efektif dan akuntabel.
112	Kartu Kendali LPG 3 Kg Berbasis Android	Perdagangan	Meningkatkan ketepatan sasaran distribusi LPG bersubsidi melalui sistem pengendalian berbasis digital.
113	Optimalisasi Sistem Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Media Penyimpanan	Perdagangan dan UMKM	Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan dokumen pelaporan secara aman dan mudah diakses.
114	Strategi Kecil dan Menengah (KSM)	Perdagangan dan UMKM	Meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah agar lebih produktif dan berdaya saing.
115	Manajemen Sistem Resources	Perekonomian	Mendukung pengelolaan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.
116	Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Administrasi Pembangunan	Meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
117	TAKSI COVID-19	Kesehatan	Mendukung percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
118	Informasi Pengendalian Status Gizi dan Pemetaan Stunting	Kesehatan	Meningkatkan kualitas data status gizi sebagai dasar intervensi percepatan penurunan stunting.
119	RUSA MUDA (Rumah Sakit Masuk Desa)	Kesehatan	Mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah terpencil melalui pelayanan jemput bola.
120	Antrean Faskes (Fasilitas Kesehatan Online)	Kesehatan	Mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan melalui sistem antrean berbasis daring.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
121	SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	Kesehatan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan pelayanan rumah sakit melalui sistem informasi yang terintegrasi.
122	GIATLA MAKAN (Digitalisasi Alat Evaluasi Daya Terima Makanan)	Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan gizi rumah sakit melalui digitalisasi evaluasi daya terima makanan pasien.
123	Optimalisasi edukasi dan praktik massage punggung pada ibu inpartu di ruang bersalin RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan kenyamanan ibu bersalin serta mendukung proses persalinan melalui edukasi dan praktik massage punggung.
124	Optimalisasi sistem Hospital Base Geriatric Service di RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lanjut usia melalui pelayanan geriatri yang komprehensif.
125	Edukasi pengetahuan ibu pascapersalinan tentang massage uterus, ASI eksklusif, dan teknik menyusui yang benar	Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan ibu nifas dalam perawatan pascapersalinan serta mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
126	Optimalisasi penataan berkas rekam medis menggunakan sistem labelling	Kesehatan	Meningkatkan ketertiban, kecepatan, dan akurasi pengelolaan dokumen rekam medis.
127	Optimalisasi sistem pencatatan stok sediaan farmasi melalui Google Spreadsheet	Kesehatan	Meningkatkan akurasi pencatatan persediaan farmasi sehingga mendukung ketersediaan obat secara optimal.
128	Optimalisasi pengelolaan keamanan obat injeksi di ruang IGD RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan keselamatan pasien melalui pengelolaan obat injeksi yang lebih aman dan sesuai standar pelayanan.
129	Optimalisasi pengendalian binatang pembawa penyakit "KUCING" di RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungan rumah sakit melalui pengendalian vektor pembawa penyakit.
130	Optimalisasi penyebaran informasi kesehatan di lingkungan RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan sebagai bagian dari edukasi dan promosi kesehatan.
131	Edukasi pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya pijat oksitosin pada ibu post partum di ruang bersalin	Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung kelancaran produksi ASI melalui edukasi pijat oksitosin.
132	Optimalisasi pemberian edukasi kasus Low Back Pain (LBP) terhadap pasien di Poli Fisioterapi RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan pemahaman pasien mengenai penanganan nyeri punggung bawah untuk mendukung proses rehabilitasi.
133	Optimalisasi alur pelayanan IGD selama masa pandemi COVID-19	Kesehatan	Meningkatkan efektivitas pelayanan kegawatdaruratan dengan tetap menjamin

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
	di RSUD Akhmad Berahim		keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.
134	Kartu Kendali Berobat Pasien Hipertensi (KALIBER PATEN)	Kesehatan	Meningkatkan kontinuitas pemantauan dan kepatuhan pengobatan pasien hipertensi melalui sistem kendali berobat.
135	Pengkajian ulang dan penerapan rekam medis poli gigi sesuai standar Kementerian Kesehatan dan akreditasi rumah sakit	Kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan rekam medis poli gigi sesuai standar nasional dan persyaratan akreditasi rumah sakit.
136	Optimalisasi Form Daftar Keselamatan Bedah di Poli Gigi dan Mulut RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan keselamatan pasien melalui penerapan daftar periksa (checklist) tindakan bedah sesuai standar pelayanan.
137	Optimalisasi Pelayanan Pra Analitik di Laboratorium RSUD Akhmad Berahim	Kesehatan	Meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium melalui penguatan tahapan pra analitik sehingga hasil pemeriksaan lebih akurat.
138	Optimalisasi Pemahaman serta Kepatuhan Pasien dan Keluarga tentang Penyakit Covid-19 di Ruang Isolasi	Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien serta keluarga terhadap prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi.
139	Optimalisasi Penerapan SOP pada Tahap Pra Analitik Pemeriksaan BTA (Bakteri Tahan Asam)	Kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan laboratorium melalui penerapan standar operasional pemeriksaan BTA secara konsisten.
140	Meningkatkan Pemahaman Pasien terhadap Prosedur Alur Triase Instalasi Gawat Darurat	Kesehatan	Meningkatkan pemahaman pasien mengenai sistem triase sehingga pelayanan kegawatdaruratan menjadi lebih efektif.
141	Peningkatan Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Resep di Instalasi Farmasi	Kesehatan	Mempercepat pelayanan farmasi melalui pengurangan waktu tunggu penyelesaian resep pasien.
142	Optimalisasi Kesadaran Pegawai dan Pengunjung terkait Pemisahan Sampah Medis dan Non Medis di Ruang IGD	Kesehatan	Meningkatkan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar keselamatan dan kesehatan lingkungan.
143	SIPATIN	Kesehatan	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi rumah sakit melalui sistem pelayanan terpadu.
144	Teleconference Desa	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa melalui pemanfaatan teknologi komunikasi.
145	Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi SOP Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah sehingga

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
			pelayanan administrasi lebih tertib.
146	Meningkatkan Pengetahuan Satlinmas tentang Keamanan dan Ketertiban Desa	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat desa.
147	PENGASI (Pengelolaan Sampah, Integrasi)	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
148	SINTERKLAS (Sistem Informasi Kecamatan Terintegrasi dan Layanan Singkat)	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kecamatan melalui sistem informasi yang terintegrasi dan responsif.
149	Optimalisasi Pelaksanaan Administrasi Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
150	Optimalisasi Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan akurasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai dasar penetapan kebijakan sosial.
151	Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dalam Mempublikasikan Informasi Hotline Service Kantor Kecamatan Muruk Rian kepada Publik	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan kecamatan melalui media sosial.
152	E-SIS (Elektronik Sistem Informasi Siskamling)	Pemerintahan Kecamatan	Mendukung peningkatan keamanan lingkungan melalui digitalisasi informasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
153	SIMPLEDesa	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi desa melalui penyederhanaan proses pelayanan.
154	SIMATALIA	Pemerintahan Kecamatan	Mendukung digitalisasi pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.
155	LAPOR SPJ	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
156	SIPENSIL (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mempermudah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara cepat dan terintegrasi.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
157	JAM KTT (Jaring Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tana Tidung)	Sekretariat DPRD	Memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.
158	Klasifikasi Arsip Digital Koleksi Laporan Hasil Kegiatan Anggota DPRD menggunakan Google Sheets	Sekretariat DPRD	Meningkatkan tertib arsip dan kemudahan akses dokumen kegiatan DPRD secara digital.
159	Optimalisasi Tata Kelola Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar melalui Google Sheets	Sekretariat DPRD	Meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip persuratan secara digital dan terdokumentasi dengan baik.
160	SIBERES (Sistem Informasi Bebas Risiko)	Pengawasan	Mendukung penguatan pengawasan internal melalui sistem informasi berbasis manajemen risiko.
161	Standar Operasional Pelayanan Jasa Konsultasi (SOP JAKON)	Pengawasan	Meningkatkan kualitas layanan konsultasi pengawasan kepada perangkat daerah secara terstandar.
162	Panduan Pengaduan Masyarakat terhadap Tim Saber Pungli	Pengawasan	Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait praktik pungutan liar secara aman dan transparan.
163	Pengarsipan Berkas TLHP secara Digital	Pengawasan	Meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
164	PATEN	Pengawasan	Meningkatkan efektivitas pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
165	e-REPORTASE	Pengawasan	Mendukung pelaporan hasil pengawasan secara elektronik sehingga lebih cepat dan akurat.
166	e-PROGRES	Pengawasan	Meningkatkan efektivitas monitoring perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan.
167	SIIH	Hukum	Memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi produk hukum daerah.
168	SIPETA DESA	Pemerintahan	Meningkatkan akurasi data dan informasi wilayah desa berbasis pemetaan digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
169	Optimalisasi Pengelolaan Sistem Kearsipan dengan Digitalisasi	Pemerintahan	Meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan akses arsip pemerintahan melalui digitalisasi.
170	Optimalisasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan	Pemerintahan	Meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah melalui monitoring dan evaluasi yang terukur.
171	Pembuatan Prosedur Standar Operasional Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tana Tidung	Pemerintahan	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan peringatan hari jadi daerah yang lebih tertib, efektif, dan sesuai standar.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
172	Pengarsipan Berkas TLHP (Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan) Secara Digital	Pengawasan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui digitalisasi dokumen.
173	Desa Cermat	Pengawasan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui penguatan pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
174	E-REPORTASE	Pengawasan	Mempercepat pelaporan hasil pengawasan secara elektronik sehingga lebih akurat dan terdokumentasi.
175	E-PROGRES	Pengawasan	Meningkatkan efektivitas pemantauan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala.
176	SINAN PERDA	Hukum	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengelolaan, dan penyebaran informasi produk hukum daerah.
177	JDIH	Hukum	Mempermudah akses masyarakat terhadap dokumentasi dan informasi hukum daerah secara terpadu.
178	SIPETA DESA	Pemerintahan	Menyediakan informasi spasial desa berbasis digital untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
179	Optimalisasi Pengelolaan Sistem Kearsipan dengan Digitalisasi Arsip (Penghimpunan, Pemindaian dan Pencadangan Data)	Pemerintahan	Meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan akses arsip pemerintahan melalui digitalisasi dan pencadangan data.
180	Optimalisasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan	Pemerintahan	Meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
181	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana Peringatan Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Pemerintahan	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih tertib, terstandar, dan efektif.
182	Pembuatan Sistem Integrasi Data Secara Daring melalui ICDS (Integrated Collective Data System)	Pemerintahan	Mengintegrasikan data pemerintahan secara elektronik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
183	Optimalisasi Realisasi Proses Penyusunan	Pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyusunan program dan

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
	Program dan Anggaran pada Bagian Pemerintahan SETDA		anggaran melalui proses perencanaan yang lebih efektif dan terukur.
184	Optimalisasi Pengelolaan Data Keamanan dan Ketertiban Kantor Camat Sesayap (LADA AMAN)	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan pengelolaan data keamanan dan ketertiban sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat kecamatan.
185	Optimalisasi Pelaksanaan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan Sesayap	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan akuntabel.
186	Peningkatan Pemahaman Pembudidaya Ikan tentang Tata Cara Pencegahan Hama dan Penyakit Ikan	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan dalam mencegah hama dan penyakit guna meningkatkan produktivitas usaha perikanan.
187	Optimalisasi Pengelolaan Data Keamanan dan Ketertiban melalui Pembuatan Aplikasi Database	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan efektivitas pengelolaan data keamanan dan ketertiban berbasis aplikasi digital.
188	Peningkatan Pemahaman Penyuluh Pertanian terkait Penyusunan Identifikasi Potensi Wilayah (IPW) Desa melalui Media Booklet	Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam mengidentifikasi potensi wilayah desa sebagai dasar pengembangan sektor pertanian.
189	Optimalisasi Pengawasan terhadap Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi	Perekonomian	Meningkatkan ketepatan sasaran distribusi LPG bersubsidi melalui penguatan sistem pengawasan.
190	Meningkatkan Pemahaman SDM dalam Penginputan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Perekonomian	Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa secara akurat dan sesuai ketentuan.
191	Sistem Pencatatan Pengadaan Langsung di Bawah Rp50 Juta pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Perekonomian	Meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
192	Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan melalui Media Kartu Kata Bergambar pada Murid Kelas B2 TK Negeri Pembina	Pendidikan	Meningkatkan kemampuan literasi dasar anak usia dini melalui media pembelajaran yang inovatif.
193	BUSAK PUNTI (Buku Syair Anak UPUD Tidung)	Pendidikan	Menumbuhkan budaya literasi, kecintaan terhadap budaya lokal, dan kemampuan berbahasa pada anak usia dini.

No	Nama Inovasi	Bidang/Urusan	Manfaat Inovasi
194	Meningkatkan Pemahaman terhadap Ibu Hamil	Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kesehatan kehamilan untuk mendukung kehamilan yang sehat dan menurunkan risiko komplikasi.
195	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Warga terhadap Pentingnya Vaksin melalui Sosialisasi di Wilayah Puskesmas Kujau	Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
196	Pembuatan Pedoman Pemeliharaan Mesin Generator Set (Genset) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Administrasi Umum	Meningkatkan efektivitas pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah melalui penyusunan pedoman operasional pemeliharaan genset.
197	GELIAT SATABA (Gerakan Literasi Satu Desa Satu Taman Baca Masyarakat)	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan taman baca sebagai pusat pembelajaran di setiap desa.
198	KATA OM AMAD (Peningkatan Data Pemadaman dan Penyelamatan)	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan akurasi data pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.
199	TEMAN KENCAN (Pedoman Kolaborasi Efektif Penanggulangan Bencana)	Penanggulangan Bencana	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
200	SIDIK MANTAPS (Sinergi Dinas Pendidikan Dalam Mencegah dan Tangani Anak Putus Sekolah)	Pendidikan	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan anak putus sekolah guna meningkatkan akses pendidikan.
201	BIJAK IKD MANTAP (Kebijakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui Integrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui integrasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah dan efisien.
202	AKSI JEMPOL (Aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui Jemput Bola)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui pelayanan jemput bola kepada masyarakat.
203	BARACUDA (Barcode Cepat Donor Darah)	Kesehatan	Mempercepat dan meningkatkan ketepatan pelayanan donor darah melalui pemanfaatan sistem barcode dalam pengelolaan pelayanan transfusi darah.

Sumber: SK Bupati Tana Tidung Nomor 100.3.3.2/2054/K-I/2025

Keberadaan inovasi daerah tersebut menjadi salah satu modal penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, pengembangan inovasi perlu terus didorong melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi antarperangkat daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta replikasi inovasi yang telah terbukti memberikan manfaat sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2027

Kebijakan fiskal nasional Tahun 2027 diarahkan secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui penguatan pendapatan negara, optimalisasi belanja negara yang efisien dan berdampak tinggi, serta pengelolaan keseimbangan primer, defisit, dan utang secara prudent guna menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal Tahun 2027 juga menjadi bagian dari upaya pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8–6,5 persen, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Pada sisi pendapatan negara, pendapatan negara Tahun 2027 ditargetkan mencapai 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Target tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 10,02–10,50 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 1,80–1,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mengonversi peningkatan aktivitas ekonomi menjadi penerimaan negara melalui reformasi administrasi, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui modernisasi administrasi perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, integrasi basis data yang didukung digitalisasi untuk mencegah kebocoran penerimaan dan menangkap seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan pada sektor informal, penguatan pengawasan, simplifikasi regulasi untuk mengurangi informalitas, penerapan *windfall tax* secara terukur dan terarah, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan perpajakan Tahun 2027 difokuskan pada perluasan basis pajak melalui formalisasi aktivitas ekonomi, termasuk tenaga kerja informal. Penguatan layanan *Coretax Administration System* berbasis analisis data juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, baik dalam pelaporan maupun pembayaran kewajiban perpajakan. Selain itu, pengawasan

perpajakan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan program bersama antarinstansi untuk mengurangi praktik *underreporting*. Optimalisasi penerimaan juga diarahkan pada sektor baru dan sektor prioritas, termasuk ekonomi digital, hilirisasi sumber daya alam, dan aktivitas ekonomi yang timbul dari pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan perpajakan selanjutnya mencakup penajaman insentif perpajakan yang lebih terarah dan terukur untuk mendorong investasi, pengembangan sektor prioritas, serta peningkatan nilai tambah perekonomian. Perbaikan manajemen restitusi perpajakan juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas administrasi penerimaan negara. Pemerintah juga menerapkan skema *windfall tax* secara terukur dan terarah terhadap pelaku usaha yang memperoleh keuntungan signifikan akibat kenaikan harga komoditas. Di bidang kepabeanan dan cukai, kebijakan diarahkan pada penguatan *Customs Excise Information System and Automation* serta peningkatan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal dan praktik *underreporting* untuk meningkatkan kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada optimalisasi penerimaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan sumber daya alam. Arah kebijakan tersebut mencakup perbaikan tata kelola pendapatan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, penguatan pengawasan dan optimalisasi royalti sumber daya alam melalui peningkatan akurasi pencatatan, pelaporan, dan pengawasan produksi, serta optimalisasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara. Peningkatan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak juga diarahkan pada sektor kehutanan, perikanan, dan panas bumi dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak juga dilaksanakan melalui inovasi pelayanan dan digitalisasi pada kementerian dan lembaga pengelola PNBP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan aset atau barang milik negara serta integrasi dan penguatan peran Badan Layanan Umum untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan sinergi antarinstansi pemerintah. Dengan demikian, optimalisasi pendapatan negara tidak hanya bertumpu pada penerimaan perpajakan, tetapi juga pada penguatan tata kelola sumber daya

alam, pelayanan publik, pengelolaan aset negara, dan peningkatan kinerja badan layanan pemerintah.

Penguatan kapasitas fiskal daerah ditempuh melalui peningkatan pendapatan daerah atau *local taxing power*. Kebijakan tersebut mencakup percepatan dan perluasan digitalisasi sistem perpajakan daerah, pengembangan potensi ekonomi dan daya saing daerah, serta pertukaran dan integrasi data antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Insentif pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi, mendorong pengembangan sektor prioritas dan sektor unggulan daerah, serta memperkuat kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada sisi belanja, belanja negara Tahun 2027 ditargetkan mencapai 13,62–14,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,07–12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Kebijakan belanja diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, menurunkan tingkat kemiskinan, serta memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri.

Belanja negara diprioritaskan pada belanja produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian melalui penerapan prinsip *better spending*. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program Kerja Prioritas Nasional. Dari sisi pelaksanaan anggaran, pemerintah mendorong agar penyerapan belanja berlangsung lebih merata dan lebih cepat sejak awal tahun sehingga pelaksanaan belanja tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pengaturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2027 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan minimum operasional pemerintahan. Optimalisasi belanja pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas aparatur negara, kualitas pelayanan publik, keberlanjutan program pembangunan, serta pelaksanaan transformasi digital. Pemerintah juga melakukan pengendalian terhadap belanja yang tidak produktif dan mengalihkannya melalui mekanisme *switching spending* kepada belanja barang dan jasa yang memberikan dampak

langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian target ekonomi makro pembangunan.

Belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, konektivitas, industrialisasi, teknologi, dan transformasi digital. Penyaluran bantuan sosial diperbaiki melalui pemanfaatan sistem digital agar lebih tepat sasaran. Kebijakan subsidi energi diarahkan pada reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran dengan tetap memperhatikan efisiensi fiskal dan kebutuhan transisi energi, sedangkan subsidi nonenergi diarahkan untuk ditingkatkan efektivitasnya. Pemerintah juga memastikan pemenuhan belanja bunga utang guna menjaga stabilitas fiskal dan menurunkan risiko pembiayaan kembali atau *refinancing*. Sementara itu, belanja lain-lain dialokasikan secara lebih terarah untuk kebutuhan tanggap darurat, mendukung pelaksanaan visi, misi, dan program kerja pemerintah, serta memenuhi kewajiban atau kompensasi pemerintah.

Transfer ke Daerah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal serta mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik daerah, penyediaan pelayanan dasar, pengembangan sektor unggulan dan mesin pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemberian alokasi afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Transfer ke Daerah, belanja Pemerintah Pusat, dan sumber pendanaan pembangunan lainnya.

Pada aspek pengelolaan defisit dan pembiayaan, defisit anggaran Tahun 2027 ditargetkan sebesar 1,80–2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Pembiayaan utang tetap menjadi instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan defisit dengan pengelolaan risiko yang terukur, terutama berkaitan dengan tingkat imbal hasil dan jatuh tempo utang. Pengelolaan utang dilaksanakan secara prudent untuk menjaga kesinambungan fiskal serta mengendalikan risiko pembiayaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pembiayaan nonutang diperkuat melalui sinergi Indonesia Investment Authority dan Badan Pengelola Investasi Danantara, penguatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, peningkatan peran Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, serta pemanfaatan aset negara dan

Saldo Anggaran Lebih secara lebih efektif dan efisien. Seluruh instrumen pembiayaan tersebut dikelola secara terpadu untuk memperkuat sinergi pendanaan antara APBN, sektor swasta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tingkat daerah, pembiayaan utang daerah didorong agar lebih sinergis dengan instrumen APBN dan APBD. Penguatan kapasitas fiskal daerah juga dilakukan melalui perluasan skema pembiayaan inovatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, *land value capture*, dana abadi daerah, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah, serta optimalisasi Saldo Anggaran Lebih dan dana daerah yang masih mengendap di perbankan. Pengembangan instrumen tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sasaran fiskal nasional Tahun 2027 meliputi pendapatan negara dan hibah sebesar 11,82–12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto, belanja negara sebesar 13,62–14,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto, serta keseimbangan primer pada kisaran surplus 0,45 persen hingga defisit 0,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Surplus atau defisit APBN ditargetkan pada kisaran defisit 1,80–2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto, pembiayaan investasi pada kisaran 0,50–0,90 persen terhadap Produk Domestik Bruto, dan stok utang pada kisaran 40,31–40,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin, kredibilitas, dan keberlanjutan fiskal sekaligus menyediakan ruang pembiayaan yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2027.

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Arah kebijakan fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 disusun untuk mendukung tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, yaitu “Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.” Tema tersebut diselaraskan dengan tema RKP Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.” Penyelarasan tersebut menempatkan penguatan sumber daya manusia, konektivitas wilayah, investasi, hilirisasi, dan pengembangan sektor unggulan sebagai agenda yang relevan bagi pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2027.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 diarahkan pada tiga pesan utama. Pertama, pembangunan wilayah yang merata melalui penguatan konektivitas, peningkatan pelayanan dasar, serta dukungan bagi kawasan perbatasan, pesisir, pedalaman, dan kepulauan. Kedua, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembentukan karakter masyarakat. Ketiga, pengembangan ekonomi bernilai tambah melalui penguatan sektor unggulan, hilirisasi, investasi berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ketiga pesan tersebut menjadi benang merah dalam penyusunan tema, prioritas, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta pengalokasian sumber daya pembangunan daerah.

Arah pembangunan Tahun 2027 juga merupakan bagian dari pelaksanaan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.” Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat implementasi misi RPJMD, terutama dalam aspek transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan, transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif, stabilitas wilayah, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pemerataan pembangunan wilayah, penyediaan sarana dan prasarana berkualitas serta ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan daerah.

Dalam mendukung daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi, Provinsi Kalimantan Utara menargetkan Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,42 dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60 persen pada Tahun 2027. Perekonomian daerah diarahkan agar semakin inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan melalui target Indeks Ekonomi Hijau sebesar 73,79 dan Indeks Ekonomi Biru sebesar 40,05. Penguatan sumber daya manusia ditunjukkan melalui target Indeks Modal Manusia sebesar 0,57, sedangkan dukungan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan berkualitas diarahkan untuk mencapai Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 45,86.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, target Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2027 ditetapkan sebesar 53,25. Kemandirian dan produktivitas masyarakat diarahkan melalui penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,20 persen, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,72 persen, serta penurunan Indeks Gini menjadi 0,249. Pembangunan wilayah perbatasan juga

diarahkan untuk meningkatkan persentase desa di wilayah perbatasan yang berstatus maju dan mandiri menjadi 24,02 persen. Target tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan penganggaran Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperluas pemerataan manfaat pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial maupun kewilayahan.

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketangguhan terhadap bencana serta perubahan iklim. Pada Tahun 2027, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar 63,46 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 86,39, dan Indeks Risiko Bencana diturunkan menjadi 115. Arah tersebut diperkuat melalui pengembangan ekonomi rendah emisi, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem, pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan, reformasi pengelolaan sampah, perlindungan kawasan hutan, gambut, mangrove, serta penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, inovasi, serta kualitas pelayanan publik. Target Indeks Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 83,80, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 72,77, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 76,997, Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,32, Indeks Inovasi Daerah sebesar 61,00, dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 75,00. Pencapaian target tersebut didukung melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja, pengelolaan data pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, serta pengembangan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan inklusif.

Dalam kerangka kebijakan fiskal daerah, peningkatan kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Utara diarahkan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas manajemen aset, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kapasitas dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan tersebut juga didukung oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan penganggaran berbasis kinerja, dan peningkatan kualitas belanja daerah agar alokasi anggaran semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2027 menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.264.017.962.564, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.015.466.843.564, pendapatan transfer sebesar Rp1.248.201.119.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp350.000.000. Dibandingkan dengan proyeksi Tahun 2026, jumlah pendapatan daerah Tahun 2027 mengalami penurunan, terutama karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah turun dari sekitar Rp1,028 triliun menjadi sekitar Rp1,015 triliun, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan tetap sebesar sekitar Rp1,248 triliun. Kondisi tersebut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset yang lebih produktif, dan penguatan kontribusi BUMD.

Pada sisi belanja, total belanja daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.294.017.962.564. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.741.574.606.075, belanja modal sebesar Rp171.241.421.168, belanja tidak terduga sebesar Rp5.000.000.000, dan belanja transfer sebesar Rp376.201.935.321. Struktur tersebut menunjukkan bahwa belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam belanja daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan belanja menekankan perlunya prioritas program, peningkatan kualitas belanja, pengendalian belanja yang kurang produktif, dan pemusatan anggaran pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap pelayanan dasar, konektivitas wilayah, pembangunan manusia, produktivitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program pembangunan wilayah yang merata melalui penyediaan pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengembangan transportasi multimoda, peningkatan konektivitas inter dan antarwilayah, penyediaan akses air minum dan sanitasi, penanganan permukiman kumuh, peningkatan ketenagalistrikan, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan digital. Kebijakan konektivitas juga diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi *superhub* Ibu Kota Nusantara, memperkuat jalur distribusi dan logistik, serta meningkatkan keterhubungan kawasan perbatasan, pedalaman, pesisir, kepulauan, dan pusat-pusat pertumbuhan.

Pada bidang pembangunan manusia, kebijakan anggaran diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Bidang

kesehatan difokuskan pada perluasan upaya promotif dan preventif, peningkatan cakupan Universal Health Coverage, pengendalian penyakit menular, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rumah sakit, percepatan penurunan stunting, peningkatan imunisasi, serta perluasan jangkauan pelayanan kesehatan hingga wilayah perbatasan dan pedalaman. Sementara itu, bidang pendidikan diarahkan pada percepatan wajib belajar 13 tahun, pemerataan mutu pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan kualitas guru, revitalisasi pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyediaan bantuan pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan literasi masyarakat dan literasi digital.

Penguatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas data kemiskinan, pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran, perlindungan sosial adaptif bagi masyarakat rentan, peningkatan akses terhadap rumah layak huni, serta pemaduan kebijakan perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan agar bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendukung penumbuhan usaha yang berkelanjutan dan inovatif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dalam mendukung ekonomi bernilai tambah, kebijakan fiskal diarahkan pada pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis berkelanjutan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan, pengembangan ekonomi hijau dan biru, penguatan daya saing pariwisata, serta peningkatan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengembangan sektor pangan dan agribisnis dilakukan melalui peningkatan diversifikasi dan produksi pangan lokal, pembangunan sentra produksi pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan rumput laut, penguatan rantai pasok, peningkatan pascapanen, adopsi teknologi pertanian, serta peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.

Peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan diarahkan melalui perluasan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengembangan usaha dan pemasaran UMKM serta industri kecil dan menengah, pengembangan riset dan inovasi produk unggulan daerah, perluasan ekonomi digital dan inklusi keuangan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, revitalisasi BUMDes dan BUMDes Bersama,

serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan. Kebijakan tersebut juga mendorong kerja sama antara investor besar dengan UMKM, industri kecil dan menengah, koperasi, serta pelaku ekonomi lokal agar manfaat investasi dapat tersebar lebih luas.

Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru dilakukan melalui pengembangan kawasan industri hijau, perlindungan lahan pertanian, pengembangan pelabuhan perikanan dan logistik, perlindungan serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan mangrove, pengembangan kegiatan ekonomi pesisir yang produktif dan ramah lingkungan, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, pengembangan ekonomi sirkular, akselerasi industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Pada sektor pariwisata, kebijakan diarahkan pada pengembangan ekowisata mangrove, wisata pesisir dan perairan, kawasan *Heart of Borneo*, daerah tujuan wisata, promosi dan pemasaran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Peningkatan iklim investasi dilaksanakan melalui pengelolaan Proyek Strategis Nasional secara kolaboratif dan berbasis manajemen risiko, penyediaan dukungan kebijakan dan infrastruktur yang berkualitas, penguatan stabilitas wilayah, pengembangan investasi padat karya yang memenuhi standar keberlanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kompetensi angkatan kerja yang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta peningkatan daya saing wirausaha muda melalui fasilitasi akses permodalan, pengembangan produk, dan pemasaran.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp30.000.000.000, tanpa proyeksi pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp30.000.000.000. Jumlah tersebut digunakan untuk menutup selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Keterbatasan ruang fiskal tersebut mendorong perlunya penguatan pembiayaan pembangunan yang kreatif dan inovatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, *Public Private Partnership*, tanggung jawab sosial perusahaan, dan skema pembiayaan lainnya. Pembiayaan alternatif juga diarahkan untuk mendukung program

yang berdampak tinggi serta mengurangi ketergantungan pembangunan pada APBD.

Pengelolaan fiskal daerah juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi secara kolaboratif, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan penguatan pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, disertai penguatan pengawasan, pengendalian, evaluasi, serta penerapan manajemen risiko pembangunan daerah. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Secara kewilayahan, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara bagi Kabupaten Tana Tidung difokuskan pada akselerasi kualitas pelayanan dasar; pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak; pengembangan pelabuhan logistik; pelestarian lingkungan daerah aliran sungai; pengembangan kawasan kampung nelayan; penataan permukiman yang layak huni; pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan afirmasi Kecamatan Tana Lia; pengelolaan kawasan Hak Guna Usaha secara berkelanjutan; serta perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologis Gambut. Arah kewilayahan tersebut menjadi bagian penting dalam penyelarasan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tana Tidung dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.

Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, kebijakan fiskal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 menempatkan prioritas sebagai suatu keniscayaan. Pengelolaan pendapatan diarahkan pada peningkatan kapasitas PAD dan optimalisasi aset daerah, sedangkan belanja difokuskan pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap pemerataan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi bernilai tambah, kualitas pelayanan publik, dan kelestarian lingkungan. Pada saat yang sama, kolaborasi pembiayaan dan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif diperkuat untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mendukung pencapaian sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.

3.1.3 Ekonomi Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

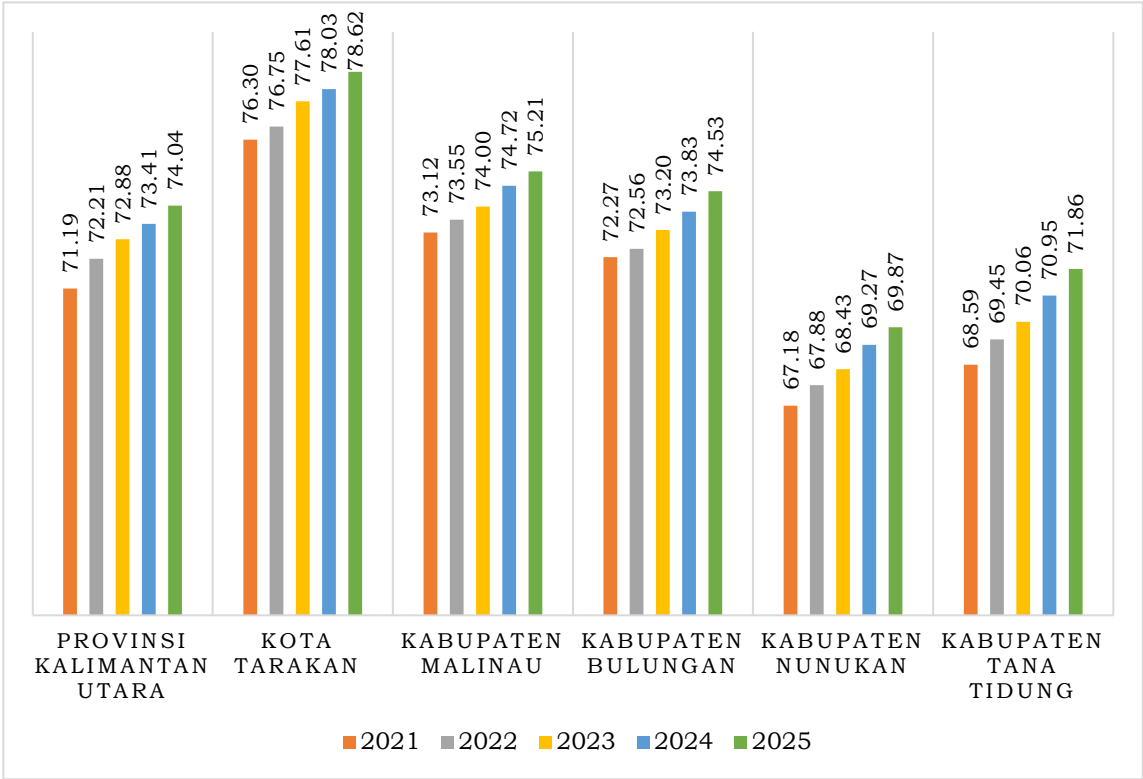
Kondisi ekonomi makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kecenderungan perkembangan, serta berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi pembangunan daerah. Hasil analisis menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, menyusun kebijakan fiskal daerah, serta menetapkan target ekonomi makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 agar selaras dengan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan kondisi riil daerah. Oleh karena itu, setiap indikator ekonomi makro disajikan melalui uraian perkembangan kinerjanya selama 5 (lima) tahun terakhir yang kemudian menjadi landasan dalam penetapan target ekonomi makro Tahun 2027. Adapun pembahasan masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah).

IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM dapat dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar yaitu: umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Karena IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, IPM Kabupaten Tana Tidung di tahun 2020 karena adanya dampak covid 19 IPM di Kabupaten Tana Tidung mengalami penurunan, dan meningkat Kembali di tahun 2021 sampai 2025. Berikut data perkembangan IPM di Kabupaten Tana Tidung, dan disandingkan dengan IPM daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia
 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Perkembangan IPM Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun secara relatif masih berada pada kelompok IPM menengah dibandingkan daerah lain di Kalimantan Utara.

Seiring waktu, IPM Tana Tidung terus mengalami peningkatan yang stabil dari 68,59 pada tahun 2021, menjadi 69,45 pada tahun 2022, dan menembus angka 70,06 pada tahun 2023. Pencapaian ini menjadi titik penting karena menandai peralihan IPM Tana Tidung dari kategori “sedang” menuju kategori “tinggi”, meskipun masih berada pada batas bawah. Pada periode yang sama, IPM provinsi juga meningkat, sehingga jarak antara Tana Tidung dan rata-rata Kalimantan Utara relatif masih terjaga.

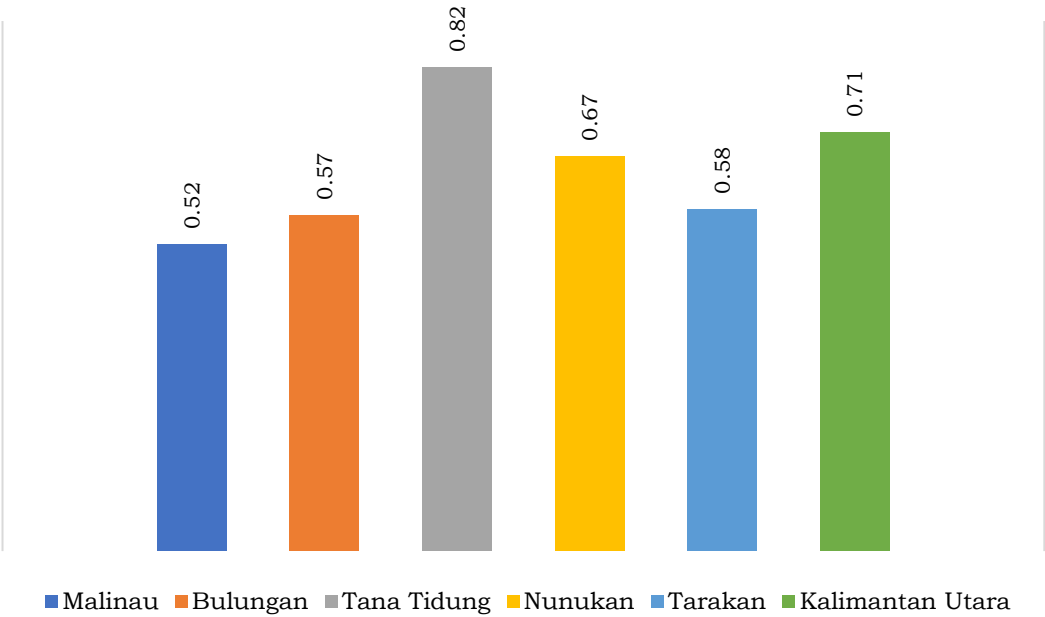
Pada tahun 2024 dan 2025, IPM Kabupaten Tana Tidung meningkat lebih signifikan, masing-masing mencapai 70,95 dan 71,86. Walaupun capaian ini

masih lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain seperti Malinau, Bulungan, dan terutama Kota Tarakan yang konsisten menjadi daerah dengan IPM tertinggi, kinerja Tana Tidung menunjukkan konvergensi ke arah rata-rata provinsi. Pada tahun 2025, selisih IPM Tana Tidung dengan Provinsi Kalimantan Utara (74,04) mulai menyempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Nunukan, IPM Tana Tidung secara konsisten berada pada posisi yang lebih tinggi sejak 2021, menunjukkan keunggulan relatif dalam aspek pembangunan manusia. Namun demikian, kesenjangan dengan daerah maju seperti Tarakan masih cukup lebar, mencerminkan perbedaan kapasitas pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Secara keseluruhan, Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kinerja IPM yang progresif dan berkelanjutan, dengan laju pertumbuhan yang positif setiap tahun. Tantangan ke depan adalah mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar agar mampu mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota dengan IPM tinggi serta mendekati bahkan melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan Utara

Berikut data rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tana Tidung dan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan IPM (2021-2025)
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Apabila dilihat lebih lanjut di tahun 2025 komponen IPM semua mengalami peningkatan. Berikut data capaian masing-masing komponen IPM di Kabupaten Tana Tidung pada 5 tahun terakhir:

Tabel 3. 1 Komponen IPM

Komponen IPM	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup Saat lahir/UHH (Tahun)	73,42	73,44	73,47	73,51	73,64
Harapan Lama Sekolah/ HLS (Tahun)	12,22	12,38	12,39	12,61	12,85
Rata-rata Lama Sekolah/ RLS (Tahun)	8,8	8,97	9,04	9,24	9,41
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	7.676	8.012	8.386	8.707	9.037
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,59	69,45	70,06	70,95	71,96

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas menggambarkan perkembangan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021 hingga 2025. Secara umum, IPM daerah ini menunjukkan tren peningkatan yang positif, mencerminkan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Dari sisi kesehatan, indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) terus mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya, dari 73,42 tahun pada 2021 menjadi 73,64 tahun pada 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Di bidang pendidikan, baik Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan pertumbuhan yang stabil. HLS meningkat dari 12,22 tahun pada 2021 menjadi 12,85 tahun pada 2025, sementara RLS naik dari 8,8 tahun menjadi 9,41 tahun pada periode yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pengeluaran per kapita disesuaikan juga menunjukkan tren meningkat, dari Rp7.676 ribu pada 2021 menjadi Rp9.037 ribu pada 2025. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Secara keseluruhan, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Tidung meningkat dari 68,59 pada tahun 2021 menjadi 71,86 pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Tana Tidung pada kategori IPM “tinggi” dan menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah ini terus membaik dari tahun ke tahun sebagai hasil dari sinergi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

B. Kemiskinan

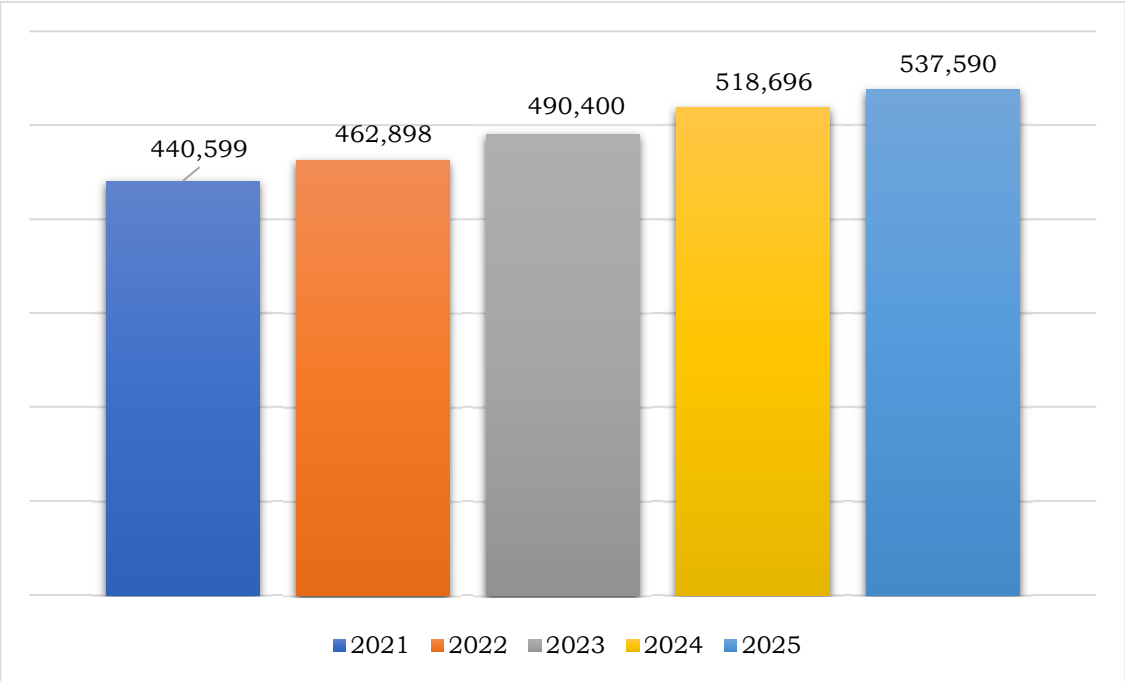
Dari perspektif kebijakan umum, kemiskinan dapat dipahami melalui dua aspek utama:

1. Aspek primer, yang mencakup kekurangan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Aspek sekunder, yang meliputi kekurangan jaringan sosial, sumber keuangan, dan akses informasi.

Untuk mengukur kemiskinan, satu metode sederhana adalah menghitung proporsi orang miskin terhadap total populasi, yang dikenal sebagai Indeks Hitung Kepala (*Head Count Index*). Meskipun metode ini berguna, ia sering dikritik karena tidak memperhitungkan seberapa jauh penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan menentukan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Seseorang dianggap miskin jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimum, dengan batas antara miskin dan tidak miskin didefinisikan oleh garis kemiskinan.

Sementara itu, kemiskinan relatif menilai distribusi pendapatan nasional antar berbagai kelompok pendapatan. Konsep ini bersifat dinamis, yang berarti kemiskinan selalu ada. Semakin besar ketimpangan antara tingkat hidup golongan bawah, semakin banyak jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai miskin. Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Diharapkan, dengan peningkatan kesejahteraan yang merata, masalah kemiskinan dapat berkurang. Kemiskinan bersifat multidimensi, mencerminkan berbagai kebutuhan manusia, sehingga memiliki banyak aspek.

Di Kabupaten Tana Tidung, garis kemiskinan setiap tahun mengalami peningkatan, salah satunya disebabkan oleh inflasi. Berikut adalah data garis kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2021 hingga 2025:



Gambar 3. 3 Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar diatas memperlihatkan pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar 440.599 rupiah per kapita per bulan. Nilai ini kemudian meningkat menjadi 462.898 rupiah pada tahun 2022, yang mencerminkan adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat.

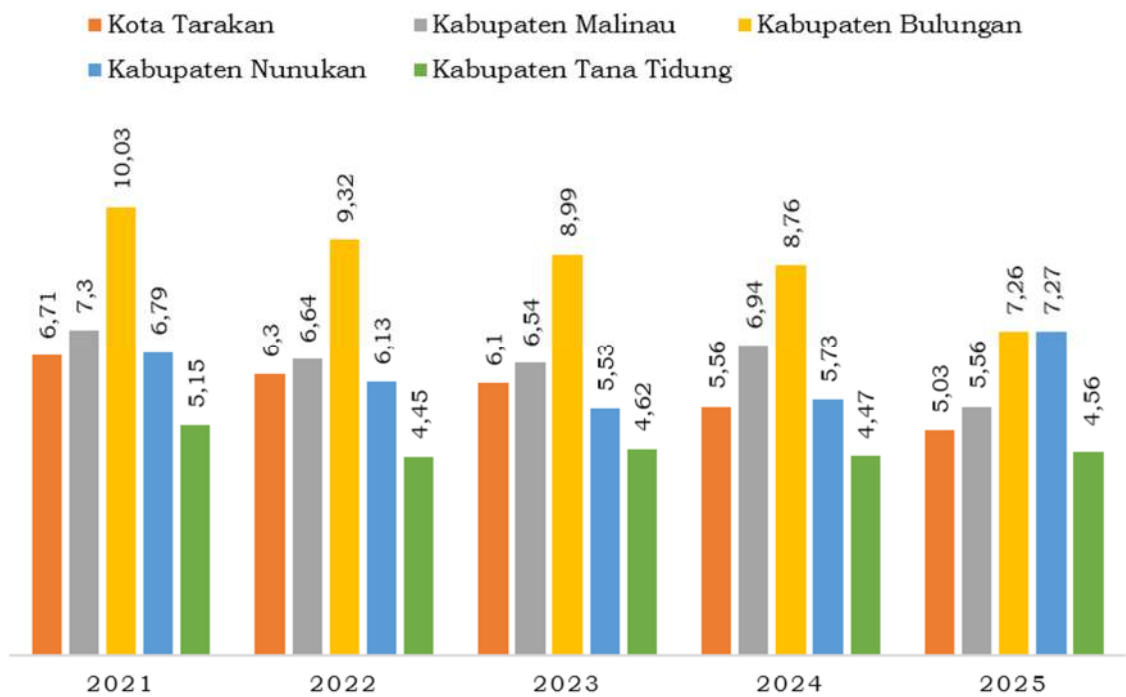
Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan garis kemiskinan mencapai 490.400 rupiah. Kenaikan ini menunjukkan adanya perubahan pada komponen kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang menjadi dasar perhitungan garis kemiskinan. Tren peningkatan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa standar kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2024, garis kemiskinan kembali meningkat menjadi 518.696 rupiah, dan terus naik pada tahun 2025 hingga mencapai 537.590 rupiah per kapita per bulan. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan dinamika harga serta peningkatan biaya hidup masyarakat, khususnya pada komoditas utama yang berkontribusi terhadap pembentukan garis kemiskinan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung selama periode tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Meskipun nilai garis kemiskinan meningkat, hal ini tidak serta merta menunjukkan peningkatan

jumlah penduduk miskin, melainkan lebih menggambarkan perubahan standar kebutuhan hidup layak yang harus dipenuhi oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, dari tahun 2021 sampai 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan fluktuatif. Berikut perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung, dibandingkan juga dengan provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 4 Persentase Kemiskinan
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar diatas menyajikan data persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021 hingga 2025. Tahun 2021, persentase kemiskinan Kabupaten Tana Tidung tercatat sebesar 5,15 persen, yang merupakan salah satu tingkat kemiskinan terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Utara. Pada periode yang sama, Kabupaten Bulungan masih berada pada tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 10,03 persen, diikuti Malinau 7,3 persen dan Nunukan 6,79 persen. Kota Tarakan juga berada di atas Tana Tidung dengan 5,71 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal periode, Tana Tidung telah memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam pengendalian kemiskinan.

Tahun 2022, tingkat kemiskinan Tana Tidung menurun menjadi 4,45 persen dan tetap menjadi yang terendah di antara seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, daerah lain seperti Bulungan masih berada pada 9,32 persen dan Malinau sebesar 6,64 persen. Kota Tarakan dan Nunukan masing-masing berada pada 6,3 persen dan 6,13 persen. Penurunan yang terjadi di Tana Tidung menunjukkan efektivitas program penanganan kemiskinan yang berjalan lebih optimal dibandingkan daerah lain.

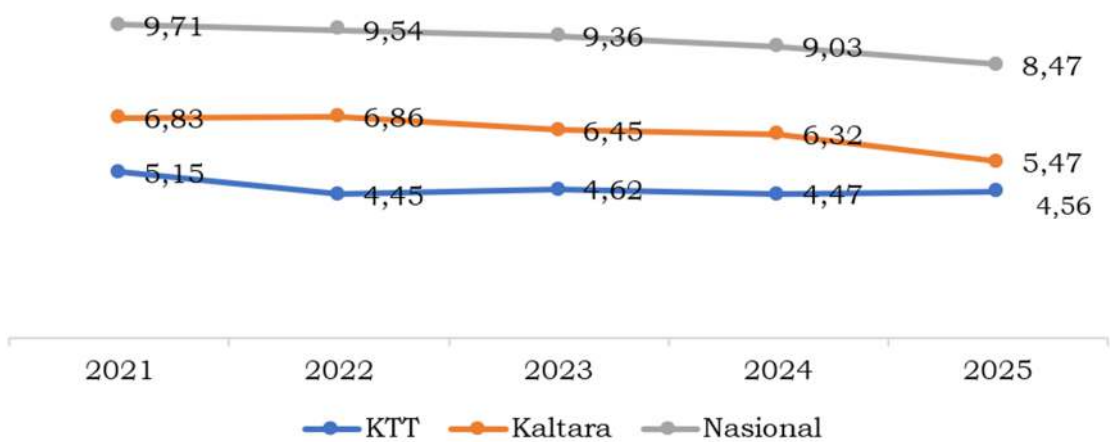
Tahun 2023, persentase kemiskinan Tana Tidung relatif stabil pada 4,62 persen, tetap berada pada posisi terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Di sisi lain, Bulungan masih berada pada 8,99 persen dan Malinau 6,54 persen, sementara Nunukan dan Tarakan masing-masing berada pada 5,53 persen dan 6,1 persen. Stabilitas yang ditunjukkan Tana Tidung mencerminkan konsistensi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat meskipun terdapat dinamika ekonomi di wilayah lain.

Tahun 2024, tingkat kemiskinan Tana Tidung kembali menurun menjadi 4,47 persen, mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Pada saat yang sama, Bulungan masih berada pada 8,76 persen, Malinau meningkat menjadi 6,94 persen, dan Nunukan berada pada 5,73 persen. Kota Tarakan juga masih lebih tinggi dibandingkan Tana Tidung dengan 5,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Tana Tidung mampu menjaga tren penurunan kemiskinan secara lebih konsisten dibandingkan daerah lain.

Tahun 2025, persentase kemiskinan Tana Tidung sedikit meningkat menjadi 4,56 persen, namun tetap menjadi yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Bulungan masih berada pada kisaran 7,26 persen, Malinau 5,56 persen, dan Nunukan mengalami peningkatan hingga sekitar 7,27 persen. Kota Tarakan juga berada di atas Tana Tidung dengan 5,03 persen. Dengan demikian, meskipun terjadi sedikit kenaikan, posisi Tana Tidung tetap menunjukkan kinerja terbaik dalam pengendalian kemiskinan di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, narasi per tahun tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Tidung secara konsisten berada pada posisi terendah dalam tingkat kemiskinan dibandingkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi serta efektivitas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Berikut perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung, dibandingkan juga dengan provinsi Kalimantan Utara dan Nasional:



Gambar 3. 5 Persentase Kemiskinan
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2025

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dan tingkat nasional. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional dan juga rata-rata Provinsi Kalimantan Utara. Tren ini memberikan gambaran awal mengenai keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung.

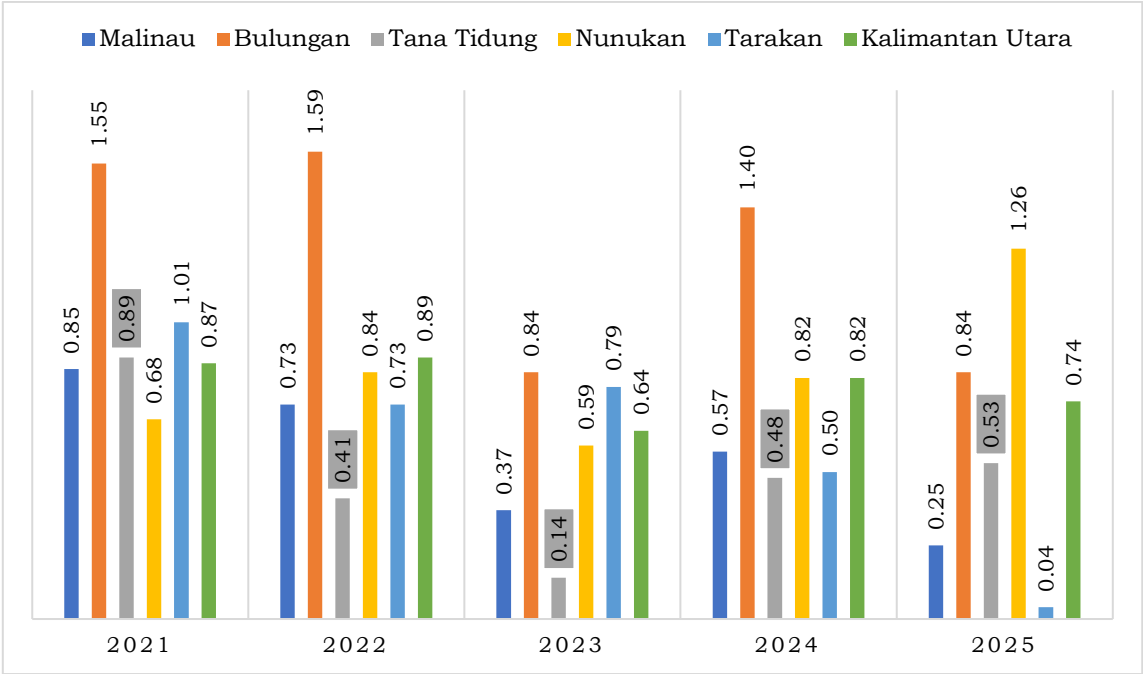
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung yang ditunjukkan oleh garis biru memperlihatkan pola fluktuatif selama periode tertentu. Pada awal periode, terjadi sedikit peningkatan, namun diikuti oleh tren penurunan yang relatif stabil di beberapa periode berikutnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten tersebut mulai menunjukkan hasil, meskipun perlu dicatat adanya tantangan yang menyebabkan fluktuasi pada titik tertentu.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, yang diwakili oleh garis oranye, tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang lebih stabil dan konsisten menurun dibandingkan Kabupaten Tana Tidung. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi berjalan dengan baik, memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tren ini dapat menjadi tolok ukur bagi Kabupaten Tana Tidung untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan lokalnya agar lebih efektif.

Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional yang diwakili oleh garis abu-abu menunjukkan penurunan yang lambat namun konsisten. Meskipun demikian, angka kemiskinan nasional tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional lebih kompleks, mengingat keragaman geografis, demografis, dan tingkat pembangunan yang berbeda di berbagai daerah.

Perbandingan ini memberikan wawasan penting bahwa Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi untuk terus menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan program-program yang lebih terarah dan terintegrasi. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan dapat menjadi kunci utama. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan nasional dalam hal alokasi sumber daya dan implementasi kebijakan juga sangat diperlukan.

Keberlanjutan tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung harus menjadi prioritas agar kesenjangan dengan tingkat provinsi dapat diminimalkan. Dengan memperkuat sinergi antara kebijakan daerah dan program-program provinsi serta nasional, Kabupaten Tana Tidung berpeluang untuk menjadi contoh sukses dalam pengentasan kemiskinan di Kalimantan Utara. Evaluasi berkala dan pengumpulan data yang akurat perlu dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Berikut data perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir, yang disandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

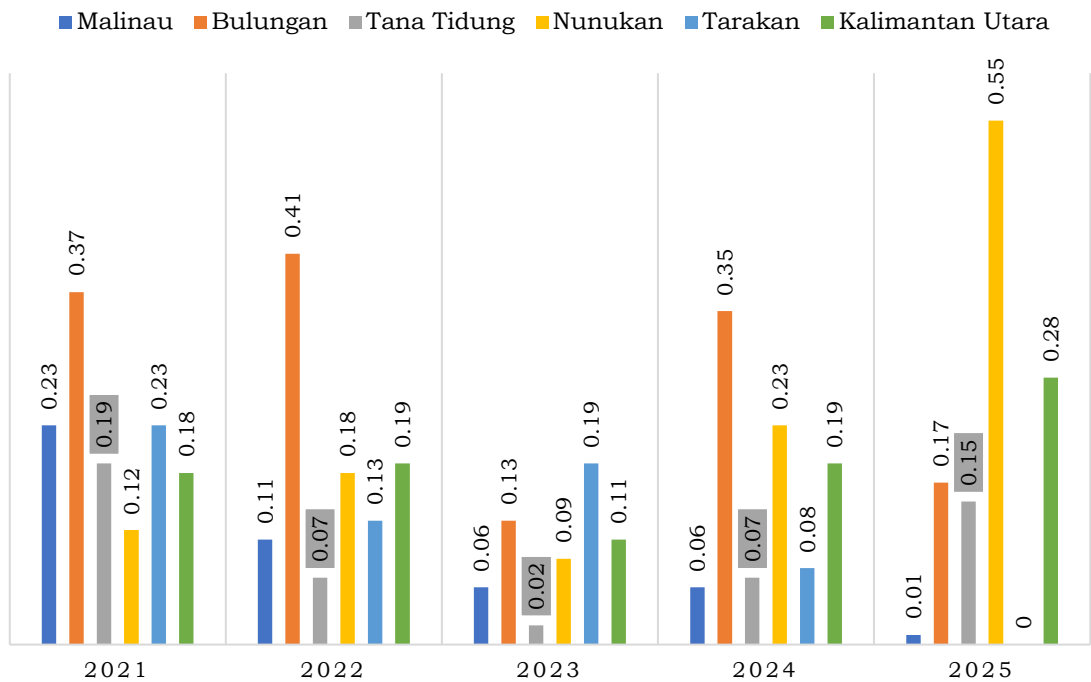
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis, mencerminkan berbagai tantangan dan keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya Indeks Kedalaman Kemiskinan Tana Tidung menjadi 0,89. Meski meningkat, nilainya masih relatif sebanding dengan Nunukan (0,68) dan lebih rendah dibandingkan Bulungan (1,55). Namun, capaian ini sedikit di atas rata-rata provinsi (0,87), menandakan tekanan ekonomi penduduk miskin di Tana Tidung meningkat pada periode tersebut.

Pada tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan Tana Tidung menurun tajam menjadi 0,41. Penurunan ini menjadikan Tana Tidung kembali sebagai salah satu daerah dengan kedalaman kemiskinan terendah di Kalimantan Utara, lebih baik dibandingkan Malinau (0,73), Bulungan (1,59), Nunukan (0,84), Tarakan (0,73), serta jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,89. Tahun 2023 mencatat perbaikan yang sangat signifikan, di mana Indeks Kedalaman Kemiskinan Tana Tidung turun menjadi 0,14, merupakan nilai terendah sepanjang periode pengamatan dan paling rendah di antara seluruh kabupaten/kota. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata provinsi (0,64), menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di Tana Tidung semakin mendekati garis kemiskinan.

Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan Tana Tidung meningkat menjadi 0,48. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain seperti Bulungan (1,40) dan Nunukan (0,82), serta berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,82. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi penduduk miskin relatif terkendali. Tahun 2025 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tana Tidung sebesar 0,53. Nilai ini lebih rendah dibandingkan Nunukan (1,26) dan Bulungan (0,84), namun lebih tinggi dibandingkan Tarakan (0,04) dan Malinau (0,25). Secara agregat, capaian Tana Tidung masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara yang tercatat sebesar 0,74.

Secara keseluruhan, tren fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pencapaian signifikan dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan dalam pengurangan kedalaman kemiskinan memerlukan upaya yang lebih strategis. Kabupaten Tana Tidung harus terus memperkuat program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dinamis.

Keberhasilan Tana Tidung dalam menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2023 menjadi contoh nyata bahwa kebijakan yang tepat sasaran dan inklusif dapat memberikan dampak signifikan. Namun, tantangan ke depan tetap ada, dan diperlukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat miskin dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi besar untuk menjadi model pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional. Berikut data perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir, yang disandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 7 Indeks Keparahan Kemiskinan
 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan Tana Tidung menjadi 0,19. Meskipun meningkat, nilainya masih lebih rendah dibandingkan Bulungan (0,37), dan relatif sebanding dengan Malinau dan Tarakan (0,23). Namun demikian, capaian ini berada sedikit di atas rata-rata provinsi yang tercatat sebesar 0,18, mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di kelompok miskin pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan Tana Tidung menurun signifikan menjadi 0,07. Angka ini kembali menempatkan Tana Tidung sebagai salah satu daerah dengan keparahan kemiskinan terendah, lebih baik dibandingkan Bulungan (0,41), Nunukan (0,18), Tarakan (0,13), serta jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 0,19.

Tahun 2023 mencatat perbaikan yang sangat kuat, dengan Indeks Keparahan Kemiskinan Tana Tidung turun menjadi 0,02, yang merupakan nilai terendah di antara seluruh kabupaten/kota. Nilai ini juga jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,11, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin di Tana Tidung semakin kecil. Pada tahun 2024, indeks keparahan kemiskinan Tana Tidung meningkat menjadi 0,07. Walaupun mengalami kenaikan, nilainya tetap lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain, khususnya Bulungan

(0,35) dan Nunukan (0,23), serta masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 0,19. Tahun 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan Tana Tidung tercatat sebesar 0,15. Angka ini lebih rendah dibandingkan Nunukan yang meningkat tajam hingga 0,55, serta masih lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 0,28. Namun demikian, nilainya lebih tinggi dibandingkan Malinau (0,01) dan Tarakan (0,00), menandakan perlunya perhatian lebih lanjut agar ketimpangan di kelompok miskin tidak kembali melebar.

Dengan memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dan mengatasi tantangan ekonomi yang ada, Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi besar untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperkecil ketimpangan pengeluaran di masa mendatang. Secara keseluruhan, selama periode 2020–2025, Kabupaten Tana Tidung menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mengendalikan keparahan kemiskinan, tercermin dari nilai indeks yang umumnya lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara dan menjadi yang terendah pada beberapa tahun penting, terutama tahun 2020 dan 2023. Fluktuasi yang terjadi mencerminkan dinamika kondisi sosial-ekonomi, namun secara umum ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Tana Tidung relatif lebih terkendali dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pemahaman mengenai konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi penduduk yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau pengangguran. Indikator-indikator ketenagakerjaan harus mempunyai konsep yang jelas dan tidak ambigu. Penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, usia kerja dibedakan pulamenjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Berikut data Angkatan kerja yang disajikan berdasarkan tingkat Pendidikan di Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2025:

Tabel 3. 2 Angkatan Kerja

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja	Angkatan Kerja				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sampai dengan SD	4.248	7.970	5.532	4.756	4.704
Sekolah Menengah Pertama	2.091	1.700	1.630	1.766	1.634
Sekolah Menengah Atas	5.306	4.788	4.562	4.755	4.120
Perguruan Tinggi	2.903	2.825	3.407	3.830	3.964
Jumlah	14.848	17.283	15.131	15.107	14.422

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas menyajikan data jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan tingkat pendidikan selama periode 2021 hingga 2025. Secara keseluruhan, jumlah total angkatan kerja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 14.848 orang, meningkat menjadi 17.283 orang pada 2022. Namun, jumlah ini kembali menurun menjadi 15.131 orang pada 2023 dan sedikit turun lagi menjadi 15.107 orang pada 2024.dan turun lagi 2025 menjadi 14.422 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, kelompok angkatan kerja yang sampai dengan SD mendominasi pada tahun 2022 dengan jumlah 7.970 orang, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, menjadi 5.532 orang pada 2023 dan 4.756 orang pada 2024 hingga 2025 menjadi 4.704 orang. Sementara itu, kelompok dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun, yakni dari 2.091 orang pada 2021 menjadi 1.634 orang pada 2025. Untuk kelompok dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlahnya relatif stabil, berkisar antara 5.306 orang, dengan sedikit penurunan pada 2023 dan kembali meningkat pada 2024. namun akhirnya turun lagi di 2025. Yang menarik, kelompok dengan pendidikan Perguruan Tinggi menunjukkan tren peningkatan, dari 2.903 orang pada 2021 menjadi 3.964 orang pada 2025. Ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi angkatan kerja ke arah tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Berikut data rincian jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan status pekerjaan tersebut di tahun 2025:

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
Berusaha sendiri	1.932	718	2.650
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	1.049	468	1.517
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	232	106	338
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	4.714	2.818	7.532
Pekerja bebas	467	149	616
Pekerja keluarga/tak dibayar	854	1.348	2.202
Jumlah	9.248	5.607	14.855

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas menyajikan data persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tana Tidung menurut status pekerjaan utama berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama, terlihat bahwa struktur ketenagakerjaan didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai, dengan jumlah mencapai 7.532 orang atau merupakan porsi terbesar dari total penduduk bekerja. Komposisi ini terdiri dari 4.714 laki-laki dan 2.818 perempuan, yang menunjukkan bahwa sektor formal masih menjadi penyerap tenaga kerja utama di wilayah tersebut.

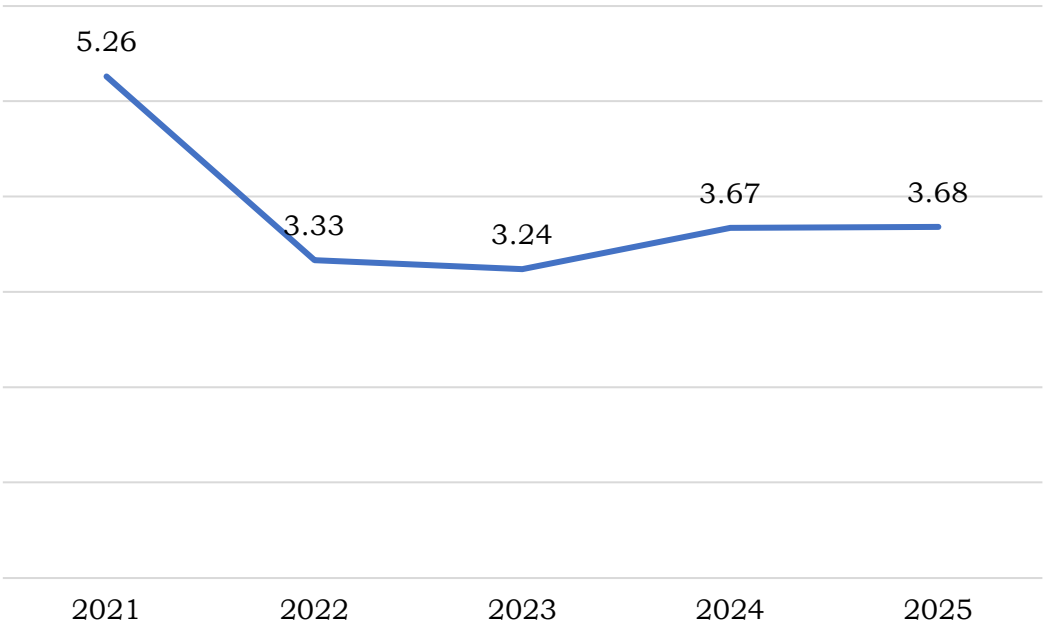
Selanjutnya, kelompok berusaha sendiri juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan, dengan jumlah sebesar 2.650 orang, terdiri dari 1.932 laki-laki dan 718 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya peran penting kegiatan usaha mandiri dalam mendukung perekonomian masyarakat, meskipun masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Kelompok pekerja keluarga atau tidak dibayar tercatat sebanyak 2.202 orang, dengan komposisi perempuan yang lebih besar (1.348 orang) dibandingkan laki-laki (854 orang). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga cukup dominan, meskipun sebagian besar belum mendapatkan imbalan secara langsung.

Sementara itu, penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar mencapai 1.517 orang, dan yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar sebanyak 338 orang. Hal ini mencerminkan adanya skala usaha yang mulai berkembang, meskipun sebagian besar masih berada pada kategori usaha kecil dengan tenaga kerja terbatas. Adapun kategori pekerja bebas tercatat sebanyak 616 orang, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam

pola kerja masyarakat, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya.

Secara keseluruhan, total penduduk bekerja tercatat sebanyak 14.855 orang, yang terdiri dari 9.248 laki-laki dan 5.607 perempuan. Struktur ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja laki-laki masih lebih dominan, namun kontribusi perempuan juga cukup signifikan, terutama pada sektor informal dan pekerjaan berbasis keluarga. Data ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tana Tidung. Laki-laki lebih banyak mendominasi sektor formal dan usaha mandiri, sedangkan perempuan lebih banyak berada di sektor pekerjaan tidak dibayar. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan yang mendorong partisipasi kerja perempuan dalam sektor formal dan berbayar, serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja tak dibayar.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan yang dinyatakan dalam persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut gambar perkembangannya:



Gambar 3. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar diatas menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021 hingga 2025. Tingkat

Pengangguran Terbuka menurun dari 5,26 persen pada tahun 2021 menjadi 3,33 persen pada tahun 2022 dan 3,24 persen pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 3,67 persen pada tahun 2024 dan 3,68 persen pada tahun 2025. Pada saat yang sama, jumlah angkatan kerja berpendidikan perguruan tinggi justru meningkat dari 2.903 orang pada tahun 2021 menjadi 3.964 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan angkatan kerja belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan kesempatan kerja yang sesuai.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, terutama pada jenis pekerjaan formal dan profesional. Keterbatasan lapangan kerja yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi dapat menyebabkan sebagian lulusan perguruan tinggi belum terserap secara optimal, meskipun secara umum memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan TPT pada tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan jumlah pencari kerja, tetapi juga dengan kemampuan struktur ekonomi daerah dalam menyediakan pekerjaan yang sejalan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan angkatan kerja.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung perlu memperkuat keterkaitan antara pendidikan, pelatihan, investasi, dan kebutuhan dunia usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja per sektor, pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kerja sama dengan dunia usaha, penguatan layanan informasi pasar kerja, serta penciptaan lapangan kerja formal dan kewirausahaan bagi lulusan pendidikan tinggi. Langkah ini penting agar peningkatan kualitas angkatan kerja dapat diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran secara berkelanjutan.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar tambahan pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi suatu masyarakat dalam periode tertentu. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di Kabupaten Tana Tidung, kinerja ekonomi dapat dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitasnya, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator utama.

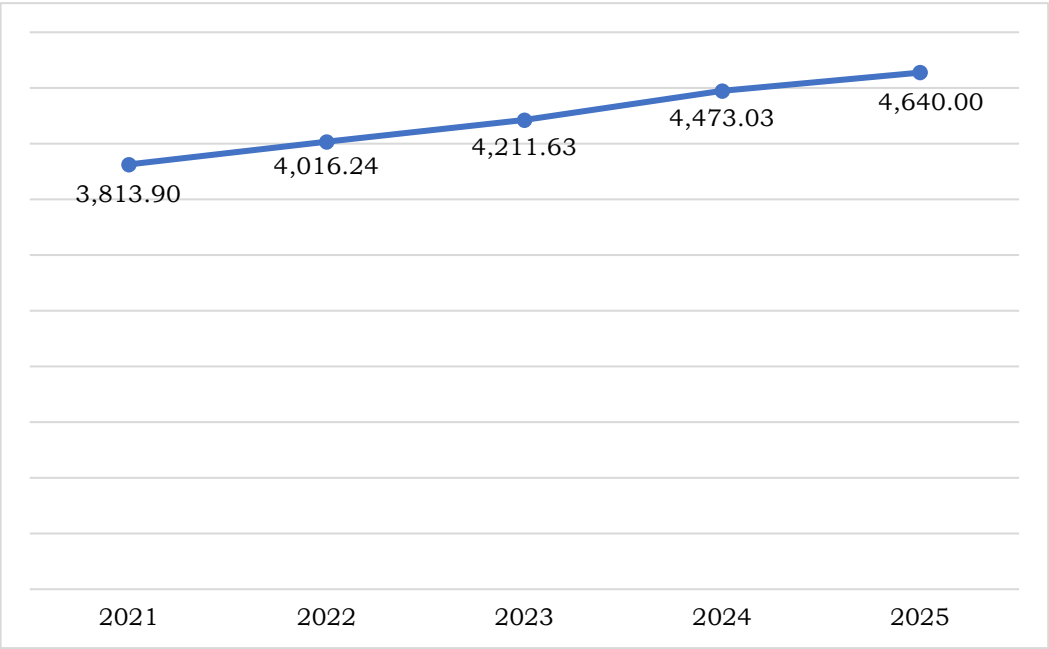
Pertumbuhan ekonomi, yang dihitung berdasarkan PDRB dengan harga konstan, adalah rata-rata pertumbuhan sektoral. Jika sektor utama mengalami pertumbuhan lambat, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, pertumbuhan cepat di sektor penting bisa memacu pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Setiap perubahan, sekecil apa pun, dalam sektor yang dominan dalam PDRB bisa berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu daerah, atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. PDRB dihitung dengan menggunakan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB dengan harga konstan, yang menggunakan harga tahun dasar tertentu, mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, tanpa pengaruh perubahan harga.

PDRB dengan harga konstan mencakup 17 sektor ekonomi, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, dan sebagainya. PDRB atas dasar harga konstan terdiri dari 17 lapangan usaha, diantaranya:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

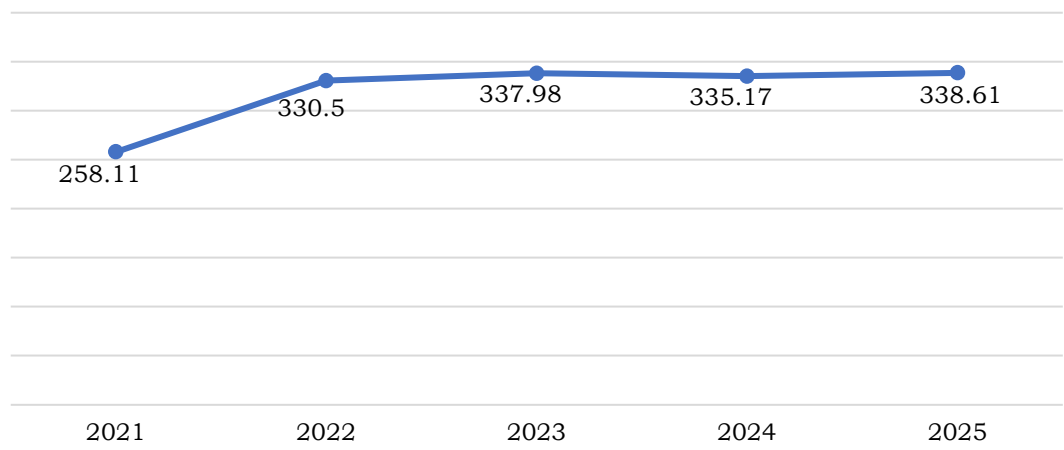
PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut gambar PDRB ADHK (miliar rupiah) di Kabupaten Tana Tidung di tahun 2021-2025:



Gambar 3. 9 PDRB Kabupaten Tana Tidung 2021-2025 (miliar rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan data dari BPS. Secara umum, tren PDRB Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup stabil. Pada tahun 2021 berada pada Rp3.813,90 miliar, dan meningkat pada tahun 2022 mencapai Rp4.016,24 miliar. Peningkatan yang signifikan juga terlihat pada tahun 2023, di mana nilai PDRB mencapai Rp4.211,63 miliar, dan terus berlanjut hingga tahun 2024 dengan nilai tertinggi sebesar Rp4.473,03 miliar. Serta pada tahun 2025 mencapai 4.640,00 miliar. Kenaikan dari tahun ke tahun ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang tumbuh secara konsisten dalam lima tahun terakhir, meskipun dalam periode tersebut juga terjadi berbagai tantangan nasional maupun global. Kestabilan ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Tana Tidung relatif adaptif dan didukung oleh sektor-sektor unggulan yang produktif. Grafik tersebut memberikan gambaran positif terhadap arah pembangunan ekonomi daerah dan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan serta penguatan sektor-sektor

prioritas yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 3. 10 PDRB Per Kapita Kab. Tana Tidung 2021-2025 (Juta Rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar diatas menyajikan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Tana Tidung. Selama periode lima tahun tersebut, PDRB per kapita menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada awalnya, meskipun kemudian mengalami stagnasi dan sedikit penurunan di akhir periode. Pada tahun 2021, PDRB per kapita berada pada angka Rp258,11 juta, dan meningkat menjadi Rp330,50 juta pada tahun 2022. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2023 dengan capaian Rp337,98 juta, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan mungkin juga dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tren positif ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan PDRB per kapita pada angka 335,17 juta dan naik lagi mencapai titik tertinggi sebesar Rp338,61 juta pada 2025.

Fenomena pada tahun 2024 merupakan indikasi awal dari dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi atau adanya tekanan ekonomi di sektor tertentu. Meskipun demikian, secara keseluruhan angka PDRB per kapita Kabupaten Tana Tidung tetap berada dalam level tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan ini mencerminkan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir,

meskipun stabilitasnya perlu dijaga melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Berikut rincian PDRB ADHK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 setiap lapangan usaha:

Tabel 3. 4 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2021-2025

Kategori/Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.146,65	1.147,92	1.146,84	1.198,09	1.226,92
Pertambangan dan Penggalian	1.256,93	1.385,30	1.483,67	1.437,56	1.449,37
Industri Pengolahan	82,22	84,27	99,19	215,11	235,40
Pengadaan Listrik dan Gas	0,74	0,84	0,96	1,09	1,10
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,61	0,63	0,69	0,75	0,82
Konstruksi	591,02	614,77	678,58	760,77	844,91
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	190,14	206,21	213,95	234,32	258,25
Transportasi dan Pergudangan	27,96	30,21	30,64	33,29	36,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,68	8,44	8,74	9,38	9,55
Informasi dan Komunikasi	1,61	1,74	1,87	2,18	2,25
Jasa Keuangan	4,43	4,88	5,62	5,95	6,28
Real Estate	24,56	25,73	26,41	27,79	29,17
Jasa Perusahaan	0,63	0,67	0,70	0,73	0,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	397,98	418,59	425,35	452,89	446,15
Jasa Pendidikan	60,54	64,23	65,82	69,56	67,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,10	3,14	3,18	3,32	3,55
Jasa Lainnya	17,11	18,67	19,42	20,25	21,14
Produk Domestik Regional Bruto	3.813,90	4.016,24	4.211,63	4.473,03	4.640,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	2.556,97	2.630,94	2.727,96	3.035,47	3.190,63

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tana Tidung tahun 2021 hingga 2025 menurut kategori lapangan usaha. Secara umum, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif, tercermin dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari Rp 3.813,90 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 4.640,00 miliar pada tahun 2025. Kenaikan ini juga tercermin dalam PDRB tanpa migas yang tumbuh dari Rp 2.556,97 miliar menjadi Rp 3.190,63 miliar, menandakan penguatan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor non-migas secara konsisten.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan kontribusi yang terus meningkat dari Rp 1.146,65 miliar menjadi Rp 1.226,92 miliar dalam lima tahun. Peningkatan ini menggambarkan keberhasilan pembangunan sektor primer dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam secara produktif. Sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, sebelum mengalami sedikit penyesuaian pada 2024 yang tetap dalam angka tinggi, dan naik lagi pada 2025 yaitu Rp 1.449,37 miliar.

Selain itu, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan bertahap, dari Rp 82,22 miliar menjadi Rp 235,40 miliar, mencerminkan geliat aktivitas industri yang mulai berkembang dan mengarah pada penguatan struktur ekonomi berbasis nilai tambah. Sektor konstruksi pun mencatatkan pertumbuhan luar biasa dari Rp 591,02 miliar pada 2021 menjadi Rp 844,91 miliar pada 2025. Hal ini menandakan adanya peningkatan investasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing wilayah.

Perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, juga mengalami pertumbuhan pesat, dari Rp 190,14 miliar menjadi Rp 258,25 miliar. Ini mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat dan dinamika aktivitas ekonomi lokal yang terus membaik. Seiring dengan itu, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh secara positif, menandakan pulihnya mobilitas dan konektivitas antarwilayah.

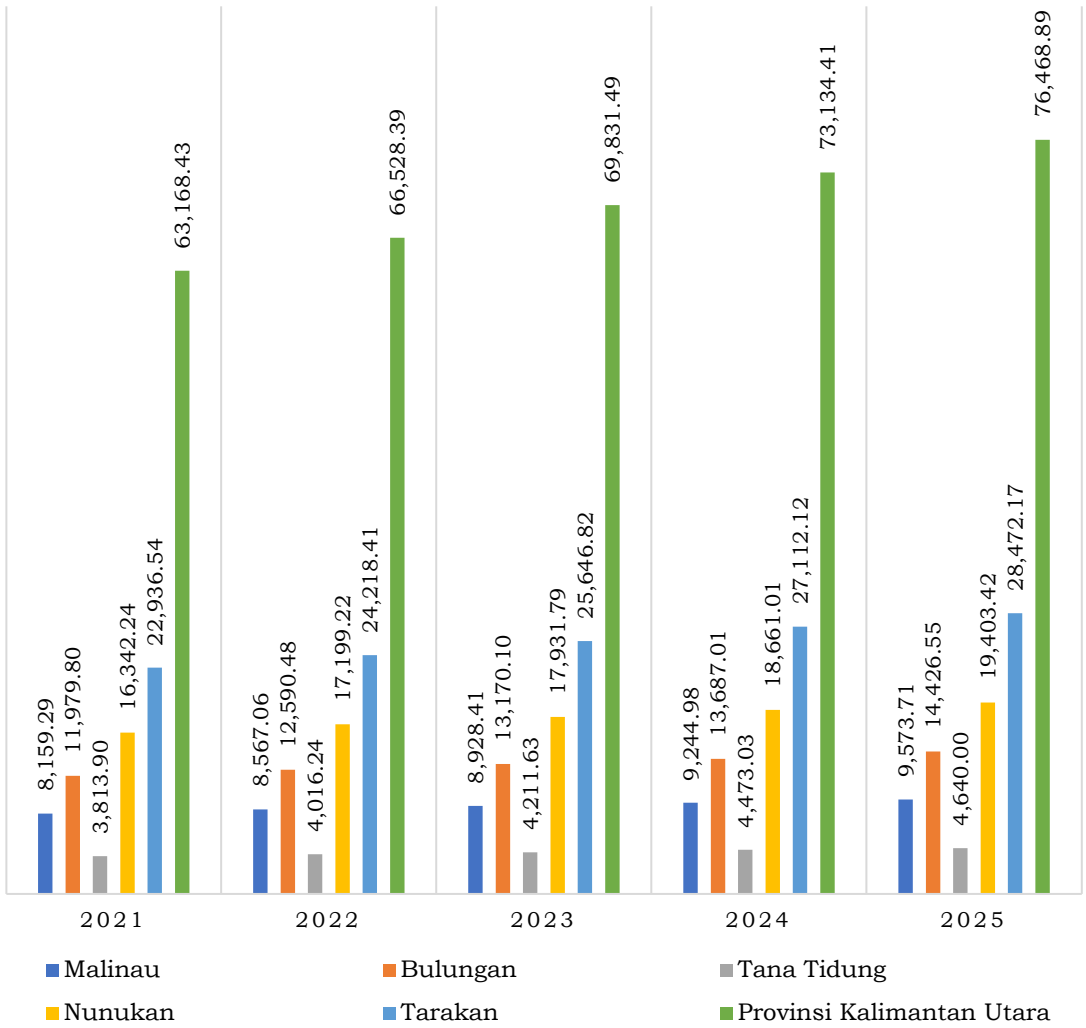
Sektor-sektor jasa juga menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan. Penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari Rp 7,68 miliar menjadi Rp 9,55 miliar, sejalan dengan pulihnya pariwisata dan sektor hospitality. Informasi dan komunikasi, yang menjadi tulang punggung transformasi digital, tumbuh dari Rp 1,61 miliar menjadi Rp 2,25 miliar, menunjukkan adopsi teknologi informasi yang semakin luas di tengah masyarakat.

Sektor keuangan, real estate, dan administrasi pemerintahan mencatatkan pertumbuhan yang stabil, menandakan tata kelola ekonomi yang semakin matang dan modern. Sementara itu, sektor jasa pendidikan dan kesehatan juga tumbuh, mencerminkan peningkatan kualitas layanan dasar dan investasi pada pembangunan sumber daya manusia. Sektor jasa lainnya

pun tidak tertinggal, menunjukkan kontribusi positif dalam mendorong keberagaman aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB tahun 2021 hingga 2025 mencerminkan arah pembangunan daerah yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Setiap sektor menunjukkan peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, dengan peningkatan yang mencerminkan ketahanan, daya saing, serta semangat transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung masih memiliki ruang yang luas untuk meningkatkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini justru membuka peluang besar bagi daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumber daya dan pembangunan sektor unggulan. Capaian Tana Tidung menunjukkan potensi percepatan yang signifikan di masa mendatang. Data PDRB ADHK dari tahun 2021 hingga 2025 berikut ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya saing di tingkat provinsi. Berikut data PDRB ADHK setiap daerah di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021-2025:



**Gambar 3. 11 PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara 2021-2025
(Dalam Miliar Rupiah)**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Sedangkan untuk struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari nilai distribusi dari PDRB ADHK masing-masing sektor. Karena nilai distribusi tersebut menggambarkan besarnya peranan masing-masing sektor dari 17 lapangan usaha. Berdasarkan distribusi tersebut dapat dilihat juga suatu daerah tersebut merupakan daerah masuk dalam kategori agraris atau non agraris. Dan apabila data distribusi PDRB ADHK di sajikan dalam bentuk series, dapat diketahui perubahan struktur ekonomi suatu daerah. Berikut data distribusi PDRB ADHK Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2025:

Tabel 3. 5 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha 2021-2025

Kategori/Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,07	28,58	27,23	26,78	26,44
Pertambangan dan Penggalian	32,96	34,49	35,23	32,14	31,24
Industri Pengolahan	2,16	2,10	2,36	4,81	5,07
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	15,50	15,31	16,11	17,01	18,21
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4,99	5,13	5,08	5,24	5,57
Transportasi dan Pergudangan	0,73	0,75	0,73	0,74	0,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
Informasi dan Komunikasi	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Jasa Keuangan	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14
Real Estate	0,64	0,64	0,63	0,62	0,63
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,43	10,42	10,10	10,12	9,62
Jasa Pendidikan	1,59	1,60	1,56	1,56	1,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
Jasa Lainnya	0,45	0,46	0,46	0,45	0,46
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas menyajikan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tana Tidung menurut lapangan usaha selama periode 2021 hingga 2025 dalam persentase kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Secara umum, struktur perekonomian daerah berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan komposisi yang relatif stabil, sekaligus mencerminkan kekuatan dan potensi sektor-sektor unggulan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dua sektor utama yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan mencatatkan peningkatan proporsi yang cukup signifikan, dari 32,96 % pada tahun 2021 menjadi puncaknya di 35,23% pada tahun 2023, sebelum sedikit

menyesuaikan ke 32,14 % di tahun 2024 dan 31,24% di 2025. Kinerja ini menggambarkan peran strategis sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menunjukkan kontribusi yang kuat, meskipun proporsinya sedikit menurun dari 30,07% menjadi 26,44% sepanjang lima tahun terakhir. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan pesat sektor lain, bukan karena pelemahan sektor pertanian itu sendiri.

Sektor konstruksi juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi yang meningkat secara konsisten, dari 15,50 % pada tahun 2021 menjadi 18,21 % pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan masifnya pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis yang mendorong aktivitas ekonomi lintas sektor. Sektor perdagangan besar dan eceran turut mencatat peningkatan kontribusi dari 4,99 % menjadi 5,57 %, menandakan pertumbuhan aktivitas konsumsi masyarakat dan dinamika sektor jasa yang semakin menggeliat.

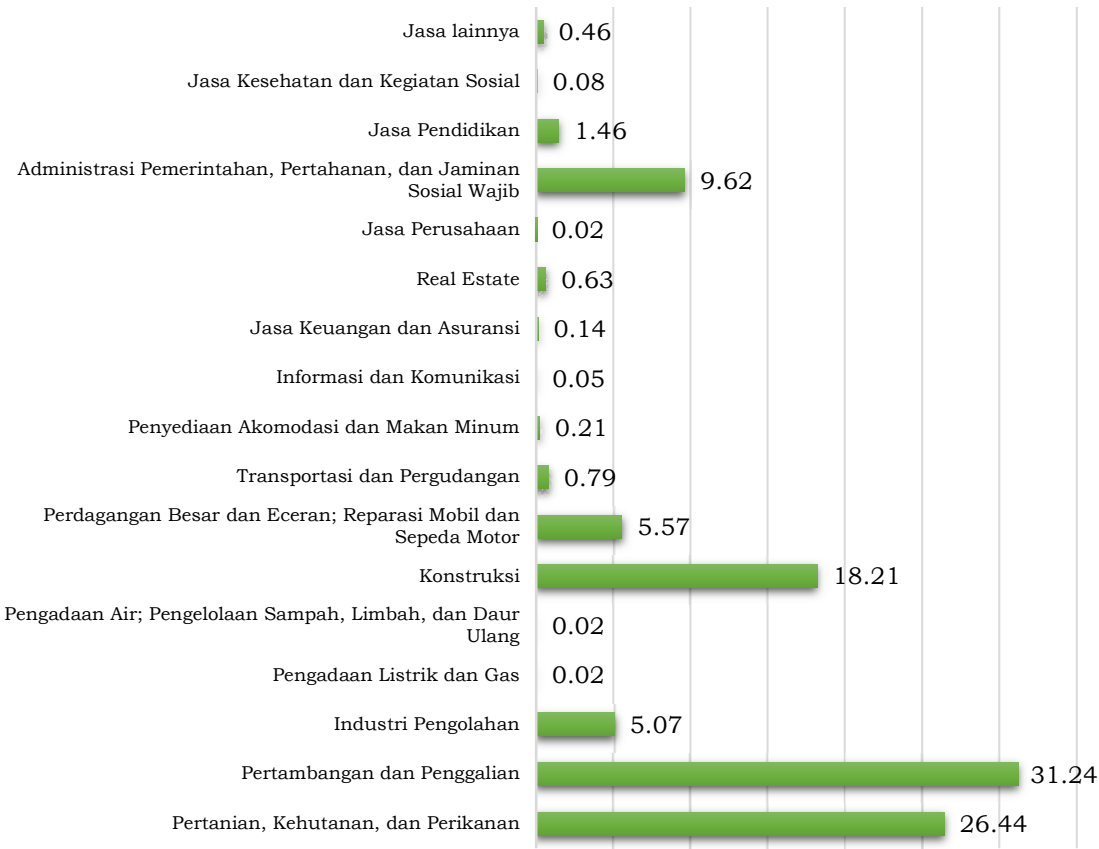
Sektor-sektor penunjang seperti industri pengolahan, meskipun proporsinya relatif kecil, tetap menunjukkan kontribusi yang stabil di kisaran 2-5%, menandakan pentingnya penguatan rantai nilai di sektor industri. Begitu pula dengan sektor transportasi dan pergudangan, yang tetap konsisten memberikan kontribusi sekitar 0,73% hingga 0,79%, menunjukkan peran penting konektivitas logistik dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi daerah.

Sektor-sektor jasa lainnya, seperti akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta real estate, meskipun masih memiliki porsi yang lebih kecil secara persentase, menunjukkan tren yang meningkat atau stabil, menggambarkan mulai terbentuknya ekonomi jasa yang mendukung transformasi struktural jangka panjang. Khusus sektor jasa keuangan, kontribusinya meningkat dari 0,12% menjadi 0,14%, menandakan inklusi keuangan yang semakin baik.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga memegang peranan penting dengan kontribusi stabil sekitar 10%, mencerminkan kuatnya peran sektor publik dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Adapun sektor pendidikan dan kesehatan tetap menunjukkan peran yang konsisten, masing-masing menyumbang sekitar 1,55% dan 0,08%, yang mencerminkan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan dasar.

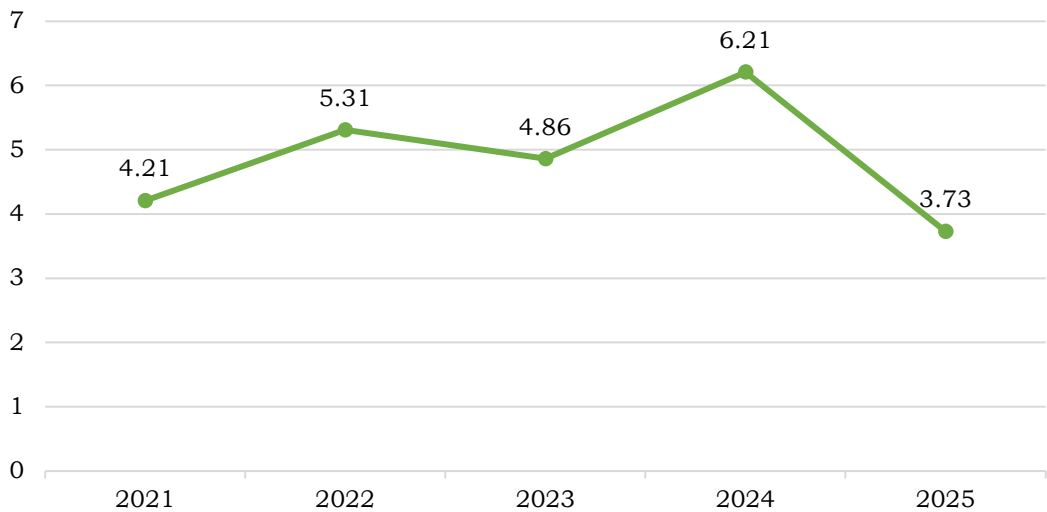
Secara keseluruhan, distribusi PDRB ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah telah bergerak secara seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta mendorong sinergi antarsektor, perekonomian daerah diyakini akan terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Berikut gambar distribusi PDRB ADHK Kabupaten Tana Tidung tahun 2025:



Gambar 3. 12 Distribusi PDRB ADHK 2025
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. berikut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung mulai dari tahun 2021-2025:



Gambar 3. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung
Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Dari grafik diatas Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis dengan tren yang tetap positif. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,21 persen, kemudian meningkat menjadi 5,31 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 4,86 persen pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat dan mencapai puncaknya sebesar 6,21 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,73 persen, yang menunjukkan adanya normalisasi setelah pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Tana Tidung tetap mampu tumbuh secara positif, mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang cukup stabil dan memiliki ketahanan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung perlu terus diperkuat melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut rincian pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2021-2025:

Tabel 3. 6 Pertumbuhan PDRB ADHK 2021-2025

Kategori/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,79	0,11	-0,09	4,47	2,41
Pertambangan dan Penggalian	7,66	10,21	7,1	-3,11	0,82
Industri Pengolahan	1,93	2,5	17,7	116,88	9,43
Pengadaan Listrik dan Gas	3,51	13,92	13,98	14,41	0,57
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	4,26	8,6	8,93	9,3
Konstruksi	2,86	4,02	10,38	12,11	11,06
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	7,25	8,45	3,76	9,52	10,21
Transportasi dan Pergudangan	-0,5	8,02	1,44	8,63	10,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	10	3,5	7,27	1,85
Informasi dan Komunikasi	8,71	7,84	7,3	16,96	3,12
Jasa Keuangan	10,14	10,06	15,13	6,01	5,49
Real Estate	3,68	4,78	2,63	5,22	4,97
Jasa Perusahaan	2,86	6,1	4,07	3,97	-1,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,14	5,18	1,62	6,47	-1,49
Jasa Pendidikan	4,47	6,09	2,48	5,68	-2,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,68	1,4	1,33	4,52	6,95
Jasa Lainnya	5,5	9,1	4,06	4,25	4,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,21	5,31	4,86	6,21	3,73

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Tabel diatas memperlihatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tana Tidung menurut lapangan usaha selama periode 2021–2025. Secara umum, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan mencapai 4,21% pada 2021, naik menjadi 5,31% pada 2022, kembali menurun sedikit menjadi 4,86% di tahun 2023, naik lagi menjadi 6,21% pada tahun 2024 dan kemudian turun lagi di angka 3,73% pada tahun 2025.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan kinerja yang relatif stabil sepanjang periode 2021–2025, meskipun sempat mengalami kontraksi ringan pada tahun 2023 sebesar -0,09 persen. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2024 sektor ini kembali tumbuh sebesar 4,47 persen dan tetap berada pada jalur positif pada tahun 2025 sebesar 2,41 persen. Hal ini menegaskan bahwa sektor primer tetap berperan sebagai fondasi utama dalam menopang stabilitas perekonomian daerah.

Sektor Pertambangan dan Penggalian mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi pada periode 2021–2023, dengan puncak pertumbuhan sebesar 10,21 persen pada tahun 2022. Namun demikian, sektor ini mengalami kontraksi signifikan pada tahun 2024 sebesar -3,11 persen sebelum kembali tumbuh

sebesar 0,82 persen pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika eksternal, khususnya perubahan harga komoditas dan permintaan pasar.

Pada sektor sekunder, Industri Pengolahan menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mencapai 116,88 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ekspansi besar, baik dalam bentuk investasi maupun peningkatan kapasitas produksi. Meskipun mengalami normalisasi pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 9,43 persen, sektor ini tetap menjadi indikator penting dalam proses transformasi struktural ekonomi daerah menuju sektor yang lebih bernilai tambah.

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan meningkat hingga tahun 2024 sebesar 14,41 persen, sebelum melambat menjadi 0,57 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya fase stabilisasi setelah periode ekspansi. Sementara itu, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dari 2,02 persen pada tahun 2021 menjadi 9,30 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dasar serta kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan.

Sektor Konstruksi memperlihatkan kinerja yang sangat kuat dan berkelanjutan, dengan pertumbuhan yang meningkat dari 2,86 persen pada tahun 2021 menjadi 11,06 persen pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan meningkat, khususnya pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing sebesar 9,52 persen dan 10,21 persen, yang menandakan semakin menguatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pada tahun 2021 sebesar -0,50 persen, namun mampu pulih secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 10,07 persen pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan pemulihan mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas distribusi barang. Di sisi lain, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, dengan puncak pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 10,00 persen, namun mengalami perlambatan pada

tahun 2025 menjadi 1,85 persen, yang mengindikasikan adanya penyesuaian pada sektor konsumsi dan pariwisata.

Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan yang tinggi dan konsisten, dengan puncak sebesar 16,96 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin kuatnya peran digitalisasi dalam mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan tinggi, yang mencerminkan semakin berkembangnya sistem keuangan serta meningkatnya inklusi keuangan di daerah.

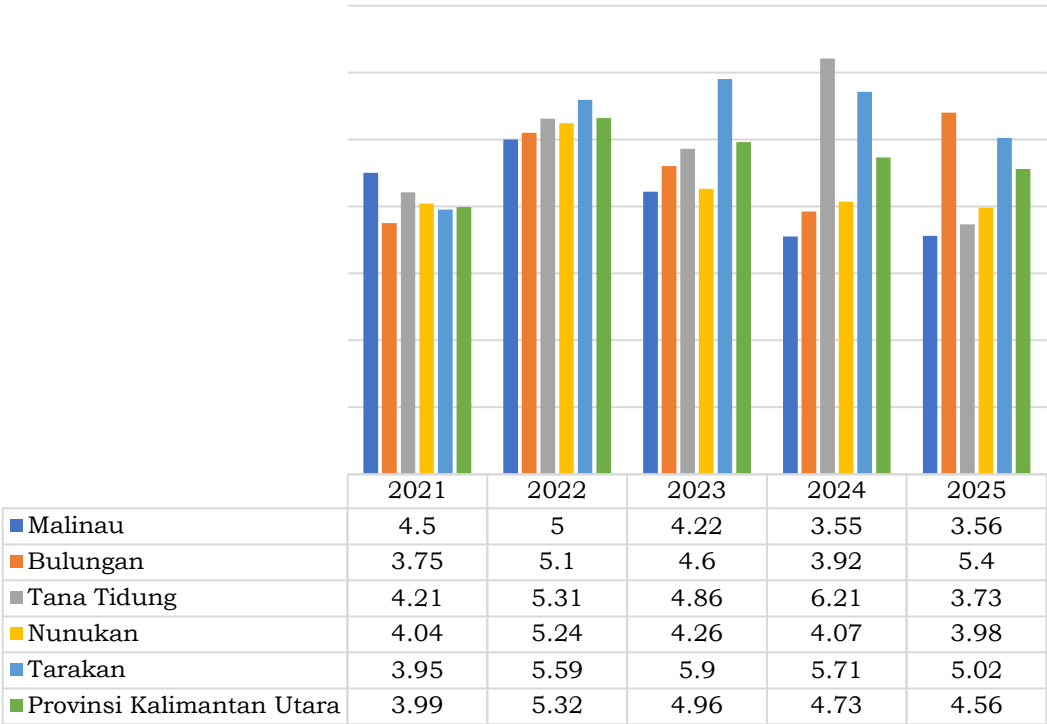
Pada kelompok sektor jasa lainnya, Real Estate menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan meningkat secara bertahap, mencerminkan perkembangan investasi di bidang properti. Namun demikian, sektor Jasa Perusahaan mengalami fluktuasi dan bahkan kontraksi pada tahun 2025 sebesar -1,38 persen, yang menunjukkan adanya tantangan dalam sektor jasa penunjang kegiatan usaha. Sektor Administrasi Pemerintahan juga mengalami perlambatan hingga kontraksi pada tahun 2025 sebesar -1,49 persen, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dan belanja pemerintah.

Sektor Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif, namun sektor kesehatan kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 sebesar 6,95 persen. Hal ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan pelayanan di bidang sosial. Adapun sektor Jasa Lainnya menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil pada kisaran moderat, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi pendukung tetap berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK menunjukkan tren yang positif selama periode 2021–2025. Pertumbuhan meningkat dari 4,21 persen pada tahun 2021 menjadi 6,21 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami sedikit perlambatan menjadi 3,73 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mengalami fase akselerasi pertumbuhan hingga tahun 2024, yang kemudian diikuti oleh fase normalisasi pada tahun 2025, dengan tetap mempertahankan kinerja yang positif dan stabil.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi

yang menunjukkan tren yang positif, berikut data pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Utara:



Gambar 3. 14 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2026

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, dengan capaian sebesar 3,99 persen pada tahun 2021 yang meningkat menjadi 5,32 persen pada tahun 2022. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 4,96 persen dan 4,73 persen, serta kembali melandai menjadi 4,56 persen pada tahun 2025, kondisi ini mencerminkan proses normalisasi setelah fase akselerasi pertumbuhan, dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Di sisi lain, Kabupaten Tana Tidung menunjukkan dinamika pertumbuhan yang kompetitif dan mampu mengikuti bahkan melampaui capaian provinsi pada beberapa periode. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Tana Tidung tercatat sebesar 4,21 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 5,31 persen dan 4,86 persen, yang berada pada kisaran yang sebanding dengan pertumbuhan provinsi.

Kinerja Tana Tidung mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 6,21 persen, yang melampaui capaian Provinsi

Kalimantan Utara sebesar 4,73 persen. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi pembangunan ekonomi yang signifikan di Tana Tidung, serta keberhasilan dalam memanfaatkan potensi sektor unggulan daerah sebagai pendorong pertumbuhan.

Meskipun pada tahun 2025 pertumbuhan Tana Tidung tercatat sebesar 3,73 persen atau sedikit di bawah rata-rata provinsi, kondisi ini lebih mencerminkan proses penyesuaian setelah pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan Kabupaten Tana Tidung tetap menunjukkan kinerja yang kuat dan berdaya saing, dengan kemampuan untuk tumbuh di atas atau sejalan dengan provinsi dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan demikian, Kabupaten Tana Tidung dapat dipandang sebagai salah satu daerah dengan kinerja pertumbuhan yang progresif di Provinsi Kalimantan Utara. Pola pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung meningkat dan kompetitif tersebut menunjukkan bahwa Tana Tidung memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang serta kontribusi yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional secara berkelanjutan.

Selain indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, kondisi perekonomian Kabupaten Tana Tidung juga dapat dilihat melalui beberapa indikator daerah yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kontribusi perekonomian daerah, daya saing, serta perkembangan sektor keuangan. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan ekonomi daerah dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat daya saing wilayah, serta mendorong intermediasi sektor keuangan sebagai salah satu penopang aktivitas ekonomi. Realisasi indikator ekonomi daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Realisasi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
1	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Ribu Rp/ Kapita	9.037
2	Kontribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung terhadap Kalimantan Utara	%	6,37
3	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	62,20
4	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,03
5	Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB	%	21,24

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025
6	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Rp	3.449.809
7	Total Kredit terhadap PDRB	%	12,00

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan tabel tersebut, Pengeluaran per Kapita (PPP) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.037 ribu per kapita, yang mencerminkan tingkat kemampuan konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari sisi kontribusi regional, Kabupaten Tana Tidung memberikan sumbangan sebesar 6,37 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, kontribusi seluruh sektor di luar pertambangan dan penggalian mencapai 62,20 persen, yang menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah tidak hanya ditopang oleh sektor ekstraktif, tetapi juga oleh sektor-sektor produktif lainnya seperti pertanian, konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

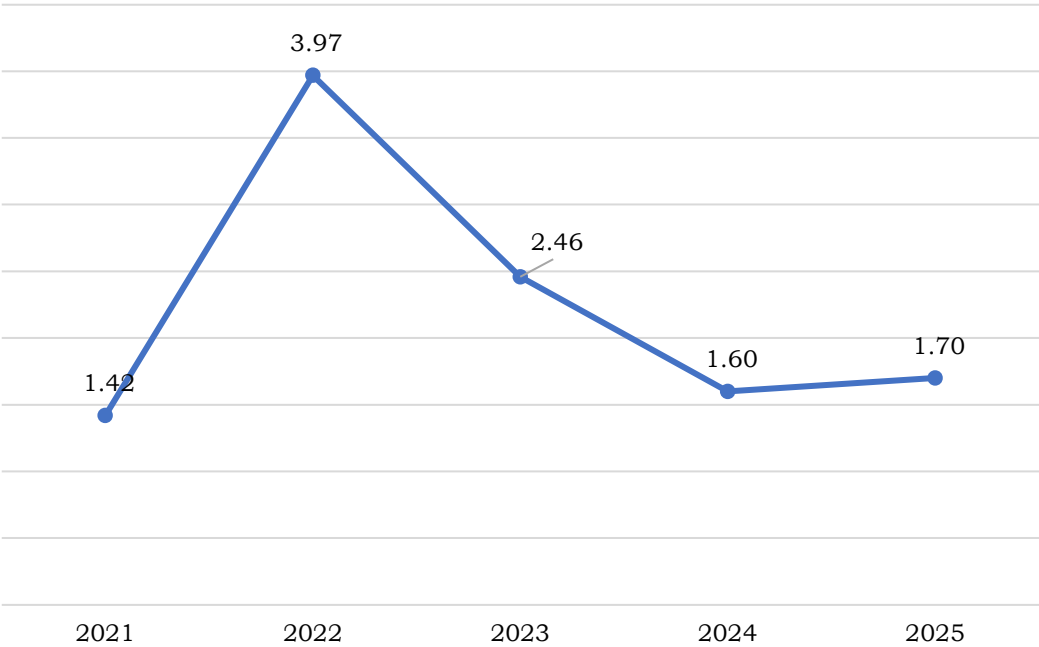
Dari aspek daya saing, Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,03 poin, yang menggambarkan kapasitas daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi melalui berbagai aspek, seperti kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan iklim investasi. Sementara itu, perkembangan sektor keuangan menunjukkan bahwa Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap PDRB mencapai 21,24 persen, sedangkan Total Kredit terhadap PDRB sebesar 12,00 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi sektor keuangan telah berjalan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, nilai transaksi saham yang mencapai Rp3.449.809 menunjukkan adanya aktivitas pasar modal sebagai bagian dari perkembangan sektor keuangan, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2025 berada dalam kondisi yang cukup baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin beragam, daya saing daerah yang terus berkembang, serta sektor keuangan yang mulai menunjukkan peran dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ke depan, berbagai indikator tersebut perlu terus ditingkatkan melalui penguatan investasi, pengembangan sektor-

sektor produktif di luar pertambangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Laju Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa. Tingkat Inflasi Kabupaten Tana Tidung mengacu ke Kota Tarakan, karena Kabupaten Tana Tidung bukan merupakan salah satu dari kabupaten/kota penghitungan angka inflasi di Provinsi Kalimantan Utara. Berikut tingkat inflasi tahun 2021-2025:



Gambar 3. 15 Laju Inflasi
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara 2026

Berdasarkan gambar di atas, laju inflasi Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 1,42 persen, yang menunjukkan tingkat kenaikan harga relatif rendah. Selanjutnya, pada tahun 2022 inflasi meningkat menjadi 3,97 persen, sejalan dengan tekanan inflasi yang terjadi secara nasional akibat kenaikan harga

komoditas global, gangguan rantai pasok, serta penyesuaian harga energi dan bahan kebutuhan pokok. Kondisi tersebut menyebabkan inflasi sedikit berada di atas rentang sasaran inflasi nasional.

Memasuki tahun 2023, laju inflasi kembali menurun menjadi 2,46 persen, kemudian terus menurun menjadi 1,60 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, inflasi mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,70 persen, namun masih berada dalam kisaran yang relatif rendah dan stabil. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kabupaten Tana Tidung mulai mereda setelah peningkatan yang terjadi pada tahun 2022, seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dan efektivitas berbagai upaya pengendalian inflasi di daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan inflasi Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021–2025 mencerminkan kondisi stabilitas harga yang cukup terjaga. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022, laju inflasi pada tiga tahun terakhir kembali berada pada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1$ persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga di daerah dapat dipertahankan sehingga mampu mendukung terjaganya daya beli masyarakat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

F. Gini Rasio

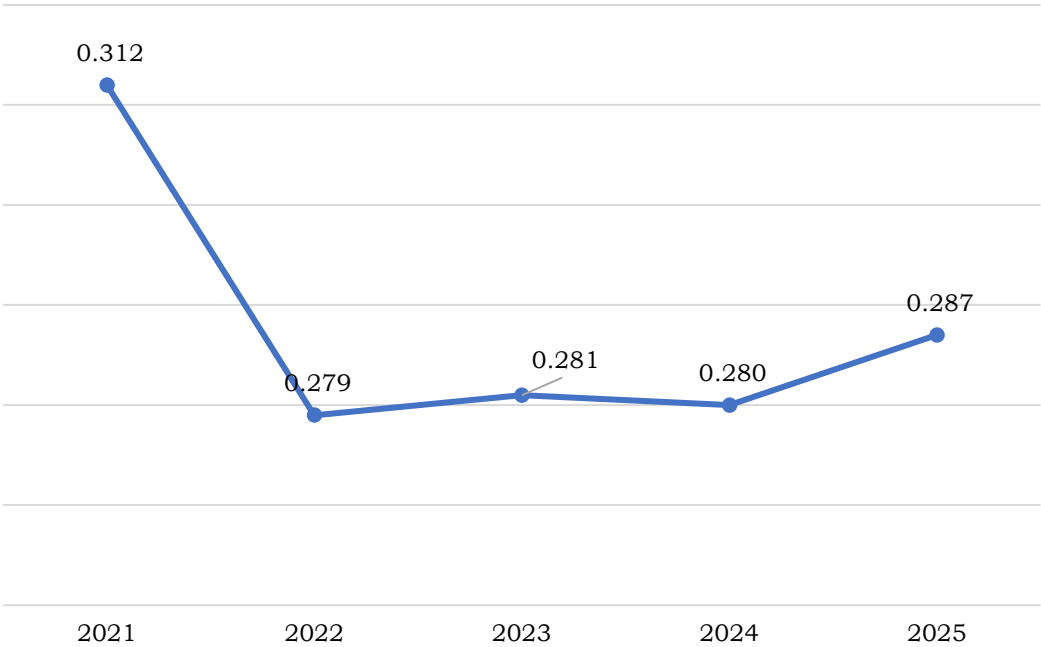
Gini Rasio atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi, gini rasio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille). Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. Berikut pedoman pengukuran gini rasio:

Tabel 3. 8 Pedoman Pengukuran Gini Rasio

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0.4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Berdasarkan pedoman tersebut berikut perkembangan indeks gini di Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2021-2025:



Gambar 3. 16 Indeks Gini

Sumber: BPS Kabupaten Tana Tidung, 2026

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021–2025. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, di mana nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data tersebut, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun terakhir berada pada kategori rendah dan menunjukkan kondisi yang relatif stabil.

Pada tahun 2021, Indeks Gini tercatat sebesar 0,312, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,279 pada tahun 2022. Penurunan tersebut

menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 Indeks Gini sedikit meningkat menjadi 0,281, kemudian kembali menurun menjadi 0,280 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Indeks Gini kembali meningkat menjadi 0,287, namun kenaikan tersebut masih tergolong moderat dan tetap berada pada kategori ketimpangan rendah.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat relatif terjaga dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga mencerminkan bahwa manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi modal yang positif untuk mendukung pembangunan yang inklusif, sekaligus perlu dipertahankan melalui kebijakan yang mendorong pemerataan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan masing-masing indikator ekonomi makro yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui kondisi, kecenderungan, serta tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Tidung. Analisis tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi peluang dan potensi yang dapat dioptimalkan, sekaligus berbagai faktor yang perlu diantisipasi dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Selain mempertimbangkan capaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya, penyusunan target ekonomi makro Tahun 2027 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029, proyeksi kondisi perekonomian regional dan nasional, serta kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Proyeksi target indikator ekonomi makro Tahun 2027 disusun sebagai sasaran yang ingin dicapai pada tahun perencanaan melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Target tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan fiskal, penentuan prioritas pembangunan, pengalokasian

sumber daya, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan selama Tahun 2027. Dengan demikian, target indikator ekonomi makro diharapkan mampu mencerminkan kondisi yang realistis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, sehingga dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun proyeksi target indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Target Indikator Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	INDIKATOR	TARGET 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,96
2	Tingkat Kemiskinan	3,79
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,13
4	PDRB Perkapita	342,81
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,47
6	Rasio Gini	0,273

Sumber: RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029

Target indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada tabel di atas merupakan sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan. Penetapan target tersebut didasarkan pada hasil evaluasi capaian pembangunan pada periode sebelumnya, proyeksi kondisi perekonomian daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara, serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, target yang ditetapkan telah mempertimbangkan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Pada Tahun 2027, pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47 persen yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PDRB per kapita menjadi Rp342,81 juta. Sejalan dengan itu, kualitas pembangunan manusia ditargetkan meningkat yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,96, disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,79 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,13 persen. Selain itu, pemerataan hasil pembangunan terus diupayakan melalui target Rasio Gini sebesar 0,273.

Secara keseluruhan, target indikator ekonomi makro Tahun 2027 mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pencapaian target tersebut memerlukan sinergi antarperangkat daerah, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

3.2 Keuangan Daerah

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada batasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan sangat menentukan keberhasilan dari realisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun

kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2023 hingga tahun 2025. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;

6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Adapun rangkuman data dari rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 - 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 10 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025

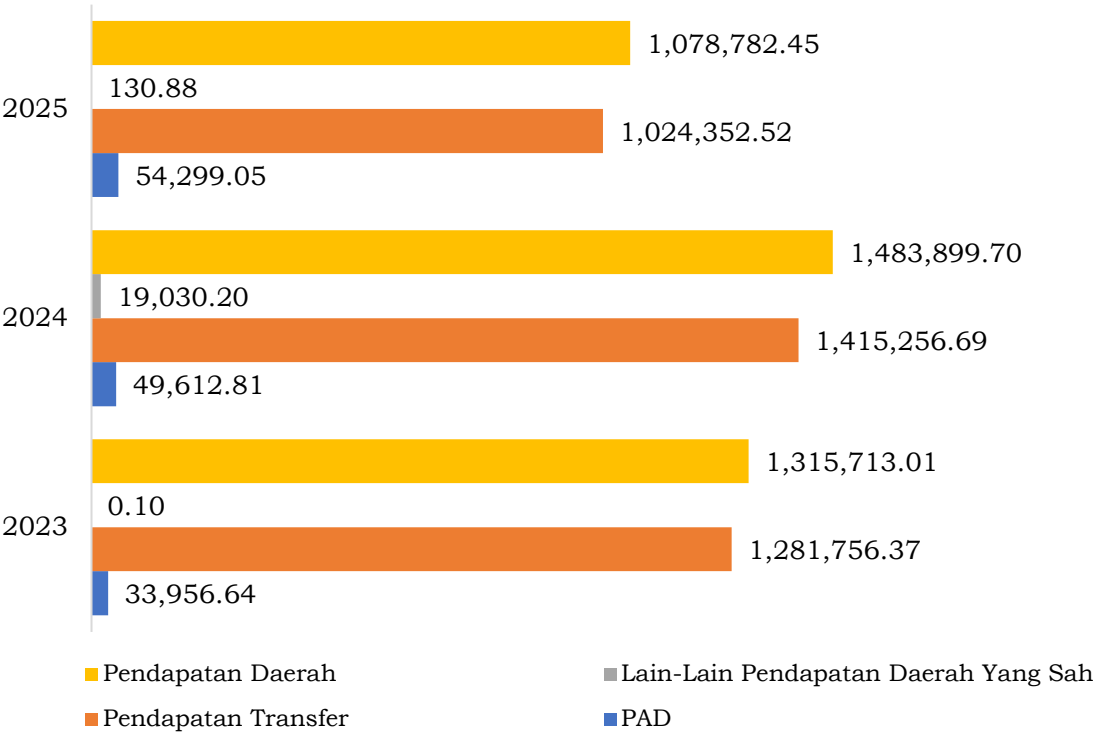
No	Komponen	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	33,94	1,67	-27,3	2,77
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69,24	24,18	9,45	34,29
04.01.01	Pajak Daerah	119,06	-18,4	31,07	43,91
04.01.02	Retribusi Daerah	0,15	-37,48	174,14	45,60
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,74	2,35	-24,11	-6,01
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	85,86	55,61	6,13	49,20
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	33,2	-0,28	-27,62	1,77
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	34,15	-1,45	-27,26	1,81
04.2.01.01	Dana Perimbangan	35,39	-2,21	-27,38	1,93
04.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-5,54	-100		-52,77
04.2.01.03	Dana Penyesuaian				
04.2.01.05	Dana Desa	4,26	0,49	-10,85	-2,03
04.2.01.06	Dana Insentif Fiskal			-50,61	-50,61
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,08	25,87	-34,28	2,22
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44,99	-30,51	31,87	15,45
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	-40,36	279,92	-95,42	48,05
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-100		-99,31	-99,66
04.03.01	Pendapatan Lainnya				
04.03.02	Pendapatan Hibah			-99,66	-99,66
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-100		-95,82	-97,91
5	BELANJA DAERAH	53,73	15,43	0,75	23,30
05.01	BELANJA OPERASI	26,25	12,45	0,75	13,15
05.01.01	Belanja Pegawai	7,65	5,6	0,75	4,67
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	44,3	14,67	-22,98	12,00
05.01.05	Belanja Hibah	83,84	74,92	-49,36	36,47
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2255,75	-97,38	1281,95	1146,77
05.02	BELANJA MODAL	173,34	27,21	-13,31	62,41
05.02.01	Belanja Modal Tanah	-100			-100,00
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,94	-27,54	-11,29	3,70
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201,29	33,51	3,81	79,54
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269,24	52,94	-38,04	94,71
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	128,06	-87,7	171,36	70,57
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA			-12,52	-12,52
05.03.01	Belanja Tidak Terduga			-12,52	-12,52

No	Komponen	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
05.04	BELANJA TRANSFER	44,22	-0,39	-12,52	10,44
05.04.01	Belanja Bagi Hasil				
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	44,22	-0,39	-13,25	10,19

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun nilai realisasi Pendapatan Daerah Tana Tidung pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 1.078.782,45 (dalam Juta Rupiah). Berikut merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Tana Tidung pada tahun 2023 hingga 2025:



Gambar 3. 17 Perkembangan Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode tahun 2023 hingga 2025 pada awalnya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, sebelum mengalami penyesuaian pada tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan dinamika kapasitas fiskal daerah yang tetap kuat namun adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal. Pada tahun 2023, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp1,32 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp1,28 triliun. PAD juga menunjukkan peningkatan menjadi Rp33,96 miliar, meskipun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat kecil, yakni sekitar Rp0,10 juta.

Tren peningkatan ini mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,48 triliun. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan PAD menjadi Rp49,61 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,42 triliun, serta pemulihan signifikan pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp19,03 miliar. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan pendapatan daerah menjadi Rp1,08 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan transfer menjadi Rp1,02 triliun, meskipun PAD tetap mengalami peningkatan menjadi Rp54,30 miliar. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp130,88 juta, relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung tetap menunjukkan kapasitas fiskal yang cukup kuat. Hal ini tercermin dari tren peningkatan PAD yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya upaya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. Ke depan, penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan diversifikasi sumber pendapatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Secara lebih rinci pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 11 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025

Uraian	Pertumbuhan (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2023	2024	2025	

Pendapatan Daerah	33,94	1,67	-27,3	2,77
Pendapatan Asli Daerah	69,24	24,18	9,45	34,29
Pendapatan Transfer	33,2	-0,28	-27,62	1,77
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-100	-	-99,31	-99,66

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung , 2026

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang progresif pada fase awal, sebelum mengalami penyesuaian pada tahun terakhir sebagai bagian dari siklus fiskal yang adaptif. Pada tahun 2023 pertumbuhan mencapai akselerasi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 33,94%, yang menandai penguatan kapasitas fiskal daerah secara substansial. Pada tahun 2024, pertumbuhan tetap terjaga meskipun melambat menjadi 1,67%, menunjukkan fase stabilisasi setelah periode ekspansi tinggi. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi kontraksi sebesar -27,30%, yang lebih dipengaruhi oleh dinamika penyesuaian pada komponen pendapatan, khususnya transfer. Meskipun demikian, secara rata-rata, pendapatan daerah masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,77%, yang menunjukkan bahwa fondasi fiskal daerah tetap berada dalam kondisi yang relatif kuat dan resilien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama kemandirian fiskal menunjukkan kinerja yang sangat positif dan konsisten meningkat sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2023, PAD meningkat pada sebesar 69,24% seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan intensifikasi pemungutan. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 24,18%, dan tetap tumbuh pada tahun 2025 sebesar 9,45%. Dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 34,29%, kinerja PAD ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berhasil memperkuat basis penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan potensi ekonomi lokal secara lebih efektif.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan daerah dan berperan sebagai penopang utama kapasitas fiskal. Pada tahun 2023, pendapatan transfer tumbuh sebesar 33,20%. Pada tahun 2024, terjadi penurunan tipis sebesar -0,28%, yang menunjukkan fase normalisasi setelah peningkatan signifikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi kontraksi sebesar -27,62%, yang turut memengaruhi penurunan total pendapatan daerah.

Meskipun demikian, secara rata-rata pendapatan transfer masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 1,77%, yang menegaskan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap konsisten meskipun bersifat fluktuatif mengikuti kebijakan nasional dan kondisi makroekonomi.

Di sisi lain, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan karakteristik yang sangat fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Setelah mengalami penurunan sebesar -100,00% pada tahun 2023, sehingga kontribusinya menjadi sangat minimal. Pada tahun 2025, penurunan masih terjadi sebesar -99,31%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -99,66%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komponen ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor insidental dan belum menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, struktur dan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan arah yang progresif dengan fondasi fiskal yang cukup kuat. Fase pertumbuhan tinggi pada periode 2023 berhasil mendorong peningkatan kapasitas fiskal secara signifikan, sementara perlambatan dan kontraksi pada tahun 2024–2025 mencerminkan proses penyesuaian yang wajar dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Di tengah dinamika tersebut, tren peningkatan PAD yang konsisten menjadi indikator utama penguatan kemandirian fiskal daerah, yang menjadi modal penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Dengan capaian rata-rata pertumbuhan yang tetap positif serta upaya pengelolaan keuangan yang semakin adaptif, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memiliki landasan yang kuat untuk terus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2023 hingga 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 12 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)

No	Komponen	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.315.713,01	1.483.899,70	1.078.782,45	2,77
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.956,64	49.612,81	54.299,05	34,29
04.01.01	Pajak Daerah	9.532,11	7.812,76	10.240,38	43,91
04.01.02	Retribusi Daerah	1.129,13	706,31	1.936,25	45,60
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816,82	4.930,22	3.741,72	-6,01
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.478,59	36.163,52	38.380,70	49,20
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.281.756,37	1.415.256,69	1.024.352,52	1,77
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.226.822,79	1.342.315,18	976.414,18	1,81
04.2.01.01	Dana Perimbangan	1.191.361,09	1.298.349,35	942.849,10	1,93
04.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.806,33	0	0	-52,77
04.2.01.03	Dana Penyesuaian		0	0	
04.2.01.05	Dana Desa	29.655,37	29.801,78	26.568,98	-2,03
04.2.01.06	Dana Insentif Fiskal		14.164,04	6.996,10	-50,61
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.933,58	72.941,51	47.938,34	2,22
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.956,79	35.037,62	46.203,85	15,45
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.976,79	37.903,89	1.734,50	48,05
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		19.030,20	130,88	-99,66
04.03.01	Pendapatan Lainnya				
04.03.02	Pendapatan Hibah		17.314,15	59,09	-99,66
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1.716,05	71,8	-97,91

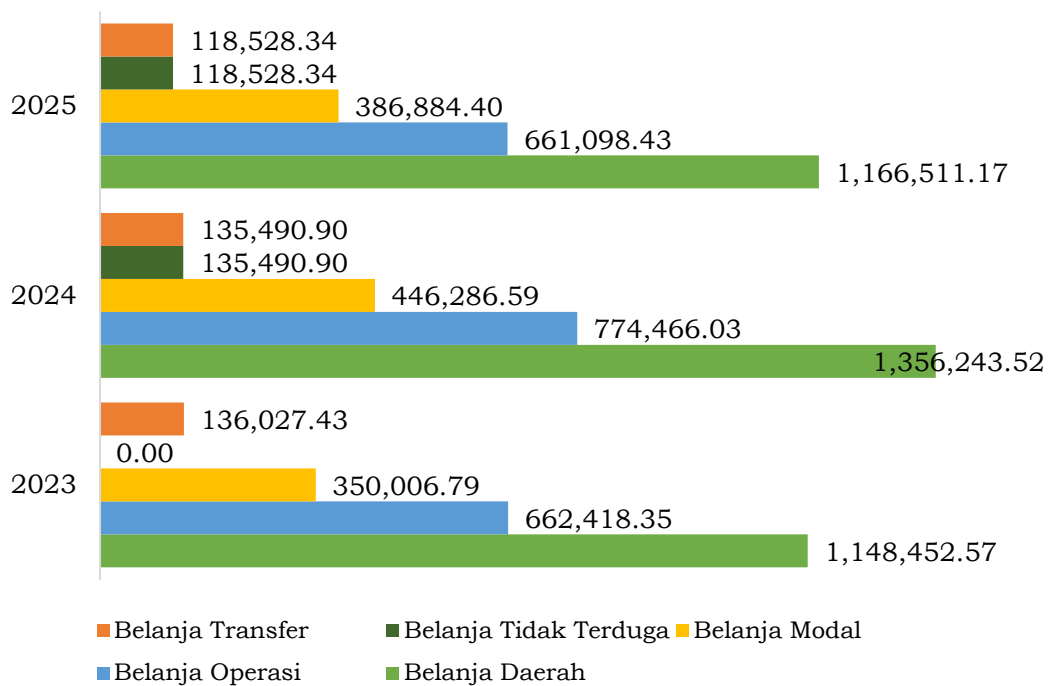
Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

B. Kinerja Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan.

Prioritas pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Realisasi belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung selama kurun waktu 3 tahun (2023 – 2025) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,23%. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 18 Perkembangan Realisasi Belanja Dearah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)
 Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

Berdasarkan perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025, pengelolaan belanja daerah menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Total realisasi belanja daerah pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.148.452,57 juta, kemudian meningkat menjadi Rp1.356.243,52 juta pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 18,09 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp1.166.511,17 juta, atau mengalami penurunan sekitar 13,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan APBD bersifat adaptif terhadap perubahan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan, sehingga alokasi belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada masing-masing tahun anggaran.

Berdasarkan komposisinya, belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Realisasi belanja operasi meningkat dari Rp662.418,35 juta pada tahun 2023 menjadi Rp774.466,03 juta pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 16,92 persen, kemudian menurun menjadi Rp661.098,43 juta pada tahun 2025 atau turun sekitar 14,64 persen.

Dominasi belanja operasi menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja operasional lainnya. Di sisi lain, besarnya proporsi belanja operasi juga mengindikasikan bahwa ruang fiskal untuk meningkatkan belanja yang bersifat produktif masih perlu terus diperkuat agar alokasi APBD semakin berorientasi pada penciptaan manfaat pembangunan jangka panjang.

Sementara itu, belanja modal mengalami peningkatan dari Rp350.006,79 juta pada tahun 2023 menjadi Rp446.286,59 juta pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 27,51 persen, kemudian menurun menjadi Rp386.884,40 juta pada tahun 2025 atau berkurang sekitar 13,31 persen. Peningkatan belanja modal pada tahun 2024 mencerminkan adanya penguatan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, serta aset tetap yang mendukung pembangunan daerah. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2025, nilai belanja modal masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meskipun dilakukan secara lebih selektif sesuai kemampuan fiskal.

Pada komponen belanja transfer, realisasi menunjukkan kecenderungan menurun dari Rp136.027,43 juta pada tahun 2023 menjadi Rp135.490,90 juta pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi Rp118.528,34 juta pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian alokasi transfer yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pengalokasian belanja pada masing-masing tahun anggaran. Sementara itu, belanja tidak terduga tidak terealisasi pada tahun 2023, namun terealisasi sebesar Rp135.490,90 juta pada tahun 2024 dan Rp118.528,34 juta pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menyediakan kapasitas fiskal untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak maupun keadaan tertentu, sehingga fleksibilitas APBD dalam menghadapi risiko tetap terjaga.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 memperlihatkan bahwa APBD masih didominasi oleh belanja operasi, sementara belanja modal menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan fisik dan peningkatan kualitas pelayanan

publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dengan pembiayaan pembangunan daerah. Namun demikian, ke depan diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah (quality spending) melalui penguatan belanja yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap alokasi APBD tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3. 13 Petumbuhan dan Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	Pertumbuhan (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	
4	BELANJA	53,73	15,43	-13,99	18,39
4.1	Belanja Operasi	26,25	12,45	-14,64	8,02
4.2	Belanja Modal	173,34	27,21	-13,31	62,41
4.3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-12,52	-12,52
4.4	Belanja Transfer	44,22	-0,39	-12,52	10,44

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

Selain berdasarkan nilai nominal, perkembangan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan realisasi belanja selama periode 2023–2025. Secara agregat, total belanja daerah masih menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2023 realisasi belanja tumbuh sebesar 53,73 persen, kemudian melambat menjadi 15,43 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 13,99 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan realisasi belanja daerah selama periode tersebut mencapai 18,39 persen, yang menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir belanja daerah masih mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi perlambatan pada tahun terakhir.

Berdasarkan jenis belanja, belanja modal mencatat rata-rata pertumbuhan tertinggi, yaitu 62,41 persen. Pada tahun 2023 belanja modal meningkat sangat signifikan sebesar 173,34 persen, kemudian masih tumbuh sebesar 27,21 persen pada tahun 2024, sebelum mengalami penurunan sebesar 13,31 persen pada tahun 2025. Pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sempat melakukan percepatan investasi pembangunan melalui peningkatan belanja aset tetap dan infrastruktur, namun pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian sebagai

bagian dari pengelolaan kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, tingginya rata-rata pertumbuhan belanja modal mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan jangka menengah melalui penyediaan sarana dan prasarana publik.

Di sisi lain, belanja operasi menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan jenis belanja lainnya. Pertumbuhan belanja operasi mencapai 26,25 persen pada tahun 2023, kemudian melambat menjadi 12,45 persen pada tahun 2024, dan mengalami penurunan sebesar 14,64 persen pada tahun 2025. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,02 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus mulai melakukan penyesuaian terhadap belanja operasional agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal daerah.

Untuk belanja transfer, pertumbuhannya relatif lebih moderat dengan rata-rata sebesar 10,44 persen. Setelah meningkat cukup tinggi pada tahun 2023 sebesar 44,22 persen, belanja transfer mengalami penurunan tipis sebesar 0,39 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun sebesar 12,52 persen pada tahun 2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alokasi belanja transfer cenderung mengikuti dinamika kebutuhan pendanaan serta kebijakan pengalokasian transfer sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, belanja tidak terduga tidak mengalami pertumbuhan pada tahun 2023 dan 2024 karena tidak terdapat realisasi pada periode tersebut. Pada tahun 2025, belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 12,52 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Fluktuasi tersebut merupakan karakteristik belanja tidak terduga yang penggunaannya bergantung pada kebutuhan penanganan keadaan darurat, bencana, maupun kondisi tertentu yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD.

Secara keseluruhan, perkembangan pertumbuhan belanja daerah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 masih berorientasi pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan pendanaan pembangunan daerah. Tingginya pertumbuhan belanja modal pada awal periode mencerminkan dorongan pembangunan infrastruktur dan aset daerah, sedangkan perlambatan pertumbuhan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya penyesuaian fiskal (*fiscal adjustment*) untuk

menjaga keberlanjutan APBD di tengah dinamika kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk terus mengarahkan kebijakan belanja pada prinsip belanja berkualitas (*quality spending*), yaitu belanja yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah serta masing-masing komponennya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025 (Dalam Juta Rupiah)

No	Komponen	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	
5	BELANJA DAERAH	1.148.452,57	1.356.243,52	1.166.511,17	0,02
05.1	BELANJA OPERASI	662.418,35	774.466,03	661.098,43	0,01
05.1.01	Belanja Pegawai	293.426,55	313.541,04	315.896,00	0,04
05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.282,91	422.867,34	325.696,83	-0,01
05.1.05	Belanja Hibah	21.037,04	38.040,04	19.262,10	0,16
05.1.06	Belanja Bantuan Sosial	671,86	17,62	243,5	5,92
05.2	BELANJA MODAL	350.006,79	446.286,59	386.884,40	0,07
05.2.01	Belanja Modal Tanah		0	2.847,96	
05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.699,31	39.818,60	35.323,56	-0,19
05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.659,23	225.324,83	233.904,48	0,19
05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.638,74	179.911,50	111.466,20	0,07
05.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	10.009,52	1.231,67	3.342,20	0,42
05.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		135.490,90	118.528,34	-0,13
05.3.01	Belanja Tidak Terduga		0	989,95	
05.4	BELANJA TRANSFER	136.027,43	135.490,90	118.528,34	-0,06
05.4.01	Belanja Bagi Hasil		0	989,95	
05.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.027,43	135.490,90	117.538,40	-0,07

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026

C. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan pada pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp. 0,-.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2023 – 2025 (dalam Juta Rupiah)**

No	Komponen	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.090,88	308.365,96	436.022,14	0,80
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.090,88	308.365,96	436.022,14	0,80
	PEMBIAYAAN NETTO	141.090,88	308.365,96	436.022,14	0,80
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	308.351,32	320.366,68	348.293,42	0,06

Sumber : BPKAD Kabupaten Tana Tidung 2026

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

A. Proporsi Pendapatan Daerah

Berdasarkan rata-rata proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebagai sumber utama penerimaan daerah. Komposisi tersebut menggambarkan kapasitas fiskal daerah yang masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata proporsi sebesar 3,65 persen dari total pendapatan daerah. Meskipun kontribusinya relatif kecil, PAD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah karena berasal dari potensi ekonomi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan

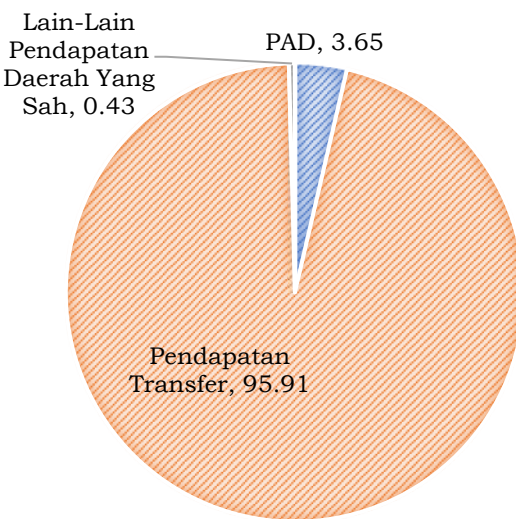
sumber-sumber pendapatan yang sah masih terbuka dan perlu terus diperkuat.

Sementara itu, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,91 persen terhadap total pendapatan daerah. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi penopang utama kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini merupakan karakteristik yang umum dijumpai pada daerah dengan kapasitas fiskal yang masih berkembang, sehingga keberlanjutan pembangunan daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer pemerintah pusat.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki rata-rata proporsi sebesar 0,43 persen. Meskipun kontribusinya relatif kecil, komponen pendapatan ini tetap memberikan tambahan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pendukung dalam pelaksanaan APBD.

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta penguatan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 19 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3. 16 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

No	Komponen	Proporsi			Rata-Rata Proporsi 2023-2025 (%)
		2023	2024	2025	
4	PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100
04.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,58	3,34	5,03	3,65
04.1.01	Pajak Daerah	28,07	15,75	18,86	20,89
04.1.02	Retribusi Daerah	3,33	1,42	3,57	2,77
04.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14,19	9,94	6,89	10,34
04.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54,42	72,89	70,68	66,00
04.2	PENDAPATAN TRANSFER	97,42	95,37	94,95	95,91
04.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	95,71	94,85	95,32	95,29
04.2.01.01	Dana Perimbangan	97,11	96,72	96,56	96,80
04.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,47	0	0	0,16
04.2.01.03	Dana Penyesuaian	0	0	0	0,00
04.2.01.05	Dana Desa	2,42	2,22	2,72	2,45
04.2.01.06	Dana Insentif Fiskal		1,06	0,72	0,89

No	Komponen	Proporsi			Rata-Rata Proporsi 2023-2025 (%)
		2023	2024	2025	
04.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,29	5,15	4,68	4,71
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	81,84	48,04	96,38	75,42
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	18,16	51,96	3,62	24,58
04.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	1,28	0,01	0,43
04.3.01	Pendapatan Lainnya		0	0	0,00
04.3.02	Pendapatan Hibah		90,98	45,14	68,06
04.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		9,02	54,86	31,94

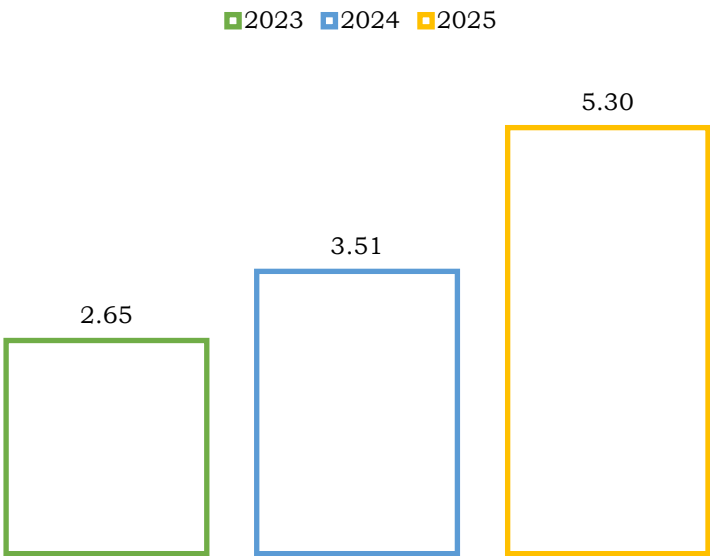
Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Komposisi pendapatan daerah tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan arah kebijakan fiskal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027, yang diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2023 – 2025) dan kriteria dari rasio tersebut.



Gambar 3. 20 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Tabel 3. 17 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Rasio kemandirian daerah tercatat sebesar 2,65 persen pada tahun 2023, meningkat menjadi 3,51 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 5,30 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, meskipun peningkatannya masih relatif terbatas dibandingkan dengan besarnya pendapatan yang bersumber dari transfer.

Mengacu pada klasifikasi pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 masih berada pada kategori kemampuan keuangan

sangat rendah dengan pola hubungan instruktif, karena nilai rasio kemandirian masih berada pada kisaran 0–25 persen. Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih didukung terutama oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih belum menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

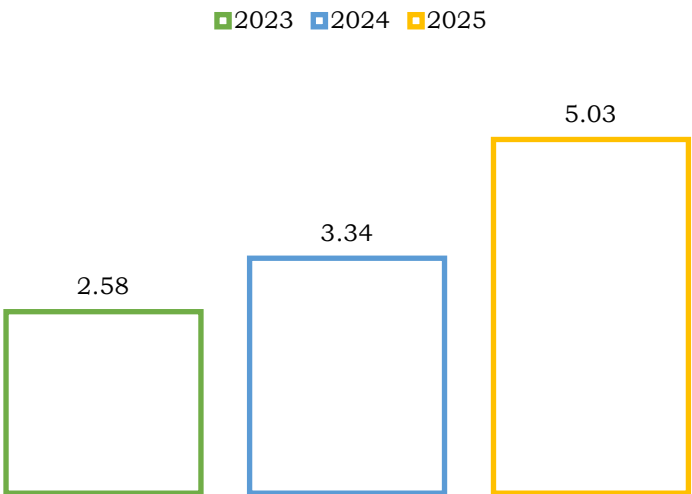
Meskipun demikian, peningkatan rasio kemandirian dari 2,65 persen pada tahun 2023 menjadi 5,30 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, walaupun hasilnya masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan.

Ke depan, peningkatan kemandirian fiskal perlu terus diarahkan melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penguatan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah, diharapkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih luas sehingga kemampuan dalam membiayai prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat semakin optimal.dikurangi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut tersaji data

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 3 tahun beserta kriterianya:



Gambar 3. 21 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Tabel 3. 18 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, meskipun masih berada pada kategori sangat kurang. Rasio derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 2,58 persen pada tahun 2023, meningkat menjadi 3,34 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 5,03 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, walaupun peningkatannya masih relatif terbatas.

Mengacu pada kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, rasio yang berada pada kisaran 0,00–10,00 persen termasuk dalam kategori sangat kurang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan

Kabupaten Tana Tidung dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri masih terbatas. Dengan kata lain, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal masih sangat dipengaruhi oleh dukungan fiskal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

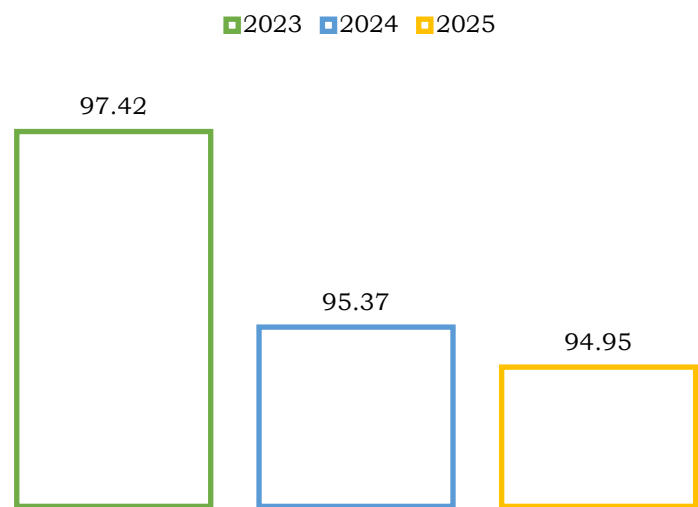
Meskipun demikian, peningkatan rasio dari 2,58 persen pada tahun 2023 menjadi 5,03 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya arah perbaikan dalam kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah mulai memberikan hasil, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Kondisi ini menjadi modal awal yang perlu terus diperkuat agar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dapat meningkat secara bertahap.

Ke depan, peningkatan derajat desentralisasi fiskal perlu didukung melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah, pengembangan potensi ekonomi unggulan, serta inovasi dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha juga perlu terus didorong sebagai upaya memperluas basis penerimaan daerah. Dengan demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah diharapkan semakin meningkat sehingga kapasitas fiskal daerah menjadi lebih kuat, ruang fiskal semakin luas, dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer

dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir beserta kriterianya.



Gambar 3. 22 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Tabel 3. 19 Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Tana Tidung terhadap pendapatan transfer selama periode 2023–2025 masih berada pada kategori sangat tinggi, meskipun menunjukkan kecenderungan menurun. Rasio ketergantungan keuangan daerah tercatat sebesar 97,42 persen pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 95,37 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 94,95 persen pada tahun 2025.

Mengacu pada kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah, nilai rasio yang berada di atas 50 persen termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Tana Tidung masih didominasi oleh pendapatan transfer, sehingga kapasitas fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dengan demikian, keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah masih bergantung pada stabilitas dan kecukupan alokasi dana transfer.

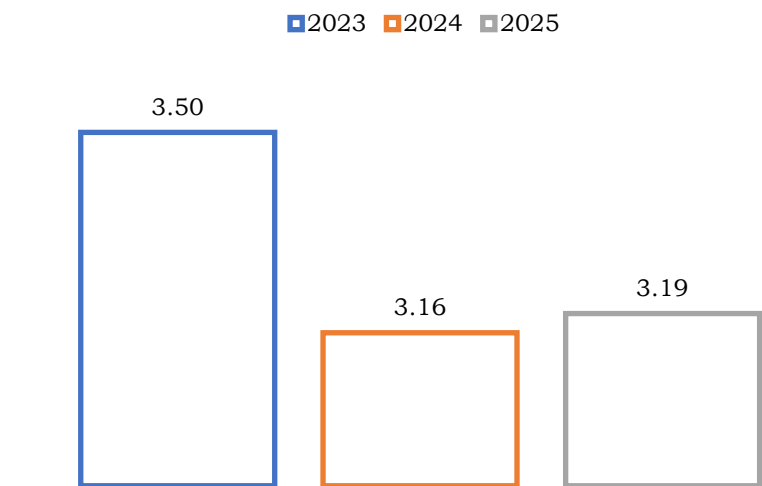
Meskipun demikian, penurunan rasio ketergantungan dari 97,42 persen pada tahun 2023 menjadi 94,95 persen pada tahun 2025 menunjukkan adanya arah perbaikan dalam struktur pendapatan daerah. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai meningkat, meskipun belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap komposisi pendapatan daerah secara keseluruhan. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, walaupun ruang fiskal yang bersumber dari PAD masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, rasio ketergantungan keuangan daerah yang masih berada pada kategori sangat tinggi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ke depan perlu diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar dana transfer yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah

ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.



Gambar 3. 23 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 – 2025
Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Tabel 3. 20 Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD \geq 1,838$	Sangat Tinggi
$1,053 \leq IKFD < 1,838$	Tinggi
$0,727 \leq IKFD < 1,053$	Sedang
$0,530 \leq IKFD < 0,727$	Rendah
$IKFD < 0,530$	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 memiliki kapasitas fiskal yang berada pada kategori sangat tinggi. Nilai IKFD tercatat sebesar 3,50 pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 3,16 pada tahun 2024, dan sedikit meningkat menjadi 3,19 pada tahun 2025. Mengacu pada kriteria penilaian IKFD, nilai yang berada di atas 1,838 termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga kapasitas fiskal

Kabupaten Tana Tidung selama tiga tahun terakhir tergolong sangat baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, nilai IKFD Kabupaten Tana Tidung tetap berada jauh di atas batas kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara relatif daerah masih memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Tingginya nilai IKFD juga mencerminkan bahwa kemampuan fiskal daerah, yang dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan dan karakteristik fiskal daerah, masih berada pada tingkat yang cukup kuat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Di sisi lain, apabila dibandingkan dengan hasil analisis rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah, terlihat adanya karakteristik fiskal Kabupaten Tana Tidung yang khas. Meskipun kapasitas fiskal daerah tergolong sangat tinggi, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, sehingga tingkat kemandirian fiskal masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya berasal dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan masih ditopang oleh besarnya transfer pemerintah pusat sebagai bagian dari kebijakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Dengan demikian, tantangan utama pengelolaan fiskal Kabupaten Tana Tidung bukan terletak pada keterbatasan kapasitas fiskal, tetapi pada upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ke depan perlu diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pemanfaatan aset daerah, pengembangan potensi ekonomi unggulan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Di sisi lain, kapasitas fiskal yang relatif tinggi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui alokasi anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

B. Proporsi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja terbagi ke dalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 hingga 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 21 Proporsi Belanja Kab. Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

No	Komponen	Proporsi			Rata-Rata Proporsi 2023-2025 (%)
		2023	2024	2025	
5	BELANJA DAERAH	100	100	100	100,00
05.1	BELANJA OPERASI	57,68	57,1	56,67	57,15
05.1.01	Belanja Pegawai	44,3	40,48	47,78	44,19
05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52,43	54,6	49,27	52,10
05.1.05	Belanja Hibah	3,18	4,91	2,91	3,67
05.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,1	0	0,04	0,05
05.2	BELANJA MODAL	30,48	32,91	33,17	32,19
05.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0	0,74	0,25
05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,34	8,92	9,13	11,13
05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,19	50,49	60,46	53,05
05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33,61	40,31	28,81	34,24
05.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	2,86	0,28	0,86	1,33
05.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	9,99	10,16	6,72
05.3.01	Belanja Tidak Terduga	0	0	0,84	0,28
05.4	BELANJA TRANSFER	11,84	9,99	10,16	10,66
05.4.01	Belanja Bagi Hasil		0	0,84	0,42
05.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100	100	99,16	99,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan

struktur belanja yang relatif konsisten. Belanja Operasi masih menjadi komponen dengan proporsi terbesar dalam struktur belanja daerah dengan rata-rata sebesar 57,15 persen, diikuti oleh Belanja Modal sebesar 32,19 persen, Belanja Transfer sebesar 10,66 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 6,72 persen.

Dominannya proporsi Belanja Operasi menunjukkan bahwa pengalokasian APBD masih difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik secara berkelanjutan. Di sisi lain, proporsi Belanja Modal yang mencapai lebih dari sepertiga total belanja daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta penguatan aset daerah sebagai penunjang pembangunan jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, proporsi Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga relatif lebih kecil dibandingkan dua kelompok belanja utama tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Tana Tidung masih diarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan dukungan terhadap pembangunan daerah, dengan tetap menyediakan ruang fiskal untuk memenuhi kewajiban transfer serta mengantisipasi kebutuhan yang bersifat mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, komposisi belanja daerah tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan APBD Kabupaten Tana Tidung telah mengalokasikan belanja pada seluruh kelompok belanja sesuai fungsi dan kebutuhannya. Ke depan, peningkatan kualitas belanja daerah perlu terus diarahkan agar komposisi belanja tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga semakin berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan (outcome), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

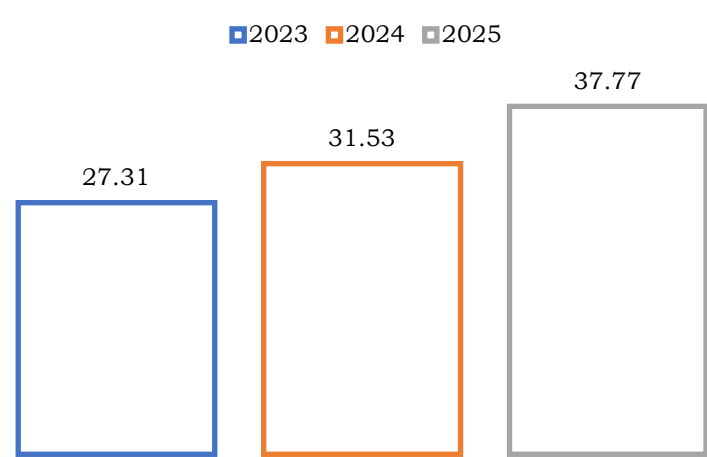
Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tana Tidung pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut:

1. Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam

jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (*leverage*) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama daerah di kawasan pulau Kalimantan seperti Kabupaten Tana Tidung.

Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. 24 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 - 2025
Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Berdasarkan Gambar tersebut, proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2023 proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer tercatat sebesar 27,31 persen, kemudian meningkat menjadi 31,53 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 37,77 persen pada tahun 2025.

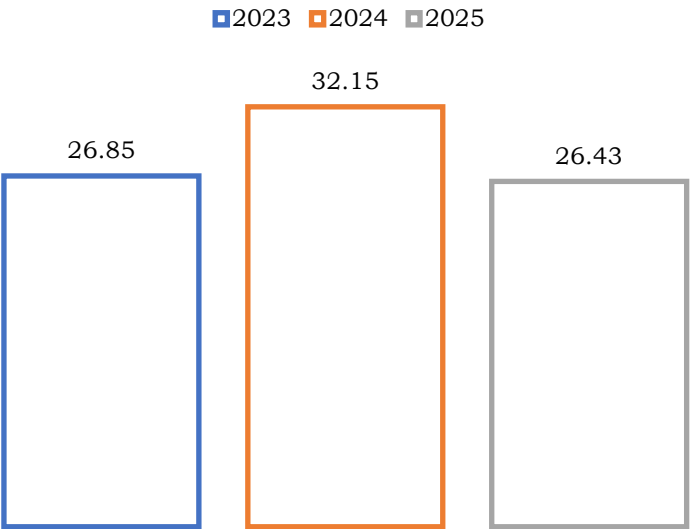
Peningkatan proporsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer untuk membiayai belanja yang bersifat produktif, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta pengadaan aset tetap yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran alokasi belanja ke arah

yang lebih produktif, sehingga dana transfer tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Secara umum, tren peningkatan proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer mencerminkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam meningkatkan kualitas belanja daerah (quality spending). Meskipun demikian, besarnya ketergantungan terhadap dana transfer sebagaimana ditunjukkan pada analisis struktur pendapatan daerah tetap menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja perlu diimbangi dengan upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

2. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 - 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 25 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025
Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Berdasarkan Gambar di atas, proporsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2023 proporsi SiLPA terhadap Belanja Daerah tercatat sebesar 26,85 persen, kemudian meningkat menjadi 32,15 persen pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 26,43 persen pada tahun 2025.

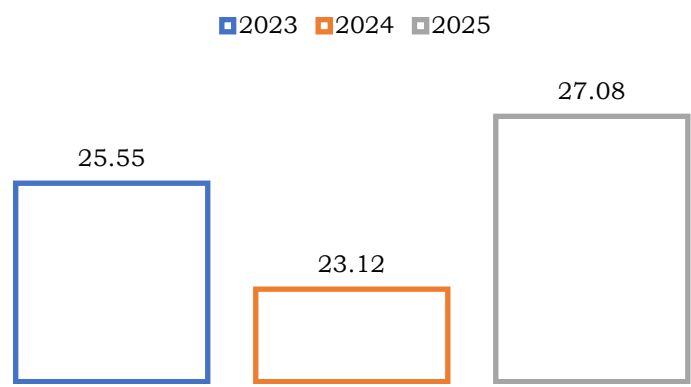
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya masih menjadi salah satu komponen pembiayaan yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pelaksanaan APBD. Peningkatan proporsi pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pemanfaatan SiLPA dalam mendukung pembiayaan belanja daerah semakin besar, sedangkan penurunan pada tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian dalam struktur pembiayaan daerah sehingga ketergantungan terhadap SiLPA relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, proporsi SiLPA yang berada pada kisaran 26–32 persen mencerminkan bahwa SiLPA masih memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan daerah, terutama sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada awal tahun anggaran. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan prioritas sebelum seluruh pendapatan daerah terealisasi. Namun demikian, pengelolaan SiLPA perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, akurasi proyeksi pendapatan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar struktur pembiayaan daerah menjadi lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.

3. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah

Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 hingga 2025 disajikan pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 26 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Berdasarkan Gambar tersebut, proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung selama periode 2023–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2023 proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah tercatat sebesar 25,55 persen, kemudian menurun menjadi 23,12 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 27,08 persen pada tahun 2025.

Perubahan proporsi tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pengalokasian Belanja Pegawai sebagai bagian dari penyesuaian struktur APBD terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penurunan proporsi pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah lebih banyak diarahkan pada komponen belanja lainnya, sedangkan peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya penyesuaian alokasi Belanja Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Secara umum, proporsi Belanja Pegawai yang berada pada kisaran 23,12–27,08 persen menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pegawai masih relatif proporsional terhadap total belanja daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa struktur APBD Kabupaten Tana Tidung tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pendanaan program pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui komponen belanja lainnya. Dengan demikian, komposisi belanja

daerah masih menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintahan dan belanja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ke depan, pengelolaan Belanja Pegawai perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, peningkatan kinerja aparatur, serta kemampuan keuangan daerah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan kualitas belanja melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga struktur APBD mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.2.3 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Analisis Surplus/Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel surplus/defisit Riil Anggaran. Hal tersebut untuk mengetahui apakah anggaran dari Kabupaten Tana Tidung mengalami surplus atau defisit. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan surplus/riil anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 22 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.315.713.014.762,43	1.483.899.695.654,45	1.078.782.452.324,05
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.148.452.568.868,60	1.356.243.522.076,42	1.166.511.172.955,70
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Surplus/Defisit riil	167.260.445.893,83	127.656.173.578,03	-87.728.720.631,65
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	141.090.876.020,99	436.022.138.025,90	308.365.964.447,87
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	141.090.876.020,99	436.022.138.025,90	308.365.964.447,87
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	308.351.321.914,82	348.293.417.394,25	436.022.138.025,90

Sumber: BPKAD Kabupaten Tana Tidung, 2026 (data diolah)

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2023 hingga 2025 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memiliki surplus riil yang cukup. Kondisi tersebut menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung cukup kuat untuk membiayai belanja.

3.3. Kerangka Pendanaan

Berpedoman pada prinsip perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program. Oleh karena itu, mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung dalam beberapa tahun kedepan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk mendukung analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam dokumen ini disajikan dengan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diturunkan melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dimana terdapat perbedaan rekening dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) khususnya pada pos Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja daerah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun dengan pendekatan yang lebih adaptif dan realistis, mencerminkan upaya penguatan ketahanan fiskal di tengah keterbatasan ruang keuangan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp692,728 miliar, yang menunjukkan adanya penyesuaian signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat, namun pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas penerimaan serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal secara bertahap.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp31,008 miliar. Nilai ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil, PAD tetap menjadi fokus penguatan sebagai fondasi peningkatan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dengan proyeksi sebesar Rp585,58 miliar. Komponen ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer antar daerah. Tingginya proporsi transfer ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung, terutama dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merancang belanja daerah sebesar Rp800,011 miliar dengan penekanan kuat pada efisiensi dan prioritas pembangunan. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp473,427 miliar, yang difokuskan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan

dan pelayanan publik, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja modal direncanakan sebesar Rp.232,015 miliar sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar. Selain itu, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp10 miliar untuk mengantisipasi kondisi darurat, serta belanja transfer sebesar Rp84,568 miliar diarahkan untuk mendukung desa dan pemerintahan di bawahnya.

RKPD Tahun 2027 juga mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga meskipun terdapat defisit anggaran sebesar Rp107,282 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan nilai yang sama, sehingga struktur APBD tetap dalam kondisi berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi RKPD Tahun 2027 menggambarkan kondisi fiskal yang lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap dikelola secara terarah dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas pendapatan. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta secara bertahap memperkuat kemandirian fiskal daerah demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rincian selengkapnya mengenai proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
(Dalam Juta Rupiah)

No	Komponen	Realisasi			Proyeksi 2027
		2023	2024	2025	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.315.713,01	1.483.899,70	1.078.782,45	692.728,74
04.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.956,64	49.612,81	54.299,05	31.008,15
04.1.01	Pajak Daerah	9.532,11	7.812,76	10.240,38	4.857,25
04.1.02	Retribusi Daerah	1.129,13	706,31	1.936,25	623,94
04.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.816,82	4.930,22	3.741,72	6.099,41
04.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.478,59	36.163,52	38.380,70	19.427,56
04.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.281.756,37	1.415.256,69	1.024.352,52	661.720,59
04.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.226.822,79	1.342.315,18	976.414,18	650.779,33
04.2.01.01	Dana Perimbangan	1.191.361,09	1.298.349,35	942.849,10	627.196,90
04.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.806,33	0,00	0,00	0,00
04.2.01.03	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00
04.2.01.05	Dana Desa	29.655,37	29.801,78	26.568,98	23.582,43
04.2.01.06	Dana Insentif Fiskal		14.164,04	6.996,10	0,00
04.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.933,58	72.941,51	47.938,34	10.941,26
04.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	44.956,79	35.037,62	46.203,85	10.941,26
04.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.976,79	37.903,89	1.734,50	0,00
04.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		19.030,20	130,88	0,00
04.3.01	Pendapatan Lainnya				0,00
04.3.02	Pendapatan Hibah		17.314,15	59,09	0,00
04.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1.716,05	71,80	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.148.452,57	1.356.243,52	1.166.511,17	800.011,23
05.1	BELANJA OPERASI	662.418,35	774.466,03	661.098,43	473.427,76
05.1.01	Belanja Pegawai	293.426,55	313.541,04	315.896,00	299.712,21
05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.282,91	422.867,34	325.696,83	167.905,71
05.1.05	Belanja Hibah	21.037,04	38.040,04	19.262,10	5.797,53
05.1.06	Belanja Bantuan Sosial	671,86	17,62	243,50	12,30
05.2	BELANJA MODAL	350.006,79	446.286,59	386.884,40	232.015,08
05.2.01	Belanja Modal Tanah		0,00	2.847,96	270,53

No	Komponen	Realisasi			Proyeksi 2027
		2023	2024	2025	
05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.699,31	39.818,60	35.323,56	8.329,41
05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.659,23	225.324,83	233.904,48	64.499,17
05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.638,74	179.911,50	111.466,20	155.109,36
05.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	10.009,52	1.231,67	3.342,20	3.806,62
05.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		135.490,90	118.528,34	10.000,00
05.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	989,95	10.000,00
05.4	BELANJA TRANSFER	136.027,43	135.490,90	118.528,34	84.568,39
05.4.01	Belanja Bagi Hasil		0,00	989,95	548,72
05.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	136.027,43	135.490,90	117.538,40	84.019,67
	SURPLUS / DEFISIT	167.260,45	127.656,17	-87.728,72	-107.282,49
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.090,88	308.365,96	436.022,14	107.282,49
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.090,88	308.365,96	436.022,14	107.282,49
	PEMBIAYAAN NETTO	141.090,88	308.365,96	436.022,14	107.282,49
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	308.351,32	436.022,14	348.293,42	0,00

Sumber: LRA 2021-2025 (diolah untuk 2027)

Proyeksi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun dengan pendekatan yang realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal daerah, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan serta stabilitas keuangan daerah. Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp692,73 miliar, yang mencerminkan struktur pendapatan yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, namun tetap diiringi dengan upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp31,01 miliar atau sekitar 4,48 persen dari total pendapatan daerah. Komposisi PAD masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19,43 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6,10 miliar. Sementara itu, kontribusi pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp4,86 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp0,62 miliar, yang menunjukkan bahwa ruang peningkatan penerimaan daerah masih perlu terus dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan lokal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas kemandirian fiskal daerah masih relatif terbatas sehingga penguatan PAD tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah ke depan.

Di sisi lain, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama struktur pendapatan daerah dengan proyeksi sebesar Rp661,72 miliar atau sekitar 95,52 persen dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer tersebut terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang seluruhnya masih menjadi sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Tingginya proporsi pendapatan transfer menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Tana Tidung terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Namun demikian, kondisi ini juga mencerminkan masih kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, khususnya bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merencanakan Belanja Daerah sebesar Rp800,01 miliar. Struktur belanja menunjukkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp473,43 miliar atau sekitar 59,18 persen dari total belanja daerah, dengan

komponen terbesar berupa Belanja Pegawai sebesar Rp299,71 miliar dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp167,91 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, operasional pemerintahan, serta pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

Selain belanja operasional, Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp232,02 miliar atau sekitar 29,00 persen dari total belanja daerah. Porsi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan investasi pembangunan meskipun ruang fiskal relatif terbatas. Belanja modal difokuskan pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp155,11 miliar, gedung dan bangunan sebesar Rp64,50 miliar, serta pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp8,33 miliar, yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan dasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp84,57 miliar, yang sebagian besar dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp10,00 miliar sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keadaan darurat, bencana, maupun kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons cepat dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, struktur APBD Tahun 2027 menunjukkan kondisi defisit anggaran sebesar Rp107,28 miliar. Defisit tersebut sepenuhnya ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan Daerah yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp107,28 miliar, sehingga Pembiayaan Netto juga bernilai Rp107,28 miliar dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan diproyeksikan sebesar Rp0,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal yang tetap terjaga, di mana defisit anggaran telah direncanakan secara sehat tanpa menambah beban pembiayaan melalui pinjaman daerah.

Secara umum, proyeksi APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 menggambarkan kebijakan fiskal yang konservatif, realistis, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. Meskipun struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer dan kapasitas fiskal daerah masih relatif

terbatas, pemerintah daerah tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan dukungan kepada pemerintah desa. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tetap menjadi prioritas strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bertahap, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Mengoptimalkan peningkatan PAD secara realistis dan terukur dengan memperhatikan karakteristik ekonomi Kabupaten Tana Tidung yang masih terbatas dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan lokal, dan pengelolaan aset daerah.
2. Memfokuskan pengelolaan PAD pada sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan, khususnya pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah dan peran BUMD secara selektif sebagai sumber pendapatan alternatif tanpa menambah beban fiskal daerah.
4. Menetapkan target pendapatan transfer secara konservatif dan berbasis kepastian kebijakan pemerintah pusat, mengingat tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer.
5. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menjaga kesinambungan dana transfer dan dukungan fiskal bagi daerah perbatasan dan daerah tertinggal.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1. Mengarahkan belanja daerah untuk menjaga keberlanjutan pelayanan dasar dan fungsi pemerintahan, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik di wilayah perdesaan.
2. Menyesuaikan struktur dan skala belanja daerah dengan kapasitas fiskal Kabupaten Tana Tidung yang menurun, melalui pengendalian belanja dan peningkatan efisiensi anggaran.
3. Memprioritaskan belanja operasi untuk menjamin kelangsungan layanan publik dan operasional pemerintahan daerah yang esensial.
4. Mengendalikan belanja pegawai secara ketat agar tetap proporsional dan tidak mengurangi ruang fiskal pembangunan daerah.

5. Mengarahkan belanja modal secara selektif pada infrastruktur dasar dan kegiatan strategis yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal.
6. Mengoptimalkan belanja transfer dan bantuan keuangan untuk mendukung pemerintahan desa dan pembangunan wilayah secara berkeadilan.
7. Menyediakan belanja tidak terduga secara memadai sebagai langkah antisipasi risiko bencana dan kondisi darurat, mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Menjaga keseimbangan APBD Tahun 2027 melalui pemanfaatan SiLPA secara terukur dan akuntabel untuk menutup defisit anggaran.
2. Mengendalikan ketergantungan terhadap SiLPA dengan meningkatkan kualitas perencanaan, penjadwalan kegiatan, dan penyerapan anggaran.
3. Mengelola pembiayaan daerah secara hati-hati dan berorientasi pada stabilitas fiskal, dengan menghindari kebijakan pembiayaan yang berpotensi membebani APBD di masa mendatang.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, kerangka pendanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Instrumen ini memuat rancangan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan kerangka pendanaan menjadi bagian integral dari keseluruhan upaya pembangunan daerah, karena berfungsi untuk memastikan bahwa perencanaan program sejalan dengan kemampuan keuangan riil daerah.

Tujuan utama dari penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan kapasitas keuangan daerah secara aktual, yang dapat dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas dalam kerangka pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Proses ini diawali dengan menghitung seluruh potensi penerimaan daerah, yang mencakup Pendapatan Daerah, pencairan Dana Cadangan (sesuai dengan Peraturan Daerah), serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya. Seluruh penerimaan tersebut kemudian

dikurangi dengan kebutuhan pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan estimasi kapasitas fiskal bersih.

Namun demikian, pemahaman mengenai kapasitas keuangan riil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijakan dan regulasi terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.258 Tahun 2025 terjadi perubahan mendasar dalam cara memahami dan menghitung kapasitas riil tersebut.

Sebelum adanya regulasi-regulasi tersebut, kapasitas riil keuangan daerah umumnya diartikan sebagai anggaran riil yang tersedia untuk belanja langsung program dan kegiatan pembangunan. Namun dalam sistem klasifikasi dan penganggaran yang baru, hampir seluruh komponen belanja termasuk belanja wajib dan mengikat seperti belanja pegawai, tunjangan, bantuan sosial, hingga hibah secara sistemik telah terklasifikasi dalam struktur program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah. Akibatnya, pendekatan lama dalam menghitung kapasitas riil menjadi tidak relevan lagi dalam konteks perencanaan saat ini.

Oleh karena itu, dalam dokumen ini, kapasitas riil keuangan daerah dirumuskan sebagai pagu indikatif belanja yang tersedia pada tingkat program, kegiatan, dan subkegiatan di masing-masing perangkat daerah, setelah terlebih dahulu memperhitungkan seluruh komitmen belanja yang bersifat wajib, prioritas, dan tidak dapat ditunda. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran kapasitas fiskal yang benar-benar mencerminkan kondisi keuangan daerah secara aktual, sekaligus menghindari interpretasi yang bias atau terlalu menyederhanakan realitas fiskal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2027, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil 2027
1.	Pendapatan	692.728.743.701
2.	Penerimaan Pembiayaan	107.282.486.277
	TOTAL PENERIMAAN	800.011.229.978
	<i>(Dikurangi):</i>	
3.	Belanja Transfer	84.568.388.921
4.	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0
	Kapasitas Riil Pagu OPD	705.442.841.057

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD serta memastikan konsistensi dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Penyusunan prioritas ini didasarkan pada proses perencanaan yang sistematis dan berbasis evidensi melalui identifikasi isu strategis, analisis capaian kinerja tahunan, serta penilaian terhadap kemampuan fiskal daerah. Perumusan sasaran pembangunan tahun 2027 mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, tantangan pelayanan dasar, serta tuntutan percepatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja tahun sebelumnya menunjukkan perlunya penguatan intervensi pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, daya saing ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pencapaian outcome yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah, dengan mengedepankan integrasi antara perencanaan berbasis kewilayahan dan sektoral. Keputusan terkait prioritas program dipandu oleh tingkat urgensi isu, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas implementasi pemerintah daerah. Selain itu, prioritas pembangunan juga mempertimbangkan peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat efektivitas pendanaan dan memperluas dampak pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan 2027, Kabupaten Tana Tidung menekankan pentingnya penguatan resiliensi daerah melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, percepatan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penataan ruang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Peningkatan kualitas SDM tetap menjadi pilar utama dengan fokus pada peningkatan kompetensi, akses, dan kualitas layanan publik sebagai prasyarat percepatan transformasi ekonomi daerah.

Dari sisi ekonomi, sasaran pembangunan diorientasikan pada penguatan struktur ekonomi lokal melalui optimalisasi sektor unggulan daerah terutama

pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan mendorong peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha, dan penguatan rantai nilai. Upaya pengembangan UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan iklim investasi menjadi bagian penting untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Seluruh proses perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 berlandaskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan capaian yang lebih strategis, terarah, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing daerah.

4.1 Arah Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagai Acuan Pembangunan Daerah Tahun 2027

Pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, penyusunan arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, dan kegiatan daerah perlu memperhatikan serta menyelaraskan sasaran pembangunan kabupaten dengan arah pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Keselarasan tersebut diperlukan untuk menjamin keterpaduan antardokumen perencanaan, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan, serta memperkuat kontribusi Kabupaten Tana Tidung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Arah pembangunan nasional memberikan kerangka kebijakan makro, prioritas strategis, serta sasaran pembangunan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan fokus pembangunan tahunan. Pada saat yang sama, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan kabupaten/kota di wilayah provinsi. Dengan memperhatikan kedua arah pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap responsif terhadap karakteristik, potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas.

Penyelarasan arah pembangunan juga menjadi dasar dalam membangun sinergi program, pembagian peran, dan dukungan pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Tana

Tidung. Proses ini tidak hanya dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur program dan indikator kinerja, tetapi juga melalui penerjemahan prioritas nasional dan provinsi ke dalam kebijakan daerah yang operasional, terukur, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 diharapkan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1 Arah Pembangunan Nasional Tahun 2027

Asta Cita menjadi pijakan strategis dalam perumusan RPJMN 2025–2029. Delapan misi yang terkandung di dalamnya berfungsi sebagai panduan utama dalam menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang di seluruh sektor pembangunan nasional. Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, Asta Cita ditetapkan sebagai delapan agenda strategis pembangunan yang diarahkan untuk menghadapi dinamika baik di tingkat nasional maupun global. Setiap misi dalam Asta Cita saling terintegrasi dan saling mendukung untuk menciptakan transformasi menyeluruh di berbagai bidang, mulai dari penguatan ideologi dan demokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Rangkaian misi ini dirancang guna mendorong kemajuan bangsa yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Selanjutnya, Asta Cita dijabarkan ke dalam delapan Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025–2029 yang menjadi kerangka operasional utama pembangunan nasional, berikut ini adalah Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Fokus pada penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi negara, serta memperkuat demokrasi dan perlindungan HAM. Strategi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang toleran, inklusif, dan menghargai hak setiap individu, termasuk kelompok rentan. Pendekatan ini juga mencakup penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik, dan regulasi yang menjamin keterbukaan informasi.

2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Ditujukan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional serta meningkatkan kemandirian bangsa dalam hal pangan, energi, dan air. Termasuk juga pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Fokus utamanya adalah swasembada dan transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

3. **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Berfokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung konektivitas dan produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Termasuk pengembangan industri kreatif, agromaritim, dan koperasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi logistik, mendorong investasi, dan memperkuat perekonomian daerah.

4. **Prioritas Nasional 4:** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

Mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Strategi ini menekankan pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing melalui pendekatan inklusif, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Juga menekankan pentingnya sains, teknologi, dan inovasi untuk menghadapi tantangan masa depan.

5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Pembangunan kawasan industri dan kemudahan investasi menjadi bagian dari strategi ini.

6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Strategi pembangunan dari akar rumput untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Fokus pada pemberdayaan desa, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan layak, dan keterkaitan desa-kota. Pendekatan ini memastikan pembangunan lebih merata dan inklusif.

7. **Prioritas Nasional 7:** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Reformasi ini mencakup tata kelola pemilu, birokrasi, lembaga hukum, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Pemerintah juga menargetkan peningkatan transparansi serta reformasi fiskal dan pelayanan publik.

8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Fokus pada penguatan toleransi, moderasi beragama, dan pelestarian budaya untuk menjaga kohesi sosial dan persatuan bangsa. Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, sementara penguatan moderasi beragama dilakukan untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027 ditetapkan sebagai **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**. Tema ini menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan berkualitas dalam RKP 2027 didorong oleh tiga pilar utama, yaitu peningkatan produktivitas, penguatan investasi, dan pengembangan sektor industri. Ketiga aspek ini menjadi fondasi transformasi struktural ekonomi nasional, di mana produktivitas berperan dalam meningkatkan efisiensi dan output ekonomi, investasi menjadi pengungkit utama ekspansi ekonomi, dan industri menjadi sektor strategis dalam menciptakan nilai tambah serta memperkuat daya saing nasional.

Untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, RKP 2027 menggunakan pendekatan trisula pembangunan, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan kemiskinan. Ketiga pilar ini saling terintegrasi dan menjadi kerangka utama dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Pilar pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 6,3–7,5 persen pada tahun 2027. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat juga tercermin dari target GNI per kapita sebesar USD 5.980–6.050, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Di sisi lain, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, yang ditunjukkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 39,57 persen serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,84. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Pilar kedua, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diarahkan untuk memperkuat daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercermin dari target peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,58, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kapasitas produktif masyarakat. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas ekonomi serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan keterampilan.

Pilar ketiga, yaitu penurunan kemiskinan, diarahkan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Target yang ditetapkan antara lain penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0–6,5 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2027. Selain itu, perbaikan distribusi pendapatan juga ditunjukkan melalui target rasio gini pada kisaran 0,375–0,378, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30–4,87 persen. Sasaran ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan.

Lebih lanjut, untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, RKP 2027 juga menetapkan indikator tambahan yang mencerminkan penguatan sektor riil dan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038 serta peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada aspek makro, tetapi

juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan transformasi struktur ketenagakerjaan.

4.1.2 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029, visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2025-2029 adalah: Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 8 misi, diantaranya:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berkeadilan

Misi transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan bertujuan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Misi transformasi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah serta posisi geografis yang strategis.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tata kelola yang dimaksud mencakup perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah bekerja, mulai dari penguatan sistem birokrasi yang transparan hingga penerapan prinsip good governance dalam setiap lini pelayanan publik.

4. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI

Misi memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI merupakan salah satu kunci dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang berada di kawasan perbatasan negara. Misi ini berfokus pada memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi di tingkat regional Asia Tenggara dan membangun kekuatan pertahanan di kawasan perbatasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi di perbatasan utara Indonesia memiliki peran vital dalam menjaga integrasi nasional serta mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

6. Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Misi memantapkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan menjadi fondasi yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya transformasi sosial, ekonomi maupun tata kelola.

7. Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Dalam implementasinya, pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan juga perlu disertai dengan pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi penopang keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

8. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas

Misi ini memastikan bahwa pembangunan Kalimantan Utara berlangsung secara berkelanjutan, terpadu, dan selaras dengan visi misi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menjamin adanya kesinambungan berbagai program pembangunan lintas sektor yang tidak hanya menekankan pencapaian internal semata, tetapi juga berdampak terhadap pembangunan nasional.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tema dan fokus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027: Tema pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2027, yaitu **“Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur”**, dirumuskan sebagai respons atas dinamika pembangunan nasional dan karakteristik struktural wilayah perbatasan. Tema ini secara teknokratik mencerminkan upaya penyelarasan antara sasaran pembangunan jangka menengah nasional, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, dan kebutuhan pembangunan daerah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Tana Tidung.

Dalam konteks nasional, tema tersebut selaras dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan pengurangan ketimpangan wilayah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi

ekonomi sebagai pilar utama pembangunan. Kebijakan nasional mendorong kawasan perbatasan tidak lagi diposisikan semata sebagai wilayah pertahanan, tetapi sebagai kawasan strategis yang berfungsi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan etalase kedaulatan negara. Oleh karena itu, Kalimantan Utara diarahkan untuk berperan aktif dalam mendukung agenda nasional melalui pembangunan yang berorientasi pada pemerataan wilayah, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi bernilai tambah.

Secara teknokratik, fokus pembangunan wilayah yang merata dalam tema ini merupakan respons atas masih adanya kesenjangan akses infrastruktur, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi antarwilayah di Kalimantan Utara. Pemerataan pembangunan dipahami bukan sebagai pemerataan alokasi anggaran secara administratif, melainkan sebagai penajaman intervensi pembangunan berbasis kebutuhan wilayah (*spatial-based development*). Pendekatan ini menuntut peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan layanan dasar di wilayah perbatasan dan perdesaan, serta integrasi pembangunan wilayah dengan sistem logistik dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Aspek SDM berkarakter dalam tema pembangunan Tahun 2027 menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama keberhasilan transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pengembangan SDM diarahkan tidak hanya pada peningkatan indikator pendidikan dan keterampilan kerja, tetapi juga pada pembentukan karakter, etos kerja, dan wawasan kebangsaan yang relevan dengan konteks wilayah perbatasan. Secara teknokratik, penguatan SDM ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, menekan ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya, fokus ekonomi bernilai tambah mencerminkan arah transformasi struktur ekonomi Kalimantan Utara dari ketergantungan pada sektor primer menuju penguatan sektor pengolahan dan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan daerah. Dalam konteks perencanaan, ekonomi bernilai tambah diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas

lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Tana Tidung, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 menjadi rujukan strategis dalam perumusan RKPD. Sebagai kabupaten dengan kapasitas fiskal terbatas dan karakteristik wilayah perdesaan serta perbatasan, Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk menginternalisasikan tema tersebut melalui kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan layanan dasar, penguatan kualitas sumber daya manusia lokal, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Pembangunan wilayah yang merata diwujudkan melalui peningkatan akses infrastruktur dasar dan pelayanan publik, sementara pengembangan ekonomi bernilai tambah difokuskan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Dengan demikian, keterkaitan antara visi dan agenda pembangunan nasional, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, dan arah pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam RKPD Tahun 2027 dibangun secara hierarkis dan konsisten. Pendekatan teknokratik ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis analisis kebijakan, kondisi objektif daerah, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penguatan peran Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang makmur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan turunan dari visi yang diusung oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi jangka menengah ini menjadi arah strategis pembangunan daerah serta mencerminkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan. Penyusunan visi tersebut didasarkan pada evaluasi hasil pembangunan sebelumnya, pemetaan potensi dan kondisi wilayah, serta identifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada. Berdasarkan hal tersebut, visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

“TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA”

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung di tahun 2029. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dengan memerhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Tana Tidung. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu meningkatkan daya saing, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Indeks Modal Manusia (IMM). Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan sesuai standar.

2. MISI 2 : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, serta dari segi sosial dan budaya mampu mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-budaya masyarakat. Langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sektor unggulan daerah dan penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kabupaten Tana Tidung yang berdaya saing.

3. MISI 3 : Membangun infrastruktur dan mendorong kemandirian desa

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Tana Tidng dengan infrastruktur dasar mulai dari infrastruktur yang merata di perdesaan. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal dan merata, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa dan hal ini tentu menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Kabupaten Tana Tidung dalam mendorong pemerataan serta daya saing daerah.

4. MISI 4 : Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah serta kelestarian lingkungan

Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan dalam rencana jangka panjang daerah, Kabupaten Tana Tidung berupaya mewujudkan Kabupaten yang aman dan tertib dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan Kabupaten dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana. Upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan mulai dari rukun tetangga dan pemberdayaan di tingkat desa berbasis gotong royong dan toleransi antar sesama.

5. MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan publik

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Kabupaten Tana Tidung. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam

melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati.

Berikut ini adalah penyandingan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2025-2029:

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2027
VISI: TANA TIDUNG BERDAYA SAING, ADIL DAN SEJAHTERA				
Misi 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	71,96
			Tingkat Kemiskinan	3,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,13
	1.1.	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan	67,18
	1.2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	11
	1.3.	Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Rasio Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang yang Diiikuti	73,66
	1.4.	Meningkatnya kualitas keluarga yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	72,50
	1.5.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	0,285
	1.6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita	9.713
	1.7.	Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (Infrastruktur Dasar) berkualitas	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	88,9
Misi 2, 3, dan 4 : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA; MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DAN MENDORONG KEMANDIRIAN DESA; MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH SERTA KELESTARIAN LINGKUNGAN				
2			PDRB Perkapita	342,81

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2027
	Mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,47
			Rasio Gini	0,273
			Indeks Desa	79,01
	2.1.	Menguatnya Produktivitas Sektor Pertanian dalam Arti Luas	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,6
	2.2.	Meningkatnya Hilirisasi Ekonomi Potensi Sumber daya Strategis Daerah	LPE Kategori Industri Pengolahan	9,50
	2.3.	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	LPE Sektor Pariwisata	8,64
	2.4.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Tana Tidung	85,86
	2.5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,20
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	51,34
	2.6.	Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Risiko Bencana	145,11
	2.7.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Laju Penurunan Pelanggaran Perda	14,50
	2.8.	Meningkatnya Desa yang Mengalami Kenaikan Status	Persentase Nilai Kinerja Pemerintahan Desa	84
			Indeks Ketahanan Ekonomi	77
	2.9.	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	55
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan publik				
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	80,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	87,65
	3.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,07
	3.2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	73,05
			Opini BPK	WTP

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai panduan arah kebijakan selama lima tahun ke depan. Tujuan mencerminkan capaian strategis yang ingin diraih pemerintah daerah, sementara sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan tersebut, yang dirumuskan dalam bentuk indikator yang fokus, terukur, dan realistis. Setiap sasaran disusun agar dapat dicapai melalui indikator kinerja yang konkret dan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Program Unggulan Kepala Daerah dirancang untuk menjadi penggerak utama dalam mendorong tercapainya hasil pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program-program unggulan ini merupakan kelanjutan dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye. Dengan pendekatan berbasis potensi lokal dan aspirasi masyarakat, program ini mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan publik, serta intervensi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi program unggulan secara langsung memperkuat pencapaian sasaran pembangunan, karena dirancang selaras dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain menjadi representasi dari mandat rakyat, program-program ini juga telah disusun sejalan dengan struktur dan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan demikian, program unggulan tidak hanya memastikan keterpaduan antara janji politik dan kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa seluruh sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara sistematis, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional.

Merujuk pada hal-hal tersebut, penyusunan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan program unggulan dan kebijakan strategis lainnya, sehingga pembangunan daerah selama lima tahun ke depan benar-benar mampu menjawab tantangan, memanfaatkan peluang, dan mewujudkan visi Kabupaten Tana Tidung yang maju, inklusif, dan berdaya

saing. Berikut ini adalah Program Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029:



Gambar 4. 1 Program Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

1. TANA TIDUNG UNGGUL

Program ini merupakan tulang punggung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Tana Tidung. Fokus utamanya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kepemudaan, dan olahraga, serta aspek-aspek lain yang berkontribusi terhadap penciptaan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, program ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar dan penunjang seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan energi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. TANA TIDUNG PEDULI

Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketenagakerjaan, koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai skema intervensi yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Program ini juga mencakup pelestarian seni, budaya, dan tradisi lokal sebagai bentuk

pembangunan karakter daerah. Termasuk di dalamnya program pelestarian lingkungan dan penguatan keamanan wilayah yang kondusif, untuk mendukung stabilitas sosial dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan yang pada gilirannya akan mempercepat akselerasi pembangunan.

3. DESA CERMAT (Cerdas Mandiri dan Terpadu)

Program ini dirancang untuk memperkuat kemandirian desa dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dengan arah pembangunan kabupaten. Fokusnya adalah membangun kapasitas pemerintahan desa, penguatan ekonomi desa, serta pengelolaan potensi lokal yang berbasis partisipasi dan inovasi. Desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang mampu mendorong pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up). Melalui program ini, desa diharapkan menjadi pilar ketahanan daerah yang tangguh, adaptif, dan mandiri secara sosial, ekonomi, serta ekologis.

4. TANA TIDUNG MELAYANI

Program ini mengusung semangat reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Digitalisasi layanan menjadi salah satu pilar utama program ini, sehingga tercipta sistem pelayanan yang terintegrasi dan mampu mendukung program-program lainnya. Dengan birokrasi yang profesional dan pelayanan yang prima, masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung dan nyata.

5. TANA TIDUNG MELAJU

Program ini mencerminkan semangat percepatan pembangunan wilayah, khususnya penyelesaian pusat pemerintahan dan ruang-ruang publik strategis. Selain sebagai simbol kemajuan, program ini juga diarahkan untuk menjadi pengungkit lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang saling terhubung. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memotong rantai kendali birokrasi, sehingga proses layanan pemerintahan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mendorong kemunculan kawasan produktif dan memperkuat peran Tana Tidung sebagai simpul strategis di wilayah perbatasan dan hinterland Kalimantan Utara.

Lima program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025-2029 merupakan pilar strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta partisipatif. Program Tana Tidung Unggul, Tana Tidung Peduli, Desa Cermat, Tana Tidung Melayani, dan Tana Tidung Melaju disusun secara holistik dan terintegrasi, menjawab tantangan pembangunan melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

Seluruh program ini tidak hanya bersifat akseleratif, tetapi juga menjadi wahana transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan prioritas daerah. Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, terukur, dan partisipatif, kelima program unggulan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam membawa Kabupaten Tana Tidung menuju daerah yang maju, mandiri, sejahtera, serta menjadi beranda depan yang strategis di wilayah Kalimantan Utara.

4.3 Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Tema dan fokus pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan rumusan strategis yang menjadi arah utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun perencanaan. Perumusannya dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah, sasaran pembangunan jangka menengah, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya, kondisi aktual daerah, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang masih perlu ditangani. Selain itu, tema dan fokus pembangunan juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara terpadu, konsisten, dan saling mendukung.

Tema pembangunan berfungsi sebagai gambaran umum mengenai orientasi dan prioritas utama yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2027. Tema tersebut menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja, menentukan sasaran, serta mengarahkan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan adanya tema pembangunan yang jelas, seluruh sumber daya daerah diharapkan dapat diarahkan secara lebih efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat perekonomian

daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan dan keberlanjutan pembangunan.

Untuk menerjemahkan tema pembangunan ke dalam langkah yang lebih operasional, ditetapkan sejumlah fokus pembangunan yang mencerminkan bidang-bidang prioritas yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan secara lebih intensif. Fokus pembangunan disusun berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, potensi unggulan daerah, target kinerja yang harus dicapai, serta kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Fokus tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

Penetapan tema dan fokus pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan keterpaduan lintas sektor, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada pencapaian target administratif dan sektoral, tetapi juga pada penyelesaian permasalahan pembangunan secara nyata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, penahapan RPJMD, hasil evaluasi pembangunan, serta isu strategis daerah, tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 ditetapkan sebagai:

“Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah”

Tema tersebut menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan agar masyarakat Kabupaten Tana Tidung semakin sehat, berpendidikan, terampil, produktif, berkarakter, dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan kualitas manusia juga harus diikuti dengan tersedianya kesempatan kerja, perlindungan sosial, akses terhadap pelayanan dasar, serta ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya.

Pemerataan pembangunan menjadi landasan penting karena karakteristik geografis Kabupaten Tana Tidung menyebabkan masih adanya

perbedaan akses pelayanan dan infrastruktur antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya dipusatkan pada kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau seluruh desa dan kecamatan. Pemerataan mencakup akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan layak, transportasi, jaringan komunikasi, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi.

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan keluarga. Pemanfaatan data yang terpadu juga dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat mengenali kelompok rentan, menentukan lokasi prioritas, mengurangi tumpang tindih program, serta mengarahkan sumber daya pembangunan secara lebih efektif.

Tema pembangunan juga menempatkan budaya lokal sebagai fondasi pembentukan karakter dan identitas masyarakat. Pelestarian budaya tidak hanya diarahkan untuk menjaga warisan daerah, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial, pendidikan karakter, ekonomi kreatif, dan daya tarik pariwisata. Penguatan nilai budaya, toleransi, gotong royong, dan keterlibatan masyarakat menjadi modal sosial dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan tema tersebut membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, adaptif, dan inovatif. Digitalisasi pemerintahan, integrasi data, peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan pelayanan, dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi prasyarat agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh penguatan ekonomi, infrastruktur, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Berikut ini adalah keterkaitan Tema dan Fokus Pembangunan RKP Nasional tahun 2027, RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027:

TEMA PEMBANGUNAN RKPD 2027		
RKP NASIONAL TAHUN 2027	RKPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2027	RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027
TEMA RKP NASIONAL TAHUN 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” Tema ini menekankan bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya tinggi, tetapi juga berkualitas, produktif, menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2027 “Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkualitas/Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.” Tema ini menekankan tiga fokus besar, yaitu pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi bernilai tambah, sesuai dengan posisi strategis Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan	TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027 “Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah.” Tema ini menunjukkan bahwa pembangunan Tana Tidung Tahun 2027 menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas tenaga kerja, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah.
“Penyandingan tema pembangunan Tahun 2027 menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan antara tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung. Tema RKP Nasional menekankan akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Hal ini diperkuat oleh tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara yang berfokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan ekonomi bernilai tambah. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Tana Tidung menurunkan arah tersebut melalui peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif berbasis pemerataan pembangunan daerah.”		

Gambar 4. 2 Tema dan Fokus Pembangunan 2027

Tema pembangunan Tahun 2027 menunjukkan adanya kesinambungan dan keselarasan arah kebijakan antara tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Keterkaitan ini mencerminkan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sehingga setiap level pemerintahan saling memperkuat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, tema pembangunan menekankan pada *“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”*. Tema ini mengarah pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan investasi, serta pengembangan sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi. Pendekatan ini menempatkan transformasi ekonomi sebagai kunci dalam meningkatkan daya saing nasional.

Selanjutnya, tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu *“Pembangunan Wilayah yang Merata, SDM Berkualitas dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur”*, merupakan bentuk penjabaran dari arah kebijakan nasional yang disesuaikan dengan konteks regional. Fokus pada pemerataan pembangunan wilayah menunjukkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, sementara penguatan kualitas SDM dan ekonomi bernilai tambah menjadi strategi untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Posisi strategis Kalimantan Utara

sebagai wilayah perbatasan juga menjadi pertimbangan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Tana Tidung, yaitu *“Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah”*, merupakan turunan yang lebih operasional dan kontekstual dari tema pembangunan provinsi dan nasional. Fokus pada peningkatan kualitas SDM mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan produktivitas tenaga kerja, sementara penekanan pada pemerataan pembangunan menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di wilayah kabupaten.

Secara substansi, terdapat benang merah yang kuat antara ketiga tema tersebut. Arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada produktivitas dan investasi diterjemahkan di tingkat provinsi melalui penguatan SDM dan ekonomi bernilai tambah, serta pemerataan wilayah. Selanjutnya, Kabupaten Tana Tidung menginternalisasikan arah tersebut melalui fokus pada peningkatan kualitas SDM yang unggul dan produktif sebagai fondasi utama, dengan tetap menekankan aspek pemerataan pembangunan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, keterkaitan tema pembangunan ini menunjukkan adanya konsistensi dan harmonisasi kebijakan antarlevel pemerintahan. Hal ini diharapkan mampu mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat sinergi antar program, serta memastikan bahwa tujuan pembangunan nasional dapat tercapai melalui kontribusi nyata dari daerah, termasuk Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rangka memastikan keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan di tingkat kabupaten memiliki keselarasan dengan kebijakan pembangunan yang lebih tinggi, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah.

Tema pembangunan nasional Tahun 2027 yang berfokus pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri menjadi dasar utama dalam merumuskan arah pembangunan

daerah. Pilar-pilar tersebut kemudian diterjemahkan pada tingkat provinsi dalam bentuk prioritas pembangunan yang lebih kontekstual, yaitu melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, serta pengembangan ekonomi bernilai tambah. Selanjutnya, Kabupaten Tana Tidung menginternalisasikan arah tersebut ke dalam prioritas pembangunan daerah yang lebih operasional dan aplikatif. Penjabaran ini mempertimbangkan kondisi riil daerah, potensi unggulan, serta berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Fokus pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan penjabaran operasional dari tema pembangunan daerah. Fokus pembangunan ditetapkan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjawab permasalahan strategis yang masih dihadapi masyarakat. Dengan demikian, setiap intervensi pembangunan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan fokus pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan daerah, kondisi objektif dan karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung, serta tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029. Selain itu, fokus pembangunan juga diselaraskan dengan tema dan arah pembangunan nasional serta Provinsi Kalimantan Utara agar tercipta keterpaduan kebijakan, sinergi pelaksanaan pembangunan, dan dukungan pencapaian sasaran pembangunan lintas tingkatan pemerintahan.

Fokus pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang produktif dan berdaya saing, penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keenam fokus tersebut

saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mampu memperkuat daya saing daerah.

Melalui fokus pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Fokus pembangunan ini selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta program pembangunan Tahun 2027 sehingga setiap sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berikut fokus pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing

Fokus ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, keterampilan kerja, serta pelayanan dasar lainnya. Pembangunan sumber daya manusia harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas. Intervensi diarahkan untuk meningkatkan IPM, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing generasi muda.

2. Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Fokus ini diarahkan pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran. Kebijakan mencakup pemutakhiran dan pemanfaatan data sosial ekonomi, rehabilitasi dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kewirausahaan. Fokus ini juga diarahkan untuk memperkuat daya tahan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi dan sosial.

3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa

Fokus ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi, air minum, sanitasi, perumahan layak, kawasan permukiman, listrik, dan jaringan

komunikasi. Pembangunan konektivitas diperlukan untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pelayanan publik, serta akses terhadap pusat-pusat ekonomi. Pengembangan desa dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, dan integrasi pembangunan desa dengan prioritas pembangunan kabupaten.

4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah

Fokus ini diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, koperasi, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan investasi. Intervensi pembangunan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, pengemasan, standardisasi, pemasaran, akses permodalan, digitalisasi usaha, dan perluasan jaringan pasar. Desa didorong menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal dan mampu membangun keterkaitan dengan pusat pertumbuhan daerah.

5. Penguatan Karakter, Budaya Lokal, dan Kohesi Sosial Masyarakat

Fokus ini diarahkan pada pelestarian nilai luhur, warisan budaya, kesenian, adat istiadat, dan identitas masyarakat Tana Tidung. Penguatan budaya diintegrasikan dengan pendidikan karakter, muatan lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, peningkatan toleransi, wawasan kebangsaan, kerukunan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak menjadi bagian penting dalam membangun kohesi sosial serta mencegah konflik dan kerentanan sosial.

6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan

Fokus ini diarahkan pada peningkatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan data, riset, inovasi, dan pengawasan. Digitalisasi digunakan untuk memperluas akses pelayanan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Fokus ini juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup, persampahan, pengendalian pencemaran, mitigasi bencana, pembangunan rendah karbon, serta penguatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

Fokus pembangunan tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari isu strategis daerah yang diterjemahkan ke dalam fokus pembangunan beserta arah penanganan dan intervensi utama. Rincian keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Penyandingan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No.	Isu Strategis	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Arah Penanganan dan Intervensi Utama
1	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan inklusif berbasis digitalisasi untuk mewujudkan stabilitas wilayah serta iklim investasi yang kondusif	F6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan F3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa F4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah	1. Penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan berbasis elektronik, integrasi data, dan kapasitas aparatur 2. peningkatan ketenteraman dan ketertiban 3. penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung investasi 4. peningkatan kemudahan berusaha dan pelayanan penanaman modal
2	Peningkatan ketahanan lingkungan dan pangan daerah berbasis potensi lokal, kearifan masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan	F4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah F6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan local 2. pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan terpadu 3. penguatan cadangan dan distribusi pangan 4. perlindungan sumber daya air, DAS, gambut, dan keanekaragaman hayati 5. pengendalian pencemaran dan persampahan 6. pembangunan rendah karbon 7. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
3	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk peningkatan layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat	F6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan F1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing F3. Pemerataan Infrastruktur Dasar,	1. Pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik 2. integrasi data dan sistem informasi; perluasan jaringan internet dan infrastruktur teknologi informasi 3. digitalisasi pendidikan dan layanan Kesehatan 4. peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur

No.	Isu Strategis	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Arah Penanganan dan Intervensi Utama
		Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa F4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah	5. digitalisasi UMKM dan pemasaran produk lokal
4	Penguatan karakter, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan SDM yang unggul dan produktif	F5. Penguatan Karakter, Budaya Lokal, dan Kohesi Sosial Masyarakat F1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing F2. Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pelestarian nilai luhur, adat istiadat, kesenian, sejarah, dan warisan budaya 2. penguatan pendidikan karakter dan muatan local 3. pengembangan pariwisata budaya dan ekonomi kreatif 4. peningkatan wawasan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan 5. penguatan keluarga dan peran Perempuan 6. perlindungan anak dan pencegahan konflik sosial
5	Peningkatan ekonomi lokal dan desa produktif berbasis agribisnis, UMKM, potensi unggulan daerah, serta didukung oleh penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	F4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah F3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa	1. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan sektor unggulan 2. pengembangan hilirisasi dan industri pengolahan 3. pemberdayaan koperasi, UMKM, dan BUMDes 4. peningkatan kualitas produk, pengemasan, standarisasi, pemasaran, dan akses pembiayaan 5. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 6. pembangunan infrastruktur yang menghubungkan desa dengan pusat pertumbuhan
6	Peningkatan kualitas SDM yang sehat, terampil, dan produktif melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi	F1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing F2. Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, dan pelatihan keterampilan 2. pemerataan sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kesehatan 3. peningkatan kompetensi tenaga kerja 4. pelayanan penempatan tenaga kerja

No.	Isu Strategis	Fokus Pembangunan Tahun 2027	Arah Penanganan dan Intervensi Utama
			5. perlindungan dan jaminan sosial 6. peningkatan kualitas keluarga 7. perlindungan kelompok rentan

Sumber: Data diolah, 2026

Fokus pembangunan yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027. Penetapan ini dimaksudkan agar setiap prioritas pembangunan memiliki keterkaitan yang jelas dengan isu strategis daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, program prioritas, serta rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2027.

4.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 merupakan fokus intervensi yang memperoleh perhatian utama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Prioritas ditentukan karena tidak seluruh permasalahan dapat ditangani secara bersamaan dengan tingkat intervensi dan dukungan anggaran yang sama. Oleh karena itu, penetapan prioritas dilakukan berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, kesenjangan capaian indikator, besarnya daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pemerataan wilayah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan membiayai program.

Prioritas pembangunan berfungsi untuk mengarahkan perangkat daerah agar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan memiliki fokus yang sama. Prioritas juga menjadi instrumen untuk mengintegrasikan intervensi lintas urusan, mengurangi fragmentasi program, dan memastikan bahwa belanja daerah diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan. Dengan demikian, satu prioritas dapat didukung oleh beberapa perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan tema pembangunan, arah kebijakan, isu strategis, dan target kinerja Tahun 2027, ditetapkan enam prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan dasar; penguatan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan; pemerataan infrastruktur dan pengembangan desa; penguatan ekonomi lokal

dan nilai tambah; penguatan karakter dan budaya; serta reformasi tata kelola, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Enam prioritas tersebut telah disandingkan dengan sasaran, indikator, arah kebijakan, perangkat daerah, dan program pendukung dalam dokumen RKPD.

Perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis.

1. Pertama, prioritas harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029. Setiap prioritas harus mendukung sekurang-kurangnya satu indikator tujuan atau sasaran daerah sehingga kontribusinya terhadap visi kepala daerah dapat diukur.
2. Kedua, prioritas disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan dan kesenjangan antara realisasi terakhir dengan target Tahun 2027. Perkembangan IPM, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, ketimpangan, kualitas lingkungan, konektivitas, dan kualitas tata kelola menjadi bahan dalam menentukan fokus intervensi. Indikator yang menunjukkan perlambatan, peningkatan risiko, atau kesenjangan capaian membutuhkan perhatian lebih besar dalam penentuan program dan pendanaan.
3. Ketiga, prioritas memperhatikan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Tana Tidung, baik yang bersifat struktural maupun yang muncul akibat perubahan lingkungan pembangunan. Isu kualitas SDM, kemiskinan, produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, transformasi digital, kesenjangan infrastruktur, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan diterjemahkan menjadi prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
4. Keempat, prioritas mempertimbangkan keselarasan vertikal dengan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Utara. Program daerah diprioritaskan apabila memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas, investasi, hilirisasi, kualitas SDM, pemerataan wilayah, pembangunan desa, ekonomi bernilai tambah, dan keberlanjutan lingkungan.
5. Kelima, prioritas mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan pemerataan antarwilayah. Kabupaten Tana Tidung memiliki desa dan kecamatan dengan tingkat aksesibilitas dan ketersediaan layanan yang berbeda. Oleh karena itu, lokasi intervensi tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga berdasarkan tingkat

keterisolasian, kesenjangan layanan, kerentanan sosial, potensi ekonomi, dan kedudukan wilayah dalam struktur ruang.

6. Keenam, penetapan prioritas mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan pelaksanaan. Program yang diprioritaskan harus memiliki kejelasan kewenangan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, kesiapan teknis, serta perangkat daerah penanggung jawab. Dukungan APBD diarahkan terutama pada intervensi yang menjadi kewenangan kabupaten, sementara kebutuhan yang berada di luar kapasitas fiskal daerah didorong melalui dukungan APBN, APBD provinsi, kerja sama, dan sumber pendanaan sah lainnya.
7. Ketujuh, prioritas memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, forum perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil koordinasi teknis pembangunan. Pokok-pokok pikiran DPRD digunakan sebagai salah satu bahan dalam menentukan program, lokasi, dan kelompok sasaran sepanjang sesuai dengan kewenangan daerah dan arah RPJMD.

Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027:

1. Prioritas 1: Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing

Prioritas pertama diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, olahraga, dan penguatan keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi bagi seluruh agenda pembangunan karena kemampuan daerah untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan teknologi sangat bergantung pada kualitas manusia.

Pada bidang pendidikan, intervensi diarahkan pada peningkatan akses, mutu pembelajaran, sarana dan prasarana, kompetensi pendidik, serta pemerataan pelayanan antarwilayah. Pada bidang kesehatan, prioritas mencakup peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, promotif dan preventif, pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, dan peningkatan keterjangkauan pelayanan. Pada bidang ketenagakerjaan, intervensi diarahkan pada pelatihan berbasis kompetensi, produktivitas, sertifikasi, dan keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja.

Prioritas ini juga mencakup pembinaan keluarga, kependudukan, kepemudaan, dan olahraga. Keluarga ditempatkan sebagai lingkungan

pertama dalam membentuk kualitas kesehatan, pendidikan, karakter, dan ketahanan ekonomi masyarakat. Indikator utama prioritas adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, yang didukung oleh indikator pendidikan, kesehatan, keterampilan, prestasi pemuda, dan kualitas keluarga. Program utama prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta perangkat daerah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prioritas 2: Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas kedua diarahkan untuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan melalui sistem perlindungan sosial yang tepat sasaran serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prioritas ini menempatkan perlindungan sosial tidak hanya sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan individu agar lebih mandiri dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi.

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional perlu diperkuat untuk memastikan ketepatan sasaran program. Data tersebut digunakan dalam menentukan kelompok miskin, rentan, perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang membutuhkan intervensi. Program perlindungan dan jaminan sosial selanjutnya diintegrasikan dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, pengendalian penduduk, serta program ketenagakerjaan.

Pada aspek ketenagakerjaan, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, mendorong kewirausahaan, dan meningkatkan produktivitas. Target prioritas ini meliputi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,79 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,13 persen, serta pemeliharaan tingkat ketimpangan pada Rasio Gini sebesar 0,273.

3. Prioritas 3: Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa

Prioritas ketiga diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Infrastruktur dasar dipandang sebagai prasyarat peningkatan kualitas hidup, produktivitas ekonomi, efektivitas pelayanan publik, dan daya tarik investasi. Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada

pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, transportasi, air minum, sanitasi, perumahan, kawasan permukiman, bangunan publik, serta sarana penunjang lainnya.

Penguatan konektivitas diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa antardesa, antarkecamatan, dan menuju pusat-pusat ekonomi. Mengingat karakteristik Tana Tidung yang memiliki ketergantungan pada transportasi darat dan sungai, pembangunan jalan perlu didukung oleh peningkatan sarana pelayaran, dermaga, perlengkapan jalan, dan keselamatan transportasi.

Pengembangan desa dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, dan integrasi perencanaan desa dengan perencanaan kabupaten. Desa diarahkan menjadi pelaku utama pembangunan yang mampu mengelola potensi lokal, menyediakan pelayanan dasar, dan membangun kegiatan ekonomi produktif. Program prioritas ini melibatkan perangkat daerah bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, investasi, pariwisata, keamanan, serta UMKM.

4. Prioritas 4: Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah

Prioritas keempat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan kemandirian ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi difokuskan pada sektor yang memiliki keterkaitan kuat dengan mata pencaharian masyarakat dan potensi wilayah, terutama pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, koperasi, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi.

Pada sektor pertanian dan perikanan, intervensi mencakup peningkatan sarana produksi, teknologi tepat guna, diversifikasi pangan, budidaya, pengolahan hasil, distribusi, dan peningkatan akses pasar. Pengembangan hilirisasi diperlukan agar komoditas tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pada sektor UMKM dan koperasi, kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, standardisasi produk, pengemasan, pemasaran digital, perlindungan usaha, dan perluasan

jaringan distribusi. Sementara itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan melalui peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran, pengembangan sumber daya pelaku pariwisata, dan integrasi dengan budaya serta produk lokal. Indikator utama prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,47 persen dan PDRB per kapita sebesar Rp342,81 juta.

5. Prioritas 5: Penguatan Karakter, Budaya Lokal, dan Kohesi Sosial Masyarakat

Prioritas kelima diarahkan untuk menjaga identitas daerah, memperkuat karakter masyarakat, meningkatkan kerukunan, dan membangun kohesi sosial. Budaya lokal dipandang bukan hanya sebagai warisan yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber pembentukan karakter, modal sosial, daya tarik pariwisata, serta basis pengembangan ekonomi kreatif.

Kebijakan diarahkan pada perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian kesenian dan adat istiadat, penguatan kelembagaan adat, integrasi budaya dalam pendidikan, serta pendidikan karakter berbasis muatan lokal. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, toleransi, dan kerukunan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat yang majemuk.

Pencapaian prioritas diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Kerukunan, dan Indeks Ketimpangan Gender. Perangkat daerah utama yang terlibat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perangkat daerah lain yang menangani pemberdayaan perempuan, masyarakat, pariwisata, dan kelembagaan adat.

6. Prioritas 6: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas keenam diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Reformasi tata kelola mencakup penyederhanaan proses kerja, peningkatan kompetensi aparatur, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, pengawasan, kualitas perencanaan, pengelolaan data, riset, dan inovasi daerah.

Digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan menyediakan data yang akurat bagi pengambilan keputusan. Penguatan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilaksanakan secara terpadu, tidak terbatas pada penyediaan aplikasi, tetapi mencakup integrasi proses bisnis, interoperabilitas data, keamanan informasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan perluasan akses masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengawasan izin lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan kebakaran. Prioritas ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks SPBE, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran utama dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur pencapaian pembangunan pada tahun perencanaan. Keterkaitan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Prioritas, Sasaran, dan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran Utama	Indikator dan Target Tahun 2027
1	Peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar yang inklusif dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	- Indeks Pembangunan Manusia: 71,96
2	Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan	- Kemiskinan:3,79% - TPT: 3,13% - Rasio Gini: 0,273
3	Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan desa	Meningkatnya akses layanan dasar dan pemerataan pembangunan wilayah	- Kontribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung terhadap Kalimantan Utara: 6,53% - Indeks Desa: 79,01
4	Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat	- Laju Pertumbuhan Ekonomi: 4,47% - PDRB per kapita Rp342,81 juta
5	Penguatan karakter, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat	Meningkatnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya	- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 58,86 - Indeks Kerukunan: 82,77 - IKG: 0,422
6	Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan	- Indeks Reformasi Birokrasi: 80,50 - Indeks SPBE 2,83 - IKLH 78,15

Sumber: Data diolah, 2026

Keselarasan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan dapat saling mendukung dan menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Prioritas nasional menjadi acuan utama dalam menentukan agenda strategis pembangunan yang memerlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan karakteristik wilayahnya. Pada tingkat provinsi, prioritas nasional diterjemahkan lebih lanjut ke dalam prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kondisi kewilayahan, potensi ekonomi, kesenjangan pembangunan, konektivitas antarwilayah, serta kebutuhan kabupaten dan kota. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merumuskan prioritas pembangunan daerah dengan mengintegrasikan arah pembangunan nasional dan provinsi ke dalam konteks permasalahan, potensi unggulan, serta kebutuhan spesifik masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Penyelarasan prioritas pembangunan tidak hanya didasarkan pada kesamaan bidang atau urusan pemerintahan, tetapi juga memperhatikan keterkaitan sasaran, target, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan hasil pembangunan yang ingin diwujudkan. Setiap prioritas Kabupaten Tana Tidung perlu memiliki hubungan yang jelas dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tanpa mengabaikan kekhasan daerah serta kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Pendekatan ini memungkinkan agenda pembangunan nasional dan provinsi diterjemahkan menjadi program serta kegiatan yang lebih operasional, terukur, dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tana Tidung.

Keselarasan prioritas juga menjadi dasar untuk memperkuat sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Melalui keselarasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat

mengoptimalkan dukungan program kementerian dan lembaga, dana transfer, bantuan keuangan provinsi, serta berbagai bentuk kerja sama pembangunan lainnya. Selain itu, penyelarasan prioritas diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih program, memperjelas pembagian peran antarlevel pemerintahan, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara Prioritas Nasional Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027. Penyajian tabel tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai konsistensi dan kontribusi prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus memastikan bahwa prioritas daerah tetap responsif terhadap isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan target pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Prioritas Nasional	Program Unggulan Provinsi Kalimantan Utara	Prioritas Kabupaten Tana Tidung	Hasil yang diharapkan
1	PN 1: Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara; Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Penguatan karakter, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat; Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya karakter, kerukunan, pelestarian budaya, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif
2	PN 2: Pertahanan, keamanan, serta kemandirian pangan, energi, dan air	Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan Agribisnis; Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru; Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah; Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan desa; Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan pangan, akses air dan energi, produktivitas sektor unggulan, ketahanan wilayah, dan kualitas lingkungan
3	PN 3: Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan,	Akselerasi Konektivitas Inter dan Antar Wilayah; Produktivitas	Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan desa; Penguatan	Meningkatnya konektivitas, lapangan kerja, produktivitas UMKM dan

No	Prioritas Nasional	Program Unggulan Provinsi Kalimantan Utara	Prioritas Kabupaten Tana Tidung	Hasil yang diharapkan
	industri kreatif, dan agromaritim	Ekonomi Kerakyatan dan Perdesaan; Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	koperasi, pariwisata, serta kelancaran distribusi
4	PN 4: Pembangunan SDM	SDM Sehat, Cerdas, dan Setara Gender	Peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar yang inklusif dan berdaya saing; Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, keluarga, kesetaraan gender, kepemudaan, dan olahraga
5	PN 5: Hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam	Pengembangan Sektor Unggulan Pangan dan Agribisnis; Pembangunan Ekonomi Hijau dan Biru	Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	Meningkatnya hilirisasi produk pertanian, perkebunan dan perikanan, industri pengolahan, investasi, dan nilai tambah lokal
6	PN 6: Pembangunan dari desa, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan	Produktivitas Ekonomi Kerakyatan dan Perdesaan; Membangun Kawasan Perbatasan yang Sejahtera	Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat; Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan desa; Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan serta meningkatnya kemandirian desa dan ekonomi masyarakat
7	PN 7: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif	Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya reformasi birokrasi, akuntabilitas, pelayanan publik, integrasi data, pengawasan, dan pemerintahan digital
8	PN 8: Harmoni lingkungan,	Pembangunan Ekonomi Hijau	Penguatan karakter, budaya lokal, dan	Meningkatnya kualitas

No	Prioritas Nasional	Program Unggulan Provinsi Kalimantan Utara	Prioritas Kabupaten Tana Tidung	Hasil yang diharapkan
	alam, budaya, dan toleransi	dan Biru; Gerakan Bersama Bangun Pariwisata dan Budaya Kaltara	kohesi sosial masyarakat; Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	lingkungan, ketahanan iklim dan bencana, pelestarian budaya, serta kerukunan masyarakat

Sumber: Data diolah, 2026

4.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman operasional yang menjembatani tujuan dan sasaran pembangunan dengan prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Arah kebijakan menjelaskan pendekatan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mengatasi permasalahan pembangunan, memanfaatkan potensi daerah, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan umum, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi, lokasi, kelompok sasaran, perangkat daerah penanggung jawab, dan dukungan pendanaannya.

Perumusan arah kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dilakukan melalui pendekatan berjenjang dan terpadu. Pada tingkat daerah, arah kebijakan mengacu pada visi **“Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera”**, lima misi pembangunan, tiga tujuan daerah, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tingkat tahunan, arah kebijakan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan, perkembangan indikator kinerja, isu strategis, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pemerataan pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan juga diselaraskan dengan tema RKP Tahun 2027 dan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Utara agar intervensi pembangunan kabupaten memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang lebih luas.

Arah kebijakan Tahun 2027 terutama diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas, memperkuat kemandirian desa, menjaga

kualitas lingkungan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Seluruh arah kebijakan tersebut dilaksanakan secara holistik, tematik, integratif, dan spasial agar program pembangunan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling memperkuat dalam menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan isu strategis dan juga fokus/prioritas pembangunan dirumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 yang menjadi landasan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan fokus intervensi pada setiap isu strategis, memastikan konsistensi antara tantangan pembangunan dan respons kebijakan, serta mengarahkan perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.
2. Peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
3. Penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna dan kolaboratif.
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam.
5. Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pendidikan berbasis teknologi informasi.
6. Integrasi pembangunan daerah dan desa berbasis inovasi serta penguatan ekonomi digital masyarakat.
7. Pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan lokal serta penguatan pendidikan karakter berbasis muatan lokal pada peserta didik.
8. Penguatan peran keluarga, perempuan, dan sistem perlindungan sosial adaptif untuk membangun ketahanan sosial masyarakat.
9. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.

10. Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
11. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan masyarakat usia produktif.
12. Penguatan peran keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing.

Penyandingan arah kebijakan dengan isu strategis dan fokus/prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Keselarasan Isu Strategis, Prioritas/Fokus Pembangunan, dan Arah Kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No.	Isu strategis	Fokus/Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	Arah kebijakan Tahun 2027
1	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan inklusif berbasis digitalisasi untuk mewujudkan stabilitas wilayah serta iklim investasi yang kondusif	P3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa; P4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah; P6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan	1) Penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif; dan 2) peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
2	Peningkatan ketahanan lingkungan dan pangan daerah berbasis potensi lokal, kearifan masyarakat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan	P4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah; P6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan	1) Penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna dan kolaboratif; dan 2) pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam.
3	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk peningkatan layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat	P1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing;	1) Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pendidikan

No.	Isu strategis	Fokus/Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	Arah kebijakan Tahun 2027
		P3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa; P4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah; P6. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan	berbasis teknologi informasi; dan 2) integrasi pembangunan daerah dan desa berbasis inovasi serta penguatan ekonomi digital masyarakat.
4	Penguatan karakter, budaya lokal, dan kohesi sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan SDM yang unggul dan produktif	P1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing; P2. Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat; P5. Penguatan Karakter, Budaya Lokal, dan Kohesi Sosial Masyarakat	1) Pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan lokal serta penguatan pendidikan karakter berbasis muatan lokal pada peserta didik; dan 2) penguatan peran keluarga, perempuan, dan sistem perlindungan sosial adaptif untuk membangun ketahanan sosial masyarakat.
5	Peningkatan ekonomi lokal dan desa produktif berbasis agribisnis, UMKM, potensi unggulan daerah, serta didukung oleh penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	P3. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa; P4. Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah	1) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM; dan 2) peningkatan investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
6	Peningkatan kualitas SDM yang sehat, terampil, dan produktif melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan untuk memanfaatkan bonus demografi	P1. Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing; P2. Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat	1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan masyarakat usia produktif; dan 2) penguatan peran keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing.

Sumber: Data diolah, 2026

Keselarasan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027. Keselarasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan kabupaten tidak berjalan secara terpisah, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui penyelarasan ini, prioritas pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi, sekaligus tetap menjawab kebutuhan, permasalahan, dan karakteristik pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

Arah kebijakan nasional menjadi kerangka utama yang memuat prioritas strategis, sasaran makro, dan agenda pembangunan yang perlu didukung oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara menerjemahkan agenda nasional ke dalam konteks kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, serta tantangan pembangunan antarkabupaten dan kota di wilayah provinsi. Kabupaten Tana Tidung kemudian mengoperasionalkan kedua arah kebijakan tersebut ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses penyelarasan tidak hanya dilakukan berdasarkan kesamaan nomenklatur atau bidang pembangunan, tetapi juga dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, strategi, fokus, dan hasil pembangunan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, arah kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dirumuskan sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus sebagai respons terhadap isu strategis daerah. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap kebijakan daerah memiliki hubungan yang jelas dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi tanpa mengabaikan kekhasan serta kewenangan pemerintah kabupaten.

Keselarasan kebijakan juga menjadi dasar untuk memperkuat sinergi program, kegiatan, pendanaan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dengan adanya keselarasan yang teridentifikasi secara jelas, peluang dukungan melalui dana transfer, program kementerian dan lembaga, bantuan keuangan provinsi, serta kerja sama lintas pemerintahan dapat dioptimalkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan

pembangunan, menghindari tumpang tindih program, serta memperbesar daya ungkit kebijakan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara arah kebijakan nasional, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara, dan arah kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai posisi dan kontribusi kebijakan pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus memastikan konsistensi perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah.

Tabel 4. 6 Keselarasan Arah Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No.	Fokus Pembangunan/Arah Kebijakan Nasional RKP Tahun 2027	Fokus Pembangunan Kewilayahan Kab. Tana Tidung dalam RKPDP Prov. Kalimantan Utara Tahun 2027	Arah Kebijakan RKPDP Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
1	FP 1: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi; FP 2: Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	Akselerasi kualitas pelayanan dasar	1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan masyarakat usia produktif; 2) Penguatan peran keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing; dan 3) Penguatan peran keluarga, perempuan, dan sistem perlindungan sosial adaptif untuk membangun ketahanan sosial masyarakat.
2	FP 9: Industri Nasional; FP 10: Hilirisasi SDA Strategis; FP 11: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak	1) Penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna dan kolaboratif; dan 2) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.
3	FP 6: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; FP 8: Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor	Pengembangan Pelabuhan logistik	1) Peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar

No.	Fokus Pembangunan/Arah Kebijakan Nasional RKP Tahun 2027	Fokus Pembangunan Kewilayahan Kab. Tana Tidung dalam RKPD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2027	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
			penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif; dan 2) Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.
4	FP 11: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam.
5	FP 10: Hilirisasi SDA Strategis; FP 11: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan kawasan kampung nelayan	1) Penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna dan kolaboratif; dan 2) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.
6	FP 2: Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat; FP 6: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Penataan permukiman yang layak huni	Peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
7	FP 5: Efisiensi dan Efektivitas Investasi; FP 6: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi; FP 8: Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan afirmasi (Kecamatan Tana Lia)	1) Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa; dan 2) Peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju

No.	Fokus Pembangunan/Arah Kebijakan Nasional RKP Tahun 2027	Fokus Pembangunan Kewilayahan Kab. Tana Tidung dalam RKPDP Prov. Kalimantan Utara Tahun 2027	Arah Kebijakan RKPDP Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
			pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
8	FP 10: Hilirisasi SDA Strategis; FP 11: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengelolaan Kawasan HGU secara berkelanjutan	1) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam; dan 2) Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.
9	FP 11: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Perlindungan ekosistem Kawasan Hidrologi Gambut	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam.

Sumber: Data diolah, 2026

4.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

Program prioritas pembangunan daerah merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam intervensi yang lebih operasional, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melalui program prioritas, sasaran dan target pembangunan daerah dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan, kegiatan, serta alokasi sumber daya yang diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penetapan program prioritas tidak hanya didasarkan pada kesesuaian dengan urusan pemerintahan atau tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi terutama pada hubungan langsung antara outcome program dengan indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027.

Setiap program prioritas perlu memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian target kinerja daerah. Program yang mempunyai keterkaitan kuat dan langsung dengan indikator sasaran ditempatkan sebagai program utama yang memperoleh perhatian lebih besar dalam proses perencanaan dan

penganggaran. Sementara itu, program yang kontribusinya bersifat tidak langsung tetap dapat dilaksanakan sebagai program pendukung atau penunjang sepanjang diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, maupun keberlanjutan pelaksanaan program utama. Dengan pendekatan tersebut, pengalokasian sumber daya pembangunan dapat lebih selektif dan diarahkan pada program yang memiliki daya ungkit tinggi, mampu menjawab permasalahan strategis, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Penetapan program prioritas juga perlu mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam menentukan bentuk intervensi yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan memberikan penjelasan mengenai pendekatan, strategi, dan langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, program prioritas tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang saling mendukung dan diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan tertentu. Keterkaitan yang kuat antara prioritas, arah kebijakan, program, indikator, dan target diperlukan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, serta dokumen penganggaran daerah.

Dalam pelaksanaannya, program prioritas pembangunan daerah pada umumnya bersifat lintas urusan dan melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Satu sasaran pembangunan dapat membutuhkan intervensi dari berbagai sektor, baik dalam bentuk pelayanan langsung, penyediaan infrastruktur, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan data dan kelembagaan. Oleh karena itu, setiap program perlu dilengkapi dengan pembagian peran yang jelas antara perangkat daerah koordinator, penanggung jawab utama, dan perangkat daerah pendukung. Pembagian peran tersebut penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja dalam arah yang sama dan tidak melaksanakan intervensi secara parsial. Integrasi lintas perangkat daerah juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, memastikan penggunaan data sasaran yang sama, serta memperjelas kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi penerima manfaat.

Berdasarkan kerangka tersebut, program prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan keterkaitannya terhadap prioritas daerah, sasaran pembangunan, arah

kebijakan, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja daerah. Penyusunan program prioritas juga mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, kebutuhan masyarakat, potensi unggulan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta peluang sinergi dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara prioritas program pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 sebagai dasar dalam mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah secara lebih terfokus, terpadu, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4. 7 Prioritas Program Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Prioritas 2027	Sasaran Utama	Indikator Kunci 2027	Arah Kebijakan	Nama Opd Penanggung Jawab	Program Prioritas
1	Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar yang Inklusif dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	IPM 71,89 (RPJMD 71,55)	Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta pelatihan keterampilan masyarakat usia produktif	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pengelolaan Pendidikan; 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
				Penguatan peran keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemberdayaan Sosial 5. Program Pengendalian Penduduk
2	Penguatan Perlindungan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan	Kemiskinan 3,79%;	Penguatan peran keluarga, perempuan, dan sistem perlindungan sosial adaptif untuk membangun ketahanan sosial masyarakat	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Program Rehabilitasi Sosial 6. Program Pengendalian Penduduk
			TPT 3,13%;			

No	Prioritas 2027	Sasaran Utama	Indikator Kunci 2027	Arah Kebijakan	Nama Opd Penanggung Jawab	Program Prioritas
			Indeks Gini 0,273	Penguatan peran keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemberdayaan Sosial 5. Program Pengendalian Penduduk
3	Pemerataan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Wilayah, dan Pengembangan Desa	Meningkatnya akses layanan dasar dan pemerataan pembangunan wilayah	Kontribusi PDRB KTT ke Kaltara 6,53%	Peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, dan perumahan layak masyarakat sebagai dasar penguatan konektivitas dan iklim investasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Satpol PP 4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 3. Program Pengelolaan Pelayaran 4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5. Program Kawasan Permukiman 6. Program Pengembangan Perumahan 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 11. Program Promosi Penanaman Modal
				Integrasi pembangunan daerah dan desa berbasis inovasi serta penguatan ekonomi digital masyarakat	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

No	Prioritas 2027	Sasaran Utama	Indikator Kunci 2027	Arah Kebijakan	Nama Opd Penanggung Jawab	Program Prioritas
					3. Dinas Komunikasi dan Informatika	4. Program Pengembangan UMKM 5. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 6. Program Pemberdayaan Sosial
4	Penguatan Ekonomi Lokal, Desa Produktif, dan Peningkatan Nilai Tambah Daerah	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat	LPE 4,47%;	Penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi tepat guna dan kolaboratif.	1. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			PDRB/kapita 342,81 juta			
			LPE 4,47%;	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, hilirisasi komoditas unggulan, dan pemberdayaan UMKM.	1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			PDRB/kapita 342,81 juta	Peningkatan investasi, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa.	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Program Promosi Penanaman Modal

No	Prioritas 2027	Sasaran Utama	Indikator Kunci 2027	Arah Kebijakan	Nama Opd Penanggung Jawab	Program Prioritas
						5. Program Pelayanan Penanaman Modal
5	Penguatan Karakter, Budaya Lokal, dan Kohesi Sosial Masyarakat	Meningkatnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan 58,86; Indeks Kerukunan 82,77; IKG 0,422	Pelestarian nilai-nilai luhur kebudayaan lokal serta penguatan pendidikan karakter berbasis muatan lokal pada peserta didik.	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pengelolaan Pendidikan 4. Program Pengembangan Kurikulum
6	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan keberlanjutan lingkungan	Indeks Reformasi Birokrasi = 80,50	Penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berbasis digital dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.	1. Kecamatan 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 5. Sekretariat Daerah 6. Inspektorat	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Penyelenggaraan Pengawasan 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Riset dan Inovasi Daerah 7. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Indeks SPBE = 2,83	Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pendidikan berbasis teknologi informasi.	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 4. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Prioritas 2027	Sasaran Utama	Indikator Kunci 2027	Arah Kebijakan	Nama Opd Penanggung Jawab	Program Prioritas
					Penelitian Pengembangan	
			IKLH 78,15	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui aksi pembangunan rendah karbon, mitigasi bencana, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam.	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Penanggulangan Bencana 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel Prioritas Program Pembangunan dan Arah Kebijakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027, terlihat bahwa setiap prioritas pembangunan daerah telah diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional dan didukung oleh arah kebijakan yang jelas. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa penetapan program tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran, target, dan indikator pembangunan daerah. Dengan demikian, program prioritas menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan yang menghubungkan antara tujuan pembangunan daerah dengan intervensi yang dilaksanakan melalui kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Arah kebijakan yang tercantum dalam memberikan kerangka bagi pemerintah daerah dalam menentukan pendekatan pembangunan yang akan ditempuh. Arah kebijakan tersebut menjelaskan orientasi intervensi, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, penyediaan infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan kualitas lingkungan hidup, maupun penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui arah kebijakan yang terstruktur, pelaksanaan program diharapkan tidak hanya menghasilkan keluaran administratif, tetapi mampu menciptakan manfaat dan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan daerah pada umumnya bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi satu perangkat daerah. Sebagai contoh, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya memerlukan program pada bidang sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan program ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, dan penyediaan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pelaksanaan program prioritas memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah dengan pembagian peran, sasaran, lokasi, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Selain menjadi dasar pelaksanaan program, keterkaitan antara program prioritas dan arah kebijakan juga menjadi pedoman dalam proses pengalokasian anggaran. Program yang memiliki hubungan langsung dengan pencapaian indikator tujuan dan sasaran daerah perlu memperoleh perhatian utama sesuai dengan tingkat urgensi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, program pendukung tetap diarahkan untuk

memperkuat kapasitas kelembagaan, kualitas pelayanan, ketersediaan data, serta keberlanjutan pelaksanaan program utama. Pendekatan ini diperlukan agar penganggaran daerah lebih selektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Implementasi program prioritas tersebut selanjutnya perlu diikuti dengan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap tingkat penyerapan anggaran dan penyelesaian keluaran kegiatan, tetapi juga terhadap kontribusi program dalam mencapai target indikator pembangunan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengidentifikasi efektivitas intervensi, kendala pelaksanaan, kesenjangan antarwilayah dan kelompok sasaran, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan. Dengan demikian, program dan kegiatan dapat terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Di samping mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 juga perlu diselaraskan dengan program strategis pemerintah pusat, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa agenda pembangunan nasional dapat diterjemahkan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan karakteristik daerah. Dukungan pemerintah kabupaten dapat diwujudkan melalui integrasi program, penentuan kelompok sasaran, penyediaan data, penguatan kelembagaan, pengalokasian anggaran daerah, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Keterkaitan antara program daerah dan Program Hasil Terbaik Cepat juga membuka peluang bagi Kabupaten Tana Tidung untuk memperkuat sinergi pendanaan, memperluas cakupan penerima manfaat, dan mempercepat pencapaian target pembangunan. Namun demikian, dukungan tersebut perlu disusun secara terarah agar tidak menimbulkan duplikasi program, ketidaksamaan data sasaran, maupun tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang menjelaskan bentuk dukungan, program dan kegiatan daerah yang relevan, perangkat daerah penanggung jawab, kelompok sasaran, serta hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Tana Tidung terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Tahun 2027. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan hubungan antara agenda strategis nasional dengan program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, sekaligus memastikan bahwa dukungan daerah diberikan secara terpadu, terukur, sesuai kewenangan, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel 4. 8 Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Tana Tidung terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Tahun 2027

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Prioritas Pembangunan Kab. Tana Tidung 2027	Program Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Bentuk Dukungan Daerah
1	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar yang inklusif dan berdaya saing; Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan , dan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendataan penerima manfaat; kesiapan satuan pendidikan; pemeriksaan kesehatan dan status gizi; pengawasan higiene dan keamanan pangan; serta koordinasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	Peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar yang inklusif dan berdaya saing	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pemeriksaan kesehatan masyarakat; penemuan dan pengobatan TBC; peningkatan fasilitas kesehatan; penguatan sistem rujukan; pemenuhan tenaga kesehatan; serta integrasi informasi kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas	1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Prioritas Pembangunan Kab. Tana Tidung 2027	Program Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Bentuk Dukungan Daerah
			Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana produksi; peningkatan prasarana pertanian; penyuluhan; penggunaan teknologi tepat guna; penguatan lumbung pangan; peningkatan produktivitas lahan; dan pengembangan kelembagaan petani
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
4	Membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi	Peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar yang inklusif dan berdaya saing	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi dan peningkatan sarana pendidikan; pemerataan guru; peningkatan mutu pembelajaran; penanganan anak tidak sekolah; serta dukungan terhadap pengembangan sekolah unggul sesuai penetapan lokasi
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta	Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data sosial ekonomi; bantuan sosial tepat

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Prioritas Pembangunan Kab. Tana Tidung 2027	Program Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Bentuk Dukungan Daerah
	kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	kesejahteraan masyarakat; Penguatan ekonomi lokal, desa produktif, dan peningkatan nilai tambah daerah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	sasaran; pemberdayaa n penerima manfaat; pelayanan kerja; bantuan usaha produktif; kemitraan usaha; dan peningkatan skala UMKM
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
6	Kenaikan gaji ASN, terutama guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh	Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan; pemutakhiran data kepegawaian; penataan kebutuhan ASN; dan penerapan pengelolaan kinerja aparatur
			Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat yang membutuhkan	Pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan desa; Penguatan perlindungan sosial, ketenagakerjaan , dan kesejahteraan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan jalan dan infrastruktur desa; penyediaan air minum dan sanitasi; rehabilitasi perumahan; penyediaan PSU; dukungan BLT Desa; serta penguatan administrasi dan tata kelola pembangunan desa
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Program Penyelenggaraa n Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

No.	Program Hasil Terbaik Cepat	Prioritas Pembangunan Kab. Tana Tidung 2027	Program Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan Kab. Tana Tidung Tahun 2027	Bentuk Dukungan Daerah
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB	Reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan pembangunan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemutakhiran basis data pendapatan; digitalisasi penerimaan daerah; peningkatan kepatuhan; optimalisasi pajak, retribusi dan aset; serta pertukaran data sesuai ketentuan
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Data diolah, 2026

Selain mendukung Program Hasil Terbaik Cepat, Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 juga diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui penyelarasan ini, program prioritas daerah tidak hanya berfungsi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tana Tidung, tetapi juga memperkuat pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Keterkaitan antara program prioritas daerah dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas disusun berdasarkan kesesuaian sasaran, indikator, kelompok penerima manfaat, lokasi intervensi, serta hasil pembangunan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, setiap program daerah dipetakan berdasarkan kontribusinya terhadap agenda nasional, baik dalam bentuk dukungan langsung terhadap kegiatan prioritas maupun dukungan tidak langsung melalui penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, perlindungan sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemetaan tersebut diperlukan agar kontribusi Kabupaten Tana Tidung terhadap pencapaian prioritas nasional dapat diidentifikasi secara jelas dan terukur.

Pelaksanaan dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas juga memerlukan sinergi lintas perangkat daerah. Hal ini disebabkan satu agenda nasional dapat mencakup beberapa urusan pemerintahan dan membutuhkan intervensi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran yang jelas antara perangkat daerah penanggung jawab dan perangkat daerah pendukung, disertai penggunaan data sasaran yang sama, penetapan lokasi prioritas, serta penyelarasan indikator dan target kinerja. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program, memperkuat keterpaduan pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Keselarasan program daerah dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas juga menjadi dasar untuk mengoptimalkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Program daerah yang memiliki keterkaitan kuat dengan agenda nasional dapat didorong untuk memperoleh dukungan melalui dana transfer, program kementerian dan lembaga, bantuan keuangan provinsi, maupun bentuk kerja sama pembangunan lainnya. Namun demikian, dukungan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah kabupaten, kapasitas fiskal daerah, kesiapan perangkat daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan kerangka tersebut, tabel berikut menyajikan keterkaitan antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 dengan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas. Penyajian tabel dimaksudkan untuk memperlihatkan bentuk kontribusi program daerah terhadap agenda pembangunan nasional, memperjelas posisi dan peran perangkat daerah, serta menjadi dasar dalam mengarahkan program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pendanaan secara lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

**Tabel 4. 9 Kegiatan Prioritas Utama dan Dukungan Program serta Kegiatan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027**

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional 2027	Program RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
PN 1	Penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PN 2	Pengembangan KSPP/lambung pangan lainnya; pangan akuatik; pangan hewani; pangan lokal dan nabati; konservasi sumber daya air; SPAM; sanitasi aman; pengelolaan kualitas air; peningkatan kualitas ekosistem gambut; tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
PN 3	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan digitalisasinya; pengembangan ekosistem digital; pengembangan koperasi sektor produksi	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PN 4	Perluasan PAUD; revitalisasi sekolah; penanganan anak tidak sekolah; sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional 2027	Program RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
	unggul; penurunan kematian ibu dan anak; pencegahan stunting; pemeriksaan kesehatan gratis; penuntasan TBC; pemberian makan bergizi; pelayanan kesehatan primer; rumah sakit berkualitas; pendayagunaan SDM kesehatan		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PN 5	Hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut dan sumber daya alam potensial lainnya	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
PN 6	Bantuan sosial adaptif; kartu usaha produktif; kartu usaha afirmatif; perumahan terintegrasi dengan PSU; pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional 2027	Program RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027	Kegiatan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
PN 7	Pencegahan tindak pidana korupsi; peningkatan kesejahteraan ASN berbasis kinerja; transformasi digital layanan publik prioritas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PN 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa; pemanfaatan khazanah budaya; pemajuan kebudayaan; peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sumber: Data diolah, 2026

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026 merupakan forum koordinasi teknis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Salah satu keluaran utama forum tersebut adalah kesepakatan mengenai dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN), yaitu program lintas sektor yang menjadi tumpuan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan

memerlukan dukungan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, kesepakatan Rakortekbang tidak berhenti sebagai catatan koordinatif, melainkan harus diterjemahkan menjadi muatan program dan subkegiatan dalam RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menindaklanjuti seluruh kesepakatan Pro-SN dengan menandai (tagging) dan menetapkan program serta subkegiatan pendukung pada Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, sehingga dukungan daerah bersifat operasional, memiliki perangkat daerah penanggung jawab, dan dapat dikendalikan pelaksanaannya.

Terdapat 5 (lima) Program Strategis Nasional yang disepakati untuk didukung Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2027, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Kesehatan Untuk Semua, Perluasan Akses Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Kelima Pro-SN tersebut didukung melalui 36 (tiga puluh enam) penugasan program dan 53 (lima puluh tiga) subkegiatan yang tersebar pada berbagai perangkat daerah pengampu urusan.

Dukungan Kabupaten Tana Tidung terhadap Pro-SN dirancang agar setiap program strategis nasional memiliki instrumen pelaksanaan yang jelas di tingkat daerah. Analisis atas komposisi program dan subkegiatan sebagaimana matriks pada tabel berikut menunjukkan karakteristik dukungan sebagai berikut.

Pengentasan Kemiskinan didukung melalui 7 program dan 10 subkegiatan. Komposisi dukungan memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak diperlakukan semata sebagai persoalan pendapatan. Selain perlindungan dan jaminan sosial fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, pengelolaan data fakir miskin, serta fasilitasi jaminan sosial bagi pekerja rentan miskin dukungan juga mencakup penanganan kerawanan pangan, penyediaan rumah bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta penataan bangunan gedung. Pola ini menunjukkan pendekatan multidimensi yang menyasar sekaligus aspek pendapatan, pangan, dan tempat tinggal. Kemunculan berulang subkegiatan pengelolaan data fakir miskin menegaskan bahwa ketepatan sasaran ditempatkan sebagai prasyarat efektivitas seluruh intervensi. Konsekuensinya, keberhasilan Pro-SN ini sangat

bergantung pada kualitas koordinasi antara urusan sosial, pangan, pekerjaan umum dan perumahan, serta lingkungan hidup.

Ketahanan Pangan didukung melalui 6 program dan 13 subkegiatan. Dukungan bertumpu pada dua sisi yang saling melengkapi, yaitu infrastruktur produksi dan kelembagaan penyuluhan. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, dan irigasi air tanah menempati porsi terbesar, diikuti penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian, serta penyediaan infrastruktur cadangan pangan. Hadirnya irigasi rawa secara khusus mencerminkan karakter fisik wilayah Kabupaten Tana Tidung yang didominasi dataran rendah dan lahan basah, sehingga pengelolaan air menjadi penentu utama produktivitas lahan. Penguatan kapasitas dan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa melengkapi sisi perangkat keras dengan pendampingan teknis kepada petani. Kombinasi ini konsisten dengan posisi kewilayahan daerah sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan tambak.

Kesehatan Untuk Semua merupakan Pro-SN dengan cakupan terluas, yaitu 19 program dan 20 subkegiatan. Komposisi ini adalah dukungan yang tidak berhenti pada layanan klinis. Selain pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta jaminan kesehatan masyarakat, dukungan juga mencakup pembangunan sistem penyediaan air minum, penanganan keluarga berisiko stunting, dan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. Komposisi tersebut memperlihatkan pemahaman bahwa derajat kesehatan ditentukan pula oleh determinan di luar sektor kesehatan: akses air bersih berpengaruh langsung terhadap penyakit berbasis lingkungan, sementara akurasi data kependudukan menentukan keaktifan kepesertaan jaminan kesehatan. Dengan demikian, Pro-SN ini menjadi contoh paling jelas dari penanganan isu secara lintas urusan.

Perluasan Akses Pendidikan didukung secara terfokus melalui program pengelolaan pendidikan, khususnya bimbingan teknis, pelatihan, dan magang untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan. Pilihan titik ungkit pada peningkatan kapasitas menunjukkan bahwa perluasan akses tidak dimaknai semata sebagai penambahan sarana, melainkan juga sebagai penjagaan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Fokus ini melengkapi belanja sarana dan prasarana pendidikan yang telah tercakup dalam program prioritas daerah lainnya, sehingga akses dan mutu berjalan beriringan.

Pertumbuhan Ekonomi didukung melalui 3 program dan 4 subkegiatan yang diarahkan pada penguatan iklim usaha, sarana distribusi perdagangan, dan pemberdayaan pelaku usaha. Cakupan yang relatif terbatas mengindikasikan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2027 sebagian besar bekerja secara tidak langsung, yaitu melalui Pro-SN lain seperti ketahanan pangan serta melalui belanja infrastruktur daerah. Hal ini perlu dicermati mengingat perekonomian daerah tengah menghadapi perlambatan dan skala ekonomi wilayah masih relatif terbatas, sehingga penguatan sisi produksi dan distribusi memerlukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, sebaran dukungan terhadap Pro-SN memperlihatkan tiga pola. Pertama, konsentrasi terbesar berada pada program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kesehatan, pangan, dan pengentasan kemiskinan. Kedua, hampir seluruh Pro-SN ditangani secara lintas urusan sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarperangkat daerah dan kejelasan pembagian peran. Ketiga, penguatan basis data, baik data fakir miskin maupun data kependudukan muncul sebagai simpul yang menghubungkan berbagai intervensi, sehingga perbaikan kualitas data menjadi pekerjaan mendasar yang menentukan efektivitas keseluruhan. Seluruh program dan subkegiatan hasil kesepakatan sebagaimana tabel berikut telah tercantum dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, sehingga dukungan daerah terhadap Pro-SN dapat dipastikan telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah.

Tabel 4. 10 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro-SN) Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Pro-SN	Program	Sub Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Pro-SN	Program	Sub Kegiatan		
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru		
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
		2	Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah					
Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku					
	Program Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa		
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					

No	Pro-SN	Program	Sub Kegiatan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
3	Kesehatan Untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

No	Pro-SN	Program	Sub Kegiatan
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4	Perluasan Akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
5	Pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Persampahan	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
			Penanganan Sampah melalui Pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

Sumber: Data diolah, 2026

Selain Program Strategis Nasional, Rakortekbang Tahun 2026 juga menyepakati dukungan daerah terhadap Program Tematik Pembangunan. Program

tematik merupakan agenda pembangunan lintas sektor yang bersifat pengarusutamaan (mainstreaming), yaitu isu yang penanganannya tidak dapat diserahkan kepada satu urusan tunggal, melainkan harus diinternalisasikan ke dalam berbagai program dan subkegiatan perangkat daerah. Karakteristik inilah yang membedakan program tematik dari program sektoral pada umumnya.

Pengarusutamaan tematik dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi penting karena menyangkut pemenuhan hak dasar kelompok masyarakat tertentu, penguatan nilai kebangsaan, serta pengurangan risiko pembangunan. Dengan menempatkan isu tematik sebagai bagian dari struktur program dan subkegiatan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memastikan bahwa perhatian terhadap isu tersebut memiliki dasar pelaksanaan dan penanggung jawab yang jelas, bukan sekadar pernyataan kebijakan.

Terdapat 6 (enam) Program Tematik Pembangunan yang disepakati untuk dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2027, yaitu Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak, Masyarakat Adat, Ekonomi Syariah, Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Penanggulangan Bencana. Keenam tematik tersebut didukung melalui 19 (sembilan belas) penugasan program dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan pada berbagai perangkat daerah. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pengarusutamaan Gender didukung melalui 6 program dan 6 subkegiatan yang tersebar pada enam urusan berbeda, yaitu advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender, rehabilitasi sosial, peningkatan kapasitas bidang pendidikan, pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak, perluasan kesempatan kerja, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha dalam pembentukan badan hukum berusaha. Pola satu program dengan satu subkegiatan pada banyak urusan menunjukkan strategi menyebar yang khas pengarusutamaan, bukan strategi memusat pada satu perangkat daerah. Kekuatan pola ini terletak pada hadirnya perspektif gender di ranah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi sekaligus. Namun demikian, pola menyebar juga menyimpan risiko intervensi menjadi dangkal apabila tidak disertai mekanisme pengarah bersama, sehingga penguatan kelompok kerja pengarusutamaan gender menjadi kebutuhan yang relevan.

2. Perlindungan Anak didukung melalui 5 program dan 5 subkegiatan yang berpusat pada pemenuhan hak anak, khususnya melalui bimbingan teknis dan pendampingan sumber daya manusia lembaga penyedia layanan. Titik berat pada penguatan kapasitas kelembagaan layanan dan bukan pada bantuan langsung merupakan pilihan yang berorientasi keberlanjutan, karena yang dibangun adalah sistem yang mampu merespons kasus secara berulang dan

konsisten. Pendekatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagai unit terkecil perlindungan anak.

- 3. Masyarakat Adat** didukung melalui program pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan 2 subkegiatan, sehingga merupakan tematik dengan cakupan paling terbatas. Meskipun demikian, dukungan ini bermakna sebagai bentuk pengakuan dan penguatan kelembagaan adat yang menjadi bagian dari identitas serta kohesi sosial masyarakat Kabupaten Tana Tidung. Ruang penguatan ke depan masih terbuka, antara lain melalui pengintegrasian dengan urusan kebudayaan dan penataan ruang, agar keberadaan masyarakat adat tidak hanya diakui secara kelembagaan tetapi juga terlindungi dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya.
- 4. Ekonomi Syariah** didukung melalui 4 program dan 4 subkegiatan yang diarahkan pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pelaku usaha berbasis prinsip syariah. Sebagaimana pengarusutamaan gender, tematik ini menggunakan pola satu program dengan satu subkegiatan pada beberapa urusan. Kehadirannya memperluas pilihan pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus melengkapi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini berjalan pada jalur konvensional.
- 5. Pembinaan Ideologi Pancasila** didukung melalui 2 program dan 3 subkegiatan. Berbeda dengan tematik lain yang menyebar tipis, dukungan pada tematik ini relatif terkonsolidasi pada urusan pengampu tertentu dengan kedalaman subkegiatan yang lebih besar per program. Pola terkonsolidasi memudahkan pengendalian dan pengukuran hasil. Substansi dukungan diarahkan pada penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter masyarakat, yang relevan untuk menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial.
- 6. Penanggulangan Bencana** didukung melalui program penanggulangan bencana dengan 3 subkegiatan yang berfokus pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Seluruh subkegiatan berada pada fase pra-bencana, sehingga orientasi dukungan adalah mitigasi dan kesiapsiagaan, bukan semata tanggap darurat. Orientasi ini tepat bagi wilayah yang bercirikan sungai, rawa, dan pesisir dengan kerentanan terhadap banjir serta kebakaran lahan, karena investasi pada pencegahan pada umumnya jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana.

Dari keseluruhan tematik tersebut dapat ditarik dua pola dukungan. Pola pertama adalah dukungan yang menyebar pada banyak urusan dengan intensitas tipis pada masing-masing urusan, sebagaimana terlihat pada Pengarusutamaan Gender, Ekonomi Syariah, dan Perlindungan Anak. Pola kedua adalah dukungan

yang terkonsolidasi pada satu urusan pengampu dengan kedalaman yang lebih besar, sebagaimana terlihat pada Pembinaan Ideologi Pancasila, Penanggulangan Bencana, dan Masyarakat Adat. Kedua pola tersebut sama-sama sah dan sesuai dengan karakter isunya; namun pola menyebar menuntut mekanisme koordinasi dan pemantauan bersama yang lebih kuat agar pengarusutamaan tidak berhenti sebagai pemenuhan formalitas administratif. Seluruh program dan subkegiatan hasil kesepakatan sebagaimana tabel berikut telah tercantum dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Tabel 4. 11 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Dukungan terhadap Program Tematik Pembangunan Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Tematik Pembangunan	Program	Sub Kegiatan
1	Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi dan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha
2	Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Program Perencanaan, Pengendalian, Dan	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

No	Tematik Pembangunan	Program	Sub Kegiatan
		Evaluasi Pembangunan Daerah	
3	Masyarakat Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4	Ekonomi Syariah	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Pembentukan Paskibraka
6	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Sumber: Data diolah, 2026

Dalam Rakortekbang Tahun 2026, pembahasan desk urusan menghasilkan kesepakatan mengenai outcome prioritas yang menjadi tanggung jawab bersama, beserta program dan subkegiatan daerah yang menjadi instrumen pencapaiannya. Kesepakatan inilah yang menjadi dasar bagi Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun muatan RKPD Tahun 2027, sehingga terbentuk rantai keterhubungan yang utuh dari Asta Cita, outcome prioritas, program, hingga subkegiatan yang memiliki perangkat daerah penanggung jawab.

Kabupaten Tana Tidung mendukung seluruh 8 (delapan) Asta Cita melalui 33 (tiga puluh tiga) outcome prioritas, yang dijabarkan ke dalam 60 (enam puluh) penugasan program dan 108 (seratus delapan) subkegiatan pada Tahun 2027. Cakupan ini menunjukkan bahwa dukungan daerah terhadap agenda nasional bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada satu atau dua bidang urusan saja. Analisis atas dukungan Kabupaten Tana Tidung terhadap outcome prioritas pada masing-masing Asta Cita diuraikan sebagai berikut.

1. **Asta Cita 1 — Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.** Didukung melalui 3 outcome prioritas, 7 program, dan 15 subkegiatan, yang mencakup terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, terakselerasinya transformasi pemerintahan digital, serta meningkatnya kualitas stabilitas politik dan kehidupan demokrasi. Hal yang menarik dicermati, cita yang bernuansa ideologis ini diterjemahkan daerah tidak hanya melalui pembinaan wawasan kebangsaan, tetapi juga melalui tata kelola kebencanaan dan digitalisasi pemerintahan. Penerjemahan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kepercayaan publik terhadap negara dibangun melalui keandalan pemerintah saat menghadapi krisis dan melalui kemudahan warga memperoleh layanan.
2. **Asta Cita 2 — Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air.** Didukung melalui 5 outcome prioritas, 9 program, dan 18 subkegiatan, meliputi meningkatnya ketahanan pangan, lingkungan hidup berkualitas, menguatnya keamanan siber dan persandian, terwujudnya tata kelola kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produksi pertanian. Keragaman outcome pada cita ini memperlihatkan bahwa kemandirian dimaknai secara luas sebagai gabungan antara kedaulatan pangan, kualitas lingkungan, dan keamanan informasi. Penempatan keamanan siber sebagai bagian dari kemandirian merupakan konsekuensi logis dari meluasnya digitalisasi layanan pemerintahan, sementara dominasi outcome pangan dan perikanan menegaskan kembali posisi kewilayahan daerah sebagai pusat kegiatan pertanian dan perikanan tambak.
3. **Asta Cita 3 — Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja.** Didukung melalui 5 outcome prioritas, 8 program, dan 12 subkegiatan, mencakup pemerataan penguasaan tanah, peningkatan peran dan produktivitas koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan pemajuan kebudayaan, dan peningkatan kontribusi

pariwisata serta ekonomi kreatif. Terlihat bahwa cita ini diterjemahkan daerah lebih pada penciptaan lapangan kerja melalui ekonomi rakyat dan pariwisata daripada melalui pembangunan fisik, karena muatan pembangunan fisik justru sebagian besar ditempatkan pada Asta Cita 5. Penggabungan kebudayaan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu cita juga memperlihatkan strategi menjadikan kekayaan budaya lokal sebagai basis penciptaan nilai ekonomi.

4. **Asta Cita 4 — Memperkuat pembangunan sumber daya manusia.**

Merupakan Asta Cita dengan cakupan outcome terbanyak, yaitu 8 outcome prioritas, 15 program, dan 29 subkegiatan. Outcome yang didukung meliputi terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan, kesehatan untuk semua, peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan efektivitas penanganan sesuai standar, peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, penyelenggaraan Program Bangga Kencana, peningkatan kualitas pemuda dan budaya olahraga, serta peningkatan kegemaran membaca dan literasi masyarakat. Keluasan cakupan ini konsisten dengan tema pembangunan daerah yang menempatkan sumber daya manusia unggul dan produktif sebagai fokus utama. Rentang outcome yang membentang dari layanan dasar hingga literasi dan keolahragaan menunjukkan bahwa pembangunan manusia dipahami secara utuh, tidak terbatas pada pendidikan dan kesehatan formal semata.

5. **Asta Cita 5 — Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam.** Didukung melalui 6 outcome prioritas, 12 program, dan 19 subkegiatan, mencakup penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, terlaksananya pembangunan daerah sesuai rencana tata ruang, peningkatan konektivitas antarwilayah, pencapaian realisasi penanaman modal, peningkatan perdagangan melalui integrasi rantai pasok, serta peningkatan peran industri dalam perekonomian. Cita inilah yang menjadi tumpuan utama pembangunan fisik daerah. Penempatan konektivitas dan integrasi rantai pasok dalam satu cita bersama hilirisasi memperlihatkan logika bahwa nilai tambah hanya dapat terwujud apabila hasil produksi mampu bergerak menuju pasar. Logika tersebut sangat relevan bagi Kabupaten Tana Tidung yang berdekatan dengan kawasan industri dan energi di wilayah sekitarnya, sehingga kesiapan konektivitas menentukan kemampuan daerah menangkap limpahan manfaat ekonomi.

6. **Asta Cita 6 — Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.** Didukung melalui 4 outcome prioritas, 6 program, dan 11 subkegiatan, mencakup terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan; tercapainya kesejahteraan sosial; meningkatnya kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; serta transformasi kawasan transmigrasi. Fokus pada desa dan permukiman ini bertaut erat dengan dukungan terhadap Program Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan, sehingga terlihat adanya konsistensi antara kedua matriks. Kehadiran outcome transmigrasi juga menandakan perhatian terhadap kawasan permukiman baru dan kawasan afirmasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan antarwilayah.
7. **Asta Cita 7 — Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memberantas korupsi.** Didukung melalui 1 outcome prioritas, 2 program, dan 2 subkegiatan, yaitu tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi tata kelola pemerintahan. Cakupan pada cita ini merupakan yang paling terbatas. Mengingat reformasi tata kelola dan digitalisasi merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah, dukungan pada cita ini berpotensi untuk diperkuat. Perlu dicatat bahwa sebagian substansi reformasi birokrasi sesungguhnya telah terwadahi pada Asta Cita 1 melalui outcome transformasi pemerintahan digital, sehingga yang lebih diperlukan adalah penajaman penempatan outcome, bukan penambahan beban program baru.
8. **Asta Cita 8 — Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.** Didukung melalui 1 outcome prioritas, 1 program, dan 2 subkegiatan, yaitu meningkatnya tertib arsip dan pengembangan memori kolektif bangsa. Sebagaimana Asta Cita 7, cakupan pada cita ini terbatas. Namun demikian, pembacaan atas dukungan cita ini sebaiknya dilakukan bersama Asta Cita 2, karena aspek lingkungan hidup tidak hilang melainkan terwadahi di sana melalui outcome lingkungan hidup berkualitas. Dengan pembacaan tersebut, perhatian daerah terhadap keberlanjutan lingkungan sesungguhnya lebih besar daripada yang tampak apabila cita ini dibaca secara terpisah.

Secara keseluruhan, distribusi dukungan terhadap Asta Cita memperlihatkan dua pusat gravitasi, yaitu pembangunan manusia pada Asta Cita 4 dan pembangunan fisik serta ekonomi pada Asta Cita 5. Pola ini konsisten dengan tema pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis pemerataan pembangunan sebagai arah utama. Di sisi lain, terdapat beberapa cita dengan cakupan yang lebih terbatas, khususnya Asta Cita 7 dan Asta Cita 8, yang sebagian substansinya telah terwadahi pada cita lain. Terhadap kondisi tersebut, langkah yang diperlukan bukanlah penambahan program baru, melainkan penajaman pemetaan agar dukungan daerah tergambar secara proporsional pada seluruh cita. Seluruh outcome prioritas, program, dan subkegiatan hasil kesepakatan sebagaimana tabel berikut telah tercantum dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, sehingga rantai perencanaan dari Asta Cita hingga subkegiatan telah terbentuk secara utuh.

Tabel 4. 12 Hasil Rakortekbang Tahun 2026 tentang Outcome Prioritas, Program, dan Subkegiatan dalam Mendukung Asta Cita untuk Kabupaten Tahun 2027 Yang Dilaksanakan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas
				Pengembangan Rumah Sakit
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Normalisasi/Restorasi Sungai
			Program Pengelolaan Dan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				Rekonstruksi Jalan
		Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
				Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
				Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Program Penanggulangan Bencana	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Daerah dan Peraturan Kepala daerah
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan	Program Perlindungan Perempuan	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
				Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	perlakuan salah lainnya	Program Perlindungan Khusus Anak	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
				Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
				Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Lingkungan Hidup Berkualitas	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Program Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Program Pembinaan Keluarga	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
			Berencana (Kb)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)
				Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Pelayaran	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
				Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Terakselerasinya Transformasi Pemerintah Digital di Daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet
				Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
				Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga yang Inklusif, dan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
				Pemanfaatan Cagar Budaya
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Program Pengelolaan Arsip	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
				Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
				Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
				Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
				Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
				Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
28	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
29	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem <i>Online Single Submission Risk Base Approach</i> (OSS RBA)
30	Membangun dari desadan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penyuluhan Transmigrasi
				Pelatihan Transmigrasi
31	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan

No	Asta Cita	Outcome Prioritas	Program	Sub Kegiatan
	adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	kewaspadaan nasional		Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan ketiga matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa program dan subkegiatan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 telah mendukung hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 secara menyeluruh, baik pada aspek Program Strategis Nasional, Program Tematik Pembangunan, maupun outcome prioritas dalam kerangka Asta Cita. Dukungan tersebut tidak berhenti pada tataran narasi, melainkan telah diterjemahkan menjadi program dan subkegiatan yang tercantum dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 beserta perangkat daerah penanggung jawabnya.

Analisis atas komposisi ketiga matriks menunjukkan beberapa hal pokok. Pertama, dukungan daerah terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyediaan infrastruktur, yang sejalan dengan karakteristik permasalahan pembangunan daerah. Kedua, sebagian besar agenda bersifat lintas urusan sehingga keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarperangkat daerah, bukan semata oleh besaran alokasi. Ketiga, penguatan basis data dan tata kelola muncul berulang sebagai

simpul penghubung antarintervensi, sehingga perbaikan pada aspek tersebut akan memberikan dampak berganda terhadap efektivitas program lainnya. Dengan demikian, tantangan utama pada tahap pelaksanaan terletak pada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, konsistensi penandaan program dan subkegiatan dalam sistem informasi perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan.

BAB V

RENCANA KERJA

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur, terarah, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Perumusan rencana tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan aktual masyarakat, kapasitas fiskal daerah, serta keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara permasalahan pembangunan, sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja, target, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, perangkat daerah penanggung jawab, serta kebutuhan pendanaan indikatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar alokasi sumber daya daerah dapat lebih fokus pada intervensi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendanaan pembangunan Tahun 2027 juga disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterpaduan antarsektor. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah mengharuskan setiap perangkat daerah melakukan penajaman prioritas, menghindari duplikasi program, serta memastikan bahwa belanja daerah diarahkan pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja. Oleh karena itu, kebutuhan pendanaan disusun secara indikatif dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, perangkat daerah pelaksana, dan kebutuhan pendanaan Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						160.000.000.000,00							258.706.810.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						148.885.971.000,00							223.424.608.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						148.885.971.000,00							223.424.608.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						99.074.699.868,00							130.892.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	-		-	85 poin	93.640.502.188,00						-	121.967.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	-		-	85 Poin	5.384.197.680,00						-	8.485.000.000,00	
			Nilai AKIP	-		-	83 Nilai	99.024.699.868,00						-	130.452.000.000,00	
			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	-		-	82 %	99.024.699.868,00						-	130.452.000.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.024.840,00					-		160.000.000,00	
		-						117.024.840,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	29.140.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	37.884.840,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	50.000.000,00						-	79.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						37.884.840,00							80.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	37.884.840,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							79.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	79.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						29.140.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	150 Data	29.140.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						93.640.502.188,00					-		121.967.000.000,00	
		-						93.640.502.188,00					-		121.967.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	948.720.000,00						-	967.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	92.691.782.188,00						-	121.000.000.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						92.691.782.188,00							121.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	630 Orang/bulan	92.691.782.188,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	121.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						948.720.000,00							967.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	948.720.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	967.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						698.374.560,00					-		1.635.000.000,00	
		-						698.374.560,00					-		1.635.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	186.128.000,00						-	360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	264.716.000,00						-	915.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	247.530.560,00						-	360.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						186.128.000,00							360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	186.128.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	360.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						264.716.000,00							915.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	264.716.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	915.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						247.530.560,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	12 Laporan	247.530.560,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	360.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		370.000.000,00	
		-						50.000.000,00					-		370.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	50.000.000,00						-	370.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							370.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	370.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.193.509.536,00					-		2.675.000.000,00	
		-						1.193.509.536,00					-		2.675.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	16.650.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	102.463.499,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	645.702.000,00						-	970.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	261.453.100,00						-	920.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	89.332.200,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.908.737,00						-	610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.908.737,00							610.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	77.908.737,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	610.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						261.453.100,00							920.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	52 Paket	261.453.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	920.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						89.332.200,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	900 Paket	89.332.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						16.650.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	16.650.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						645.702.000,00							970.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	645.702.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	970.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						102.463.499,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	102.463.499,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						800.000.000,00					-		880.000.000,00	
		-						800.000.000,00					-		880.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	800.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	80.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	800.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	800.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.824.874.744,00					-		2.480.000.000,00	
		-						1.824.874.744,00					-		2.480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	381.889.400,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.422.985.344,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						381.889.400,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	381.889.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.422.985.344,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.422.985.344,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						750.414.000,00					-		725.000.000,00	
		-						750.414.000,00					-		725.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	366.960.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	355.300.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	28.154.000,00						-	120.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						366.960.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	30 Unit	366.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						355.300.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	355.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	105.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.154.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	28.154.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	120.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						49.711.595.132,00							91.952.608.000,00	
			Indeks Iklim Inklusivitas sekolah jenjang SD	-		-	63,70 %	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
			Indeks iklim Inklusivitas sekolah jenjang SMP	-		-	65,20 %	21.204.088.000,00						-	31.771.171.628,00	
			Indeks Iklim Keamanan sekolah jenjang SD	-		-	76,30 %	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
			Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	-		-	77,50 %	21.204.088.000,00						-	31.771.171.628,00	
			Indeks Iklim Kebhinekaan sekolah jenjang SD	-		-	72,97 %	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
			Indeks iklim kebhinekaan sekolah jenjang SMP	-		-	75,10 %	21.204.088.000,00						-	31.771.171.628,00	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	-		-	99,45 %	7.378.655.900,00						-	10.052.650.000,00	
			Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	-		-	21,00 %	1.154.320.820,00						-	1.866.238.175,00	
			Jumlah Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun	-		-	99,23 %	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	-		-	72,70 %	7.378.655.900,00						-	10.052.650.000,00	
			Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	-		-	63,14 %	7.378.655.900,00						-	10.052.650.000,00	
			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	-		-	62,26 Nilai	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
			Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	-		-	76,06 %	21.204.088.000,00						-	31.771.171.628,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Assesmen Nasional	-		-	56,34 Nilai	19.457.329.412,00						-	38.592.883.197,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						19.857.730.412,00					-		41.993.048.197,00	
		-						19.857.730.412,00					-		41.993.048.197,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	50.560.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-		-	-	449.880.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	251.000.000,00						-	249.553.197,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	152.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	404.500.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	150.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	48.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	-	1.397.218.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	50.001.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	999.422.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	-	204.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	1.098.040.000,00						-	1.100.165.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	499.996.400,00						-	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	296.300.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	6.000.000.000,00						-	9.093.165.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.001.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	-	58.400.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	58.400.000,00						-	1.100.165.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	58.400.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	58.400.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	58.400.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	58.400.000,00						-	3.600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	201.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	500.000.000,00						-	950.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	-	58.400.000,00						-	8.650.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	-	148.000.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	4.200.000.000,00						-	4.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.803.012.012,00						-	3.900.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	-	446.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						58.400.000,00							8.650.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	8.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						58.400.000,00							200.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						58.400.000,00							3.600.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	2 Unit	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	3.600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						58.400.000,00							200.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						58.400.000,00							50.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Unit	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						1.397.218.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-		-	5 Paket	1.397.218.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						499.996.400,00							1.500.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	5 Paket	499.996.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.803.012.012,00							3.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	400 Peserta Didik	1.803.012.012,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	3.900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						204.000.000,00							200.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-		-	15 Orang	204.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						999.422.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	300 Orang	999.422.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						148.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-		-	34 Satuan Pendidikan	148.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						4.200.000.000,00							4.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-		-	34 Satuan Pendidikan	4.200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangu- naan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						446.000.000,00							600.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-		-	100 Orang	446.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangu- naan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.001.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	150 Orang	50.001.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						48.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	1 Konten Digital	48.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.001.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	34 Orang	50.001.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						251.000.000,00							249.553.197,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	251.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	249.553.197,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						404.500.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	404.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						150.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	5 Komunitas	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						152.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	1 Kegiatan	152.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						449.880.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	-		500 Buku	449.880.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang disabilitas.	-		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.098.040.000,00							1.100.165.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-		400 Paket	1.098.040.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.100.165.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						58.400.000,00							1.100.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	6 Ruang	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.100.165.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						201.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Unit	201.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						296.300.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	80 Orang	296.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						500.000.000,00							950.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	34 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	950.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						58.400.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	1 Ruang	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						6.000.000.000,00							9.093.165.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	3000 Peserta Didik	6.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	9.093.165.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						50.560.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	5 Paket	50.560.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						21.320.888.000,00					-		33.241.171.628,00	
		-						21.320.888.000,00					-		33.241.171.628,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	50.560.000,00						-	650.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-		-	-	49.734.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	500.000.000,00						-	520.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	149.990.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	50.400.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	212.500.000,00						-	260.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	49.980.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	-	1.042.700.000,00						-	947.050.041,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	49.959.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	1.003.195.000,00						-	1.300.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	312.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	1.495.960.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	1.537.640.000,00						-	1.191.920.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	299.980.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	4.000.000.000,00						-	7.658.763.587,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	328.000.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	49.749.000,00						-	520.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	58.400.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	-	58.400.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	-	5.512.900.000,00						-	5.600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	58.400.000,00						-	3.153.438.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	-	746.130.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	-	2.371.980.000,00						-	1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	1.282.330.000,00						-	3.900.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	-	50.001.000,00						-	250.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						58.400.000,00							400.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-		-	1 Ruang	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						5.512.900.000,00							5.600.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	5.512.900.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	5.600.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						58.400.000,00							3.153.438.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Unit	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	3.153.438.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						1.042.700.000,00							947.050.041,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-		-	2 Paket	1.042.700.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	947.050.041,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						1.537.640.000,00							1.191.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	4 Paket	1.537.640.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.191.920.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						4.000.000.000,00							7.658.763.587,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1200 Peserta Didik	4.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	7.658.763.587,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1.282.330.000,00							3.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	1200 Peserta Didik	1.282.330.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	3.900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						312.000.000,00							300.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-		-	15 Orang	312.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.003.195.000,00							1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	3 Orang	1.003.195.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						746.130.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-		-	3 Satuan Pendidikan	746.130.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						2.371.980.000,00							1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-		-	10 Satuan Pendidikan	2.371.980.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat peman- gunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	1.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						50.001.000,00							250.000.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-		-	10 Orang	50.001.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman- gunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						49.959.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	1 Orang	49.959.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						49.980.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	49.980.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						49.749.000,00							520.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	100 Orang	49.749.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	520.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						500.000.000,00							520.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	520.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.400.000,00							240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	1 Dokumen	50.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	240.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						212.500.000,00							260.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	5 Komunitas	212.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	260.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						149.990.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	1 Kegiatan	149.990.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						328.000.000,00							700.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	-	10 Satuan Pendidikan	328.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						58.400.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	58.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						299.980.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	80 Orang	299.980.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						49.734.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-		-	300 Buku	49.734.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.495.960.000,00							1.500.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	500 Paket	1.495.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						50.560.000,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-		-	6 Paket	50.560.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						7.378.655.900,00					-		14.172.150.000,00	
		-						7.378.655.900,00					-		14.172.150.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	-	51.720.000,00						-	267.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	170.964.000,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	152.710.000,00						-	267.500.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	50.940.000,00						-	214.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	49.920.000,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	-	99.200.000,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	50.080.000,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-		-	-	51.682.900,00						-	53.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	320.200.000,00						-	749.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	1.000.000.000,00						-	1.498.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	260.928.000,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	-	2.399.900.000,00						-	2.568.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	-	103.240.000,00						-	107.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	399.000.000,00						-	642.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	299.636.000,00						-	1.070.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.498.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	-	200.000.000,00						-	214.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	300.238.000,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	58.297.000,00						-	214.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	0,00						-	1.899.250.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	0,00						-	278.200.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	-	0,00						-	535.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	-	160.000.000,00						-	171.200.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						0,00							535.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	535.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						99.200.000,00							107.000.000,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		-	20 Paket	99.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	107.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						103.240.000,00							107.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-		-	5 Paket	103.240.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	107.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						1.200.000.000,00							1.498.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	1600 Peserta Didik	1.200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.498.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						2.399.900.000,00							2.568.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-		-	240 Orang	2.399.900.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	2.568.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						260.928.000,00							535.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	100 Orang	260.928.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	535.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						320.200.000,00							749.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	8 Satuan Pendidikan	320.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	749.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						1.000.000.000,00							1.498.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-		-	38 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.498.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						160.000.000,00							171.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	8 Orang	160.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	171.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.080.000,00							107.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	10 Orang	50.080.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	107.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						49.920.000,00							107.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	49.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	107.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						58.297.000,00							214.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	38 Orang	58.297.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	214.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						170.964.000,00							535.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	1 Dokumen	170.964.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	535.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						152.710.000,00							267.500.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	152.710.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	267.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.940.000,00							214.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	2 Komunitas	50.940.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	214.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							1.899.250.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	2 Ruang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	1.899.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK						51.682.900,00							53.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-		-	1 Paket	51.682.900,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	53.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						300.238.000,00							535.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	100 Peserta didik	300.238.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	535.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						299.636.000,00							1.070.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	100 Orang	299.636.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.070.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						399.000.000,00							642.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	4 Paket	399.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	642.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						51.720.000,00							267.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-		-	4 Paket	51.720.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	267.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						200.000.000,00							214.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-		-	4 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	214.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						0,00							278.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	2 Ruang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	278.200.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.154.320.820,00					-		2.546.238.175,00	
		-						1.154.320.820,00					-		2.546.238.175,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-		-	-	53.852.820,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-		-	-	0,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	-	100.500.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	-	79.948.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	100.030.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	-	50.010.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	-	49.920.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	100.730.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	99.230.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	-	200.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	-	48.850.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	-	50.020.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	-	221.230.000,00						-	346.238.175,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						200.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-		-	300 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						100.730.000,00							100.000.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	10 Orang	100.730.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-		-	2 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						221.230.000,00							346.238.175,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-		-	2 Satuan Pendidikan	221.230.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	346.238.175,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						49.920.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-		-	2 Orang	49.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	60.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.010.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-		-	2 Konten Digital	50.010.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	10 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.500.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-		-	4 Dokumen	100.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						100.030.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	100.030.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							50.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-		-	2 Komunitas	0,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						79.948.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-		-	2 Kegiatan	79.948.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-		-	2 Paket	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						48.850.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-		-	200 Peserta Didik	48.850.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0,00							100.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-		-	2 Buku	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							100.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						99.230.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	10 Orang	99.230.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						53.852.820,00							50.000.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-		-	10 Paket	53.852.820,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						50.020.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-		-	200 Peserta Didik	50.020.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						0,00							260.000.000,00	
			Persentase Sekolah DIKDAS yang menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa dan kesenian daerah	-		-	76 %	0,00						-	210.000.000,00	
			Persentase Sekolah TK yang menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa dan kesenian daerah	-		-	68 %	0,00						-	25.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00					-		210.000.000,00	
		-						0,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	-	0,00						-	80.000.000,00	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							75.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-		-	900 Buku	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	-		-	45 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							55.000.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00					-		50.000.000,00	
		-						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							25.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-		-	1000 Buku	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						99.676.000,00							140.000.000,00	
			Persentase Guru berkualifikasi D-IV/S1	-		-	32 %	99.676.000,00						-	70.000.000,00	
			Persentase Satuan Pendidik yang memenuhi standar jumlah dan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan	-		-	100 %	99.676.000,00						-	70.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						99.676.000,00					-		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						99.676.000,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	49.686.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	-	49.990.000,00						-	70.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						49.686.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	1 Dokumen	49.686.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						49.990.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-		-	25 Laporan	49.990.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						0,00							180.000.000,00	
			Persentase Siswa kelas SD dan SMP yang mampu berbahasa Daerah	-		-	33 %	0,00						-	180.000.000,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		180.000.000,00	
		-						0,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	-		-	-	0,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah						0,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	-		-	100 Buku	0,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	130.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.114.029.000,00							35.282.202.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						11.114.029.000,00							35.282.202.000,00	
6.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.834.029.000,00							19.342.051.000,00	
			Persentase Pekan Kebudayaan Daerah	-		-	63 %	1.834.029.000,00						-	19.092.051.000,00	
			Persentase pelaku budaya/pegiat budaya yang menerima pembinaan	-		-	61 %	1.834.029.000,00						-	19.092.051.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						964.029.000,00					-		14.300.000.000,00	
		-						964.029.000,00					-		14.300.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	-	849.029.000,00						-	14.050.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	-	115.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						849.029.000,00							14.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	-		-	2 Objek	849.029.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	14.050.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						115.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	2 Orang	115.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						370.000.000,00					-		439.971.000,00	
		-						370.000.000,00					-		439.971.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	120.000.000,00						-	139.971.000,00	
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						120.000.000,00							139.971.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	1 Objek	120.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	139.971.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	-		-	2 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	-		-	2 Sertifikat	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00					-		4.602.080.000,00	
		-						500.000.000,00					-		4.602.080.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	-	100.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	-	400.000.000,00						-	4.302.080.000,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-		-	2 Objek	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						400.000.000,00							4.302.080.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-		-	4 Unit	400.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.302.080.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						650.000.000,00							1.850.000.000,00	
			Persentase Grup Kesenian yang representatif	-		-	62 %	400.000.000,00						-	1.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						650.000.000,00					-		1.850.000.000,00	
		-						650.000.000,00					-		1.850.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	250.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-		-	-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	-		-	20 Orang	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	-		-	5 Sertifikat	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						250.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	5 Lembaga	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						8.200.000.000,00							13.401.122.000,00	
			Persentase Tradisi dan Sejarah Lokal yang Lestari	-		-	55 %	8.200.000.000,00						-	13.401.122.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						8.200.000.000,00					-		13.401.122.000,00	
		-						8.200.000.000,00					-		13.401.122.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	-		-	-	8.000.000.000,00						-	13.150.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	-	50.000.000,00						-	101.122.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						50.000.000,00							101.122.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	-		-	3 Orang	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	101.122.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						8.000.000.000,00							13.150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	-		-	4 Unit	8.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	13.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						430.000.000,00							689.029.000,00	
			Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang di daftarkan	-		-	62 %	280.000.000,00						-	589.029.000,00	
			Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang kebudayaan	-		-	7,5 %	280.000.000,00						-	589.029.000,00	
			Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	-		-	45,47 %	280.000.000,00						-	589.029.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						160.000.000,00					-		215.000.000,00	
		-						160.000.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	-	60.000.000,00						-	115.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-		-	2 Objek	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						60.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	-		-	10 Objek	60.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	115.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	1 Objek	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						270.000.000,00					-		474.029.000,00	
		-						270.000.000,00					-		474.029.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	50.000.000,00						-	249.029.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	170.000.000,00						-	175.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						170.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	10 Objek	170.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	175.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						50.000.000,00							249.029.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	10 Objek	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	249.029.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	2 Objek	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Kesehatan						63.583.876.379,00							91.653.145.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						63.081.268.629,00							91.324.759.900,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						63.081.268.629,00							91.324.759.900,00	
10.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						59.835.529.903,00							75.707.354.978,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan pelaksanaan administrasi, penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-		-	100 %	70.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Nilai AKIP perangkat Daerah	-		-	80,81 Persen	254.196.330,00						-	649.320.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80,81 Persen	945.990.000,00						-	2.167.800.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80.91 Persen	64.004.000,00						-	200.000.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80,81 %	23.600.000,00						-	30.000.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80.81 Persen	50.522.745.566,00						-	60.744.540.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 %	23.600.000,00						-	30.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 Persen	51.736.935.896,00						-	63.011.660.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						64.004.000,00					Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas dan tersusun dengan baik		200.000.000,00	
		-						64.004.000,00					Memastikan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas dan tersusun dengan baik		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	47.944.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	16.060.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						47.944.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	47.944.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.060.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	23 Laporan	16.060.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						50.522.745.566,00					Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		60.744.540.000,00	
		-						50.522.745.566,00					Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		60.744.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	692.040.000,00						-	692.040.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	16.880.000,00						-	52.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	49.813.825.566,00						-	60.000.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						49.813.825.566,00							60.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	389 Orang/bulan	49.813.825.566,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						692.040.000,00							692.040.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	692.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	692.040.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						16.880.000,00							52.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	13 Laporan	16.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	52.500.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						23.600.000,00					Terselenggaranya pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		60.000.000,00	
		-						23.600.000,00					Terselenggaranya pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	16.880.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	6.720.000,00						-	30.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						6.720.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	2 Dokumen	6.720.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						16.880.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	4 Laporan	16.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		80.000.000,00	
		-						70.000.000,00					Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						20.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						254.196.330,00					Tersedianya sarana administrasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		649.320.000,00	
		-						254.196.330,00					Tersedianya sarana administrasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		649.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	117.400.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	72.476.330,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.320.000,00						-	14.320.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						72.476.330,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	72.476.330,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	85.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.320.000,00							14.320.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	14.320.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	14.320.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						117.400.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	117.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Kesehatan

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					Tersedianya sarana dan prasarana Penunjang perkantoran		250.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Tersedianya sarana dan prasarana Penunjang perkantoran		250.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.388.590.000,00					Terlaksananya layanan jasa penunjang administrasi perkantoran secara efisien dan tepat waktu		3.160.000.000,00	
		-						2.388.590.000,00					Terlaksananya layanan jasa penunjang administrasi perkantoran secara efisien dan tepat waktu		3.160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	427.650.000,00						-	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.950.940.000,00						-	2.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						427.650.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	4 Laporan	427.650.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						338.140.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	338.140.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						338.340.000,00					Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan secara berkala dan sesuai standar		577.800.000,00	
		-						338.340.000,00					Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan secara berkala dan sesuai standar		577.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	200.000,00						-	195.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	338.140.000,00						-	382.800.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						338.140.000,00							382.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	18 Unit	338.140.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	382.800.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000,00							195.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	195.000.000,00	Dinas Kesehatan
11.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	-		-	100 Persen	25.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	-		-	86 Persen	1.592.945.833,00						-	15.418.351.600,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	71 Persen	1.718.525.833,00						-	15.873.351.600,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	-		-	85 Persen	1.718.525.833,00						-	15.873.351.600,00	
			Persentase Fasyankes yang Memiliki Alat Kesehatan/Penunjang Sesuai Standar	-		-	50 Persen	1.592.945.833,00						-	15.418.351.600,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	7.212.386.060,00						-	8.412.803.800,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
		-						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	85.569.907,00						-	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	151.348.200,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	-	258.227.000,00						-	331.265.600,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-		-	-	50.000.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	10.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	-	5.040.000,00						-	5.040.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	2.093.898.128,00						-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	40.000.000,00						-	1.582.046.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	2.571.000.000,00						-	9.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	36.000.000,00						-	2.150.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	1.000.000,00						-	750.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						40.000.000,00							1.582.046.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.582.046.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						10.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						1.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						50.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	36 Unit	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						35.569.907,00							350.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	50 Unit	35.569.907,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-		-	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						1.000.000,00							6.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	6.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.193.108.926,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	50 Paket	1.193.108.926,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						5.040.000,00							5.040.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-		-	50 Keluarga	5.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.040.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						258.227.000,00							331.265.600,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-		-	4 Paket	258.227.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-		-	331.265.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	5.920.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	110.465.600,00						-	171.198.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	-	27.250.000,00						-	61.528.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	-	5.200.000.000,00						-	4.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	-	22.000.000,00						-	42.253.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	-	10.000.000,00						-	215.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	109.079.360,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	-	1.660.000,00						-	41.476.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	-	250.000.000,00						-	623.736.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	-	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	160.083.000,00						-	160.083.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	-	6.300.000,00						-	6.300.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	8.082.000,00						-	41.082.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	4.440.000,00						-	7.560.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	4.440.000,00						-	7.560.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	2.960.000,00						-	28.536.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	4.440.000,00						-	11.340.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	31.502.500,00						-	31.502.500,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	10.000.000,00						-	35.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						8.064.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	466 Orang	8.064.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						160.083.000,00							160.083.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	446 Orang	160.083.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	160.083.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						110.465.600,00							171.198.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	424 Orang	110.465.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	171.198.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						5.920.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	2858 Orang	5.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						73.673.600,00							73.673.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	5990 Orang	73.673.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	73.673.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						4.440.000,00							11.340.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	21104 Orang	4.440.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	11.340.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						2.960.000,00							28.536.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1768 Orang	2.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	28.536.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						4.440.000,00							7.560.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	3319 Orang	4.440.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	7.560.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						4.440.000,00							7.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	597 Orang	4.440.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	7.560.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.240.000,00							15.680.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	51 Orang	8.240.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	15.680.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						28.100.000,00							96.991.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	508 Orang	28.100.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	96.991.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						8.082.000,00							41.082.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	912 Orang	8.082.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	41.082.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00							215.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	215.240.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						455.424.800,00							505.424.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	6 Dokumen	455.424.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	505.424.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						374.480.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	4 Dokumen	374.480.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						109.079.360,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	4 Dokumen	109.079.360,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.000.000,00							158.012.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	158.012.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						5.200.000.000,00							4.750.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-		-	4 Dokumen	5.200.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						1.660.000,00							41.476.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-		-	1 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	41.476.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						250.000.000,00							623.736.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	8 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	623.736.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.300.000,00							6.300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	545 Orang	6.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	6.300.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	-		-	7 Tatanan	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						27.250.000,00							61.528.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	-		-	4 Dokumen	27.250.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	61.528.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						244.661.200,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	4 Dokumen	244.661.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						22.000.000,00							42.253.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	2 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	42.253.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						31.502.500,00							31.502.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	4 Paket	31.502.500,00	Kab. Tana Tidung	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	31.502.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							436.187.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	436.187.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						75.000.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan		215.000.000,00	
		-						75.000.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	75.000.000,00						-	215.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						25.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	165.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						128.540.000,00					Masyarakat		455.000.000,00	
		-						128.540.000,00					Masyarakat		455.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	-	122.620.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	2.960.000,00						-	105.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	-	2.960.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.960.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	-		-	2 Unit	2.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						2.960.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	7 Unit	2.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	105.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						122.620.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-		-	4 Dokumen	122.620.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
12.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.680.514.840,00							4.858.256.500,00	
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	-		-	100 undefined	1.880.000,00						-	90.000.000,00	
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	-		-	100 Persen	685.074.000,00						-	1.633.626.500,00	
			Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-		-	50 Persen	685.074.000,00						-	1.633.626.500,00	
			Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-		-	50 Persen	1.880.000,00						-	90.000.000,00	
			Persentase SDMK yang berkompeten dan memiliki izin praktik aktif sesuai jenis profesinya	-		-	100 Persen	1.880.000,00						-	90.000.000,00	
			Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	-		-	100 Persen	712.050.840,00						-	450.000.000,00	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-		-	20,25 Persen	686.954.000,00						-	1.723.626.500,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						3.760.000,00					SDM Kesehatan		90.000.000,00	
		-						3.760.000,00					SDM Kesehatan		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	1.880.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	-	1.880.000,00						-	35.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						1.880.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	4 Dokumen	1.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						1.880.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-		-	4 Dokumen	1.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	55.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1.925.074.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan		4.133.626.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.925.074.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan		4.133.626.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	170.754.000,00						-	77.737.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	1.754.320.000,00						-	4.055.889.500,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						170.754.000,00							77.737.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	3 Dokumen	170.754.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	77.737.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						514.320.000,00							1.555.889.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	11 Orang	514.320.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.555.889.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						751.680.840,00					Sumber Daya Kesehatan		634.630.000,00	
		-						751.680.840,00					Sumber Daya Kesehatan		634.630.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	751.680.840,00						-	634.630.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						712.050.840,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	60 Orang	712.050.840,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
13.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						342.056.000,00							215.690.000,00	
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	-		-	85 Persen	341.656.000,00						-	215.690.000,00	
			Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	-		-	50 Persen	326.056.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	-		-	70 Persen	400.000,00						-	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	-		-	70 Persen	341.256.000,00						-	135.690.000,00	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	-		-	50 Persen	15.600.000,00						-	115.690.000,00	
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	-		-	72 Persen	326.056.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	-		-	70 Persen	400.000,00						-	25.000.000,00	
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar teknis dan legalitas berdasarkan hasil pengawasan	-		-	100 Persen	15.600.000,00						-	115.690.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	-		-	72 Persen	15.600.000,00						-	115.690.000,00	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	-		-	100 Persen	326.056.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						400.000,00					Industri Rumah Tangga, Toko Obat, Apotek, UMOT, Toko Alkes dan Optical		25.000.000,00	
		-						400.000,00					Industri Rumah Tangga, Toko Obat, Apotek, UMOT, Toko Alkes dan Optical		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	-	400.000,00						-	25.000.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						400.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		-	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						326.056.000,00					Industri Rumah Tangga		100.000.000,00	
		-						326.056.000,00					Industri Rumah Tangga		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	-	326.056.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						326.056.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		-	70 Dokumen	326.056.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						15.200.000,00					Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		35.690.000,00	
		-						15.200.000,00					Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		35.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	-	15.200.000,00						-	35.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						15.200.000,00							35.690.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	2 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	35.690.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						400.000,00					Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		55.000.000,00	
		-						400.000,00					Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		55.000.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	-	400.000,00						-	55.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						400.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-		-	36 Unit	400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	55.000.000,00	Dinas Kesehatan
14.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	9.900.000,00						-	455.068.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.240.000,00					Masyarakat, kader, Lintas Sektor		15.070.000,00	
		-						5.240.000,00					Masyarakat, kader, Lintas Sektor		15.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	5.240.000,00						-	15.070.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.240.000,00							15.070.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	4 Dokumen	5.240.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	15.070.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.660.000,00					Masyarakat		289.998.000,00	
		-						1.660.000,00					Masyarakat		289.998.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	-	1.660.000,00						-	289.998.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						1.660.000,00							289.998.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-		-	2 Dokumen	1.660.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	289.998.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						3.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						502.607.750,00							328.385.250,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						502.607.750,00							328.385.250,00	
15.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						41.645.750,00							66.104.250,00	
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	-		-	1,75 Rata-rata anak per w	41.645.750,00						-	66.104.250,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						22.445.750,00					Masyarakat		36.104.250,00	
		-						22.445.750,00					Masyarakat		36.104.250,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	22.445.750,00						-	36.104.250,00	
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						22.445.750,00							36.104.250,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	5 Kelompok	22.445.750,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	36.104.250,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						19.200.000,00					-		30.000.000,00	
		-						19.200.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	-	9.200.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						9.200.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	1 Dokumen	9.200.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
16.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						179.632.000,00							156.151.000,00	
			Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertiity Rate (ASFR) 15-19 tahun	-		-	20,05 Per 1.000 perempuan	179.632.000,00						-	156.151.000,00	
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mCPR)	-		-	69,21 Persen	179.632.000,00						-	156.151.000,00	
			Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	-		-	32,90 Persen	179.632.000,00						-	156.151.000,00	
			Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	-		-	6,74 Persen	179.632.000,00						-	156.151.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand safisfied by modern meyhods)	-		-	92,07 Persen	179.632.000,00						-	156.151.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						86.408.000,00					Masyarakat		45.000.000,00	
		-						86.408.000,00					Masyarakat		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	-	81.408.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-		-	-	5.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						81.408.000,00							20.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-		-	5 Laporan	81.408.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						30.000.000,00					Tenaga Penyuluh dan Petugas Lapangan dan Kader		35.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Tenaga Penyuluh dan Petugas Lapangan dan Kader		35.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	-	30.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	62 Orang	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	35.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						63.224.000,00					-		76.151.000,00	
		-						63.224.000,00					-		76.151.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	-	10.200.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	4.500.000,00						-	10.710.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	26.000.000,00						-	22.920.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	22.524.000,00						-	32.521.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						22.524.000,00							32.521.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	147 Orang	22.524.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	32.521.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						10.200.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	4 Kegiatan	10.200.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						26.000.000,00							22.920.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	4 Laporan	26.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	22.920.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						4.500.000,00							10.710.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	10.710.000,00	Dinas Kesehatan
17.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						281.330.000,00							106.130.000,00	
			Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-		-	75 Persen	281.330.000,00						-	106.130.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						36.880.000,00					Masyarakat		73.410.000,00	
		-						36.880.000,00					Masyarakat		73.410.000,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	-	10.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-		-	-	6.660.000,00						-	21.350.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	5.220.000,00						-	12.060.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	-		-	96 Orang	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						6.660.000,00							21.350.000,00	
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	-		-	2 Kelompok	6.660.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	21.350.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						5.220.000,00							12.060.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	5.220.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	12.060.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						244.450.000,00					Masyarakat		32.720.000,00	
		-						244.450.000,00					Masyarakat		32.720.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	-	8.400.000,00						-	7.400.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	211.050.000,00						-	15.320.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	25.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						8.400.000,00							7.400.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-		-	4 laporan	8.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	7.400.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						25.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						211.050.000,00							15.320.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	100 Keluarga	211.050.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	-	-		-	15.320.000,00	Dinas Kesehatan
		Puskesmas Tideng Pale						1.603.061.782,00							1.375.158.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						610.715.551,00							389.509.249,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						610.715.551,00							389.509.249,00	
18.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	491.777.551,00						-	159.509.249,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	664.357.729,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.624.177,00						-	96.925.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	34.900.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						40.500.000,00							29.509.249,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	183 Orang	40.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	29.509.249,00	Puskesmas Tideng Pale

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						57.050.000,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	2558 Orang	57.050.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						6.400.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	14 Orang	6.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.520.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	209 Orang	6.520.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						169.226.029,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	169.226.029,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.100.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						31.311.077,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	31.311.077,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						122.750.445,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	122.750.445,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						520.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	520.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	60.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.950.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	4 Orang	3.950.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						48.450.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	48.450.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	15.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						48.450.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	48.450.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	15.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
19.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	70.488.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						70.488.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	70.488.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Tideng Pale
	X							992.346.231,00							985.648.751,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						992.346.231,00							985.648.751,00	
20.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.324.646.861,00							2.361.213.897,00	
			-	-		-	-	992.346.231,00						-	985.648.751,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.324.646.861,00					-		2.361.213.897,00	
		-						2.324.646.861,00					-		2.361.213.897,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.324.646.861,00						-	2.361.213.897,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						992.346.231,00							985.648.751,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	992.346.231,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	985.648.751,00	Puskesmas Tideng Pale
		Puskesmas Sesayap Hilir						1.521.762.620,00							1.255.158.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						646.114.902,00							473.311.749,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						646.114.902,00							473.311.749,00	
21.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	583.987.684,00						-	180.811.749,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	664.357.729,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.624.177,00						-	96.925.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	34.900.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						101.463.000,00							63.311.749,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	122 Orang	101.463.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	63.311.749,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						24.500.000,00							30.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	1469 Orang	24.500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						15.040.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	6 Orang	15.040.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	112 Orang	4.360.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	0,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						174.360.814,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	174.360.814,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						15.350.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	15.350.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						55.554.616,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	55.554.616,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						137.239.521,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	137.239.521,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.480.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	10 Orang	11.480.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						43.639.733,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	43.639.733,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	12.500.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						43.639.733,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	43.639.733,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	12.500.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
22.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	18.487.485,00						-	50.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Masyarakat		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Masyarakat		285.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						18.487.485,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	18.487.485,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Sesayap Hilir
	X							875.647.718,00							781.846.251,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						875.647.718,00							781.846.251,00	
23.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.324.646.861,00							2.361.213.897,00	
			-	-		-	-	875.647.718,00						-	781.846.251,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.324.646.861,00					Masyarakat dan SDM Fasilitas Kesehatan		2.361.213.897,00	
		-						2.324.646.861,00					Masyarakat dan SDM Fasilitas Kesehatan		2.361.213.897,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.324.646.861,00						-	2.361.213.897,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						875.647.718,00							781.846.251,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	875.647.718,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	781.846.251,00	Puskesmas Sesayap Hilir
		Puskesmas Tana Lia						894.298.600,00							832.531.473,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						894.298.600,00							832.531.473,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						894.298.600,00							832.531.473,00	
24.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						59.835.529.903,00							75.707.354.978,00	
			-	-		-	-	340.961.612,00						-	367.291.473,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.024.054.007,00					Masyarakat		9.985.694.978,00	
		-						6.024.054.007,00					Masyarakat		9.985.694.978,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	6.024.054.007,00						-	9.985.694.978,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						340.961.612,00							367.291.473,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	340.961.612,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	367.291.473,00	Puskesmas Tana Lia
25.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	488.333.988,00						-	172.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	664.357.729,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.624.177,00						-	96.925.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	34.900.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100.656.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	53 Orang	100.656.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Tana Lia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	620 Orang	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						11.430.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	11 Orang	11.430.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						34.930.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	49 Orang	34.930.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						65.089.967,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	65.089.967,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						31.651.730,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	31.651.730,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						165.521.291,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	165.521.291,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.700.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	70.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.620.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2 Orang	6.620.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						36.735.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	36.735.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	17.500.000,00	Puskesmas Tana Lia
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						36.735.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	36.735.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembedaan penggunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	17.500.000,00	Puskesmas Tana Lia
26.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	28.268.000,00						-	15.240.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						28.268.000,00							15.240.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	28.268.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	15.240.000,00	Puskesmas Tana Lia
		Puskesmas Kujau						1.043.619.813,00							735.804.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.043.619.813,00							735.804.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.043.619.813,00							735.804.000,00	
27.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						59.835.529.903,00							75.707.354.978,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	414.435.666,00						-	317.787.505,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.024.054.007,00					Masyarakat		9.985.694.978,00	
		-						6.024.054.007,00					Masyarakat		9.985.694.978,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	6.024.054.007,00						-	9.985.694.978,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						414.435.666,00							317.787.505,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	414.435.666,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	317.787.505,00	Puskesmas Kujau
28.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	571.459.837,00						-	150.516.495,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	664.357.729,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.624.177,00						-	96.925.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	34.900.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						88.597.608,00							28.016.495,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	60 Orang	88.597.608,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	28.016.495,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						31.087.608,00							35.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	754 Orang	31.087.608,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.400.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	11 Orang	8.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11.100.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	68 Orang	11.100.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						155.535.640,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	155.535.640,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.400.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						53.210.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	53.210.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						122.226.487,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	122.226.487,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.253.608,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	1.253.608,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	70.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.800.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	5 Orang	1.800.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	35.000.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						46.424.442,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	46.424.442,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	17.500.000,00	Puskesmas Kujau
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						46.424.444,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	46.424.444,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	17.500.000,00	Puskesmas Kujau
29.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	57.724.310,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						57.724.310,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	57.724.310,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	5.000.000,00	Puskesmas Kujau
		Puskesmas Muruk Rian						753.158.454,00							604.353.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						568.835.542,00							460.634.105,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						568.835.542,00							460.634.105,00	
30.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	482.109.787,00						-	360.759.105,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	227.711.208,00						-	233.673.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	-	1.155.288.903,00						-	675.424.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	415.130.000,00						-	656.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	-	275.727.423,00						-	325.540.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	-	249.634.808,00						-	720.978.072,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	-	664.357.729,00						-	130.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	-	423.943.757,00						-	241.865.526,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	262.624.175,00						-	533.112.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.624.177,00						-	96.925.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	-	102.860.000,00						-	216.991.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	34.900.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	-	51.710.000,00						-	165.680.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						84.663.149,00							21.028.033,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	28 Orang	84.663.149,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	21.028.033,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						11.400.000,00							20.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-		-	349 Orang	11.400.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	20.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.200.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-		-	7 Orang	2.200.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						17.850.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-		-	26 Orang	17.850.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						135.651.653,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-	1 Dokumen	135.651.653,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	25.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.800.000,00							6.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	6.800.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						54.000.000,00							17.528.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-	1 Dokumen	54.000.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	17.528.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						116.619.985,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-	1 Dokumen	116.619.985,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						500.000,00							220.978.072,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	220.978.072,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.050.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	5 Orang	11.050.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	10.000.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						37.375.000,00							34.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	37.375.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	34.425.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						37.375.000,00							34.425.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	37.375.000,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	34.425.000,00	Puskesmas Muruk Rian
31.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						234.218.550,00							590.758.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	49.350.755,00						-	15.450.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	
		-						227.318.550,00					Kader Kesehatan		285.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	-	227.318.550,00						-	285.690.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						49.350.755,00							15.450.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	1 Dokumen	49.350.755,00	Kab. Tana Tidung	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		-	15.450.000,00	Puskesmas Muruk Rian
	X							184.322.912,00							143.718.895,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						184.322.912,00							143.718.895,00	
32.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.324.646.861,00							2.361.213.897,00	
			-	-		-	-	184.322.912,00						-	143.718.895,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.324.646.861,00					Masyarakat dan SDM Fasilitas Kesehatan (NAKES)		2.361.213.897,00	
		-						2.324.646.861,00					Masyarakat dan SDM Fasilitas Kesehatan (NAKES)		2.361.213.897,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.324.646.861,00						-	2.361.213.897,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						184.322.912,00							143.718.895,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	184.322.912,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	143.718.895,00	Puskesmas Muruk Rian
		Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim						12.193.809.318,00							18.185.246.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.193.809.318,00							18.185.246.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						12.193.809.318,00							18.185.246.000,00	
33.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						59.835.529.903,00							75.707.354.978,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80,81 Persen	1.612.800.000,00						-	1.900.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 Persen	1.612.800.000,00						-	1.900.000.000,00	
			-	-		-	-	5.268.656.729,00						-	9.300.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.388.590.000,00					-		3.160.000.000,00	
		-						2.388.590.000,00					-		3.160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.950.940.000,00						-	2.400.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.612.800.000,00							1.900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.612.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.900.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						6.024.054.007,00					-		9.985.694.978,00	
		-						6.024.054.007,00					-		9.985.694.978,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	6.024.054.007,00						-	9.985.694.978,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						5.268.656.729,00							9.300.616.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	5.268.656.729,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	9.300.616.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
34.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	-		-	100 Persen	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	-		-	86 Persen	3.655.137.402,00						-	3.850.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	71 Persen	3.655.137.402,00						-	3.850.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	-		-	85 Persen	3.655.137.402,00						-	3.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Fasyankes yang Memiliki Alat Kesehatan/Penunjang Sesuai Standar	-		-	50 Persen	3.655.137.402,00						-	3.850.000.000,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	332.585.187,00						-	300.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
		-						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	85.569.907,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	151.348.200,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	2.093.898.128,00						-	1.800.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	2.571.000.000,00						-	9.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	36.000.000,00						-	2.150.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						35.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	150.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100.348.200,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	18 Unit	100.348.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						2.570.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	2.570.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	3.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						899.789.202,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	2 Paket	899.789.202,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	307.585.187,00						-	550.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						302.585.187,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	302.585.187,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	300.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						75.000.000,00					Masyarakat		215.000.000,00	
		-						75.000.000,00					Masyarakat		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	75.000.000,00						-	215.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
35.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.680.514.840,00							4.858.256.500,00	
			Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	-		-	100 Persen	1.240.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-		-	50 Persen	1.240.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	-		-	100 Persen	34.630.000,00						-	84.630.000,00	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	-		-	20,25 Persen	1.240.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						1.925.074.000,00					SDM Kesehatan		4.133.626.500,00	
		-						1.925.074.000,00					SDM Kesehatan		4.133.626.500,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	1.754.320.000,00						-	4.055.889.500,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						1.240.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	75 Orang	1.240.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	2.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						751.680.840,00					SDM Kesehatan		634.630.000,00	
		-						751.680.840,00					SDM Kesehatan		634.630.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	751.680.840,00						-	634.630.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						34.630.000,00							84.630.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	5 Orang	34.630.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale Timur 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	84.630.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
		Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat						284.330.000,00							1.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.000.000,00							550.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						12.000.000,00							550.000.000,00	
36.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						15.958.343.062,00							31.579.736.998,00	
			Cakupan penemuan kasus TB	-		-	90 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan wilayah kerja	-		-	88,55 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	-		-	86 Persen	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	71 Persen	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	-		-	85 Persen	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase Fasyankes yang Memiliki Alat Kesehatan/Penunjang Sesuai Standar	-		-	50 Persen	1.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-		-	100 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase lanjut usia yang mandiri	-		-	86,27 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	-		-	10,4 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Penanganan Kejadian Penyakit Menular	-		-	undefined undefined	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Presentase Rumah Tangga ber-PHBS	-		-	72 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Prevalensi Depresi pada usia "e 1 5 t a h u n	-		-	1,4 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Prevalensi Obesitas > 18 tahun	-		-	23,4 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	75,41 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Rata-rata Cakupan layanan intervensi Spesifik Stunting	-		-	87 Persen	5.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
		-						5.302.083.235,00					Masyarakat		19.668.351.600,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	151.348.200,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	2.093.898.128,00						-	1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
		-						10.452.719.827,00					Masyarakat		11.241.385.398,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	-	307.585.187,00						-	550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						5.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat
37.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.680.514.840,00							4.858.256.500,00	
			Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	-		-	100 Persen	5.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						751.680.840,00					SDM Kesehatan		634.630.000,00	
		-						751.680.840,00					SDM Kesehatan		634.630.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	751.680.840,00						-	634.630.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat
	X							272.330.000,00							450.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						272.330.000,00							450.000.000,00	
38.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.324.646.861,00							2.361.213.897,00	
			-	-		-	-	272.330.000,00						-	450.000.000,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.324.646.861,00					-		2.361.213.897,00	
		-						2.324.646.861,00					-		2.361.213.897,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	2.324.646.861,00						-	2.361.213.897,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						272.330.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	272.330.000,00	Kab. Tana Tidung	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	450.000.000,00	Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman						236.052.578.271,00							166.497.463.282,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						234.982.607.471,00							165.352.690.282,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						232.080.137.471,00							161.902.690.282,00	
39.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.164.828.595,50							11.052.942.514,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	91 Nilai	11.164.828.595,50						-	11.052.942.514,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	11.164.828.595,50						-	11.052.942.514,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.748.000,00					ASN DPUPRPKP		91.324.553,00	
		-						8.748.000,00					ASN DPUPRPKP		91.324.553,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	22.524.553,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	8.748.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	0,00						-	18.800.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.748.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	12 Dokumen	8.748.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							18.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							22.524.553,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	851 Data	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	22.524.553,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.615.897.678,50					ASN DPUPRPKP		7.440.317.056,00	
		-						8.615.897.678,50					ASN DPUPRPKP		7.440.317.056,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	861.880.000,00						-	861.880.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	7.754.017.678,50						-	6.578.437.056,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.754.017.678,50							6.578.437.056,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	80 Orang/bulan	7.754.017.678,50	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.578.437.056,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						861.880.000,00							861.880.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	861.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	861.880.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						95.080.000,00					ASN DPUPRPKP		95.080.000,00	
		-						95.080.000,00					ASN DPUPRPKP		95.080.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	95.080.000,00						-	95.080.000,00	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						95.080.000,00							95.080.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	80 Orang	95.080.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.080.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						610.375.168,00					ASN DPUPRPKP		586.349.568,00	
		-						610.375.168,00					ASN DPUPRPKP		586.349.568,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	99.000.000,00						-	99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	309.392.000,00						-	300.332.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	156.004.268,00						-	146.844.268,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	45.978.900,00						-	40.173.300,00	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						156.004.268,00							146.844.268,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	156.004.268,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	146.844.268,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.978.900,00							40.173.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	6 Paket	45.978.900,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.173.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						99.000.000,00							99.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	99.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	99.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						309.392.000,00							300.332.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	309.392.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.332.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.134.450.749,00					ASN DPUPRPKP		2.139.539.037,00	
		-						1.134.450.749,00					ASN DPUPRPKP		2.139.539.037,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	488.211.037,00						-	488.211.037,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	636.239.712,00						-	1.641.328.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						488.211.037,00							488.211.037,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	488.211.037,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	488.211.037,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						636.239.712,00							1.641.328.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	636.239.712,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.641.328.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						700.277.000,00					ASN DPUPRPKP		700.332.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						700.277.000,00					ASN DPUPRPKP		700.332.300,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	668.807.000,00						-	668.862.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	31.470.000,00						-	31.470.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						668.807.000,00							668.862.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	668.807.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	668.862.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.470.000,00							31.470.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	40 Unit	31.470.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.470.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
40.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						27.233.239.895,00							8.470.105.720,00	
			Persentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	-		-	8,87 %	27.233.239.895,00						-	8.470.105.720,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						26.393.334.895,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		5.890.552.220,00	
		-						26.393.334.895,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		5.890.552.220,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-		-	-	989.820.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	-		-	-	0,00						-	900.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	-		-	-	24.839.448.080,00						-	4.067.559.880,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	-	564.066.815,00						-	822.992.340,00	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						564.066.815,00							822.992.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-		-	2 KM	564.066.815,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	822.992.340,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku						0,00							900.000.000,00	
		Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir						24.839.448.080,00							4.067.559.880,00	
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	-		-	1 KM	24.839.448.080,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	4.067.559.880,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						989.820.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-		-	1 Dokumen	989.820.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						839.905.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		2.579.553.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						839.905.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		2.579.553.500,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	-	150.375.000,00						-	1.706.258.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	49.974.540,00						-	0,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	389.597.120,00						-	673.295.500,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	249.958.340,00						-	0,00	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						389.597.120,00							673.295.500,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 KM	389.597.120,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	673.295.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						249.958.340,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0.5 KM	249.958.340,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah						49.974.540,00							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	0.5 KM	49.974.540,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.02.0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi						0,00							200.000.000,00	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	-		-	1 Rekomendasi	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						150.375.000,00							1.706.258.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	-		-	1 Dokumen	150.375.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	1.706.258.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
41.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						825.550.000,00							11.611.119.570,00	
			Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	-		-	55 %	825.550.000,00						-	11.611.119.570,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						825.550.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		11.611.119.570,00	
		-						825.550.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		11.611.119.570,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	-	0,00						-	1.121.289.698,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-		-	-	0,00						-	800.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	-	825.550.000,00						-	9.489.829.872,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						0,00							800.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						0,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						825.550.000,00							9.489.829.872,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	20 Liter/Detik	825.550.000,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	9.489.829.872,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00							1.121.289.698,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-		-	100 SR	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	1.121.289.698,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
42.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0,00							200.000.000,00	
			Presentase Pengembangan Pengelolaan Sampah	-		-	25 %	0,00						-	200.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		200.000.000,00	
		-						0,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		200.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	-		-	1 Ton/hari	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
43.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						244.787.000,00							1.034.028.000,00	
			Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	-		-	72 %	244.787.000,00						-	1.034.028.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						244.787.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		1.034.028.000,00	
		-						244.787.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		1.034.028.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	100.355.000,00						-	0,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	144.432.000,00						-	1.034.028.000,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.355.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	1 Dokumen	100.355.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						144.432.000,00							1.034.028.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	10 M³/Hari	144.432.000,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	1.034.028.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
44.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						685.320.000,00							250.000.000,00	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	-		-	34 Persentase	685.320.000,00						-	250.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						685.320.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		250.000.000,00	
		-						685.320.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	-	685.320.000,00						-	250.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						685.320.000,00							250.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	-		-	5 Sistem Drainase Perkotaan	685.320.000,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
45.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						54.909.110.840,00							52.526.218.600,00	
			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	-		-	93 %	54.909.110.840,00						-	52.526.218.600,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						54.909.110.840,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		52.526.218.600,00	
		-						54.909.110.840,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		52.526.218.600,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	54.608.976.840,00						-	52.233.526.600,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	0,00						-	202.692.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	-	300.134.000,00						-	0,00	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	40.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						300.134.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	-		-	1 Dokumen	300.134.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00							202.692.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	5 Bangunan Gedung	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	202.692.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						54.608.976.840,00							52.233.526.600,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	30 Bangunan Gedung	54.608.976.840,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	52.233.526.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	30 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
46.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						144.432.000,00							581.123.000,00	
			Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	-		-	50 %	144.432.000,00						-	581.123.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						144.432.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		581.123.000,00	
		-						144.432.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		581.123.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	-	144.432.000,00						-	581.123.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						144.432.000,00							581.123.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	3 Kawasan	144.432.000,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-		-	581.123.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
47.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						135.389.061.440,50							75.457.150.722,00	
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	-		-	60.52 %	135.389.061.440,50						-	75.457.150.722,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						135.389.061.440,50					Masyarakat Kab. Tana Tidung		75.457.150.722,00	
		-						135.389.061.440,50					Masyarakat Kab. Tana Tidung		75.457.150.722,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	-	461.501.000,00						-	462.001.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	-	54.159.245.212,00						-	38.200.913.392,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	0,00						-	3.561.500.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	5.002.547.294,00						-	4.458.149.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	74.645.833.086,00						-	27.491.862.100,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	-		-	-	1.119.934.848,50						-	1.252.725.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						0,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						461.501.000,00							462.001.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-		-	324.37 KM	461.501.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	462.001.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						5.002.547.294,00							4.458.149.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	1 KM	5.002.547.294,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	4.458.149.230,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						54.159.245.212,00							38.200.913.392,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	-		-	0.74 KM	54.159.245.212,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	38.200.913.392,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						0,00							3.561.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	1 KM	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	3.561.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						74.645.833.086,00							27.491.862.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	1.02 KM	74.645.833.086,00	Kab. Tana Tidung	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	27.491.862.100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						1.119.934.848,50							1.252.725.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	-		-	1 Meter	1.119.934.848,50	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	1.252.725.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
48.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						117.908.500,00							77.140.000,00	
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	-		-	35 %	77.244.500,00						-	77.140.000,00	
			-	-		-	-	40.664.000,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						77.244.500,00					Pengguna jasa, penyedia jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi		77.140.000,00	
		-						77.244.500,00					Pengguna jasa, penyedia jasa dan Masyarakat Jasa Konstruksi		77.140.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	-	77.244.500,00						-	57.140.000,00	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	25 Lembaga	0,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						77.244.500,00							57.140.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	50 Orang	77.244.500,00	Kab. Tana Tidung	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	57.140.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						40.664.000,00					-		0,00	
		-						40.664.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	20.664.000,00						-	0,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						20.664.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	10 Paket Pekerjaan	20.664.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						20.000.000,00							0,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	1 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
49.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.365.899.200,00							642.862.156,00	
			Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang	-		-	81 %	958.464.000,00						-	393.109.200,00	
			-	-		-	-	407.435.200,00						-	219.752.956,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						958.464.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		393.109.200,00	
		-						958.464.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		393.109.200,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	366.143.600,00						-	393.109.200,00	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	276.010.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	316.310.400,00						-	0,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						366.143.600,00							393.109.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	366.143.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	393.109.200,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						316.310.400,00							0,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	316.310.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						276.010.000,00							0,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	276.010.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		55.408.000,00	
		-						0,00					-		55.408.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	-	0,00						-	55.408.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang						0,00							55.408.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		-	10 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	55.408.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						407.435.200,00					-		194.344.956,00	
		-						407.435.200,00					-		194.344.956,00	
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	-		-	-	58.755.000,00						-	5.570.000,00	
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	-		-	-	84.567.600,00						-	10.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	-		-	-	0,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	-		-	-	45.770.000,00						-	45.596.356,00	
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	-	95.721.600,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	-	122.621.000,00						-	98.178.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						95.721.600,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	1 Kasus	95.721.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						122.621.000,00							98.178.600,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	-		-	1 Laporan	122.621.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	98.178.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						84.567.600,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	-		-	1 Dokumen	84.567.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang						45.770.000,00							45.596.356,00	
		Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	-		-	1 Berita Acara	45.770.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	45.596.356,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						58.755.000,00							5.570.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	-		-	1 Dokumen	58.755.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	5.570.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	-		-	1 Berita Acara	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.902.470.000,00							3.450.000.000,00	
50.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.752.470.000,00							1.486.181.500,00	
			Persentase Warga Negara Korban Bencana dan terkena relokasi akibat program Pemerintah Yang Mendapatkan Rumah Layak Huni	-		-	68,1 %	0,00						-	50.000.000,00	
			-	-		-	-	1.727.470.000,00						-	1.436.181.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						0,00					Warga Negara Korban Bencana dan terkena relokasi akibat program Pemerintah		50.000.000,00	
		-						0,00					Warga Negara Korban Bencana dan terkena relokasi akibat program Pemerintah		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.752.470.000,00					-		1.436.181.500,00	
		-						1.752.470.000,00					-		1.436.181.500,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	25.000.000,00						-	81.347.500,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	1.702.470.000,00						-	1.304.834.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-		-	4 Unit Rumah	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						25.000.000,00							81.347.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	1 Unit Rumah	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	81.347.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.702.470.000,00							1.304.834.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	8 Unit Rumah	1.702.470.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	1.304.834.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
51.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1.000.000.000,00							726.464.000,00	
			Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	-		-	54,29 %	1.000.000.000,00						-	576.464.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.000.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		726.464.000,00	
		-						1.000.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		726.464.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-		-	-	1.000.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-		-	-	0,00						-	426.464.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	8 Unit Rumah	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertmbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						1.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	-		-	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						0,00							150.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	20 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						0,00							426.464.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	-		-	2 Ha	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pember antasan kemiskinan.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	426.464.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
52.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						150.000.000,00							200.000.000,00	
			Persentase Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	-		-	100 %	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		200.000.000,00	
		-						150.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	8 Unit Rumah	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						0,00							200.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	40 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
53.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						0,00							1.037.354.500,00	
			Presentase PSU Terbangun Dalam Kondisi Baik	-		-	100 %	0,00						-	1.037.354.500,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						0,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		1.037.354.500,00	
		-						0,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		1.037.354.500,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	-	0,00						-	865.341.500,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	0,00						-	172.013.000,00	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						0,00							172.013.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	25 Lokasi	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	172.013.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						0,00							865.341.500,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-		-	25 Lokasi	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	865.341.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.069.970.800,00							1.144.773.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.069.970.800,00							1.144.773.000,00	
54.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						298.116.000,00							94.067.600,00	
			Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-		-	65 %	298.116.000,00						-	94.067.600,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						298.116.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		94.067.600,00	
		-						298.116.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		94.067.600,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	298.116.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	64.067.600,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						298.116.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	298.116.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00							64.067.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	64.067.600,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
55.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						15.000.000,00							885.709.900,00	
			Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	-		-	70 %	15.000.000,00						-	885.709.900,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		885.709.900,00	
		-						15.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		885.709.900,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	585.709.900,00	
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-		-	-	15.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						0,00							585.709.900,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	585.709.900,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-		-	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
56.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						170.701.000,00							164.995.500,00	
			Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	-		-	72 %	170.701.000,00						-	164.995.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						170.701.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		164.995.500,00	
		-						170.701.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		164.995.500,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	-	49.950.000,00						-	0,00	
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	69.966.000,00						-	114.995.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	19.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	30.805.000,00						-	50.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah						69.966.000,00							114.995.500,00	
		Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	69.966.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	114.995.500,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						19.980.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	19.980.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						49.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	1 Berita Acara	49.950.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.						30.805.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	30.805.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
57.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						586.153.800,00							0,00	
			Presentase Penatagunaan Tanah	-		-	80 %	586.153.800,00						-	0,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						586.153.800,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		0,00	
		-						586.153.800,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		0,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	-		-	-	139.932.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	446.221.800,00						-	0,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						446.221.800,00							0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	1 Laporan		446.221.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.10.2.01.0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK						139.932.000,00							0,00	
		Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	-	-	1 Dokumen		139.932.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan						4.376.834.233,00							5.379.591.991,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.376.834.233,00							5.379.591.991,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.376.834.233,00							5.379.591.991,00	
58.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.951.775.213,00							4.488.707.191,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	71 Nilai	3.950.875.413,00						-	4.478.707.191,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100 %	3.950.875.413,00						-	4.478.707.191,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.399.600,00					-		20.000.000,00	
		-						1.399.600,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	400.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	499.800,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	499.800,00						-	5.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						499.800,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	499.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						499.800,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	23 Laporan	499.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						400.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.532.307.303,00					ASN Dinas Pemadam Kebakaran		3.462.471.891,00	
		-						3.532.307.303,00					ASN Dinas Pemadam Kebakaran		3.462.471.891,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	10.500.000,00						-	63.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.521.807.303,00						-	3.398.721.891,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.521.807.303,00							3.398.721.891,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	518 Orang/bulan	3.521.807.303,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.398.721.891,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						10.500.000,00							63.750.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	10.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	63.750.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.129.110,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		367.920.900,00	
		-						18.129.110,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		367.920.900,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	400.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	1.000.000,00						-	252.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.881.110,00						-	89.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.848.000,00						-	21.920.900,00	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.881.110,00							89.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	14.881.110,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	89.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.848.000,00							21.920.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.848.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.920.900,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.000.000,00							252.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	252.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						400.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	36 Dokumen	400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.159.200,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		623.314.400,00	
		-						391.159.200,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		623.314.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	62.700.000,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	328.459.200,00						-	558.314.400,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.700.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	62.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						328.459.200,00							558.314.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	328.459.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	558.314.400,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.780.000,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		15.000.000,00	
		-						8.780.000,00					ASN dan PPPK Disdamkarmat		15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.780.000,00						-	15.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.780.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	14 Unit	8.780.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
59.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						425.059.020,00							890.884.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-		-	65 %	187.620.220,00						-	51.000.000,00	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-		-	65 %	4.154.000,00						-	60.000.000,00	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-		-	65 %	233.284.800,00						-	779.884.800,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						217.588.200,00					Masyarakat, Personil Damkar		704.884.800,00	
		-						217.588.200,00					Masyarakat, Personil Damkar		704.884.800,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	-	14.702.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	-	8.344.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	164.884.800,00						-	164.884.800,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	-	9.480.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	14.594.800,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	5.582.600,00						-	300.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						9.480.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-		-	1 Dokumen	9.480.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.594.800,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	14.594.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						8.344.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		-	4 Dokumen	8.344.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	95.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						14.702.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		-	1 Orang	14.702.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						164.884.800,00							164.884.800,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	164.884.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	164.884.800,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						5.582.600,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	2 Unit	5.582.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						4.154.000,00					Masyarakat, Bagunan/Gedung/Lingkungan Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemerintah		60.000.000,00	
		-						4.154.000,00					Masyarakat, Bagunan/Gedung/Lingkungan Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemerintah		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	4.154.000,00						-	60.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						4.154.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	1 Laporan	4.154.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						15.696.600,00					Masyarakat		75.000.000,00	
		-						15.696.600,00					Masyarakat		75.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	15.696.600,00						-	75.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						15.696.600,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	270 Orang	15.696.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						187.620.220,00					Masyarakat, Personil Damkar		51.000.000,00	
		-						187.620.220,00					Masyarakat, Personil Damkar		51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-		-	-	4.010.220,00						-	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	-	-	-	-	183.610.000,00						-	30.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						4.010.220,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-	-	1 Laporan		4.010.220,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
	1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar						183.610.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	-	-	6 Unit		183.610.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap 1 Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						4.166.580.208,00							5.502.429.040,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.166.580.208,00							5.502.429.040,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.166.580.208,00							5.502.429.040,00	
60.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.645.490.308,00							4.611.748.140,00	
			Nilai AKIP	-	-	80 Poin		3.645.490.308,00						-	4.611.748.140,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.471.000,00					Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		20.881.000,00	
		-						2.471.000,00					Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		20.881.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	7.930.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.843.500,00						-	10.440.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	627.500,00						-	2.510.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.843.500,00							10.440.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	1.843.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.440.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						627.500,00							2.510.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	627.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.510.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							7.930.500,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	8 Data	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.930.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.516.351.508,00					Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		4.293.162.800,00	
		-						3.516.351.508,00					Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah		4.293.162.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.516.351.508,00						-	4.293.162.800,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.516.351.508,00							4.293.162.800,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	280 Orang/bulan	3.516.351.508,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.293.162.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						79.107.800,00					Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum		166.706.000,00	
		-						79.107.800,00					Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum		166.706.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	37.096.000,00						-	126.075.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	42.011.800,00						-	40.631.000,00	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						42.011.800,00							40.631.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	42.011.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.631.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						37.096.000,00							126.075.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	37.096.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	126.075.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.012.600,00					Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran		62.097.840,00	
		-						23.012.600,00					Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran		62.097.840,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	23.012.600,00						-	62.097.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.012.600,00							62.097.840,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	23.012.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	62.097.840,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.547.400,00					Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		68.900.500,00	
		-						24.547.400,00					Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		68.900.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	24.547.400,00						-	68.900.500,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						24.547.400,00							68.900.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	24.547.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	68.900.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
61.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						521.089.900,00							890.680.900,00	
			Persentase elemen sistem kelembagaan dan Tata kelola PB yang tersedia dan berjalan secara fungsional	-		-	80 %	56.454.000,00						-	297.298.600,00	
			Persentase Masyarakat di wilayah rawan yang memahami Risiko Bencana	-		-	30 %	337.358.000,00						-	40.000.000,00	
			Persentase Penanganan Pasca Bencana	-		-	100 %	56.454.000,00						-	297.298.600,00	
			Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki dan mengoperasikan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan secara aktif	-		-	43.75 %	102.836.300,00						-	488.572.600,00	
			rata-rata waktu tanggap darurat	-		-	18 Jam	24.441.600,00						-	54.286.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						337.358.000,00					Terselenggaranya edukasi dan diseminasi informasi risiko bencana kepada masyarakat		40.000.000,00	
		-						337.358.000,00					Terselenggaranya edukasi dan diseminasi informasi risiko bencana kepada masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	-	37.358.000,00						-	40.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						37.358.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-		-	770 Orang	37.358.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						102.836.300,00					Terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan rawan bencana		488.572.600,00	
		-						102.836.300,00					Terselenggaranya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan rawan bencana		488.572.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	0,00						-	307.500.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	16.875.000,00						-	23.624.600,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	-	18.122.100,00						-	23.702.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	-	19.580.000,00						-	59.420.250,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	24.612.000,00						-	42.807.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	-	23.647.200,00						-	31.518.750,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						18.122.100,00							23.702.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-		-	40 Unit	18.122.100,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	23.702.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						23.647.200,00							31.518.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-		-	30 Orang	23.647.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	31.518.750,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						0,00							307.500.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	2 Kawasan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	307.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						19.580.000,00							59.420.250,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-		-	30 Orang	19.580.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	59.420.250,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	-	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						16.875.000,00							23.624.600,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-		-	12 laporan	16.875.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	23.624.600,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						24.612.000,00							42.807.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	52 Orang	24.612.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	42.807.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						24.441.600,00					Terselenggaranya layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara tepat waktu		64.809.700,00	
		-						24.441.600,00					Terselenggaranya layanan penyelamatan dan evakuasi korban secara tepat waktu		64.809.700,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	-	0,00						-	9.516.700,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	-	5.518.800,00						-	5.261.700,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	-	9.860.000,00						-	34.741.500,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	-	4.626.000,00						-	5.261.700,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-		-	-	368.400,00						-	5.261.700,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	4.068.400,00						-	4.766.400,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						368.400,00							5.261.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-		-	12 Laporan	368.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.261.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						5.518.800,00							5.261.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	-		-	1 Dokumen	5.518.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.261.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						4.626.000,00							5.261.700,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-		-	5 Orang	4.626.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.261.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							9.516.700,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	9.516.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						9.860.000,00							34.741.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-		-	5 Orang	9.860.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	34.741.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						4.068.400,00							4.766.400,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	12 Laporan	4.068.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.766.400,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						56.454.000,00					Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan sistem tata kelola PB secara fungsional ; Terselenggaranya layanan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dokumen perencanaan (R3P)		297.298.600,00	
		-						56.454.000,00					Terselenggaranya penguatan kelembagaan dan sistem tata kelola PB secara fungsional ; Terselenggaranya layanan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dokumen perencanaan (R3P)		297.298.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	21.327.200,00						-	65.543.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	-	0,00						-	35.947.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	7.026.400,00						-	95.035.700,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	28.100.400,00						-	100.772.000,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						0,00							35.947.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	-	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	35.947.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						21.327.200,00							65.543.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	30 Orang	21.327.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	65.543.900,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						28.100.400,00							100.772.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	2 Kegiatan	28.100.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Sambungan 1 Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tengku Dacing 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	100.772.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						7.026.400,00							95.035.700,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	7.026.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	95.035.700,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Satuan Polisi Pamong Praja						6.830.034.594,00							9.482.143.259,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.830.034.594,00							9.482.143.259,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.830.034.594,00							9.482.143.259,00	
62.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.538.857.339,00							8.928.210.759,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	76 Nilai	6.538.857.339,00						-	8.928.210.759,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	6.524.088.839,00						-	8.883.470.759,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	14.768.500,00						-	44.740.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.768.500,00					Aparatur, dan Sarana Prasarana Kantor SatpolPP Kab. Tana Tidung		44.740.000,00	
		-						14.768.500,00					Aparatur, dan Sarana Prasarana Kantor SatpolPP Kab. Tana Tidung		44.740.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	3.285.400,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	6.488.500,00						-	10.008.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.994.600,00						-	24.732.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.488.500,00							10.008.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	6.488.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	10.008.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.994.600,00							24.732.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	36 Laporan	4.994.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	24.732.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						3.285.400,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	2 Data	3.285.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.979.357.763,00					Aparatur SatpolIPP Kab. Tana Tidung		7.688.796.069,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						5.979.357.763,00					Aparatur SatpolPP Kab. Tana Tidung		7.688.796.069,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	93.870.000,00						-	211.080.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.885.487.763,00						-	7.477.716.069,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.885.487.763,00							7.477.716.069,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	43X14/21X13 Orang/bulan	5.885.487.763,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	7.477.716.069,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						93.870.000,00							211.080.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	93.870.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	211.080.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						79.781.556,00					Aparatur SatpolIPP Kab. Tana Tidung		573.665.650,00	
		-						79.781.556,00					Aparatur SatpolIPP Kab. Tana Tidung		573.665.650,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	29.028.000,00						-	308.604.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	26.082.056,00						-	230.761.650,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.900.000,00						-	34.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.771.500,00						-	0,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.771.500,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	19.771.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.082.056,00							230.761.650,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	26.082.056,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	230.761.650,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.900.000,00							34.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	4.900.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	34.300.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29.028.000,00							308.604.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	29.028.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	308.604.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						400.335.120,00					Aparatur SatpolPP (ASN dan Non ASN) Kab. Tana Tidung		462.279.040,00	
		-						400.335.120,00					Aparatur SatpolPP (ASN dan Non ASN) Kab. Tana Tidung		462.279.040,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.030.000,00						-	42.815.440,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	361.305.120,00						-	413.463.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.000.000,00						-	6.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	6.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.030.000,00							42.815.440,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	36.030.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	42.815.440,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						361.305.120,00							413.463.600,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	361.305.120,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	413.463.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.614.400,00					Aparatur SatpolPP (ASN dan Non ASN) Kab. Tana Tidung		158.730.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						64.614.400,00					Aparatur SatpolPP (ASN dan Non ASN) Kab. Tana Tidung		158.730.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.880.000,00						-	15.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	14.000.000,00						-	91.920.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.734.400,00						-	51.560.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.734.400,00							51.560.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	45.734.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	51.560.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.000.000,00							91.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	14.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	91.920.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						4.880.000,00							15.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	4.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	15.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
63.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						291.177.255,00							553.932.500,00	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	-		-	100 %	289.177.255,00						-	548.932.500,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						199.928.500,00					Masyarakat		307.666.500,00	
		-						199.928.500,00					Masyarakat		307.666.500,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-	1.000.000,00						-	140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	-	1.000.000,00						-	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	-	9.210.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	-	1.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	-		-	-	87.346.800,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	-	4.999.400,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	-	82.485.500,00						-	49.969.500,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	9.886.000,00						-	53.097.000,00	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00							9.600.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	9.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						9.210.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-		-	1 Dokumen	9.210.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						9.886.000,00							53.097.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	100 Orang	9.886.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	53.097.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						87.346.800,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	-		-	4 laporan	87.346.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						4.999.400,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	-		-	4 Laporan	4.999.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						82.485.500,00							49.969.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-		-	4 Unit	82.485.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	49.969.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	5.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0026	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						1.000.000,00							140.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	3 Orang	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	140.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						69.546.600,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, Pelajar dan Mahasiswa		124.526.000,00	
		-						69.546.600,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, Pelajar dan Mahasiswa		124.526.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	15.945.400,00						-	24.984.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	33.484.400,00						-	54.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	6.878.400,00						-	20.032.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	-	13.238.400,00						-	24.960.000,00	
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						6.878.400,00							20.032.000,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	4 Laporan	6.878.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	20.032.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						33.484.400,00							54.550.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	4 Laporan	33.484.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	54.550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						13.238.400,00							24.960.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	-		-	4 Laporan	13.238.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	24.960.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						15.945.400,00							24.984.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	4 Laporan	15.945.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	24.984.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						21.702.155,00					PPNS Kabupaten Tana Tidung		121.740.000,00	
		-						21.702.155,00					PPNS Kabupaten Tana Tidung		121.740.000,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-		-	-	2.606.600,00						-	79.398.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	5.744.000,00						-	18.010.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	-	13.351.555,00						-	24.332.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						5.744.000,00							18.010.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-		-	2 Dokumen	5.744.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	18.010.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah						2.606.600,00							79.398.000,00	
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-		-	1 Laporan	2.606.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	79.398.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						13.351.555,00							24.332.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-		-	1 Laporan	13.351.555,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat uat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	24.332.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						6.992.523.337,00							13.348.352.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.634.078.337,00							10.159.000.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.634.078.337,00							10.159.000.000,00	
64.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.864.175.983,00							7.834.000.000,00	
			Persentase Realisasi Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah terhadap Target Kinerja yang Telah Ditetapkan (%)	-		-	100 Persen	181.301.348,00						-	1.859.000.000,00	
			-	-		-	-	5.682.874.635,00						-	5.975.000.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.719.100,00					ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		280.000.000,00	
		-						25.719.100,00					ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.372.700,00						-	145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	15.346.400,00						-	135.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.372.700,00							145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	10.372.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	145.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.346.400,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	38 Laporan	15.346.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	135.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.682.874.635,00					ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.975.000.000,00	
		-						5.682.874.635,00					ASN Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.975.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	131.040.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.551.834.635,00						-	5.975.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.551.834.635,00							5.975.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	434 Orang/bulan	5.551.834.635,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.975.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						131.040.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	131.040.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.327.548,00					-		1.132.000.000,00	
		-						58.327.548,00					-		1.132.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	25.566.000,00						-	715.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	19.551.900,00						-	201.000.000,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.502.500,00						-	56.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	10.707.148,00						-	160.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.707.148,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	10.707.148,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	160.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.551.900,00							201.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	19.551.900,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	201.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.502.500,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.502.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	56.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.566.000,00							715.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	25.566.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	715.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.316.700,00					-		242.000.000,00	
		-						83.316.700,00					-		242.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	26.016.700,00						-	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	52.800.000,00						-	146.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.500.000,00						-	8.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.016.700,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	26.016.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	88.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						52.800.000,00							146.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	52.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	146.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.938.000,00					-		205.000.000,00	
		-						13.938.000,00					-		205.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	9.188.000,00						-	137.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.750.000,00						-	68.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.188.000,00							137.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	9.188.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	137.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.750.000,00							68.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	4.750.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	68.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
65.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						65.263.354,00							382.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	65.263.354,00						-	382.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						65.263.354,00					PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)		382.000.000,00	
		-						65.263.354,00					PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)		382.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.635.354,00						-	151.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	17.628.000,00						-	201.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						17.635.354,00							151.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Lembaga	17.635.354,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	151.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						17.628.000,00							201.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	40 Orang	17.628.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	201.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	1 Orang	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
66.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						269.383.000,00							870.000.000,00	
			Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	-		-	100 Persen	269.383.000,00						-	870.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						267.628.000,00					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		520.000.000,00	
		-						267.628.000,00					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		520.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.628.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	130.000.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	120.000.000,00						-	150.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						130.000.000,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	130.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	170.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	120.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						17.628.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	110 Orang	17.628.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	200.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1.755.000,00					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		350.000.000,00	
		-						1.755.000,00					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.755.000,00						-	350.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						1.755.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	10 Orang	1.755.000,00	Kab. Tana Tidung	Pajak Daerah	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	350.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
67.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						417.628.000,00							773.000.000,00	
			Persentase Penurunan Jumlah Masyarakat Miskin	-		-	4 Persen	267.628.000,00						-	773.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						417.628.000,00					Fakir Miskin		773.000.000,00	
		-						417.628.000,00					Fakir Miskin		773.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.628.000,00						-	152.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	-	150.000.000,00						-	371.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	100.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						17.628.000,00							152.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	750 Orang	17.628.000,00	Kab. Tana Tidung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	152.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							371.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	-		-	12 Usulan	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, K ETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	371.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2307 Orang	150.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, K ETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	150.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
68.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						17.628.000,00							300.000.000,00	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	-		-	100 Persen	17.628.000,00						-	300.000.000,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						17.628.000,00					Korban Bencana Alam dan Sosial		300.000.000,00	
		-						17.628.000,00					Korban Bencana Alam dan Sosial		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	17.628.000,00						-	300.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						17.628.000,00							300.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	28 Orang	17.628.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						358.445.000,00							3.189.352.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						132.800.000,00							233.000.000,00	
69.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						46.500.000,00							84.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Pemberdayaan Gender (Persentase)	-		-	64 Persen	42.500.000,00						-	12.000.000,00	
			Indeks Pemberdayaan Gender (Persentase)	-		-	64 Persen	4.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						42.500.000,00					Lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah		24.000.000,00	
		-						42.500.000,00					Lembaga Pemerintah dan lembaga non pemerintah		24.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	-	2.500.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	40.000.000,00						-	12.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						2.500.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembedaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						40.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	0 Lembaga	40.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						4.000.000,00					Organisasi wanita dan kemasyarakatan		60.000.000,00	
		-						4.000.000,00					Organisasi wanita dan kemasyarakatan		60.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	4.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						4.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	2 Lembaga	4.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	60.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
70.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						21.000.000,00							47.000.000,00	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	-		-	100 Persen	6.500.000,00						-	12.000.000,00	
			-	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Perempuan yang menjadi korban kekerasan		36.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Perempuan yang menjadi korban kekerasan		36.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	3.500.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	3.500.000,00						-	12.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						3.500.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	3.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						3.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						3.500.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	3.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, K ETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	6 Lembaga	11.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, K ETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
71.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						2.900.000,00							0,00	
			Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	-		-	100 Persen	2.900.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.900.000,00					Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Kabupaten		0,00	
		-						2.900.000,00					Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Kabupaten		0,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	-	2.900.000,00						-	0,00	
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						2.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	-		-	5 Lembaga	2.900.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
72.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						35.000.000,00							35.000.000,00	
			-	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						35.000.000,00					-		35.000.000,00	
		-						35.000.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	50 Orang	35.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, K ETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
73.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						27.400.000,00							67.000.000,00	
			Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani (Persentase)	-		-	100 Persen	16.400.000,00						-	32.000.000,00	
			-	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16.400.000,00					Anak yang menjadi korban kekerasan		56.000.000,00	
		-						16.400.000,00					Anak yang menjadi korban kekerasan		56.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	4.400.000,00						-	12.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						4.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	4.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	20.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						4.400.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	4.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.000.000,00					-		11.000.000,00	
		-						11.000.000,00					-		11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	12 Lembaga	11.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	11.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						225.645.000,00							2.956.352.000,00	
74.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						9.970.000,00							150.000.000,00	
			Persentase desa yang memenuhi syarat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa hasil penataan.	-		-	100 Persen	9.970.000,00						-	150.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						9.970.000,00					-		150.000.000,00	
		-						9.970.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-		-	-	9.970.000,00						-	150.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa						9.970.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-		-	1 Desa	9.970.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
75.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						111.883.000,00							789.000.000,00	
			Persentase Desa yg memiliki administrasi pemerintahan sesuai SOP	-		-	100 Persen	111.883.000,00						-	583.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						111.883.000,00					Pemerintah Desa dan Aparatur Desa Di Wilayah Kabupaten Tana Tidung		789.000.000,00	
		-						111.883.000,00					Pemerintah Desa dan Aparatur Desa Di Wilayah Kabupaten Tana Tidung		789.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	-	9.993.000,00						-	206.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	31.903.000,00						-	206.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	-	39.994.000,00						-	276.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	-	29.993.000,00						-	101.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-		-	32 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	-	8.Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						39.994.000,00							276.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	32 Dokumen	39.994.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	276.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						29.993.000,00							101.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-		-	32 Dokumen	29.993.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	101.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						31.903.000,00							206.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	32 Dokumen	31.903.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	206.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-		-	32 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	-	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						9.993.000,00							206.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	-		-	1 Dokumen	9.993.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyela rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENG EMBANGAN DESA		-	206.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
76.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						103.792.000,00							2.017.352.000,00	
			Presentase Lembaga Aktif yang Dibina (%)	-		-	100 Persen	61.896.000,00						-	2.007.352.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						103.792.000,00					Pengurus LKD (PKK, Karang Taruna, LPMD, RT/RW), Pengurus Lembaga Adat Kabupaten/Kota, dan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kabupaten Tana Tidung		2.017.352.000,00	
		-						103.792.000,00					Pengurus LKD (PKK, Karang Taruna, LPMD, RT/RW), Pengurus Lembaga Adat Kabupaten/Kota, dan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kabupaten Tana Tidung		2.017.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	-	20.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	-	31.896.000,00						-	205.676.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	31.896.000,00						-	991.676.000,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	10.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						31.896.000,00							991.676.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	180 Lembaga	31.896.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	991.676.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						31.896.000,00							205.676.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-		-	1 Laporan	31.896.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	205.676.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						20.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	800.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi						3.284.234.858,00							5.442.005.983,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.073.185.858,00							5.053.391.141,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.073.185.858,00							5.053.391.141,00	
77.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.786.402.858,00							4.800.468.741,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	75 Nilai	2.695.414.858,00						-	4.314.047.239,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	75 undefined	90.988.000,00						-	486.421.502,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 undefined	90.988.000,00						-	486.421.502,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 Persen	2.695.414.858,00						-	4.314.047.239,00	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.397.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		22.305.000,00	
		-						8.397.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		22.305.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.769.000,00						-	7.593.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.628.000,00						-	14.712.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.769.000,00							7.593.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	3.769.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.593.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.628.000,00							14.712.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	4.628.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.712.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.624.518.658,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		4.271.262.239,00	
		-						2.624.518.658,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		4.271.262.239,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	70.000.000,00						-	147.720.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.554.518.658,00						-	4.123.542.239,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.554.518.658,00							4.123.542.239,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	322 Orang/bulan	2.554.518.658,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.123.542.239,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						70.000.000,00							147.720.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	147.720.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
		-						0,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	7 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						90.988.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		486.421.502,00	
		-						90.988.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		486.421.502,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.029.000,00						-	403.995.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	40.959.000,00						-	82.426.102,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.959.000,00							82.426.102,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	40.959.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	82.426.102,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.029.000,00							403.995.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.029.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	403.995.400,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.259.200,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
		-						52.259.200,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	48.259.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						48.259.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	48.259.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.240.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		20.480.000,00	
		-						10.240.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		20.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.240.000,00						-	20.480.000,00	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.240.000,00							20.480.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	10.240.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.480.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
78.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						20.540.000,00							27.922.400,00	
			Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	-		-	650 Rp Juta/Orang/Bulan	20.540.000,00						-	27.922.400,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						20.540.000,00					Masyarakat		27.922.400,00	
		-						20.540.000,00					Masyarakat		27.922.400,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	-	10.540.000,00						-	17.922.400,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						10.540.000,00							17.922.400,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-		-	100 Orang	10.540.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		-	17.922.400,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
79.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						266.243.000,00							225.000.000,00	
			Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-		-	100 Persen	266.243.000,00						-	150.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						18.300.000,00					Masyarakat dan Perusahaan		50.000.000,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						18.300.000,00					Masyarakat dan Perusahaan		50.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	-	18.300.000,00						-	50.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						18.300.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-		-	2 Laporan	18.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						247.943.000,00					Masyarakat dan Perusahaan		175.000.000,00	
		-						247.943.000,00					Masyarakat dan Perusahaan		175.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-		-	-	7.980.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	-	4.440.000,00						-	75.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	-	235.523.000,00						-	25.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.440.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-		-	2 Perkara	4.440.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						7.980.000,00							75.000.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-		-	2 Perkara	7.980.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						235.523.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-		-	2178 Orang	235.523.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						64.876.000,00							139.900.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						64.876.000,00							139.900.000,00	
80.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						15.000.000,00							15.000.000,00	
			-	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	50 Kepala Keluarga	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
81.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						49.876.000,00							124.900.000,00	
			Persentase lokasi kawasan transmigrasi yang dikembangkan	-		-	100 Persen	49.876.000,00						-	124.900.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						49.876.000,00					Masyarakat		124.900.000,00	
		-						49.876.000,00					Masyarakat		124.900.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-		-	-	49.876.000,00						-	124.900.000,00	
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						49.876.000,00							124.900.000,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-		-	2 Satuan Permukiman	49.876.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	124.900.000,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	X							146.173.000,00							248.714.842,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						146.173.000,00							248.714.842,00	
82.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						146.173.000,00							248.714.842,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	75	51.933.000,00						-	70.998.125,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	75	94.240.000,00						-	177.716.717,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100	51.933.000,00						-	70.998.125,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100	94.240.000,00						-	177.716.717,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.933.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		70.998.125,00	
		-						51.933.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		70.998.125,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	51.933.000,00						-	70.998.125,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						51.933.000,00							70.998.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	51.933.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.998.125,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.560.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
		-						4.560.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	4.560.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.560.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	4.560.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.680.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		177.716.717,00	
		-						89.680.000,00					ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		177.716.717,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	89.680.000,00						-	177.716.717,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						89.680.000,00							177.716.717,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	89.680.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	177.716.717,00	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Dinas Lingkungan Hidup						8.372.019.187,00							11.183.627.526,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.372.019.187,00							11.183.627.526,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						8.372.019.187,00							11.183.627.526,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
83.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.311.699.810,00							7.092.387.001,00	
			Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	-		-	74 Poin	6.309.059.810,00						-	7.092.387.001,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.280.000,00					Dinas Lingkungan Hidup		12.519.900,00	
		-						5.280.000,00					Dinas Lingkungan Hidup		12.519.900,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.640.000,00						-	5.248.900,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.640.000,00						-	7.271.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.640.000,00							5.248.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	2.640.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.248.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.640.000,00							7.271.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	2.640.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.271.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.000.854.426,00					Dinas Lingkungan Hidup		6.162.269.201,00	
		-						6.000.854.426,00					Dinas Lingkungan Hidup		6.162.269.201,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	160.320.000,00						-	192.123.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.840.534.426,00						-	5.970.146.201,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.840.534.426,00							5.970.146.201,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	322 Orang/bulan	5.840.534.426,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.970.146.201,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						160.320.000,00							192.123.000,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	160.320.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	192.123.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.238.800,00					Dinas Lingkungan Hidup		67.362.900,00	
		-						9.238.800,00					Dinas Lingkungan Hidup		67.362.900,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	9.238.800,00						-	67.362.900,00	
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						9.238.800,00							67.362.900,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	9.238.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	67.362.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						94.662.044,00					Dinas Lingkungan Hidup		525.476.500,00	
		-						94.662.044,00					Dinas Lingkungan Hidup		525.476.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	21.820.000,00						-	338.334.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	61.969.044,00						-	141.650.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	6.100.000,00						-	39.946.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.773.000,00						-	5.545.700,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.773.000,00							5.545.700,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.773.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.545.700,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						61.969.044,00							141.650.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	8 Paket	61.969.044,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	141.650.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.100.000,00							39.946.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	6.100.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	39.946.800,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						21.820.000,00							338.334.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	21.820.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	338.334.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.605.300,00					Dinas Lingkungan Hidup		7.430.000,00	
		-						5.605.300,00					Dinas Lingkungan Hidup		7.430.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.605.300,00						-	7.430.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.605.300,00							7.430.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	5.605.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.430.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155.659.240,00					Dinas Lingkungan Hidup		217.498.500,00	
		-						155.659.240,00					Dinas Lingkungan Hidup		217.498.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	36.655.000,00						-	59.998.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	116.004.240,00						-	151.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.000.000,00						-	6.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.655.000,00							59.998.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	36.655.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	59.998.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						116.004.240,00							151.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	116.004.240,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	151.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.400.000,00					Dinas Lingkungan Hidup		99.830.000,00	
		-						40.400.000,00					Dinas Lingkungan Hidup		99.830.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	37.150.000,00						-	87.560.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	3.250.000,00						-	12.270.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.150.000,00							87.560.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	37.150.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	87.560.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.250.000,00							12.270.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	3.250.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.270.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
84.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						50.219.600,00							750.000.000,00	
			Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	-		-	100 %	50.219.600,00						-	750.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						50.219.600,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		750.000.000,00	
		-						50.219.600,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		750.000.000,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	-		-	-	50.219.600,00						-	750.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						50.219.600,00							750.000.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	-		-	1 Dokumen	50.219.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
85.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						253.156.405,00							336.144.805,00	
			Persentase Luas Lahan APL yang Tertup Vegetasi	-		-	8 %	253.156.405,00						-	336.144.805,00	
			Persentase Parameter Baku Mutu Air Yang Memenuhi Standar Baku Mutu Air	-		-	54 %	253.156.405,00						-	336.144.805,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Parameter Baku Mutu Udara Yang Memenuhi Standar Baku Mutu Udara	-		-	84 %	253.156.405,00						-	336.144.805,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						253.156.405,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		336.144.805,00	
		-						253.156.405,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		336.144.805,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-		-	-	88.271.605,00						-	106.844.805,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	164.884.800,00						-	229.300.000,00	
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						88.271.605,00							106.844.805,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-		-	14 Lokasi	88.271.605,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	106.844.805,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						164.884.800,00							229.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	1 Dokumen	164.884.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	229.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
86.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						80.704.772,00							162.149.720,00	
			Persentase RTH Yang Berfungsi Baik	-		-	100 %	80.704.772,00						-	162.149.720,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						80.704.772,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		162.149.720,00	
		-						80.704.772,00					Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		162.149.720,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	80.704.772,00						-	162.149.720,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						80.704.772,00							162.149.720,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	3 Ha	80.704.772,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	162.149.720,00	Dinas Lingkungan Hidup
87.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						100.423.200,00							317.946.000,00	
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	-		-	83 %	100.423.200,00						-	317.946.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100.423.200,00					Masyarakat dan/atau pelaku usaha		317.946.000,00	
		-						100.423.200,00					Masyarakat dan/atau pelaku usaha		317.946.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	49.983.200,00						-	127.500.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	-	50.440.000,00						-	190.446.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						50.440.000,00							190.446.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-		-	15 Dokumen	50.440.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	190.446.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						49.983.200,00							127.500.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	4 Badan Usaha	49.983.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	127.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
88.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						50.008.000,00							150.000.000,00	
			Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	-		-	40 %	50.008.000,00						-	150.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.008.000,00					Lembaga/Kelompok Masyarakat		150.000.000,00	
		-						50.008.000,00					Lembaga/Kelompok Masyarakat		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	-	50.008.000,00						-	150.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						50.008.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-		-	1 Lembaga	50.008.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
89.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.525.807.400,00							2.375.000.000,00	
			Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	-		-	2.75 %	1.510.813.400,00						-	2.360.000.000,00	
			Persentase Volume Sampah yang Tertangani	-		-	68 %	1.510.813.400,00						-	2.360.000.000,00	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	-		-	72 %	1.510.813.400,00						-	2.360.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						1.525.807.400,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		2.375.000.000,00	
		-						1.525.807.400,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		2.375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-		-	-	4.998.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	-	49.994.400,00						-	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	-	4.998.000,00						-	8.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	-	4.998.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	-	4.998.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	-	271.000.000,00						-	420.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	143.557.600,00						-	300.000.000,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	-	1.041.263.400,00						-	1.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						4.998.000,00							8.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-		-	32 Kelompok	4.998.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						4.998.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-		-	2 Dokumen	4.998.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						143.557.600,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	20 Unit	143.557.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Limbu Sedulun 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						49.994.400,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-		-	1 Dokumen	49.994.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	125.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						271.000.000,00							420.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-		-	2840 Ton	271.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						1.041.263.400,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-		-	72 Persentase	1.041.263.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						4.998.000,00							7.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-		-	2,75 Ton	4.998.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						4.998.000,00							7.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-		-	2840 Ton	4.998.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						3.717.661.948,00							4.788.110.603,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.717.661.948,00							4.788.110.603,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.717.661.948,00							4.788.110.603,00	
90.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.502.470.548,00							4.021.330.603,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	80 Nilai	3.502.470.548,00						-	3.761.792.203,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	84 %	3.502.470.548,00						-	3.761.792.203,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49.828.600,00					ASN Disdukcapil		70.000.000,00	
		-						49.828.600,00					ASN Disdukcapil		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	19.255.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	800.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	28.068.400,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	1.705.200,00						-	5.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.255.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	19.255.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						800.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	2 Dokumen	800.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						28.068.400,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	22 Laporan	28.068.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	35.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.705.200,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	1.705.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.967.762.126,00					ASN Disdukcapil		3.072.500.803,00	
		-						2.967.762.126,00					ASN Disdukcapil		3.072.500.803,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	90.840.000,00						-	90.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.876.922.126,00						-	2.981.660.803,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.876.922.126,00							2.981.660.803,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	448 Orang/bulan	2.876.922.126,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.981.660.803,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.840.000,00							90.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	90.840.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	90.840.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14.790.000,00					ASN Disdukcabil		165.540.000,00	
		-						14.790.000,00					ASN Disdukcabil		165.540.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	9.500.000,00						-	82.770.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	5.290.000,00						-	82.770.000,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.290.000,00							82.770.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	5.290.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						9.500.000,00							82.770.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	40 Orang	9.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						164.894.206,00					ASN Disdukcabil		401.741.400,00	
		-						164.894.206,00					ASN Disdukcabil		401.741.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	40.576.000,00						-	49.973.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	109.327.506,00						-	171.768.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	14.990.700,00						-	180.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.990.700,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	14.990.700,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	180.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						109.327.506,00							171.768.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	9 Paket	109.327.506,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	171.768.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.576.000,00							49.973.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	40.576.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	49.973.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196.185.616,00					ASN Disdukcapil		172.768.400,00	
		-						196.185.616,00					ASN Disdukcapil		172.768.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	195.185.616,00						-	171.768.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						195.185.616,00							171.768.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	195.185.616,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	171.768.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.010.000,00					ASN Disdukcapil		138.780.000,00	
		-						109.010.000,00					ASN Disdukcapil		138.780.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	88.780.000,00						-	88.780.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	20.230.000,00						-	50.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.780.000,00							88.780.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	88.780.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	88.780.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.230.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	40 Unit	20.230.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
91.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						60.819.600,00							263.770.000,00	
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-		-	13 %	60.819.600,00						-	263.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-		-	95.4 %	60.819.600,00						-	263.770.000,00	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						60.819.600,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		263.770.000,00	
		-						60.819.600,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		263.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	-	25.000.000,00						-	82.770.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	34.820.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	999.600,00						-	1.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						999.600,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	2 Laporan	999.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						25.000.000,00							82.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-		-	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						34.820.000,00							180.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	4 Laporan	34.820.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	180.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						60.689.600,00							263.470.000,00	
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-		-	100 %	60.689.600,00						-	263.470.000,00	
			Persentase Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun Yang diterbitkan	-		-	98 %	60.689.600,00						-	263.470.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						60.689.600,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		263.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						60.689.600,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		263.470.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	-	35.820.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	-	699.600,00						-	700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	-	24.170.000,00						-	82.770.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						699.600,00							700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	699.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman- gunaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	700.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						24.170.000,00							82.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	-		-	4 Laporan	24.170.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						35.820.000,00							180.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	4 Laporan	35.820.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	180.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
93.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						68.724.800,00							156.770.000,00	
			Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	-		-	100 %	68.724.800,00						-	156.770.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						24.981.000,00					ASN Disdukcapil		82.770.000,00	
		-						24.981.000,00					ASN Disdukcapil		82.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	24.981.000,00						-	82.770.000,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						24.981.000,00							82.770.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	2 Dokumen	24.981.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						43.743.800,00					OPD Kabupaten Tana Tidung		74.000.000,00	
		-						43.743.800,00					OPD Kabupaten Tana Tidung		74.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	-	43.743.800,00						-	74.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						43.743.800,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-		-	4 Dokumen	43.743.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	74.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
94.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						24.957.400,00							82.770.000,00	
			Jumlah Data Profil kependudukan yang Disusun	-		-	100 %	24.957.400,00						-	82.770.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						24.957.400,00					ASN Disdukcapil		82.770.000,00	
		-						24.957.400,00					ASN Disdukcapil		82.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	-	24.957.400,00						-	82.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						24.957.400,00							82.770.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-		-	1 Dokumen	24.957.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	82.770.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Perhubungan						4.595.465.266,00							5.330.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.595.465.266,00							5.330.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.595.465.266,00							5.330.000.000,00	
95.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.450.441.786,00							4.298.000.000,00	
			Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	-		-	100 %	23.310.500,00						-	60.000.000,00	
			Meningkatnya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	-		-	100 %	4.147.313.064,00						-	3.950.000.000,00	
			Meningktanya pelayanan dan tata kelola administrasi kesekretariatan perangkat daerah	-		-	100 %	78.726.400,00						-	128.000.000,00	
			Nilai AKIP OPD	-		-	77 Angka	4.334.000,00						-	35.000.000,00	
			-	-		-	-	201.091.822,00						-	95.000.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.334.000,00					ASN		35.000.000,00	
		-						4.334.000,00					ASN		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.334.000,00						-	35.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.334.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	4.334.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.147.313.064,00					ASN		3.950.000.000,00	
		-						4.147.313.064,00					ASN		3.950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	12.170.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.135.143.064,00						-	3.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.135.143.064,00							3.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	37 Orang/bulan	4.135.143.064,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.800.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12.170.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen Dokumen	12.170.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.598.000,00					-		10.000.000,00	
		-						1.598.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	1.598.000,00						-	10.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1.598.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	5 Paket	1.598.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						78.726.400,00					ASN		128.000.000,00	
		-						78.726.400,00					ASN		128.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	4.300.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	46.275.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.351.400,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.800.000,00						-	11.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						18.351.400,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	18.351.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.800.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	5 Paket	9.800.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						46.275.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	46.275.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	90.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.300.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.580.074,00					ASN		42.000.000,00	
		-						10.580.074,00					ASN		42.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	5.226.500,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	5.353.574,00						-	30.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.226.500,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	5 Unit	5.226.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.353.574,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	5.353.574,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						188.913.748,00					ASN		73.000.000,00	
		-						188.913.748,00					ASN		73.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	4.972.500,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	182.941.248,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	3.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.972.500,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	4.972.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						182.941.248,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	182.941.248,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.976.500,00					ASN		60.000.000,00	
		-						18.976.500,00					ASN		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	16.946.500,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	2.030.000,00						-	25.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.946.500,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	16.946.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.030.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	2.030.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
96.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						50.634.180,00							502.000.000,00	
			Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Angka)	-		-	13 Angka	1.050.000,00						-	12.000.000,00	
			Angka Pelanggaran Lalu Lintas (Angka)	-		-	13 %	8.880.000,00						-	33.000.000,00	
			Meningkatnya ketaatan,ketertiban lalu lintas dan angkutan	-		-	100 %	19.770.500,00						-	212.000.000,00	
			Meningkatnya ketaatan,ketertiban lalu lintas dan angkutan	-		-	100 %	18.433.680,00						-	180.000.000,00	
			Meningkatnya ketaatan,ketertiban lalu lintas dan angkutan	-		-	100 %	8.880.000,00						-	33.000.000,00	
			Ratio Angkutan (Angka)	-		-	0,28 Angka	8.880.000,00						-	33.000.000,00	
			-	-		-	-	2.500.000,00						-	35.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						1.050.000,00					Mayarakat		10.000.000,00	
		-						1.050.000,00					Mayarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.050.000,00						-	10.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						1.050.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						17.383.680,00					Masyarakat		200.000.000,00	
		-						17.383.680,00					Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	-	9.840.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	353.280,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	6.420.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	770.400,00						-	40.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						6.420.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	3 Unit	6.420.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.840.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-		-	30 Unit	9.840.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						770.400,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	1 Unit	770.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	40.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						353.280,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	10 Unit	353.280,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						2.500.000,00					-		35.000.000,00	
		-						2.500.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	2.500.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						2.500.000,00							35.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS WILAYAH, DAN PENGEMBANGAN DESA		-	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						19.770.500,00					Masyarakat		212.000.000,00	
		-						19.770.500,00					Masyarakat		212.000.000,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.050.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	-	17.548.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-		-	-	1.172.500,00						-	12.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1.050.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	1.050.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KONEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						1.172.500,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-		-	4 Unit Dokumen	1.172.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						17.548.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	-		-	2 Laporan	17.548.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						8.880.000,00					Masyarakat		33.000.000,00	
		-						8.880.000,00					Masyarakat		33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-		-	-	1.650.000,00						-	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	-	1.990.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	-	5.240.000,00						-	15.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						1.650.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-		-	1 Laporan Laporan	1.650.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin						5.240.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	-		-	2 Orang	5.240.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						1.990.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-		-	1 Laporan Laporan	1.990.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	6.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.050.000,00					Masyarakat		12.000.000,00	
		-						1.050.000,00					Masyarakat		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.050.000,00						-	12.000.000,00	
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						1.050.000,00							12.000.000,00	
		Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
97.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						94.389.300,00							530.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Meningkatnya Fasilitas Pelabuhan, Terminal,Prasarana Jalan dan Parkir Sesuai Kebutuhan	-		-	11 Unit	49.759.300,00						-	370.000.000,00	
			Meningkatnya Fasilitas Pelabuhan, Terminal,Prasarana Jalan dan Parkir Sesuai Kebutuhan	-		-	100 %	44.630.000,00						-	80.000.000,00	
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal						44.630.000,00					Masyarakat		160.000.000,00	
		-						44.630.000,00					Masyarakat		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-		-	-	19.080.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-		-	-	25.550.000,00						-	80.000.000,00	
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal						25.550.000,00							80.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-		-	1 Dokumen	25.550.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal						19.080.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	-		-	1 Dokumen	19.080.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						49.759.300,00					Masyarakat		370.000.000,00	
		-						49.759.300,00					Masyarakat		370.000.000,00	
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-		-	-	9.274.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	-	9.965.300,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	-	5.320.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	-		-	-	25.200.000,00						-	120.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						25.200.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	-		-	1 Unit	25.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	120.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						5.320.000,00							80.000.000,00	
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	2 Unit	5.320.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau						9.274.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-		-	1 Unit	9.274.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						9.965.300,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	2 Unit	9.965.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						4.988.689.937,00							9.459.465.470,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.988.689.937,00							9.459.465.470,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4.793.966.937,00							8.692.545.040,00	
98.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.330.793.937,00							5.905.994.040,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	83,5 Nilai	129.578.432,00						-	378.507.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	83,5 Nilai	4.201.215.505,00						-	5.517.487.040,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	4.330.793.937,00						-	5.885.994.040,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.851.700,00					ASN Diskominfo		88.000.000,00	
		-						29.851.700,00					ASN Diskominfo		88.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	9.910.100,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	9.992.700,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	9.948.900,00						-	33.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.992.700,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	9.992.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	45.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.948.900,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	9.948.900,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	33.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						9.910.100,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	513 Data	9.910.100,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.033.336.805,00					ASN		5.233.787.040,00	
		-						4.033.336.805,00					ASN		5.233.787.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	155.280.000,00						-	203.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.878.056.805,00						-	5.030.347.040,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.878.056.805,00							5.030.347.040,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang/bulan	3.878.056.805,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.030.347.040,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						155.280.000,00							203.440.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	155.280.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	203.440.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.978.700,00					ASN		20.000.000,00	
		-						9.978.700,00					ASN		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	9.978.700,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	10.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						9.978.700,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	5 Dokumen	9.978.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						99.726.732,00					ASN Diskominfo		290.507.000,00	
		-						99.726.732,00					ASN Diskominfo		290.507.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	9.976.800,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	49.798.000,00						-	215.355.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.998.932,00						-	25.100.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.953.000,00						-	11.150.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	23.902.000,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							23.902.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	23.902.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						24.998.932,00							25.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	3 Paket	24.998.932,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.953.000,00							11.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	14.953.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	11.150.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						49.798.000,00							215.355.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	49.798.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	215.355.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9.976.800,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	9.976.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Pemerintah Daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					Pemerintah Daerah		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.840.000,00					ASN Diskominfo		165.200.000,00	
		-						90.840.000,00					ASN Diskominfo		165.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	84.840.000,00						-	161.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.000.000,00						-	4.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.840.000,00							161.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	84.840.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	161.200.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.060.000,00					ASN		108.500.000,00	
		-						67.060.000,00					ASN		108.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	50.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	17.060.000,00						-	18.500.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	90.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.060.000,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	17.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	18.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
99.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						199.974.000,00							1.169.613.000,00	
			Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-		-	83 %	199.974.000,00						-	1.169.613.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						199.974.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.169.613.000,00	
		-						199.974.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.169.613.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	29.822.000,00						-	439.740.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	20.012.000,00						-	155.202.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	20.004.000,00						-	0,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	19.994.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	50.028.000,00						-	429.671.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	18.504.000,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	41.610.000,00						-	40.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						29.822.000,00							439.740.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	5 Laporan	29.822.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	439.740.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						41.610.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	41.610.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						20.004.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	50 Orang	20.004.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						18.504.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	18.504.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						50.028.000,00							429.671.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	1 Rekomendasi	50.028.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	429.671.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						20.012.000,00							155.202.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	2 Orang	20.012.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	155.202.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						19.994.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	1 Komunitas	19.994.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	45.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	30 Konten	0,00	Kab. Tana Tidung	-	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
100.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						263.199.000,00							1.616.938.000,00	
			Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo	-		-	28 OPD	263.199.000,00						-	1.616.938.000,00	
			Persentase Layanan Publik yang Terselenggara Secara Online atau Digital dan Terintegrasi	-		-	90 %	263.199.000,00						-	1.616.938.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						46.500.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		67.000.000,00	
		-						46.500.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		67.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-		-	-	46.500.000,00						-	67.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						46.500.000,00							67.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	-		-	3 Dokumen	46.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	67.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						216.699.000,00					OPD dan Masyarakat		1.549.938.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						216.699.000,00					OPD dan Masyarakat		1.549.938.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	29.614.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	20.000.000,00						-	72.100.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	-	10.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	29.685.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	97.370.000,00						-	1.207.838.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	30.030.000,00						-	90.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						97.370.000,00							1.207.838.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	26 Titik	97.370.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.207.838.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						20.000.000,00							72.100.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemen SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	72.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						29.685.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	1 Layanan	29.685.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						30.030.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	26 Titik	30.030.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	90.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						29.614.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	1 Aplikasi	29.614.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						89.810.000,00							480.120.430,00	
101.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						89.810.000,00							480.120.430,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pemukhtahiran dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Pembangunan Daerah	-		-	100 %	89.810.000,00						-	380.120.430,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						89.810.000,00					ASN dan Masyarakat		480.120.430,00	
		-						89.810.000,00					ASN dan Masyarakat		480.120.430,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	-	19.941.000,00						-	120.258.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	-	24.950.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	14.974.000,00						-	50.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	-	29.945.000,00						-	209.862.430,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						29.945.000,00							209.862.430,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-		-	60 %	29.945.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	209.862.430,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						24.950.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-		-	100 %	24.950.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						19.941.000,00							120.258.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-		-	32 Orang	19.941.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.258.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						14.974.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	30 %	14.974.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						104.913.000,00							286.800.000,00	
102.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						104.913.000,00							286.800.000,00	
			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi untuk Pengamanan Informasi Perangkat daerah	-		-	80,6 %	104.913.000,00						-	286.800.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						104.913.000,00					ASN dan Masyarakat		286.800.000,00	
		-						104.913.000,00					ASN dan Masyarakat		286.800.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	59.988.000,00						-	143.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	19.982.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	-	24.943.000,00						-	103.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						24.943.000,00							103.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	-		-	1 Laporan	24.943.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	103.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						59.988.000,00							143.800.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	59.988.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	143.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						19.982.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	19.982.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						3.480.729.136,00							6.653.635.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.480.729.136,00							6.653.635.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.480.729.136,00							6.653.635.000,00	
103.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.390.478.536,00							5.468.153.564,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	85,46 Nilai	3.390.478.536,00						-	5.463.153.564,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	3.390.478.536,00						-	5.463.153.564,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						559.600,00					ASN, OPD, Pemda		32.000.000,00	
		-						559.600,00					ASN, OPD, Pemda		32.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	160.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	158.200,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	241.400,00						-	15.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						158.200,00							12.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	158.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						241.400,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	4 Laporan	241.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						160.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	2 Data	160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.084.997.806,00					ASN, OPD, Pemda		4.904.473.564,00	
		-						3.084.997.806,00					ASN, OPD, Pemda		4.904.473.564,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	32.820.000,00						-	140.760.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.052.177.806,00						-	4.763.713.564,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.052.177.806,00							4.763.713.564,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	23 Orang/bulan	3.052.177.806,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.763.713.564,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						32.820.000,00							140.760.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	32.820.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	140.760.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.774.000,00					ASN, OPD, Pemda		6.254.000,00	
		-						4.774.000,00					ASN, OPD, Pemda		6.254.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	740.000,00						-	2.220.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	4.034.000,00						-	4.034.000,00	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						740.000,00							2.220.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	740.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.220.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						4.034.000,00							4.034.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	4.034.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.034.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.215.930,00					ASN, OPD, Pemda		240.411.831,00	
		-						88.215.930,00					ASN, OPD, Pemda		240.411.831,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.054.500,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	26.635.000,00						-	121.864.987,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.724.990,00						-	54.703.244,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.196.140,00						-	42.939.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.605.300,00						-	15.904.600,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.605.300,00							15.904.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	5.605.300,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.904.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.724.990,00							54.703.244,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	35.724.990,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	54.703.244,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.196.140,00							42.939.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	19.196.140,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	42.939.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						26.635.000,00							121.864.987,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	26.635.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	121.864.987,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.054.500,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	1.054.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.489.200,00					-		8.479.309,00	
		-						2.489.200,00					-		8.479.309,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	2.489.200,00						-	8.479.309,00	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.489.200,00							8.479.309,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	2.489.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	8.479.309,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.612.000,00					-		213.574.860,00	
		-						158.612.000,00					-		213.574.860,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	156.452.000,00						-	165.140.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	44.434.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.160.000,00						-	4.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.160.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	2.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						156.452.000,00							165.140.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	156.452.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	165.140.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							44.434.860,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	44.434.860,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.830.000,00					-		62.960.000,00	
		-						50.830.000,00					-		62.960.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	41.480.000,00						-	38.560.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.350.000,00						-	24.400.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.480.000,00							38.560.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	41.480.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.560.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.350.000,00							24.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	15 Unit	9.350.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	24.400.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
104.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						5.173.000,00							40.000.000,00	
			Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	-		-	100 %	5.173.000,00						-	40.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.059.500,00					Investor		40.000.000,00	
		-						5.059.500,00					Investor		40.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-	-	5.059.500,00						-	40.000.000,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						5.059.500,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-		-	1 Dokumen	5.059.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATAN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						113.500,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		0,00	
		-						113.500,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		0,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	113.500,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						113.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	113.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PEMERATA AN INFRAS TRUKTUR DASAR, KO NEKTIVITA S WILAYAH, DAN PENG EMBANGA N DESA		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
105.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						3.910.000,00							330.000.000,00	
			Jumlah Investor yang akan berinvestasi	-		-	2 Inestor	3.910.000,00						-	330.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.910.000,00					Investor		330.000.000,00	
		-						3.910.000,00					Investor		330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	-	2.851.500,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	-	1.058.500,00						-	150.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						2.851.500,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	2.851.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	180.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						1.058.500,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	1.058.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
106.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						6.768.000,00							600.000.000,00	
			Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal	-		-	95 %	6.768.000,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						6.768.000,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		600.000.000,00	
		-						6.768.000,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		600.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	2.020.000,00						-	366.745.840,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	1.936.000,00						-	15.624.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	-	2.812.000,00						-	217.630.160,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						2.812.000,00							217.630.160,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	100 Pelaku Usaha	2.812.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	217.630.160,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						1.936.000,00							15.624.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-		-	10 Pelaku Usaha	1.936.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	15.624.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						2.020.000,00							366.745.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	30 Kegiatan Usaha	2.020.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	366.745.840,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
107.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						70.999.200,00							115.481.436,00	
			Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	-		-	100 %	70.999.200,00						-	115.481.436,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						70.999.200,00					Pelaku Usaha		115.481.436,00	
		-						70.999.200,00					Pelaku Usaha		115.481.436,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	-	12.314.400,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	-	4.629.200,00						-	30.481.436,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	54.055.600,00						-	35.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						4.629.200,00							30.481.436,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-		-	10 Pelaku Usaha	4.629.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	30.481.436,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						12.314.400,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		-	5 Kegiatan Usaha	12.314.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						54.055.600,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	5 Kegiatan Usaha	54.055.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
108.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						3.400.400,00							100.000.000,00	
			Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP	-		-	100 %	3.400.400,00						-	100.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.400.400,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		100.000.000,00	
		-						3.400.400,00					Pelaku Usaha, Investor, Pemda		100.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	-	3.400.400,00						-	100.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						3.400.400,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-		-	1 Dokumen	3.400.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						2.965.082.716,00							5.229.062.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.965.082.716,00							5.229.062.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2.945.082.716,00							4.919.062.000,00	
109.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.915.668.796,00							4.489.062.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	2.601.420.690,00						-	3.760.153.286,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	69.740.000,00						-	118.397.714,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	135.773.854,00						-	96.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	101.724.752,00						-	485.011.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	20 Unit	69.740.000,00						-	118.397.714,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	97 %	2.608.430.190,00						-	3.789.153.286,00	
			umlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	-		-	1 Laporan	135.773.854,00						-	96.500.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.009.500,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		29.000.000,00	
		-						7.009.500,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		29.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.789.300,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.220.200,00						-	20.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.789.300,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	5.789.300,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.220.200,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	1.220.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.601.420.690,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.760.153.286,00	
		-						2.601.420.690,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3.760.153.286,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	144.690.000,00						-	133.930.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	-	1.532.400,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.455.198.290,00						-	3.626.223.286,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.455.198.290,00							3.626.223.286,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	280 Orang/bulan	2.455.198.290,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.626.223.286,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						144.690.000,00							133.930.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	144.690.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	133.930.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.532.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	1.532.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.724.752,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		485.011.000,00	
		-						101.724.752,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		485.011.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	55.328.000,00						-	405.011.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	43.396.752,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.396.752,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	43.396.752,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55.328.000,00							405.011.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	55.328.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	405.011.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	12 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.773.854,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		96.500.000,00	
		-						135.773.854,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		96.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	77.122.750,00						-	33.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	52.651.104,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.122.750,00							33.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	77.122.750,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						52.651.104,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	52.651.104,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	57.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.740.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		118.397.714,00	
		-						69.740.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		118.397.714,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.780.000,00						-	98.097.714,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	23.960.000,00						-	20.300.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.780.000,00							98.097.714,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	45.780.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	98.097.714,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.960.000,00							20.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	32 Unit	23.960.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.300.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
110.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						14.493.920,00							300.000.000,00	
			Persentase Perpustakaan Daerah Yang Di Bina	-		-	78 %	4.620.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase Perpustakaan Daerah Yang Di Bina	-		-	78,00 %	9.873.920,00						-	100.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						9.873.920,00					Perpustakaan, Taman Baca Masyarakat		200.000.000,00	
		-						9.873.920,00					Perpustakaan, Taman Baca Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	4.963.920,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	-	4.910.000,00						-	100.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						4.963.920,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	5 Perpustakaan	4.963.920,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						4.910.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-		-	5 Perpustakaan	4.910.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.620.000,00					Perpustakaan, Taman Baca Masyarakat		100.000.000,00	
		-						4.620.000,00					Perpustakaan, Taman Baca Masyarakat		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	-	4.620.000,00						-	100.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						4.620.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	-		-	2 Lokus	4.620.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
111.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						14.920.000,00							130.000.000,00	
			Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Dimiliki	-		-	2 %	14.920.000,00						-	130.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						14.920.000,00					Masyarakat		130.000.000,00	
		-						14.920.000,00					Masyarakat		130.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	4.920.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						4.920.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	1 Orang	4.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pmbangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	1 Eksemplar	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						20.000.000,00							310.000.000,00	
112.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						20.000.000,00							310.000.000,00	
			Tingkat Ketersediaan Arsip	-		-	64 %	5.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Tingkat Ketersediaan Arsip	-		-	64 Nilai	5.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					ASN Kabupaten Tana Tidung		210.000.000,00	
		-						15.000.000,00					ASN Kabupaten Tana Tidung		210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	-	5.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	-	5.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						5.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	-		-	300 Berkas	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						5.000.000,00							70.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-		-	300 Berkas	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	29 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						5.000.000,00					ASN Kabupaten Tana Tidung		100.000.000,00	
		-						5.000.000,00					ASN Kabupaten Tana Tidung		100.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	5.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						5.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	34 Pengguna	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						4.897.851.050,00							7.851.550.220,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						362.209.840,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						362.209.840,00							850.000.000,00	
113.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						100.790.836,00							349.000.000,00	
			Rasio Wirausaha Pemuda	-		-	1 %	100.790.836,00						-	264.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						52.425.300,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Kepemudaan Tana Tidung, Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader		213.000.000,00	
		-						52.425.300,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Kepemudaan Tana Tidung, Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader		213.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	20.212.000,00						-	43.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	25.013.300,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	7.200.000,00						-	85.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota						7.200.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	15 Orang	7.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	85.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						25.013.300,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	2 Orang	25.013.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	-		-	85.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						20.212.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	20.212.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	-		-	43.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						48.365.536,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Kepemudaan Tana Tidung, Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader		136.000.000,00	
		-						48.365.536,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Kepemudaan Tana Tidung, Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader		136.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	5.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						5.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	2 Organisasi	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	1.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						43.365.536,00							135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	5 Organisasi	43.365.536,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	135.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
114.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						216.418.744,00							400.000.000,00	
			Persentase Atlet yang Masuk Pelatda/PPLP/SPOBNAS	-		-	5 %	211.418.744,00						-	340.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						27.300.744,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		30.000.000,00	
		-						27.300.744,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	27.300.744,00						-	30.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						27.300.744,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	27.300.744,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						44.584.000,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		230.000.000,00	
		-						44.584.000,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		230.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	8.880.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	35.704.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						35.704.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	130 Orang	35.704.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang disabilitas.	-		-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						8.880.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kegiatan	8.880.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat uat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	180.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						134.534.000,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		100.000.000,00	
		-						134.534.000,00					OPD Se Kabupaten Tana Tidung, Organisasi Keolahragaan Tana Tidung, Atlet, Olahragawan, Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	34.830.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	23.920.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	75.784.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						75.784.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	1 Orang	75.784.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						34.830.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Orang	34.830.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						23.920.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	30 Orang	23.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	60.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						5.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
		-						5.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0013	Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
115.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						45.000.260,00							101.000.000,00	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	-		-	0,6 %	45.000.260,00						-	51.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						45.000.260,00					-		101.000.000,00	
		-						45.000.260,00					-		101.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	5.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	20.000.260,00						-	50.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						5.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Organisasi	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.04.2.01.0012	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						20.000.260,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	20.000.260,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.535.641.210,00							7.001.550.220,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						4.535.641.210,00							7.001.550.220,00	
116.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.280.234.879,00							6.683.250.220,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	87 Nilai	4.280.234.879,00						-	6.683.250.220,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	0 %	16.383.000,00						-	77.107.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.383.000,00					ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		77.107.000,00	
		-						16.383.000,00					ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		77.107.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.004.000,00						-	2.510.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	15.379.000,00						-	74.597.000,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.004.000,00							2.510.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	8 Dokumen	1.004.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.510.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.379.000,00							74.597.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	22 Laporan	15.379.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	74.597.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.944.221.938,00					-		5.459.981.666,00	
		-						3.944.221.938,00					-		5.459.981.666,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	63.240.000,00						-	246.140.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.880.981.938,00						-	5.213.841.666,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.880.981.938,00							5.213.841.666,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	518 Orang/bulan	3.880.981.938,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.213.841.666,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						63.240.000,00							246.140.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	63.240.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	246.140.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.068.000,00					-		50.196.000,00	
		-						8.068.000,00					-		50.196.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	8.068.000,00						-	50.196.000,00	
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.068.000,00							50.196.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	2 Orang	8.068.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.196.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						85.047.124,00					-		440.091.424,00	
		-						85.047.124,00					-		440.091.424,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	4.034.000,00						-	21.005.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	34.754.000,00						-	309.497.600,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.138.924,00						-	65.803.024,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.960.000,00						-	33.785.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.160.200,00						-	10.000.000,00	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.160.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	3.160.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						34.138.924,00							65.803.024,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	34.138.924,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	65.803.024,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.960.000,00							33.785.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	33.785.800,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						34.754.000,00							309.497.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	34.754.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	309.497.600,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.034.000,00							21.005.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	4.034.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	21.005.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		65.000.000,00	
		-						0,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	45.000.000,00	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	4 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	45.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.582.817,00					-		412.757.730,00	
		-						141.582.817,00					-		412.757.730,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	79.112.833,00						-	139.548.570,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.069.984,00						-	266.609.160,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.400.000,00						-	6.600.000,00	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00							6.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	6.600.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.112.833,00							139.548.570,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	79.112.833,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	139.548.570,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.069.984,00							266.609.160,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	60.069.984,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	266.609.160,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.932.000,00					-		178.116.400,00	
		-						84.932.000,00					-		178.116.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	36.678.200,00						-	46.979.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	40.573.800,00						-	99.647.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.680.000,00						-	31.490.000,00	
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.573.800,00							99.647.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	40.573.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	99.647.400,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.678.200,00							46.979.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	4 Unit	36.678.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	46.979.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.680.000,00							31.490.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	7.680.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	31.490.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
117.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						140.368.131,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dari Luar Daerah	-		-	5,3 %	24.958.131,00						-	70.000.000,00	
			-	-		-	-	115.410.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						24.958.131,00					-		70.000.000,00	
		-						24.958.131,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	24.958.131,00						-	70.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						24.958.131,00							70.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	11 Unit	24.958.131,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						115.410.000,00					-		0,00	
		-						115.410.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	115.410.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						115.410.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	90 Pelaku Usaha	115.410.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
118.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						55.004.800,00							113.300.000,00	
			-	-		-	-	55.004.800,00						-	113.300.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						55.004.800,00					-		113.300.000,00	
		-						55.004.800,00					-		113.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	25.004.800,00						-	43.300.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	-	30.000.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						25.004.800,00							43.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	1 Dokumen	25.004.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	43.300.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-		-	2 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
119.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						33.852.100,00							110.000.000,00	
			Persentase Pengusaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-		-	100 %	23.852.100,00						-	30.000.000,00	
			-	-		-	-	10.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		80.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	-	10.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						23.852.100,00					-		30.000.000,00	
		-						23.852.100,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	-	23.852.100,00						-	30.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						23.852.100,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	23.852.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
120.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						26.181.300,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	-		-	2 %	26.181.300,00						-	25.000.000,00	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						26.181.300,00					-		25.000.000,00	
		-						26.181.300,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	26.181.300,00						-	25.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						26.181.300,00							25.000.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	12 Orang	26.181.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan						11.631.750.446,00							12.055.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						553.949.730,00							869.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						553.949.730,00							869.000.000,00	
121.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						50.000.000,00							0,00	
			Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota	-		-	79,20 %	25.000.000,00						-	0,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		0,00	
		-						50.000.000,00					Masyarakat Kab. Tana Tidung		0,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	-		-	1 unit	25.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
122.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						367.652.130,00							739.000.000,00	
			Desa / Kelurahan yang memiliki Program Pemanfaatan Perkarangan untuk peningkatan Pangan (Asupan Gizi)	-		-	87,50 %	170.953.830,00						-	494.000.000,00	
			Desa/ Kelurahan yang memiliki Program Pemanfaatan Perkarangan untuk peningkatan Pangan (Asupan Gizi)	-		-	87,50 %	196.698.300,00						-	245.000.000,00	
			Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota	-		-	79,20 %	367.652.130,00						-	739.000.000,00	
			Skor Neraca Bahan Pangan	-		-	86,00 Nilai	367.652.130,00						-	739.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						170.953.830,00					-		494.000.000,00	
		-						170.953.830,00					-		494.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	14.950.000,00						-	0,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	-	30.174.000,00						-	18.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	-	12.663.000,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	87.993.000,00						-	360.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	25.173.830,00						-	100.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						25.173.830,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	40 Keluarga	25.173.830,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						87.993.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	4 laporan	87.993.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	360.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						30.174.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	30.174.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	18.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						12.663.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	-		-	1 Dokumen	12.663.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	16.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						14.950.000,00							0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	14.950.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						85.012.000,00					-		135.000.000,00	
		-						85.012.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	85.012.000,00						-	135.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						85.012.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	5,768 Ton	85.012.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	135.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						111.686.300,00					-		110.000.000,00	
		-						111.686.300,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	-	111.686.300,00						-	110.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						111.686.300,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-		-	4 Laporan	111.686.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	110.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
123.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						101.929.600,00							80.000.000,00	
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-		-	12,50 %	101.929.600,00						-	80.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						17.901.600,00					-		30.000.000,00	
		-						17.901.600,00					-		30.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	-	17.901.600,00						-	30.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						17.901.600,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	-		-	1 Dokumen	17.901.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						84.028.000,00					-		50.000.000,00	
		-						84.028.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	34.028.000,00						-	50.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						34.028.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	34.028.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
124.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						34.368.000,00							50.000.000,00	
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	-		-	96,00 %	34.368.000,00						-	50.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						34.368.000,00					-		50.000.000,00	
		-						34.368.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	-	34.368.000,00						-	50.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						34.368.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	-		-	4 Dokumen	34.368.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.077.800.716,00							11.186.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						546.386.270,00							650.000.000,00	
125.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						341.421.500,00							100.000.000,00	
			Produksi Perikanan Tangkap	-		-	1.158,73 Ton	293.421.500,00						-	100.000.000,00	
			-	-		-	-	48.000.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						48.000.000,00					-		0,00	
		-						48.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	-	48.000.000,00						-	0,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						48.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	50 Unit	48.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						293.421.500,00					-		100.000.000,00	
		-						293.421.500,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	-	92.938.400,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	-	60.008.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-		-	-	140.475.100,00						-	0,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						60.008.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-		-	100 Orang	60.008.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						92.938.400,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	3 Kelompok	92.938.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						140.475.100,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-		-	78 Unit	140.475.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
126.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						114.965.170,00							350.000.000,00	
			-	-		-	-	114.965.170,00						-	350.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						114.965.170,00					-		350.000.000,00	
		-						114.965.170,00					-		350.000.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	-	34.980.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	79.985.170,00						-	200.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						79.985.170,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	79.985.170,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	200.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						34.980.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	2 Dokumen	34.980.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
127.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						40.014.000,00							200.000.000,00	
			-	-		-	-	20.007.000,00						-	100.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						40.014.000,00					-		200.000.000,00	
		-						40.014.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	20.007.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	20.007.000,00						-	100.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						20.007.000,00							100.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	2 Pelaku Usaha	20.007.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						20.007.000,00							100.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	5 Pelaku Usaha	20.007.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
128.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						49.985.600,00							0,00	
			-	-		-	-	49.985.600,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						49.985.600,00					-		0,00	
		-						49.985.600,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	49.985.600,00						-	0,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						49.985.600,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	5 Unit Usaha	49.985.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						10.531.414.446,00							10.536.000.000,00	
129.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.283.401.538,00							8.891.000.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	88,09 Nilai	9.283.401.538,00						-	8.891.000.000,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	9.283.401.538,00						-	8.891.000.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						56.232.400,00					-		60.000.000,00	
		-						56.232.400,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	20.938.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	35.294.400,00						-	35.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.938.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	20.938.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.294.400,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	35.294.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	35.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.916.599.686,00							8.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						8.916.599.686,00					-		8.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	227.520.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	8.689.079.686,00						-	8.250.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.689.079.686,00							8.250.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	75 Orang/bulan	8.689.079.686,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	8.250.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						227.520.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	227.520.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						156.875.052,00					-		187.000.000,00	
		-						156.875.052,00					-		187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	101.751.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.552.052,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.572.000,00						-	27.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.552.052,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.552.052,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.572.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	19.572.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	27.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						101.751.000,00							90.000.000,00	

RPKD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	101.751.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	90.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.874.400,00					-		94.000.000,00	
		-						100.874.400,00					-		94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	95.874.400,00						-	89.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.874.400,00							89.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	95.874.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	89.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.820.000,00					-		50.000.000,00	
		-						52.820.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	52.820.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						52.820.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	52.820.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
130.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						402.556.572,00							925.000.000,00	
			-	-		-	-	402.556.572,00						-	925.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						179.714.572,00					-		695.000.000,00	
		-						179.714.572,00					-		695.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	49.844.700,00						-	395.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	49.875.200,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	-	79.994.672,00						-	200.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						79.994.672,00							200.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-		-	4 Laporan	79.994.672,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	200.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						49.875.200,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	4 Laporan	49.875.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						49.844.700,00							395.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	3 Ton	49.844.700,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	395.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						89.670.500,00					-		90.000.000,00	
		-						89.670.500,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	89.670.500,00						-	90.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						89.670.500,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	4 Dokumen	89.670.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	90.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						133.171.500,00					-		140.000.000,00	
		-						133.171.500,00					-		140.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	-	133.171.500,00						-	140.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						133.171.500,00							140.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	-		-	700 Ekor	133.171.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	140.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
131.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						658.839.708,00							600.000.000,00	
			-	-		-	-	658.839.708,00						-	300.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						658.839.708,00					-		600.000.000,00	
		-						658.839.708,00					-		600.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	49.958.800,00						-	300.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-		-	-	408.040.000,00						-	0,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	-	150.900.000,00						-	0,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	49.940.908,00						-	300.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						408.040.000,00							0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	-		-	300 Ha	408.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						150.900.000,00							0,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	1 Dokumen	150.900.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						49.958.800,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	1 Dokumen	49.958.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						49.940.908,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	49.940.908,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
132.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						77.155.628,00							70.000.000,00	
			persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan menular strategis (diperoleh dari surveilans penyakit dari 5 PHMS)	-		-	10,67 %	9.960.000,00						-	10.000.000,00	
			Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan menular strategis (diperoleh dari surveilans penyakit dari 5 PHMS)	-		-	10,67 %	67.195.628,00						-	60.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						67.195.628,00					Kelompok Peternak		60.000.000,00	
		-						67.195.628,00					Kelompok Peternak		60.000.000,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	-		-	-	67.195.628,00						-	60.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis						67.195.628,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	-		-	4 Dokumen	67.195.628,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	60.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						9.960.000,00					Unit Usaha Peternakan		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.960.000,00					Unit Usaha Peternakan		10.000.000,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	-	9.960.000,00						-	10.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						9.960.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	-		-	10 Unit Usaha	9.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
133.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						29.981.000,00							50.000.000,00	
			-	-		-	-	29.981.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						29.981.000,00					-		50.000.000,00	
		-						29.981.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	-	29.981.000,00						-	50.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						29.981.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	1 Dokumen	29.981.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
134.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						79.480.000,00							0,00	
			Persentase Kelompok Tani yang Ditingkatkan Kompetensinya	-		-	100 %	79.480.000,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						79.480.000,00					Kelompok Tani		0,00	
		-						79.480.000,00					Kelompok Tani		0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	49.900.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	29.580.000,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						49.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	1 Unit	49.900.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						29.580.000,00							0,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	1 Unit	29.580.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Sebidai 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
		Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM						6.044.943.380,00							10.507.979.572,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.593.486.700,00							8.822.506.763,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.593.486.700,00							8.822.506.763,00	
135.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.046.847.300,00							7.952.933.963,00	
			Nilai Akip Perangkat Daerah	-		-	82 Nilai	12.495.500,00						-	31.655.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 Persen	12.495.500,00						-	31.655.000,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 Persen	4.959.793.200,00						-	7.798.200.063,00	
			-	-		-	-	74.558.600,00						-	123.078.900,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.495.500,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		31.655.000,00	
		-						12.495.500,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		31.655.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	12.255.000,00						-	29.655.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	240.500,00						-	2.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.255.000,00							29.655.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	12.255.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	29.655.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						240.500,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	2 Laporan	240.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	2.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.765.146.712,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		6.887.341.803,00	
		-						4.765.146.712,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		6.887.341.803,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.765.146.712,00						-	6.887.341.803,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.765.146.712,00							6.887.341.803,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	616 Orang/bulan	4.765.146.712,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	6.887.341.803,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.223.384,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		452.994.480,00	
		-						107.223.384,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		452.994.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	48.518.000,00						-	305.765.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.705.384,00						-	147.229.480,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						58.705.384,00							147.229.480,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	58.705.384,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	147.229.480,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.518.000,00							305.765.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	48.518.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	305.765.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.423.104,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		457.863.780,00	
		-						87.423.104,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		457.863.780,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	54.988.640,00						-	87.384.900,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.934.464,00						-	365.478.880,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00						-	5.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	5.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						54.988.640,00							87.384.900,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	54.988.640,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	87.384.900,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.934.464,00							365.478.880,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	30.934.464,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	365.478.880,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74.558.600,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		123.078.900,00	
		-						74.558.600,00					ASN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM		123.078.900,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	62.378.600,00						-	100.948.900,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	12.180.000,00						-	22.130.000,00	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						62.378.600,00							100.948.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	13 Unit	62.378.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	100.948.900,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.180.000,00							22.130.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	12.180.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN LAYANAN DASAR YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING		-	22.130.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
136.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						98.894.800,00							86.245.800,00	
			Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	-		-	28,57 Persen	98.894.800,00						-	86.245.800,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						98.894.800,00					Pelaku Usaha Koperasi		86.245.800,00	
		-						98.894.800,00					Pelaku Usaha Koperasi		86.245.800,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	-	49.364.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	-	49.530.800,00						-	61.245.800,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						49.364.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-		-	16 Unit Usaha	49.364.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	25.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						49.530.800,00							61.245.800,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-		-	15 Unit Usaha	49.530.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	61.245.800,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
137.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						101.776.100,00							354.072.200,00	
			Persentase Pertumbuhan Koperasi	-		-	8,9 Persen	101.676.100,00						-	354.072.200,00	
			Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	-		-	100 Persen	101.676.100,00						-	354.072.200,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						101.776.100,00					Unit Usaha Koperasi		354.072.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						101.776.100,00					Unit Usaha Koperasi		354.072.200,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	-	101.576.100,00						-	150.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	100.000,00						-	92.496.100,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	-	100.000,00						-	111.576.100,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						100.000,00							111.576.100,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-		-	5 Kelompok Masyarakat	100.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	111.576.100,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						101.576.100,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-		-	5 Unit Usaha	101.576.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						100.000,00							92.496.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	31 Unit Usaha	100.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	92.496.100,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
138.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						278.798.500,00							300.338.400,00	
			Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	-		-	2.18 Persen	278.798.500,00						-	300.338.400,00	
			Persentase Usaha Mikro yang di Fasilitasi Pengembangan Usahanya	-		-	4.29 Persen	278.798.500,00						-	300.338.400,00	
			Persentase Usaha Mikro yang Memiliki Sertifikasi Halal	-		-	7.16 Persen	278.798.500,00						-	300.338.400,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						278.798.500,00					Pelaku Usaha Mikro Kecil		300.338.400,00	
		-						278.798.500,00					Pelaku Usaha Mikro Kecil		300.338.400,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	33.664.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	77.475.000,00						-	64.954.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	67.659.500,00						-	105.384.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	100.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						77.475.000,00							64.954.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	30 Orang	77.475.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	64.954.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						33.664.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	4 Kegiatan	33.664.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	30.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						67.659.500,00							105.384.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	50 Unit Usaha	67.659.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	105.384.400,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
139.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						67.170.000,00							128.916.400,00	
			Persentase Pelaku UMKM yang di Fasilitasi Pemasaran/ di Promosikan Produknya baik di dalam maupun di Luar Daerah	-		-	0.59 Persen	67.170.000,00						-	128.916.400,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						67.170.000,00					Pelaku Usaha Mikro Kecil		128.916.400,00	
		-						67.170.000,00					Pelaku Usaha Mikro Kecil		128.916.400,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	67.170.000,00						-	128.916.400,00	
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						67.170.000,00							128.916.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	8 Unit Usaha	67.170.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	128.916.400,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						451.456.680,00							1.685.472.809,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						199.931.400,00							467.358.332,00	
140.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						60.011.000,00							61.400.400,00	
			Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang di Fasilitasi Pengelolaanya	-		-	100 Persen	60.011.000,00						-	61.400.400,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						60.011.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang Menempati Kios dan Los Pasar		61.400.400,00	
		-						60.011.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang Menempati Kios dan Los Pasar		61.400.400,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	60.011.000,00						-	61.400.400,00	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						60.011.000,00							61.400.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	5 Unit	60.011.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	61.400.400,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
141.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						39.886.800,00							38.234.000,00	
			Persentase koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas	-		-	2 Persen	39.886.800,00						-	38.234.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						39.886.800,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Pasar		38.234.000,00	
		-						39.886.800,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang menjual Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Pasar		38.234.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	-	39.886.800,00						-	38.234.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						39.886.800,00							38.234.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-		-	12 Laporan	39.886.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	38.234.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
142.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						99.600,00							28.227.040,00	
			Persentase Keikutsertaan dalam Promosi Dagang	-		-	100 Persen	99.600,00						-	28.227.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						99.600,00					Pelaku UMKM		28.227.040,00	
		-						99.600,00					Pelaku UMKM		28.227.040,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	-	99.600,00						-	28.227.040,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						99.600,00							28.227.040,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	1 Pelaku Usaha	99.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	28.227.040,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
143.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						99.934.000,00							339.496.892,00	
			Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-		-	100% Persen	99.934.000,00						-	339.496.892,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						99.934.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Alat UTTP		339.496.892,00	
		-						99.934.000,00					Pelaku Usaha Perdagangan yang Menggunakan Alat UTTP		339.496.892,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	56.040.000,00						-	233.540.060,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	-	43.894.000,00						-	105.956.832,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						56.040.000,00							233.540.060,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	230 Unit	56.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	233.540.060,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						43.894.000,00							105.956.832,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	230 Orang	43.894.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutk an pengem bangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	105.956.832,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						251.525.280,00							1.218.114.477,00	
144.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						156.350.680,00							957.099.477,00	
			Persentase IKM yang di awasi Jaminan Produk Halalnya	-		-	22.39 Persen	156.350.680,00						-	957.099.477,00	
			Persentase Pelaku Usaha Industri yang di Fasilitasi Pemasaran/Promosi	-		-	3.24 Persen	156.350.680,00						-	957.099.477,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Peningkatan Kopetensi IKM dalam Menjalankan Usahanya	-		-	5 Persen	156.350.680,00						-	957.099.477,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						156.350.680,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		957.099.477,00	
		-						156.350.680,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		957.099.477,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	-	73.683.080,00						-	485.201.077,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	31.094.000,00						-	442.898.400,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	-	51.573.600,00						-	29.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						73.683.080,00							485.201.077,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-		-	5 Dokumen	73.683.080,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	485.201.077,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						31.094.000,00							442.898.400,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	5 Dokumen	31.094.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	442.898.400,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						51.573.600,00							29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	30 Dokumen	51.573.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	29.000.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
145.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						44.660.000,00							161.480.000,00	
			Persentase IKM yang memiliki izin sesuai ketentuan	-		-	7.58 Persen	44.660.000,00						-	161.480.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						44.660.000,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		161.480.000,00	
		-						44.660.000,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		161.480.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	44.560.400,00						-	72.924.800,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	99.600,00						-	88.555.200,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						44.560.400,00							72.924.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	20 Dokumen	44.560.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	72.924.800,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						99.600,00							88.555.200,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	10 Dokumen	99.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutk an hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk menin gkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PENGUATA N EKONOMI LOKAL, DESA PRO DUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	88.555.200,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
146.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.514.600,00							99.535.000,00	
			Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-		-	10 Persen	50.514.600,00						-	99.535.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						50.514.600,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		99.535.000,00	
		-						50.514.600,00					Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah		99.535.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	-	50.514.600,00						-	99.535.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50.514.600,00							99.535.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-		-	1 Dokumen	50.514.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	PENGUATAN EKONOMI LOKAL, DESA PRODUKTIF, DAN NILAI TAMBAH DAERAH		-	99.535.000,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
		Sekretariat Daerah						13.149.718.032,00							13.149.704.088,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						13.149.718.032,00							13.149.704.088,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						13.149.718.032,00							13.149.704.088,00	
147.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	13.149.718.032,00						-	13.149.704.088,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Sekretariat Daerah		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Sekretariat Daerah		13.897.243.888,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	13.149.718.032,00						-	13.149.704.088,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.149.718.032,00							13.149.704.088,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1442 Orang/bulan	13.149.718.032,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	13.149.704.088,00	Sekretariat Daerah
		Bagian Umum						17.306.250.548,00							19.036.871.303,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.306.250.548,00							19.036.871.303,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.306.250.548,00							19.036.871.303,00	
148.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	208.440.000,00						-	229.064.000,00	
RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	17.095.410.548,00						-	18.807.367.303,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Bagian Umum		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Bagian Umum		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						208.440.000,00							229.064.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	208.440.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	229.064.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Umum		296.313.000,00	
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Umum		296.313.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	180.328.000,00						-	177.270.500,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						180.328.000,00							177.270.500,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	6 Paket	180.328.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	177.270.500,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						18.230.000,00							21.851.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	12 Orang	18.230.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	21.851.500,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					ASN Bagian Umum		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					ASN Bagian Umum		3.079.421.527,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	600.000,00						-	50.820.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	588.652.000,00						-	680.616.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	56.602.000,00						-	68.622.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						56.602.000,00							68.622.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	56.602.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	68.622.400,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.856.800,00							28.543.880,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	26.856.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	28.543.880,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						362.832.100,00							399.543.650,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	362.832.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	399.543.650,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						151.592.000,00							174.008.780,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	151.592.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	174.008.780,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						588.652.000,00							680.616.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	588.652.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	680.616.200,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						459.255.000,00							504.014.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	459.255.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	504.014.500,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						600.000,00							50.820.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	12 Dokumen	600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	50.820.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						253.151.065,00					ASN Bagian Umum		260.170.467,00	
		-						253.151.065,00					ASN Bagian Umum		260.170.467,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	18.155.000,00						-	19.970.500,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	51.000.000,00						-	56.100.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	600.000,00						-	440.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	600.000,00						-	440.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	168.119.000,00						-	165.569.780,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.005.750,00						-	8.438.447,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.671.315,00						-	9.211.740,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						600.000,00							440.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	440.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						600.000,00							440.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	440.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						18.155.000,00							19.970.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	12 Unit	18.155.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	19.970.500,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						168.119.000,00							165.569.780,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	168.119.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	165.569.780,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						51.000.000,00							56.100.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	51.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	56.100.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.005.750,00							8.438.447,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.005.750,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.438.447,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.671.315,00							9.211.740,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.671.315,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	9.211.740,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					ASN Bagian Umum		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					ASN Bagian Umum		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	951.792.000,00						-	1.035.207.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.389.760.888,00						-	2.482.112.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.800.000,00							11.660.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	11.660.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						825.796.000,00							905.207.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	825.796.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	905.207.600,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.853.077.464,00							1.922.976.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.853.077.464,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.922.976.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					ASN Bagian Umum		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					ASN Bagian Umum		2.703.049.048,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	600.000,00						-	66.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.585.846.800,00						-	1.738.224.048,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	732.925.700,00						-	828.165.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	600.000,00						-	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.400.000,00						-	65.160.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						664.957.600,00							730.015.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	664.957.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	730.015.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.567.846.800,00							1.701.986.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	1.567.846.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.701.986.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						600.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	10 Unit	600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.500.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.500.000,00							33.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	50 Unit	30.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	33.550.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	66.000.000,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.211.174.310,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.440.186.553,00	
		-						2.211.174.310,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2.440.186.553,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	1.542.354.400,00						-	1.696.589.840,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	206.775.910,00						-	227.137.913,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	160.000.000,00						-	176.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	302.044.000,00						-	340.458.800,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						206.775.910,00							227.137.913,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	24 Orang/Bulan	206.775.910,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	227.137.913,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						302.044.000,00							340.458.800,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	4 Paket	302.044.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	340.458.800,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						160.000.000,00							176.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	160.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	176.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.542.354.400,00							1.696.589.840,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	24 Orang/Bulan	1.542.354.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.696.589.840,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						6.311.444.809,00					ASN Bagian Umum		6.949.783.213,00	
		-						6.311.444.809,00					ASN Bagian Umum		6.949.783.213,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.817.246.600,00						-	1.993.471.260,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	2.952.910.109,00						-	3.260.345.043,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	1.541.288.100,00						-	1.695.966.910,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.817.246.600,00							1.993.471.260,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.817.246.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.993.471.260,00	Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.541.288.100,00							1.695.966.910,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	1.541.288.100,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.695.966.910,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						2.952.910.109,00							3.260.345.043,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	2.952.910.109,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.260.345.043,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.522.914.600,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.675.481.060,00	
		-						1.522.914.600,00					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.675.481.060,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	1.130.250.600,00						-	1.243.550.660,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	181.922.000,00						-	200.114.200,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	210.742.000,00						-	231.816.200,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.130.250.600,00							1.243.550.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	12 Laporan	1.130.250.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	1.243.550.660,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						181.922.000,00							200.114.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	12 Laporan	181.922.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	200.114.200,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						210.742.000,00							231.816.200,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	12 Laporan	210.742.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	231.816.200,00	Bagian Umum
		Bagian Pemerintahan						778.419.000,00							1.432.799.508,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						778.419.000,00							1.432.799.508,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						778.419.000,00							1.432.799.508,00	
149.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	71.880.000,00						-	86.256.000,00	
			-	-		-	-	198.522.000,00						-	330.166.108,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103.756.300,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		163.803.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						103.756.300,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		163.803.800,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	80.950.000,00						-	140.997.500,00	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						80.950.000,00							140.997.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	3 Laporan	80.950.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	140.997.500,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Bagian Pemerintahan		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Bagian Pemerintahan		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						71.880.000,00							86.256.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	71.880.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	86.256.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Pemerintahan		296.313.000,00	
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Pemerintahan		296.313.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.368.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	5.368.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					ASN Bagian Pemerintahan		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					ASN Bagian Pemerintahan		3.079.421.527,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.953.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.953.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.535.000,00							17.851.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.535.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	17.851.200,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.400.000,00							5.026.360,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.400.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.026.360,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.316.000,00							88.053.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.316.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	88.053.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					ASN Bagian Pemerintahan		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					ASN Bagian Pemerintahan		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.389.760.888,00						-	2.482.112.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	24.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					ASN Bagian Pemerintahan		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					ASN Bagian Pemerintahan		2.703.049.048,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	1.585.846.800,00						-	1.738.224.048,00	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							36.238.048,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	18.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	36.238.048,00	Bagian Pemerintahan
150.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						4.182.344.800,00							7.368.491.243,00	
			-	-		-	-	508.017.000,00						-	1.001.377.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						481.148.000,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		953.618.000,00	
		-						481.148.000,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		953.618.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	397.368.000,00						-	804.658.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	83.780.000,00						-	148.960.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						397.368.000,00							804.658.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	9 Dokumen	397.368.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	804.658.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						83.780.000,00							148.960.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	2 Dokumen	83.780.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	148.960.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						26.869.000,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		47.759.400,00	
		-						26.869.000,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		47.759.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	26.869.000,00						-	47.759.400,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						26.869.000,00							47.759.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	15 Dokumen	26.869.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	47.759.400,00	Bagian Pemerintahan
		Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat						4.231.451.400,00							5.816.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						4.231.451.400,00							5.816.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						4.231.451.400,00							5.816.000.000,00	
151.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	195.180.000,00						-	200.000.000,00	
			-	-		-	-	762.686.400,00						-	1.041.000.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						195.180.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	195.180.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		296.313.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		296.313.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.701.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	8.701.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-		-	30.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		3.079.421.527,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.913.600,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.913.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.637.600,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	19.637.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.799.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	5.799.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	8.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						112.224.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	112.224.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	300.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	951.792.000,00						-	1.035.207.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.389.760.888,00						-	2.482.112.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	3.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.996.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	125.996.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	130.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						444.350.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	444.350.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	500.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					ASN Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat		2.703.049.048,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	732.925.700,00						-	828.165.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.400.000,00						-	65.160.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						30.265.200,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	30.265.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	60.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.300.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	7.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	10.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
152.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						4.182.344.800,00							7.368.491.243,00	
			-	-		-	-	3.012.960.200,00						-	4.215.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						3.012.960.200,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		4.215.000.000,00	
		-						3.012.960.200,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		4.215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	146.603.400,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	-	2.853.878.400,00						-	4.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	12.478.400,00						-	15.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						146.603.400,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	4 Dokumen	146.603.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						12.478.400,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	2 Dokumen	12.478.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	15.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						2.853.878.400,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-		-	10 Dokumen	2.853.878.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	4.000.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
153.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						830.590.400,00							873.712.904,00	
			-	-		-	-	260.624.800,00						-	300.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						260.624.800,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		300.000.000,00	
		-						260.624.800,00					Masyarakat Kabupaten Tana Tidung		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	56.828.400,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	-	12.218.400,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	-	191.578.000,00						-	200.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						56.828.400,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	2 Dokumen	56.828.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	80.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						191.578.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	4 Laporan	191.578.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						12.218.400,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-		-	2 Dokumen	12.218.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	20.000.000,00	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Bagian Hukum						849.998.200,00							2.841.302.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						825.998.200,00							2.817.302.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						825.998.200,00							2.817.302.000,00	
154.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	91.920.000,00						-	124.680.000,00	
			-	-		-	-	72.710.600,00						-	540.508.157,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Bagian Hukum		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Bagian Hukum		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						91.920.000,00							124.680.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	91.920.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	124.680.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Hukum		296.313.000,00	
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Hukum		296.313.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						16.629.000,00							49.191.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	16.629.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	49.191.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					ASN Bagian Hukum		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					ASN Bagian Hukum		3.079.421.527,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.789.500,00							31.510.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.789.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	31.510.600,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.363.400,00							38.924.935,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	6.363.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	38.924.935,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.380.700,00							26.584.582,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	6.380.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	26.584.582,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						33.548.000,00							368.717.040,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	33.548.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	368.717.040,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					ASN Bagian Hukum		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					ASN Bagian Hukum		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					ASN Bagian Hukum		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					ASN Bagian Hukum		2.703.049.048,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	732.925.700,00						-	828.165.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.400.000,00						-	65.160.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.970.000,00							3.970.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	3.970.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.970.000,00	Bagian Hukum
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.030.000,00							17.610.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	2.030.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	17.610.000,00	Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
155.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						4.182.344.800,00							7.368.491.243,00	
			-	-		-	-	661.367.600,00						-	2.152.113.843,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						661.367.600,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		2.152.113.843,00	
		-						661.367.600,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		2.152.113.843,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	522.262.200,00						-	1.219.482.249,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	48.401.400,00						-	543.913.814,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	90.704.000,00						-	388.717.780,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						48.401.400,00							543.913.814,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	420 Dokumen	48.401.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	543.913.814,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						522.262.200,00							1.219.482.249,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	1 Kasus	522.262.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.219.482.249,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						90.704.000,00							388.717.780,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	420 Dokumen	90.704.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	388.717.780,00	Bagian Hukum
	X							24.000.000,00							24.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						24.000.000,00							24.000.000,00	
156.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.000.000,00							24.000.000,00	
			-	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.000.000,00					ASN Bagian Hukum		24.000.000,00	
		-						24.000.000,00					ASN Bagian Hukum		24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	24.000.000,00						-	24.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	24.000.000,00	Bagian Hukum
		Bagian Organisasi						500.000.000,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						500.000.000,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						500.000.000,00							0,00	
157.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	85.792.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	414.208.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					ASN Bagian Organisasi		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					ASN Bagian Organisasi		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						85.792.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	85.792.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Organisasi		296.313.000,00	
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Organisasi		296.313.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						19.280.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	19.280.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					ASN Bagian Organisasi		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					ASN Bagian Organisasi		3.079.421.527,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.433.500,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	17.433.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.040.026,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	21.040.026,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.011.410,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	10.011.410,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						26.616.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	26.616.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					ASN Bagian Organisasi		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					ASN Bagian Organisasi		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.389.760.888,00						-	2.482.112.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.934.464,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	30.934.464,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					ASN Bagian Organisasi		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					ASN Bagian Organisasi		2.703.049.048,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.400.000,00						-	65.160.000,00	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	3.570.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						283.322.600,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
		-						283.322.600,00					Organisasi Perangkat Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	32.330.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	93.990.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	94.495.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	62.507.200,00						-	0,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						93.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	10 Dokumen	93.990.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						62.507.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Laporan	62.507.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						94.495.400,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	2 Dokumen	94.495.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						32.330.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	1 Dokumen	32.330.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	0,00	Bagian Organisasi
		Bagian Administrasi Pembangunan						992.759.360,00							996.459.404,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						992.759.360,00							996.459.404,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						992.759.360,00							996.459.404,00	
158.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.771.661.340,00							35.006.932.156,00	
			Indeks Kematangan Organisasi	-		-	86,00	111.017.800,00						-	107.539.800,00	
			-	-		-	-	311.775.960,00						-	315.206.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						103.756.300,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung		163.803.800,00	
		-						103.756.300,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung		163.803.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	7.384.000,00						-	7.384.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	15.422.300,00						-	15.422.300,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.384.000,00							7.384.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	7.384.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	7.384.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.422.300,00							15.422.300,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	15.422.300,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	15.422.300,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.913.947.832,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung		13.897.243.888,00	
		-						13.913.947.832,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung		13.897.243.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	743.932.000,00						-	730.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	8.689.400,00						-	8.689.400,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	11.608.400,00						-	8.130.400,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.720.000,00							90.720.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	3 Dokumen	90.720.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	90.720.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.689.400,00							8.689.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	8.689.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.689.400,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.608.400,00							8.130.400,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	12 Laporan	11.608.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.130.400,00	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						251.536.000,00					ASN Bagian Administrasi Pembangunan		296.313.000,00	
		-						251.536.000,00					ASN Bagian Administrasi Pembangunan		296.313.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	71.208.000,00						-	119.042.500,00	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	12 Orang	3.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.190.688.436,00					Bagian Administrasi Pembangunan		3.079.421.527,00	
		-						2.190.688.436,00					Bagian Administrasi Pembangunan		3.079.421.527,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	823.827.000,00						-	1.407.892.540,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	462.899.526,00						-	528.817.785,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	177.661.510,00						-	215.098.122,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.446.400,00						-	127.554.480,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.500.000,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	22.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	22.500.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						42.491.400,00							42.498.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	42.491.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	42.498.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.478.400,00							1.478.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.478.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.478.400,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						141.868.000,00							147.108.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	2 Laporan	141.868.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	147.108.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.362.352.888,00					Bagian Administrasi Pembangunan		3.541.479.600,00	
		-						3.362.352.888,00					Bagian Administrasi Pembangunan		3.541.479.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.389.760.888,00						-	2.482.112.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.800.000,00						-	24.160.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	2.500.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						37.398.960,00							35.136.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	37.398.960,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	35.136.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.367.372.500,00					Bagian Administrasi Pembangunan		2.703.049.048,00	
		-						2.367.372.500,00					Bagian Administrasi Pembangunan		2.703.049.048,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	732.925.700,00						-	828.165.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.400.000,00						-	65.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.732.900,00							34.180.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	8 Unit	33.732.900,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	34.180.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
159.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						830.590.400,00							873.712.904,00	
			-	-		-	-	569.965.600,00						-	573.712.904,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						138.124.700,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		141.824.700,00	
		-						138.124.700,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		141.824.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	3.700.000,00						-	3.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	100.069.500,00						-	103.769.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	34.355.200,00						-	34.355.200,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						3.700.000,00							3.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	3.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.700.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						34.355.200,00							34.355.200,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	1 Laporan	34.355.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	34.355.200,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						100.069.500,00							103.769.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	1 Laporan	100.069.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	103.769.500,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						431.840.900,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		431.888.204,00	
		-						431.840.900,00					Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		431.888.204,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	106.956.300,00						-	106.961.604,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	298.550.300,00						-	313.750.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	26.334.300,00						-	11.176.300,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						298.550.300,00							313.750.300,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	298.550.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	313.750.300,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						106.956.300,00							106.961.604,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	106.956.300,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	106.961.604,00	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						26.334.300,00							11.176.300,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	167 Orang	26.334.300,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	11.176.300,00	Bagian Administrasi Pembangunan
		Sekretariat DPRD						31.050.000.000,00							35.341.596.825,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						31.050.000.000,00							35.341.596.825,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						31.050.000.000,00							35.341.596.825,00	
160.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						18.370.873.500,00							19.382.623.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-	-		-	-	18.370.873.500,00						-	19.382.623.925,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.760.000,00					-		57.604.000,00	
		-						32.760.000,00					-		57.604.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	32.760.000,00						-	57.604.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						32.760.000,00							57.604.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	32.760.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	57.604.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.247.384.050,00					-		4.839.963.200,00	
		-						4.247.384.050,00					-		4.839.963.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	4.247.384.050,00						-	4.839.963.200,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.247.384.050,00							4.839.963.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	280 Orang/bulan	4.247.384.050,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.839.963.200,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						199.700.000,00					-		296.776.000,00	
		-						199.700.000,00					-		296.776.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	199.700.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	86.776.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						199.700.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	199.700.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	210.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							86.776.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Tana Tidung	-	-	-		-	86.776.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						350.235.400,00					-		612.691.900,00	
		-						350.235.400,00					-		612.691.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	42.484.600,00						-	151.781.100,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	193.245.800,00						-	340.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	53.311.000,00						-	55.956.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	61.194.000,00						-	64.304.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						61.194.000,00							64.304.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	61.194.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	64.304.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						53.311.000,00							55.956.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	53.311.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	55.956.800,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						42.484.600,00							151.781.100,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	4 Laporan	42.484.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	151.781.100,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						193.245.800,00							340.650.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	193.245.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	340.650.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		310.000.000,00	
		-						0,00					-		310.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	310.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	310.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						408.795.750,00					-		525.208.525,00	
		-						408.795.750,00					-		525.208.525,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	153.492.950,00						-	267.408.525,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	239.392.800,00						-	240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.110.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.800.000,00						-	4.800.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.800.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	4.800.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.492.950,00							267.408.525,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	153.492.950,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	267.408.525,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.110.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	11.110.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	13.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						239.392.800,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	239.392.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	240.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.600.000,00					-		195.920.000,00	
		-						158.600.000,00					-		195.920.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	145.200.000,00						-	180.920.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	13.400.000,00						-	15.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.200.000,00							180.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	145.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	180.920.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.400.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	13.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	15.000.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						12.870.304.300,00					-		12.161.104.300,00	
		-						12.870.304.300,00					-		12.161.104.300,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	-	12.870.304.300,00						-	12.161.104.300,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						12.870.304.300,00							12.161.104.300,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-		-	20 Orang/Bulan	12.870.304.300,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.161.104.300,00	Sekretariat DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						103.094.000,00					-		383.356.000,00	
		-						103.094.000,00					-		383.356.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	-	103.094.000,00						-	383.356.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						103.094.000,00							383.356.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		-	12 Laporan	103.094.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	383.356.000,00	Sekretariat DPRD
161.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						12.679.126.500,00							15.958.972.900,00	
			-	-		-	-	12.429.126.500,00						-	15.354.036.900,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						485.288.000,00					-		1.573.827.000,00	
		-						485.288.000,00					-		1.573.827.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	-	45.955.000,00						-	46.255.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	-	250.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	-	173.844.000,00						-	502.936.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	-	8.094.000,00						-	24.636.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	-	7.395.000,00						-	500.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						45.955.000,00							46.255.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-		-	6 Dokumen	45.955.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	46.255.000,00	Sekretariat DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						173.844.000,00							502.936.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-		-	2 Dokumen	173.844.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	502.936.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-		-	2 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						8.094.000,00							24.636.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-		-	1 Dokumen	8.094.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	24.636.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah						7.395.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-		-	0 Orang	7.395.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						158.830.000,00					-		260.692.000,00	
		-						158.830.000,00					-		260.692.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	-	33.060.000,00						-	44.902.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	-	53.437.500,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	-	15.051.000,00						-	44.936.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	-	8.994.000,00						-	25.918.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	-	33.107.500,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	-	15.180.000,00						-	44.936.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						15.051.000,00							44.936.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-		-	1 Dokumen	15.051.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	44.936.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						15.180.000,00							44.936.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-		-	1 Dokumen	15.180.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	44.936.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						33.060.000,00							44.902.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-		-	1 Dokumen	33.060.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	44.902.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						53.437.500,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-		-	1 Dokumen	53.437.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	60.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						8.994.000,00							25.918.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-		-	2 Dokumen	8.994.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.918.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						33.107.500,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-		-	1 Dokumen	33.107.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	40.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						26.217.000,00					-		91.090.000,00	
		-						26.217.000,00					-		91.090.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	-	8.804.000,00						-	26.918.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	-	8.664.000,00						-	26.036.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	-	8.749.000,00						-	38.136.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						8.664.000,00							26.036.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-		-	12 Laporan	8.664.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	26.036.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						8.804.000,00							26.918.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-		-	12 Laporan	8.804.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	26.918.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						8.749.000,00							38.136.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-		-	1 Dokumen	8.749.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	38.136.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						407.626.000,00					-		767.687.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						407.626.000,00					-		767.687.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	-	0,00						-	241.233.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	-	9.695.500,00						-	41.318.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	-	20.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	-	19.930.500,00						-	31.136.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	-	108.000.000,00						-	144.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						0,00							241.233.900,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	241.233.900,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-		-	3 Orang	250.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						108.000.000,00							144.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-		-	3 Orang	108.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	144.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						9.695.500,00							41.318.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	9.695.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	41.318.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						19.930.500,00							31.136.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-		-	12 Dokumen	19.930.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	31.136.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						20.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-		-	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	60.000.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						4.916.671.000,00					-		4.858.066.000,00	
		-						4.916.671.000,00					-		4.858.066.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	-	4.906.582.000,00						-	4.775.728.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	-	10.089.000,00						-	34.638.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	-	0,00						-	47.700.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						0,00							47.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	47.700.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						10.089.000,00							34.638.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-		-	3 Dokumen	10.089.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	34.638.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						4.906.582.000,00							4.775.728.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-		-	3 Dokumen	4.906.582.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	4.775.728.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						10.002.500,00					-		10.074.000,00	
		-						10.002.500,00					-		10.074.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	-	10.002.500,00						-	10.074.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						10.002.500,00							10.074.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-		-	1 Laporan	10.002.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.074.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						6.674.492.000,00					-		8.397.536.000,00	
		-						6.674.492.000,00					-		8.397.536.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	-	6.660.381.000,00						-	8.351.667.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	-	14.111.000,00						-	45.869.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						6.660.381.000,00							8.351.667.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-		-	12 Dokumen	6.660.381.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	8.351.667.000,00	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						14.111.000,00							45.869.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-		-	12 Laporan	14.111.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	45.869.000,00	Sekretariat DPRD
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan						10.644.442.026,00							19.166.381.949,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.644.442.026,00							19.166.381.949,00	
	5.01	PERENCANAAN						10.029.838.226,00							18.066.381.949,00	
162.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.259.390.226,00							9.146.381.949,00	
			Nilai AKIP	-		-	80 Nilai	7.224.390.226,00						-	8.646.381.949,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Kepuasan ASN Bappeda dan Litbang Terhadap Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	7.224.390.226,00						-	8.646.381.949,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.102.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		170.000.000,00	
		-						42.102.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		170.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	22.102.000,00						-	70.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						22.102.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	29 Laporan	22.102.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						10.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	31 Data	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.403.797.026,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		6.911.381.949,00	
		-						6.403.797.026,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		6.911.381.949,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	173.160.000,00						-	240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	46.958.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	6.183.679.026,00						-	6.666.381.949,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.183.679.026,00							6.666.381.949,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	602 Orang/bulan	6.183.679.026,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	6.666.381.949,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						173.160.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	9 Dokumen	173.160.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	240.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						46.958.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	13 Dokumen	46.958.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.325.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		300.000.000,00	
		-						109.325.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	99.325.000,00						-	200.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						99.325.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	99.325.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						252.343.750,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		580.000.000,00	
		-						252.343.750,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		580.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	178.186.000,00						-	295.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	59.157.750,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	30.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						59.157.750,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	59.157.750,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat penguatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						178.186.000,00							295.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	178.186.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	295.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.013.200,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		370.000.000,00	
		-						18.013.200,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		370.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	10.453.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.560.200,00						-	100.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.453.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	10.453.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-		-	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.560.200,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	7.560.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152.629.250,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		335.000.000,00	
		-						152.629.250,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	147.629.250,00						-	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						147.629.250,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	147.629.250,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	180.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyang dang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						281.180.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		480.000.000,00	
		-						281.180.000,00					ASN dan PPPK Bappedalitbang		480.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	253.580.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	27.600.000,00						-	40.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						253.580.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	253.580.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.600.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	25 Unit	27.600.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
163.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						2.107.800.000,00							6.220.000.000,00	
			Persentase Capaian RKPD Dengan Kategori Sangat Tinggi	-		-	90 %	10.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Persentase Pagu Indikatif yang mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah	-		-	68 %	10.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Persentase Pagu Indikatif yang mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah (%)	-		-	68 %	2.057.800.000,00						-	4.170.000.000,00	
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RPJMD	-		-	100 %	10.000.000,00						-	1.250.000.000,00	
			Persentase Tingkat Keselarasan Program Prioritas RKPD dengan Program Prioritas RPJMD (%)	-		-	100 %	2.057.800.000,00						-	4.170.000.000,00	
			Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi	-		-	100 %	10.000.000,00						-	250.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.057.800.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		4.570.000.000,00	
		-						2.057.800.000,00					Organisasi Perangkat Daerah		4.570.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	-	69.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	-	64.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	-	65.600.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R KPD)	-		-	-	1.251.840.000,00						-	2.570.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-		-	-	607.360.000,00						-	400.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						607.360.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-		-	1 Dokumen	607.360.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						64.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-		-	1 Berita Acara	64.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						69.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	69.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						65.600.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	-		-	1 Berita Acara	65.600.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						1.251.840.000,00							2.570.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	-		-	1 Dokumen	1.251.840.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	2.570.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						30.000.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
		-						30.000.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-		-	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-		-	33 Orang	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	-		-	5 Buku	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						20.000.000,00					Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	-	10.000.000,00						-	550.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						10.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	550.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						10.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	-		-	17 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
164.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						662.648.000,00							2.700.000.000,00	
			Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Kategori Sangat Baik	-		-	90 %	213.462.000,00						-	640.000.000,00	
			Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Kategori Sangat Baik	-		-	90 %	195.894.000,00						-	320.000.000,00	
			Persentase Capaian Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah Bidang Urusan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Kategori Sangat Baik	-		-	90 %	183.292.000,00						-	530.000.000,00	
			Persentase Keselarasan Renja PD Bidang Urusan Pemerinatahan ,SDM dan Kesejahteraan Rakyat terhadap RKPD	-		-	100 %	183.292.000,00						-	530.000.000,00	
			Persentase Keselarasan Renja PD Bidang Urusan Perekonomian ,SDA Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap RKPD	-		-	100 %	195.894.000,00						-	320.000.000,00	
			Persentase Keselarasan Renstra PD Bidang Urusan Perekonomian ,SDA Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap RPJMD	-		-	100 %	213.462.000,00						-	640.000.000,00	
			Persentase potensi anggaran non APBD yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan yang diperoleh	-		-	78 %	195.894.000,00						-	320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase potensi anggaran non APBD yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan yang diperoleh	-		-	78 %	386.754.000,00						-	950.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						233.462.000,00					Perangkat Daerah		930.000.000,00	
		-						233.462.000,00					Perangkat Daerah		930.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	10.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-		-	-	74.544.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	-	98.748.000,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	-	30.170.000,00						-	120.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						30.170.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-		-	12 Laporan	30.170.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						98.748.000,00							170.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-		-	1 Laporan	98.748.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						10.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						74.544.000,00							170.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	-		1 Laporan	74.544.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						213.292.000,00					Perangkat Daerah		850.000.000,00	
		-						213.292.000,00					Perangkat Daerah		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	-		-	10.000.000,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	-	10.000.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	-	66.476.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	-	106.816.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	-	10.000.000,00						-	200.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							110.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	110.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						10.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						106.816.000,00							200.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-		-	1 Laporan	106.816.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						66.476.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-		-	12 Laporan	66.476.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						10.000.000,00							200.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						215.894.000,00					Perangkat Daerah		920.000.000,00	
		-						215.894.000,00					Perangkat Daerah		920.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	10.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	-	106.816.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	-	78.578.000,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	-	500.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	-	10.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	-	10.000.000,00						-	200.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						78.578.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-		-	12 Laporan	78.578.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						10.000.000,00							200.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						106.816.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-		-	1 Dokumen	106.816.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-		-	12 Laporan	500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						10.000.000,00							200.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						614.603.800,00							1.100.000.000,00	
165.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						614.603.800,00							1.100.000.000,00	
			Jumlah Inovasi yang diciptakan/dikembangkan /dan ditindaklanjuti	-		-	10 Angka	574.603.800,00						-	360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Inovasi Yang didesiminasi	-		-	11 %	574.603.800,00						-	360.000.000,00	
			Persentase Inovasi yang terfasilitasi HAKI	-		-	5 %	493.009.900,00						-	250.000.000,00	
			Persentase Inovasi yang terfasilitasi HAKI	-		-	5 %	91.593.900,00						-	360.000.000,00	
			Persentase Kajian Kelitbangan Yang diintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	80 %	574.603.800,00						-	360.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						493.009.900,00					Perangkat Daerah, Akademisi dan Masyarakat		550.000.000,00	
		-						493.009.900,00					Perangkat Daerah, Akademisi dan Masyarakat		550.000.000,00	
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-		-	-	316.182.900,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	90.680.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	33.875.000,00						-	150.000.000,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	-	42.272.000,00						-	100.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						42.272.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	12 Laporan	42.272.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						90.680.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	12 Laporan	90.680.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						33.875.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	12 Laporan	33.875.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-		-	1 Pelatihan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangun sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						316.182.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-		-	1 Dokumen	316.182.900,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						121.593.900,00					Perangkat Daerah, Akademisi dan Masyarakat		550.000.000,00	
		-						121.593.900,00					Perangkat Daerah, Akademisi dan Masyarakat		550.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	-		-	-	56.457.400,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	-	10.000.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	-		-	-	25.136.500,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah						10.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						10.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat peman- gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan- dang disabilitas.	-		-	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						56.457.400,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	-	-		2 Laporan	56.457.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						25.136.500,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	-		-	12 Laporan	25.136.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	-		-	1 Naskah	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						128.583.110.556,00							103.483.809.313,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						128.583.110.556,00							103.483.809.313,00	
	5.02	KEUANGAN						128.583.110.556,00							103.483.809.313,00	
166.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						30.473.756.235,00							18.344.357.926,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai AKIP OPD	-		-	75 Poin	30.463.686.235,00						-	18.344.357.926,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	83 %	30.463.686.235,00						-	18.344.357.926,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.140.400,00					Pegawai BPKAD		26.352.318,00	
		-						22.140.400,00					Pegawai BPKAD		26.352.318,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	2.000.400,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.070.000,00						-	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	10.070.000,00						-	13.352.318,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.070.000,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	10.070.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.070.000,00							13.352.318,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	10.070.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	13.352.318,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.000.400,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	166 Data	2.000.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.431.620.819,00					Pegawai BPKAD		15.755.146.237,00	
		-						28.431.620.819,00					Pegawai BPKAD		15.755.146.237,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	119.010.000,00						-	689.834.132,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	28.312.610.819,00						-	15.065.312.105,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28.312.610.819,00							15.065.312.105,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1064 Orang/bulan	28.312.610.819,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.065.312.105,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						119.010.000,00							689.834.132,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	119.010.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	689.834.132,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76.170.000,00					Pegawai BPKAD		482.174.129,00	
		-						76.170.000,00					Pegawai BPKAD		482.174.129,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	56.000.000,00						-	56.869.888,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	20.170.000,00						-	425.304.241,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						56.000.000,00							56.869.888,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	56.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	56.869.888,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.170.000,00							425.304.241,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	20.170.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	425.304.241,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						770.986.400,00					Pegawai BPKAD		785.725.019,00	
		-						770.986.400,00					Pegawai BPKAD		785.725.019,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.300.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	19.092.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	377.914.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	315.056.000,00						-	320.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	19.810.000,00						-	34.249.895,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.815.400,00						-	10.475.124,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	34.999.000,00						-	100.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.815.400,00							10.475.124,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	2.815.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.475.124,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.999.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	34.999.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						315.056.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	315.056.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	320.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.810.000,00							34.249.895,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	19.810.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	34.249.895,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.300.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	24 Dokumen	1.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						377.914.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	377.914.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						19.092.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	5 Dokumen	19.092.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	20.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						27.312.616,00					Pegawai BPKAD		25.000.000,00	
		-						27.312.616,00					Pegawai BPKAD		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	27.312.616,00						-	25.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						27.312.616,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	56 Unit	27.312.616,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						998.996.000,00					Pegawai BPKAD		1.008.593.090,00	
		-						998.996.000,00					Pegawai BPKAD		1.008.593.090,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	932.696.000,00						-	940.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	48.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	18.300.000,00						-	18.593.090,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						18.300.000,00							18.593.090,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	18.300.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.593.090,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						932.696.000,00							940.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	932.696.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	940.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						48.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146.530.000,00					Pegawai BPKAD		261.367.133,00	
		-						146.530.000,00					Pegawai BPKAD		261.367.133,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	118.930.000,00						-	231.367.133,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	27.600.000,00						-	30.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						118.930.000,00							231.367.133,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	4 Unit	118.930.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	231.367.133,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.600.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	23 Unit	27.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
167.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						96.836.440.421,00							81.816.779.631,00	
			Jumlah OPD yang Alokasi Belanjanya Sesuai dengan Target Kinerjanya	-		-	34 OPD	1.417.980.600,00						-	3.085.410.157,00	
			Jumlah Tahapan Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan sesuai SOP	-		-	3 Kegiatan	450.064.400,00						-	530.000.000,00	
			Persentase dana di kas daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	-		-	100 %	95.018.453.321,00						-	77.098.361.921,00	
			Persentase Ketepatan waktu OPD dalam penyampaian laporan keuangan daerah	-		-	100 %	400.006.500,00						-	1.633.007.553,00	
			Tingkat Ketepatan Kapasistas Real Keuangan Daerah Yang Dianalisis	-		-	95 %	1.417.980.600,00						-	3.085.410.157,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.417.980.600,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		3.085.410.157,00	
		-						1.417.980.600,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		3.085.410.157,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	-	27.101.000,00						-	266.197.274,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	-	43.337.400,00						-	264.768.756,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	-	414.248.600,00						-	525.177.382,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	821.620.000,00						-	1.385.520.515,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	-	30.023.400,00						-	291.541.485,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	81.650.200,00						-	352.204.745,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						27.101.000,00							266.197.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	27.101.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	266.197.274,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						43.337.400,00							264.768.756,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-		-	2 Dokumen	43.337.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	264.768.756,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						30.023.400,00							291.541.485,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-	1 Dokumen	30.023.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	291.541.485,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						81.650.200,00							352.204.745,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	2 Dokumen	81.650.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	352.204.745,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						414.248.600,00							525.177.382,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-	2 Dokumen	414.248.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	525.177.382,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						821.620.000,00							1.385.520.515,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	200 Orang	821.620.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.385.520.515,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						450.064.400,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		530.000.000,00	
		-						450.064.400,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		530.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	-	49.700.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	-	58.592.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	-	341.772.400,00						-	400.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						49.700.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-		-	12 Dokumen	49.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						341.772.400,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-		-	12 Laporan	341.772.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	400.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						58.592.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-		-	12 Dokumen	58.592.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	70.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						400.006.500,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		1.633.007.553,00	
		-						400.006.500,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		1.633.007.553,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-		-	-	56.526.000,00						-	124.137.326,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	-	-	88.039.000,00						-	278.992.877,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	-	-	-	103.383.500,00						-	607.841.347,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	112.902.000,00						-	372.132.067,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	39.156.000,00						-	249.903.936,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						56.526.000,00							124.137.326,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	-	-	408 Dokumen		56.526.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	124.137.326,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						103.383.500,00							607.841.347,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	-	-	35 Laporan		103.383.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	607.841.347,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						39.156.000,00							249.903.936,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	39.156.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	249.903.936,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						88.039.000,00							278.992.877,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-		-	1 Dokumen	88.039.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	278.992.877,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						112.902.000,00							372.132.067,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	102 Orang	112.902.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	372.132.067,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						94.568.388.921,00					-		76.568.361.921,00	
		-						94.568.388.921,00					-		76.568.361.921,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	-	84.019.667.900,00						-	74.019.667.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	548.721.021,00						-	548.694.021,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	-	10.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						84.019.667.900,00							74.019.667.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-	3 Laporan	84.019.667.900,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	74.019.667.900,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						10.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-	2 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Jasa Giro Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						548.721.021,00							548.694.021,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	548.721.021,00	Kab. Tana Tidung	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	548.694.021,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
168.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						480.253.500,00							1.487.604.414,00	
			Nilai MCP KPK terkait BMD	-		-	90 Poin	480.253.500,00						-	1.457.604.414,00	
			Persentase OPD yang Asetnya yang diinformasikan dalam neraca laporan	-		-	96 %	480.253.500,00						-	1.457.604.414,00	
			Persentase Tindak Lanjut temuan BPK terkait BMD	-		-	92 %	480.253.500,00						-	1.457.604.414,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						480.253.500,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		1.487.604.414,00	
		-						480.253.500,00					Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung		1.487.604.414,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	-	58.777.000,00						-	175.864.726,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	2.010.000,00						-	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	-	46.740.000,00						-	429.852.436,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	-	75.604.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	-	22.262.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	-	16.440.100,00						-	235.448.164,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	-	49.842.000,00						-	183.330.411,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	-	30.604.000,00						-	164.791.677,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.960.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	25.508.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	-	6.675.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	-	142.831.400,00						-	142.817.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						142.831.400,00							142.817.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-		-	4 Dokumen	142.831.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	142.817.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						6.675.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	6.675.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						25.508.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-	29 Dokumen	25.508.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.010.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	2 Dokumen	2.010.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	2.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						75.604.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	34 Laporan	75.604.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						22.262.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-	10 Laporan	22.262.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						49.842.000,00							183.330.411,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-		-	4 Laporan	49.842.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	183.330.411,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						16.440.100,00							235.448.164,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-	2 Laporan	16.440.100,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	235.448.164,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						58.777.000,00							175.864.726,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-	3 Dokumen	58.777.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	175.864.726,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						30.604.000,00							164.791.677,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-		-	34 Laporan	30.604.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	164.791.677,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						46.740.000,00							429.852.436,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	-		-	2 Laporan	46.740.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	429.852.436,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						2.960.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-	102 Orang	2.960.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
169.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						792.660.400,00							1.835.067.342,00	
			Jumlah Pajak daerah	-		-	4.740.369.56 6,5 Rupiah	786.920.400,00						-	1.835.067.342,00	
			Jumlah retribusi daerah	-		-	788.466.544, 19 Rupiah	786.920.400,00						-	1.835.067.342,00	
			Laju Pertumbuhan pajak daerah	-		-	3,8 %	786.920.400,00						-	1.835.067.342,00	
			Laju Pertumbuhan retribusi daerah	-		-	5 %	786.920.400,00						-	1.835.067.342,00	
			Persentase Pencapaian target retribusi daerah	-		-	87 %	786.920.400,00						-	1.835.067.342,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						792.660.400,00					Perangkat Daerah dan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Tidung		1.835.067.342,00	
		-						792.660.400,00					Perangkat Daerah dan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Tidung		1.835.067.342,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	189.304.000,00						-	82.453.752,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	-	49.437.760,00						-	190.811.437,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	-	3.349.800,00						-	173.661.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	-	5.740.000,00						-	44.605.129,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	-	5.740.000,00						-	87.827.967,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	185.533.840,00						-	173.661.862,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	-	123.768.400,00						-	281.561.771,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	-	24.735.600,00						-	8.410.579,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	-	55.439.000,00						-	414.719.388,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	-	41.712.000,00						-	11.314.352,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	-	74.920.000,00						-	293.561.020,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	-	32.980.000,00						-	72.478.508,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						189.304.000,00							82.453.752,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	1 Dokumen	189.304.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	82.453.752,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						55.439.000,00							414.719.388,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-	20 Laporan	55.439.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	414.719.388,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						32.980.000,00							72.478.508,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-		-	100 Unit	32.980.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	72.478.508,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						123.768.400,00							281.561.771,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-		-	4 Laporan	123.768.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	281.561.771,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						24.735.600,00							8.410.579,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-	4 Laporan	24.735.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.410.579,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						74.920.000,00							293.561.020,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-		-	5500 Obyek Pajak	74.920.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	293.561.020,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						5.740.000,00							87.827.967,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-		-	500 Dokumen	5.740.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	87.827.967,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						49.437.760,00							190.811.437,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-		-	116 Dokumen	49.437.760,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	190.811.437,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						5.740.000,00							44.605.129,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-		-	4 Dokumen	5.740.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	44.605.129,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						3.349.800,00							173.661.577,00	
		Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-		-	12 Dokumen	3.349.800,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	173.661.577,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						185.533.840,00							173.661.862,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	12 Laporan	185.533.840,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	173.661.862,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						41.712.000,00							11.314.352,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	41.712.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	11.314.352,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						4.906.282.957,00							8.117.656.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.903.992.957,00							8.033.408.700,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						4.869.975.957,00							7.894.371.092,00	
170.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.956.189.257,00							5.960.715.092,00	
			Nilai AKIP OPD	-		-	73 Angka	335.112.828,00						-	770.401.553,00	
			Nilai AKIP OPD	-		-	73 Angka	3.522.152.729,00						-	4.997.020.039,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	3.524.840.729,00						-	5.000.396.439,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 Persen	238.944.624,00						-	351.353.647,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	93.480.204,00						-	415.671.506,00	
			-	-		-	-	98.923.700,00						-	189.917.100,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.688.000,00					Seluruh ASN yang berada dilingkungan BKPSDM		6.752.800,00	
		-						2.688.000,00					Seluruh ASN yang berada dilingkungan BKPSDM		6.752.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.008.000,00						-	3.376.400,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	1.680.000,00						-	3.376.400,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.008.000,00							3.376.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	4 Dokumen	1.008.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	3.376.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.680.000,00							3.376.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	6 Laporan	1.680.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	3.376.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.522.152.729,00					Seluruh ASN yang berada dilingkungan BKPSDM		4.997.020.039,00	
		-						3.522.152.729,00					Seluruh ASN yang berada dilingkungan BKPSDM		4.997.020.039,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	124.080.000,00						-	142.560.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.398.072.729,00						-	4.854.460.039,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.398.072.729,00							4.854.460.039,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	34 Orang/bulan	3.398.072.729,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.854.460.039,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						124.080.000,00							142.560.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	3 Dokumen	124.080.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	142.560.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93.480.204,00					Seluruh ASN yang berada di Lingkungan BKPSDM		415.671.506,00	
		-						93.480.204,00					Seluruh ASN yang berada di Lingkungan BKPSDM		415.671.506,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	55.824.000,00						-	304.963.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.838.204,00						-	89.740.906,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	3.818.000,00						-	20.967.400,00	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.838.204,00							89.740.906,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	33.838.204,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	89.740.906,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.818.000,00							20.967.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	3.818.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	20.967.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55.824.000,00							304.963.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	55.824.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	304.963.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.743.700,00					-		70.097.100,00	
		-						5.743.700,00					-		70.097.100,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	804.900,00						-	9.651.900,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	4.938.800,00						-	60.445.200,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						804.900,00							9.651.900,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	2 Unit	804.900,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.651.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.938.800,00							60.445.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	4.938.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	60.445.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.944.624,00					Seluruh ASN yang berada di lingkungan BKPSDM		351.353.647,00	
		-						238.944.624,00					Seluruh ASN yang berada di lingkungan BKPSDM		351.353.647,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	206.510.160,00						-	192.406.752,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.934.464,00						-	144.956.895,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.500.000,00						-	13.990.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							13.990.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	13.990.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						206.510.160,00							192.406.752,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	206.510.160,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	192.406.752,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.934.464,00							144.956.895,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	30.934.464,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	144.956.895,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						93.180.000,00					-		119.820.000,00	
		-						93.180.000,00					-		119.820.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	76.730.000,00						-	106.720.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	16.450.000,00						-	13.100.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						76.730.000,00							106.720.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	76.730.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	106.720.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.450.000,00							13.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	16.450.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	13.100.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
171.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						913.786.700,00							1.933.656.000,00	
			persentase LayananAdministrasiKepegawaian	-		-	100 %	69.315.000,00						-	368.665.500,00	
			persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	-		-	100 %	225.287.000,00						-	775.960.000,00	
			persentase LayananAdministrasi Kepegawaian	-		-	100 %	614.964.700,00						-	777.056.500,00	
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	-		-	100 %	4.220.000,00						-	11.974.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						225.287.000,00					Seluruh ASN Kabupaten Tana Tidung		775.960.000,00	
		-						225.287.000,00					Seluruh ASN Kabupaten Tana Tidung		775.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	62.760.000,00						-	40.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	71.128.000,00						-	334.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	-		-	-	2.520.000,00						-	14.682.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	-	78.879.000,00						-	366.678.000,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						71.128.000,00							334.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	1 Dokumen	71.128.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	334.200.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						2.520.000,00							14.682.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	-		-	1 Laporan	2.520.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	14.682.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						78.879.000,00							366.678.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-		-	35 Lembaga	78.879.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	366.678.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						62.760.000,00							40.400.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	62.760.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	40.400.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						69.315.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		368.665.500,00	
		-						69.315.000,00					ASN Pemerintah Kabupaten Tana Tidung		368.665.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	-	39.993.000,00						-	45.159.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	-	12.600.000,00						-	18.250.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	-	16.722.000,00						-	305.256.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						39.993.000,00							45.159.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-		-	4 Dokumen	39.993.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	45.159.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						16.722.000,00							305.256.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-		-	300 Dokumen	16.722.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	305.256.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						12.600.000,00							18.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-		-	8 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	18.250.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						614.964.700,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		777.056.500,00	
		-						614.964.700,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		777.056.500,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-		-	-	18.535.000,00						-	144.626.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	-	100.000.000,00						-	275.614.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-		-	-	10.790.000,00						-	156.250.300,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	-	485.639.700,00						-	200.566.200,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						485.639.700,00							200.566.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	1 Dokumen	485.639.700,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	200.566.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						100.000.000,00							275.614.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-		-	4 Orang	100.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	275.614.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						10.790.000,00							156.250.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-		-	2 Dokumen	10.790.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	156.250.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						18.535.000,00							144.626.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-		-	6 Orang	18.535.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pambangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	144.626.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.220.000,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		11.974.000,00	
		-						4.220.000,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		11.974.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	-	4.220.000,00						-	11.974.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.220.000,00							11.974.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		-	6 Dokumen	4.220.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	11.974.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						34.017.000,00							139.037.608,00	
172.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						34.017.000,00							139.037.608,00	
			Persentase ASN yang memiliki kompetensi	-		-	100 %	34.017.000,00						-	139.037.608,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						34.017.000,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		139.037.608,00	
		-						34.017.000,00					Seluruh ASN yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung		139.037.608,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	-	1.800.000,00						-	106.820.608,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	-	32.217.000,00						-	32.217.000,00	
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						1.800.000,00							106.820.608,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	1.800.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	106.820.608,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						32.217.000,00							32.217.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-		-	4 Laporan	32.217.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	32.217.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	X							2.290.000,00							84.248.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.290.000,00							84.248.000,00	
173.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.290.000,00							84.248.000,00	
			Nilai AKIP OPD	-		-	73 Angka	2.290.000,00						-	84.248.000,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	2.290.000,00						-	84.248.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.290.000,00					Seluruh ASN yang berada di lingkungan BKPSDM		84.248.000,00	
		-						2.290.000,00					Seluruh ASN yang berada di lingkungan BKPSDM		84.248.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	2.290.000,00						-	84.248.000,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.290.000,00							84.248.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	6 Orang	2.290.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	84.248.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat Kabupaten						11.370.969.304,00							12.217.716.610,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						11.370.969.304,00							12.217.716.610,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						11.370.969.304,00							12.217.716.610,00	
174.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.872.893.004,00							6.707.097.410,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	83 Persen	5.872.893.004,00						-	6.685.459.410,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	95 Persen	5.872.893.004,00						-	6.685.459.410,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						69.854.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		70.243.200,00	
		-						69.854.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		70.243.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	16.746.000,00						-	21.638.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	21.956.000,00						-	26.967.200,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	31.152.000,00						-	21.638.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.956.000,00							26.967.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	21.956.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	26.967.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						31.152.000,00							21.638.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	31.152.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	21.638.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						16.746.000,00							21.638.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	10 Data	16.746.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	21.638.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.782.448.180,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		4.701.607.200,00	
		-						3.782.448.180,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		4.701.607.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	168.840.000,00						-	168.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	24.006.000,00						-	32.767.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	3.589.602.180,00						-	4.500.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.589.602.180,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	448 Orang/bulan	3.589.602.180,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						168.840.000,00							168.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	168.840.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	168.840.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						24.006.000,00							32.767.200,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	26 Laporan	24.006.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	32.767.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						423.340.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		314.740.000,00	
		-						423.340.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		314.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	-	10.748.000,00						-	15.748.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	58.688.000,00						-	72.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	353.904.000,00						-	226.544.000,00	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.748.000,00							15.748.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		-	2 Dokumen	10.748.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	15.748.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						353.904.000,00							226.544.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	32 Orang	353.904.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	226.544.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						58.688.000,00							72.448.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	32 Orang	58.688.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	72.448.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						804.412.881,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		859.913.610,00	
		-						804.412.881,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		859.913.610,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	361.546.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	300.780.500,00						-	308.952.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	88.330.000,00						-	104.680.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.804.843,00						-	20.902.848,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	32.951.538,00						-	25.378.362,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.804.843,00							20.902.848,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	20.804.843,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	20.902.848,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						32.951.538,00							25.378.362,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	4 Paket	32.951.538,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	25.378.362,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.780.500,00							308.952.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	300.780.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	308.952.400,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						88.330.000,00							104.680.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	88.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	104.680.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						361.546.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	361.546.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	400.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						164.744.199,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		150.077.800,00	
		-						164.744.199,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		150.077.800,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	9.990.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	154.754.199,00						-	100.077.800,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.990.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	4 Unit	9.990.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	50.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						154.754.199,00							100.077.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	154.754.199,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	100.077.800,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						330.323.744,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		328.745.600,00	
		-						330.323.744,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		328.745.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	104.304.000,00						-	104.520.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	206.019.744,00						-	204.225.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	20.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.304.000,00							104.520.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	104.304.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	104.520.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						206.019.744,00							204.225.600,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	206.019.744,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	204.225.600,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297.770.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		281.770.000,00	
		-						297.770.000,00					Inspektorat Kab. Tana Tidung		281.770.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	258.540.000,00						-	237.540.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	39.230.000,00						-	44.230.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						258.540.000,00							237.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	20 Unit	258.540.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	237.540.000,00	Inspektorat Kabupaten

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.230.000,00							44.230.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	39.230.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	44.230.000,00	Inspektorat Kabupaten
175.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						3.727.115.300,00							3.536.675.000,00	
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti Tepat Waktu	-		-	100 Persen	3.727.115.300,00						-	3.536.675.000,00	
			Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	-		-	69,33 Persen	1.222.053.000,00						-	1.355.131.200,00	
			Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	-		-	70 Persen	2.505.062.300,00						-	2.181.543.800,00	
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan	-		-	90 Persen	2.505.062.300,00						-	2.181.543.800,00	
			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan	-		-	90 Persen	1.222.053.000,00						-	1.355.131.200,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						2.505.062.300,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa Kab. Tana Tidung, BUMD/BLUD Kab. Tana Tidung, Masyarakat		2.181.543.800,00	
		-						2.505.062.300,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa Kab. Tana Tidung, BUMD/BLUD Kab. Tana Tidung, Masyarakat		2.181.543.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	-	458.428.000,00						-	412.828.400,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	-	249.730.800,00						-	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	-	502.575.500,00						-	415.891.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	-	406.599.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	234.889.000,00						-	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	-	416.452.000,00						-	352.824.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	-	236.388.000,00						-	100.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						234.889.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	36 Laporan	234.889.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	230.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						406.599.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-	30 Laporan	406.599.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	450.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						236.388.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-		-	20 Laporan	236.388.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						416.452.000,00							352.824.200,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-		-	20 Laporan	416.452.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	352.824.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						502.575.500,00							415.891.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-		-	32 Laporan	502.575.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	415.891.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						249.730.800,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-		-	1 Kesepakatan	249.730.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	220.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						458.428.000,00							412.828.400,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-		-	12 Dokumen	458.428.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	412.828.400,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.222.053.000,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa Kab. Tana Tidung, BUMD/BLUD Kab. Tana Tidung, Masyarakat		1.355.131.200,00	
		-						1.222.053.000,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa Kab. Tana Tidung, BUMD/BLUD Kab. Tana Tidung, Masyarakat		1.355.131.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	-	958.021.000,00						-	1.173.616.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	-	264.032.000,00						-	181.515.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						264.032.000,00							181.515.200,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	-		-	2 Laporan	264.032.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	181.515.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						958.021.000,00							1.173.616.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-		-	5 Laporan	958.021.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.173.616.000,00	Inspektorat Kabupaten
176.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						1.770.961.000,00							1.973.944.200,00	
			Persentase Penurunan Jumlah Temuan yang Berulang	-		-	20 Persen	1.770.961.000,00						-	1.973.944.200,00	
			Persentase Rekomendasi Pendampingan dan Asistensi yang Ditindaklanjuti	-		-	100 Persen	1.770.961.000,00						-	1.973.944.200,00	
			Tingkat Kepuasan Layanan dan Pendampingan Asistensi	-		-	95 Persen	1.770.961.000,00						-	1.973.944.200,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						783.154.800,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD dan Masyarakat Umum Kab. Tana Tidung		922.365.200,00	
		-						783.154.800,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD dan Masyarakat Umum Kab. Tana Tidung		922.365.200,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	-	410.574.800,00						-	466.985.200,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	-	372.580.000,00						-	455.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						372.580.000,00							455.380.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-		-	5 Rekomendasi	372.580.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	455.380.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						410.574.800,00							466.985.200,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	-		-	5 Rekomendasi	410.574.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	466.985.200,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						987.806.200,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD dan Masyarakat Umum Kab. Tana Tidung		1.051.579.000,00	
		-						987.806.200,00					Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, BLUD dan Masyarakat Umum Kab. Tana Tidung		1.051.579.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	-	390.670.200,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	-	177.158.000,00						-	151.579.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	-	132.558.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	-	287.420.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						287.420.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	29 perangkat daerah	287.420.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	300.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						132.558.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-		-	29 perangkat daerah	132.558.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						390.670.200,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-		-	3 Kegiatan	390.670.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	400.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						177.158.000,00							151.579.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-		-	2 perangkat daerah	177.158.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	151.579.000,00	Inspektorat Kabupaten
		Kecamatan Sesayap						2.962.092.785,00							5.279.069.280,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.962.092.785,00							5.279.069.280,00	
	7.01	KECAMATAN						2.962.092.785,00							5.279.069.280,00	
177.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.816.775.085,00							4.624.069.280,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	72.50 Nilai	2.809.792.585,00						-	4.573.069.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	72.50 Nilai	6.982.500,00						-	6.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	2.816.250.085,00						-	4.578.069.280,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.982.500,00					ASN Kecamatan Sesayap		11.000.000,00	
		-						6.982.500,00					ASN Kecamatan Sesayap		11.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	525.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.064.500,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.393.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.064.500,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	3.064.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.393.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	3.393.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						525.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	364 Data	525.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.589.957.365,00					ASN Kecamatan Sesayap		4.151.190.000,00	
		-						2.589.957.365,00					ASN Kecamatan Sesayap		4.151.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	89.580.000,00						-	101.190.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.500.377.365,00						-	4.050.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.500.377.365,00							4.050.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	364 Orang/bulan	2.500.377.365,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.050.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						89.580.000,00							101.190.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	89.580.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	101.190.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						142.408.800,00					ASN Kecamatan Sesayap		370.692.480,00	
		-						142.408.800,00					ASN Kecamatan Sesayap		370.692.480,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	525.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	41.796.000,00						-	149.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	67.302.100,00						-	150.692.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	24.068.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	8.717.700,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.717.700,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.717.700,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	30.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						67.302.100,00							150.692.480,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	67.302.100,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	150.692.480,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.068.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	24.068.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	40.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						41.796.000,00							149.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	41.796.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	149.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						525.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.086.420,00					ASN Kecamatan Sesayap		45.506.800,00	
		-						51.086.420,00					ASN Kecamatan Sesayap		45.506.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	45.590.920,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.495.500,00						-	5.506.800,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.495.500,00							5.506.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	5.495.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.506.800,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.590.920,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	45.590.920,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	40.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.340.000,00					Aset Kantor Kecamatan Sesayap		45.680.000,00	
		-						26.340.000,00					Aset Kantor Kecamatan Sesayap		45.680.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	17.000.000,00						-	35.680.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.340.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.000.000,00							35.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	11 Unit	17.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	35.680.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.340.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	7 Unit	9.340.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	10.000.000,00	Kecamatan Sesayap
178.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.107.000,00							50.000.000,00	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang dapat diselesaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	20.107.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						20.107.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sesayap		50.000.000,00	
		-						20.107.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sesayap		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	20.107.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.107.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	20.107.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	50.000.000,00	Kecamatan Sesayap

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
179.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						62.405.200,00							385.000.000,00	
			Persentase Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang Ditindaklanjuti	-		-	100 %	62.405.200,00						-	385.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.063.200,00					Kelompok Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Aparatur Desa Se-Kecamatan Sesayap		35.000.000,00	
		-						20.063.200,00					Kelompok Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Aparatur Desa Se-Kecamatan Sesayap		35.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	20.063.200,00						-	35.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.063.200,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga Kemasyarakatan	20.063.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Desa Tideng Pale 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	35.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						42.342.000,00					Kelompok Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Aparatur Desa Se-Kecamatan Sesayap		350.000.000,00	
		-						42.342.000,00					Kelompok Kelembagaan, Organisasi Masyarakat dan Aparatur Desa Se-Kecamatan Sesayap		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	22.200.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	20.142.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						22.200.000,00							150.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	22.200.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	150.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						20.142.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.142.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	200.000.000,00	Kecamatan Sesayap
180.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						17.302.000,00							50.000.000,00	
			Persentase Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	17.302.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						17.302.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sesayap		50.000.000,00	
		-						17.302.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sesayap		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	17.302.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						17.302.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	12 Laporan	17.302.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	50.000.000,00	Kecamatan Sesayap
181.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						45.503.500,00							170.000.000,00	
			Persentase Desa yang Menyusun Laporan Administrasi Pemerintah Desa Tepat Waktu	-		-	100 %	45.503.500,00						-	170.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						45.503.500,00					Seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Sesayap		170.000.000,00	
		-						45.503.500,00					Seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Sesayap		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	20.067.000,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	25.436.500,00						-	115.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						20.067.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	2 Dokumen	20.067.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	55.000.000,00	Kecamatan Sesayap
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						25.436.500,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	4 Laporan	25.436.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	115.000.000,00	Kecamatan Sesayap
		Kecamatan Sesayap Hilir						3.206.382.676,00							5.218.477.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.191.845.036,00							5.193.477.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	KECAMATAN						3.191.845.036,00							5.193.477.500,00	
182.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.103.255.236,00							4.660.777.500,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	75,35 Nilai	13.000.300,00						-	6.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 %	111.724.301,00						-	378.018.982,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 %	15.010.000,00						-	25.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran (%)	-		-	100 %	2.933.711.235,00						-	4.204.758.518,00	
			-	-		-	-	29.809.400,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.300,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		18.000.000,00	
		-						13.000.300,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		18.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	6.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.999.900,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.000.400,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.999.900,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	2.999.900,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	6.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.400,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	4.000.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	6.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	455 Data	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	6.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.865.358.175,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		4.070.198.518,00	
		-						2.865.358.175,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		4.070.198.518,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	90.160.000,00						-	117.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.775.198.175,00						-	3.953.198.518,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.775.198.175,00							3.953.198.518,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	420 Orang/bulan	2.775.198.175,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.953.198.518,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.160.000,00							117.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	90.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	117.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.010.000,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						15.010.000,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	3.010.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	12.000.000,00						-	22.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.010.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	3.010.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						12.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	22.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						111.724.301,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		378.018.982,00	
		-						111.724.301,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		378.018.982,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.076.500,00						-	1.076.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.192.000,00						-	300.302.482,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	45.663.000,00						-	70.640.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	14.792.801,00						-	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						14.792.801,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	2 Paket	14.792.801,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	6.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.663.000,00							70.640.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	45.663.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	70.640.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.192.000,00							300.302.482,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.192.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	300.302.482,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.076.500,00							1.076.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.076.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.076.500,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.462.600,00					-		89.000.000,00	
		-						12.462.600,00					-		89.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	12.462.600,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	64.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							64.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	64.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						12.462.600,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	3 Unit	12.462.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	25.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.890.460,00					-		45.560.000,00	
		-						55.890.460,00					-		45.560.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	51.530.460,00						-	41.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	4.360.000,00						-	4.360.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.360.000,00							4.360.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	4.360.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.360.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.530.460,00							41.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	51.530.460,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	41.200.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.809.400,00					-		35.000.000,00	
		-						29.809.400,00					-		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	24.569.400,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	5.240.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						24.569.400,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	24.569.400,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	30.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.240.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	5.240.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
183.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						7.985.000,00							105.000.000,00	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang dapat diselesaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	7.985.000,00						-	105.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						7.985.000,00					ASN Kecamatan.sesayap hilir ,Masyarakat		105.000.000,00	
		-						7.985.000,00					ASN Kecamatan.sesayap hilir ,Masyarakat		105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	7.985.000,00						-	105.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.985.000,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	2 Laporan	7.985.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	105.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
184.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						56.696.800,00							336.500.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	9.096.800,00						-	16.500.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti (%)	-		-	100 %	47.600.000,00						-	320.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						9.096.800,00					ASN, Pemerintah Desa, Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan		16.500.000,00	
		-						9.096.800,00					ASN, Pemerintah Desa, Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan		16.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	9.096.800,00						-	16.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.096.800,00							16.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	9.096.800,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	16.500.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						47.600.000,00					Lembaga, Organisasi Masyarakat		320.000.000,00	
		-						47.600.000,00					Lembaga, Organisasi Masyarakat		320.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	47.600.000,00						-	320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						47.600.000,00							320.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.600.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	320.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
185.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.440.000,00							16.000.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	8.440.000,00						-	16.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						8.440.000,00					ASN Kec.sesayap hilir ,Masyarakat		16.000.000,00	
		-						8.440.000,00					ASN Kec.sesayap hilir ,Masyarakat		16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	8.440.000,00						-	16.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						8.440.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	2 Laporan	8.440.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	16.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
186.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						15.468.000,00							75.200.000,00	
			Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu	-		-	100 %	15.468.000,00						-	75.200.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15.468.000,00					ASN Kec.Sesayap Hilir,Pemerintah Desa		75.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						15.468.000,00					ASN Kec.Sesayap Hilir,Pemerintah Desa		75.200.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	7.688.000,00						-	39.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	7.780.000,00						-	36.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.688.000,00							39.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	8 Dokumen	7.688.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	39.200.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7.780.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	2 Laporan	7.780.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	36.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	X							14.537.640,00							25.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						14.537.640,00							25.000.000,00	
187.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.537.640,00							25.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran	-		-	100 %	5.037.640,00						-	5.000.000,00	
			Persentase Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Adminstras Perkantoran (%)	-		-	100 %	9.500.000,00						-	20.000.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.037.640,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		5.000.000,00	
		-						5.037.640,00					ASN Kec.Sesayap Hilir		5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.037.640,00						-	5.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.037.640,00							5.000.000,00	

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	5.037.640,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.500.000,00					-		20.000.000,00	
		-						9.500.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	9.500.000,00						-	20.000.000,00	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	9.500.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Sesayap Hilir Desa Sesayap Selor 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	20.000.000,00	Kecamatan Sesayap Hilir
		Kecamatan Tana Lia						3.101.804.645,00							4.108.712.920,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.101.804.645,00							4.108.712.920,00	
	7.01	KECAMATAN						3.101.804.645,00							4.108.712.920,00	
188.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.030.232.545,00							3.590.833.520,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	79.70 Nilai	3.028.382.545,00						-	3.587.429.520,00	
			Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	3.028.382.545,00						-	3.587.429.520,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.907.800,00					ASN Kecamatan Tana Lia		16.327.400,00	
		-						10.907.800,00					ASN Kecamatan Tana Lia		16.327.400,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	1.850.000,00						-	3.404.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	4.252.600,00						-	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	4.805.200,00						-	7.423.400,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.252.600,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	4.252.600,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.500.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.805.200,00							7.423.400,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	4.805.200,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	7.423.400,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.850.000,00							3.404.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	320 Data	1.850.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.404.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.806.042.814,00					ASN Kecamatan Tana Lia		2.900.698.720,00	
		-						2.806.042.814,00					ASN Kecamatan Tana Lia		2.900.698.720,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	75.630.000,00						-	105.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.730.412.814,00						-	2.795.448.720,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.730.412.814,00							2.795.448.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	397 Orang/bulan	2.730.412.814,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	2.795.448.720,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75.630.000,00							105.250.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	75.630.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	105.250.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.720.000,00					ASN Kecamatan Tana Lia		21.230.000,00	
		-						7.720.000,00					ASN Kecamatan Tana Lia		21.230.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	7.720.000,00						-	21.230.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						7.720.000,00							21.230.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	1 Orang	7.720.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	21.230.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						109.336.181,00					ASN Kecamatan Tana Lia		508.384.000,00	
		-						109.336.181,00					ASN Kecamatan Tana Lia		508.384.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	1.850.000,00						-	3.404.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	50.160.000,00						-	410.250.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.411.176,00						-	78.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.000.000,00						-	10.780.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	915.005,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						915.005,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	915.005,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.411.176,00							78.950.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	49.411.176,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	78.950.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							10.780.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	3 Paket	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	10.780.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.160.000,00							410.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	50.160.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	410.250.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.850.000,00							3.404.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	1.850.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.404.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.372.250,00					ASN Kecamatan Tana Lia		10.029.400,00	
		-						3.372.250,00					ASN Kecamatan Tana Lia		10.029.400,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	3.372.250,00						-	10.029.400,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.372.250,00							10.029.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	3.372.250,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	10.029.400,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.463.500,00					ASN Kecamatan Tana Lia		39.964.000,00	
		-						38.463.500,00					ASN Kecamatan Tana Lia		39.964.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	35.463.500,00						-	35.964.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.000.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.463.500,00							35.964.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	35.463.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	35.964.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.390.000,00					ASN Kecamatan Tana Lia		94.200.000,00	
		-						54.390.000,00					ASN Kecamatan Tana Lia		94.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	50.330.000,00						-	82.275.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	4.060.000,00						-	11.925.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.330.000,00							82.275.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	50.330.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	82.275.000,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00							11.925.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	4.060.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	11.925.000,00	Kecamatan Tana Lia
189.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						9.776.000,00							13.376.900,00	
			Persentase pelayanan administrasi kecamatan yang terselesaikan dengan tepat waktu	-		-	100 %	9.776.000,00						-	13.376.900,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.776.000,00					Masyarakat Kecamatan Tana Lia		13.376.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.776.000,00					Masyarakat Kecamatan Tana Lia		13.376.900,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	9.776.000,00						-	13.376.900,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9.776.000,00							13.376.900,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	9.776.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	13.376.900,00	Kecamatan Tana Lia
190.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						39.816.100,00							394.847.100,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	39.816.100,00						-	394.847.100,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.750.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kec. Tana Lia		9.980.000,00	
		-						7.750.000,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kec. Tana Lia		9.980.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	7.750.000,00						-	9.980.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.750.000,00							9.980.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	9.980.000,00	Kecamatan Tana Lia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						32.066.100,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kec. Tana Lia		384.867.100,00	
		-						32.066.100,00					Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kec. Tana Lia		384.867.100,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	26.134.100,00						-	363.887.100,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	5.932.000,00						-	20.980.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						26.134.100,00							363.887.100,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	26.134.100,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	363.887.100,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						5.932.000,00							20.980.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.932.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	20.980.000,00	Kecamatan Tana Lia
191.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.292.000,00							55.905.300,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	9.292.000,00						-	55.905.300,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						9.292.000,00					Masyarakat Kecamatan Tana Lia		55.905.300,00	
		-						9.292.000,00					Masyarakat Kecamatan Tana Lia		55.905.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	9.292.000,00						-	55.905.300,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						9.292.000,00							55.905.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	1 Laporan	9.292.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	55.905.300,00	Kecamatan Tana Lia
192.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12.688.000,00							53.750.100,00	
			Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu	-		-	100 %	12.688.000,00						-	53.750.100,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12.688.000,00					Pemerintah Desa di Kec. Tana Lia		53.750.100,00	
		-						12.688.000,00					Pemerintah Desa di Kec. Tana Lia		53.750.100,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	5.700.000,00						-	23.275.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	6.988.000,00						-	30.475.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.700.000,00							23.275.100,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	1 Dokumen	5.700.000,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Tana Lia Desa Tanah Merah 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	23.275.100,00	Kecamatan Tana Lia
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.988.000,00							30.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	4 Laporan	6.988.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	30.475.000,00	Kecamatan Tana Lia
		Kecamatan Betayau						3.307.749.568,00							4.789.329.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.307.749.568,00							4.789.329.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.307.749.568,00							4.789.329.000,00	
193.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.280.249.568,00							4.711.829.000,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	78 Nilai	3.254.149.568,00						-	4.668.109.000,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	3.254.149.568,00						-	4.668.109.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		7.940.000,00	
		-						4.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		7.940.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	500.000,00						-	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00						-	3.720.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.500.000,00						-	3.720.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							3.720.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.720.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							3.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	22 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.720.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	380 Data	500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	500.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.010.386.303,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		4.473.542.735,00	
		-						3.010.386.303,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		4.473.542.735,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.960.386.303,00						-	4.423.542.735,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.960.386.303,00							4.423.542.735,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	476 Orang/bulan	2.960.386.303,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	4.423.542.735,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	50.000.000,00	Kecamatan Betayau

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		10.000.000,00	
		-						1.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	7 Orang	1.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	10.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						65.780.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		167.796.265,00	
		-						65.780.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		167.796.265,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	8.280.000,00						-	8.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	0,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	35.000.000,00						-	98.516.265,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	12.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	25.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	15.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	20.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.000.000,00							98.516.265,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	98.516.265,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	1.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						8.280.000,00							8.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	4 Dokumen	8.280.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.280.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						173.883.265,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		0,00	
		-						173.883.265,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	173.883.265,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						173.883.265,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	173.883.265,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.100.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		43.600.000,00	
		-						21.100.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		43.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	12.500.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.600.000,00						-	3.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.600.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	3.600.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	25.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	15.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.600.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		8.950.000,00	
		-						3.600.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		8.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	3.600.000,00						-	8.950.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.600.000,00							8.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	3.600.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	8.950.000,00	Kecamatan Betayau
194.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.500.000,00							12.500.000,00	
			Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang dapat diselesaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	2.500.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						2.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	2.500.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							12.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.500.000,00	Kecamatan Betayau
195.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						17.500.000,00							37.500.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	17.500.000,00						-	37.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		15.000.000,00	
		-						10.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		15.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	7 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	15.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						7.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		22.500.000,00	
		-						7.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	5.000.000,00						-	12.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	2.500.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						5.000.000,00							12.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	7 Lembaga K emasyarakatat an	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	12.500.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						2.500.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	7 Lembaga K emasyarakatat an	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMA SI TATA KELOLA P EMERINTA HAN, DIGIT ALISASI, DAN PEMB ANGUNAN BERLANJU TAN		-	10.000.000,00	Kecamatan Betayau
196.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.500.000,00							5.000.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						2.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		5.000.000,00	
		-						2.500.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	2.500.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						2.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	5.000.000,00	Kecamatan Betayau
197.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5.000.000,00							22.500.000,00	
			Persentase desa yang menyusun laporan administrasi pemerintah desa tepat waktu	-		-	100 %	2.500.000,00						-	22.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		22.500.000,00	
		-						5.000.000,00					ASN Kecamatan Betayau dan Masyarakat		22.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	2.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	2.500.000,00						-	12.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	6 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	10.000.000,00	Kecamatan Betayau
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	6 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	12.500.000,00	Kecamatan Betayau
		Kecamatan Muruk Rian						3.009.414.394,00							70.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.009.414.394,00							70.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.009.414.394,00							70.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
198.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.910.509.194,00							0,00	
			-	-		-	-	2.907.881.694,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.512.500,00					-		0,00	
		-						7.512.500,00					-		0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	2.257.500,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	2.627.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.627.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.627.500,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	9 Dokumen	2.627.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.627.500,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	26 Laporan	2.627.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.257.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	350 Data	2.257.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.584.825.634,00					-		0,00	
		-						2.584.825.634,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	41.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.543.825.634,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.543.825.634,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	308 Orang/bulan	2.543.825.634,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	13 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.711.060,00					-		0,00	
		-						160.711.060,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	497.500,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	44.348.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	103.009.560,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.856.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						103.009.560,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	103.009.560,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.856.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	12.856.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						44.348.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	44.348.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						497.500,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	497.500,00	Provinsi Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung Kecamatan Muruk Rian Desa Rian 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.040.000,00					-		0,00	
		-						83.040.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	77.040.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	6.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.040.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	77.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	0,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						74.420.000,00					-		0,00	
		-						74.420.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	65.040.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.380.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.040.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	65.040.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.380.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	6 Unit	9.380.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
199.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						3.700.000,00							57.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan yang dapat diselesaikan Tepat Waktu	-		-	100 %	3.700.000,00						-	57.600.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.700.000,00					Masyarakat		57.600.000,00	
		-						3.700.000,00					Masyarakat		57.600.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	-	3.700.000,00						-	57.600.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.700.000,00							57.600.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-		-	6 Laporan	3.700.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	57.600.000,00	Kecamatan Muruk Rian
200.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						71.205.200,00							12.600.000,00	
			Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	11.100.000,00						-	12.600.000,00	
			-	-		-	-	60.105.200,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						11.100.000,00					Pemerintah Desa, ASN dan Masyarakat Desa Se - Kec. Muruk Rian		12.600.000,00	
		-						11.100.000,00					Pemerintah Desa, ASN dan Masyarakat Desa Se - Kec. Muruk Rian		12.600.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	11.100.000,00						-	12.600.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.100.000,00							12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	6 Lembaga Kemasyarakatan	11.100.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	12.600.000,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						60.105.200,00					-		0,00	
		-						60.105.200,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	42.405.200,00						-	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	17.700.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						42.405.200,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	42.405.200,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						17.700.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	17.700.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
201.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						7.400.000,00							0,00	
			-	-		-	-	7.400.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						7.400.000,00					-		0,00	
		-						7.400.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	-	7.400.000,00						-	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						7.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-		-	4 Laporan	7.400.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
202.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						16.600.000,00							0,00	
			-	-		-	-	8.300.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						16.600.000,00					-		0,00	
		-						16.600.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	-	8.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	8.300.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						8.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-		-	5 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						8.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	4 Laporan	8.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Kecamatan Muruk Rian
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						5.785.488.994,00							10.149.517.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.244.254.269,00							5.351.971.932,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.244.254.269,00							5.351.971.932,00	
203.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.244.254.269,00							5.351.971.932,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	-		-	68,00 Nilai	3.056.765.490,00						-	4.399.206.750,00	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai	-		-	68,00 Nilai	10.532.000,00						-	102.000.000,00	
			Presentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		-	100 %	3.065.743.490,00						-	4.501.206.750,00	
			-	-		-	-	176.956.779,00						-	850.765.182,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.552.500,00					ASN Kesbangpol		175.849.000,00	
		-						9.552.500,00					ASN Kesbangpol		175.849.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	1.554.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	3.999.500,00						-	105.069.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	3.999.000,00						-	50.780.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.999.500,00							105.069.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	5 Dokumen	3.999.500,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	105.069.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.999.000,00							50.780.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	32 Laporan	3.999.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.780.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.554.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	92 Data	1.554.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.047.212.990,00					ASN Kesbangpol		4.223.357.750,00	
		-						3.047.212.990,00					ASN Kesbangpol		4.223.357.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	133.680.000,00						-	161.160.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	2.913.532.990,00						-	4.062.197.750,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.913.532.990,00							4.062.197.750,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	294 Orang/bulan	2.913.532.990,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	4.062.197.750,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						133.680.000,00							161.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	133.680.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	161.160.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.532.000,00					ASN Kesbangpol		102.000.000,00	
		-						10.532.000,00					ASN Kesbangpol		102.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	1.554.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	8.978.000,00						-	100.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.554.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	7 Dokumen	1.554.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.978.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	5 Orang	8.978.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						120.308.779,00					-		691.765.182,00	
		-						120.308.779,00					-		691.765.182,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	-	480.000,00						-	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	57.196.000,00						-	370.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.999.930,00						-	298.465.182,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	2.988.760,00						-	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	9.644.089,00						-	0,00	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.644.089,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.644.089,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.999.930,00							298.465.182,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	25 Paket	49.999.930,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	298.465.182,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.988.760,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	4 Paket	2.988.760,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	21.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						57.196.000,00							370.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	57.196.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	370.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						480.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	1 Dokumen	480.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38.598.000,00					-		38.000.000,00	
		-						38.598.000,00					-		38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	29.008.000,00						-	26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.590.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	5.000.000,00						-	12.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	12.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.008.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	29.008.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	26.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.590.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	4.590.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.050.000,00					-		121.000.000,00	
		-						18.050.000,00					-		121.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	8.750.000,00						-	57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	9.300.000,00						-	64.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.750.000,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	8.750.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	57.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.300.000,00							64.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	9.300.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	64.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.541.234.725,00							4.797.545.068,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.541.234.725,00							4.797.545.068,00	
204.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.318.211.600,00							833.635.710,00	
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaa	-		-	100 %	1.317.841.600,00						-	833.635.710,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.318.211.600,00					OPD Kabupaten Tana Tidung, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pelajar		833.635.710,00	
		-						1.318.211.600,00					OPD Kabupaten Tana Tidung, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pelajar		833.635.710,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	-	369.600,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	370.000,00						-	106.135.710,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	370.000,00						-	107.500.000,00	
			Jumlah Paskibraka	-		-	-	1.317.102.000,00						-	550.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						370.000,00							107.500.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	135 Orang	370.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	107.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						370.000,00							106.135.710,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	2 Laporan	370.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	106.135.710,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						369.600,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-		-	30 Keluarga	369.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						1.317.102.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	-		-	39 Orang	1.317.102.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	550.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
205.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.156.946.525,00							2.030.016.398,00	
			Tingkat pemahaman politik kader partai politik dan masyarakat	-		-	100 %	1.156.946.525,00						-	2.030.016.398,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.156.946.525,00					Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Pelajar		2.030.016.398,00	
		-						1.156.946.525,00					Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Pelajar		2.030.016.398,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	2.144.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	1.124.802.525,00						-	1.700.016.398,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.124.802.525,00							1.700.016.398,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	200 Orang	1.124.802.525,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.700.016.398,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	30 Orang	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATA N KARAKT ER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MA SYARAKAT		-	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.144.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	6 Laporan	2.144.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperk okoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
206.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						4.288.000,00							796.400.000,00	
			Persentase Ormas Yang Memenuhi Persyaratan	-		-	100 %	2.144.000,00						-	796.400.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						4.288.000,00					Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),Perangk at daerah/instansi		796.400.000,00	
		-						4.288.000,00					Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),Perangk at daerah/instansi		796.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	2.144.000,00						-	106.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	2.144.000,00						-	690.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						2.144.000,00							690.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	150 Orang	2.144.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	690.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						2.144.000,00							106.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	6 Laporan	2.144.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	106.400.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
207.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						739.600,00							215.992.960,00	
			Persentase Pemahaman Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-		-	100 %	739.600,00						-	215.992.960,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						739.600,00					OPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda		215.992.960,00	
		-						739.600,00					OPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda		215.992.960,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	370.000,00						-	59.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	-	369.600,00						-	156.992.960,00	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						369.600,00							156.992.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	120 Orang	369.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN, DIGITALISASI, DAN PEMBANGUNAN BERLANJUTAN		-	156.992.960,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						370.000,00							59.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		-	3 Laporan	370.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	59.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
208.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						61.049.000,00							921.500.000,00	
			Persentase potensi konflik yang terdeteksi melalui kewaspadaan dini	-		-	100 %	61.049.000,00						-	921.500.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						61.049.000,00					OPD,TNI/Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan,		921.500.000,00	
		-						61.049.000,00					OPD,TNI/Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan,		921.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	369.600,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	6.730.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	-	23.949.400,00						-	421.500.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						23.949.400,00							421.500.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	320 Orang	23.949.400,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	421.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	120 Orang	30.000.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	PENGUATAN KARAKTER, BUDAYA LOKAL, DAN KOHESI SOSIAL MASYARAKAT		-	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						6.730.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-		-	2 Laporan	6.730.000,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	70.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						369.600,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	369.600,00	Kab. Tana Tidung	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	J U M L A H							800.011.229.978,00							904.274.224.969,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dalam RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator ini menjadi alat ukur yang penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, indikator kinerja daerah dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu spesifik, objektif, berkesinambungan, terukur, serta dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar indikator yang digunakan mampu menggambarkan kondisi riil pembangunan daerah secara akurat, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dituangkan dalam bentuk matriks yang memuat keterkaitan antara indikator, satuan, serta target capaian yang ingin diraih. Matriks ini berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah secara terintegrasi. Dengan demikian, indikator yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun indikator kinerja daerah beserta target capaian Tahun 2027 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,96
2	Indeks Gini	Poin	0,273
3	Tingkat Kemiskinan	%	3,79
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	342,81
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	78,20
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	51,34
9	Kontribusi PDRB KTT terhadap Kalimantan Utara	%	6,53

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,96
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,79
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13
4	PDRB per Kapita	Juta Rp	342,81
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47
6	Indeks Gini	Poin	0,273
7	Indeks Desa	Poin	79,01
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,50
9	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Poin	87,65
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	78,20

Tabel 6.3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,96
2	Indeks Pendidikan	Poin	67,18
3	Hasil Pembelajaran:		
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a) Literasi Membaca	%	26
	b) Numerasi	%	15
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	a) Literasi Membaca	%	43,68
	b) Numerasi	%	30,28
6	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	9,63
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44
8	Indeks Kesehatan	Poin	82,55
9	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	73,66
10	Kesehatan ibu dan anak:		
	a) Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	175
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	7,1
11	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC (treatment coverage) (%)	%	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	90
12	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	%	94,29
13	Tingkat Kemiskinan	%	3,79
14	Indeks Gini	Poin	0,273

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	49,28
16	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	44
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47
18	PDRB per Kapita	Juta Rp.	342,81
19	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	2,49
20	Pengembangan Pariwisata:		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,4
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	35
21	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	3,08
22	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:		
	a) Rasio kewirausahaan Kabupaten (%)	%	4,21
	b) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,59
	c) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	1,33
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62,33
25	Tingkat Penguasaan IPTEK:		
	a) Indeks Inovasi Daerah	Poin	51,28
26	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:		
	Kontribusi Kategori Pertanian	%	24,53
27	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	1,39
28	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	2±1
29	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	30,59
30	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	56,18
31	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan:		
	a) Kontribusi PDRB KTT terhadap Kalimantan Utara (%)	%	6,53
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	88,9
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	%	40,62 (13 desa)
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,50
33	Indeks Reformasi Hukum	Poin	71,17
34	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,83
35	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,07
36	Indeks Integritas Nasional	Poin	76,76
37	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	Sedang
38	Angka Konflik	Poin	0,534
39	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	65,46
40	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	3,78
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,73

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027
42	Tingkat Inflasi (%)	%	2±1
43	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:		
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	26,47
	b) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	%	5.596.308
	c) Total Kredit/PDRB (%)	%	17,72
44	Inklusi Keuangan (%)	%	97,49
45	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,52
46	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58,86
47	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	Poin	82,77
48	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	72,50
49	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,285
50	Kualitas Lingkungan Hidup:		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	78,20
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	77,45
	c) Pengelolaan Sampah	-	-
51	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	35,64
52	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	87,7
53	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:		
	a) Ketahanan Energi		
	a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh/kapita	2108
	b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	14
	c) Ketahanan Air: Kapasitas Air Baku		
	b. Kapasitas Air Baku	m³/detik	0,46
	c. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	69,17
54	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	145,11
55	Persentase Penurunan Emisi GRK (%):		
	a) Kumulatif	%	38,14
	b) Tahunan	%	51,34

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
	Aspek I: Geografi dan Demografi		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	65,63
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	13,43
3	Konsumsi listrik perkapita	kWh/kapita	2.108
4	Kapasitas Air Baku	m³/detik	0,46
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	69,17

No	Indikator	Satuan	Target 2027
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	78,20
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	77,45
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	35,64
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Sampah (% RT)	%	87,7
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	51,34
11	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,11
12	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,52
13	Jumlah Penduduk	Jiwa	30,15
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,27
15	Rasio Penduduk	Poin	110,99
16	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	7,81
Aspek II: Kesejahteraan Masyarakat			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,79
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	342,81
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,13
5	Indeks Gini	Poin	0,273
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,96
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,66
8	Prevalensi Stunting	%	7,1
9	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	175
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	100
11	Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	90
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	94,29
13	Indeks Pendidikan	Poin	67,18
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,63
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,44
16	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
	Literasi Membaca (Kab/Kota)	%	26
	Numerasi (Kab/Kota)	%	15
17	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
	Literasi Membaca (Satuan Pendidikan)	%	43,68
	Numerasi (Satuan Pendidikan)	%	30,28
18	Rasio Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Terhadap Ajang yang Diikuti	%	11
19	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Poin	0,41
20	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Poin	0,06

No	Indikator	Satuan	Target 2027
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	49,28
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	44
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	82,77
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58,86
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	72,50
26	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,285
27	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Ribu Rp	9.713
28	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	60,6
	Aspek III: Daya Saing Daerah		
1	Angka Ketergantungan	Poin	47,34
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,49
3	Rasio PDRB Akomodasi & Makan Minum	%	0,4
4	LPE Sektor Pariwisata (PAMM)	%	8,64
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	35
6	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	3,08
7	Rasio Kewirausahaan Kabupaten	%	4,21
8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,59
9	Return of Aset (ROA) BUMD	%	1,33
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,12
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,33
12	Indeks Inovasi Daerah	Poin	51,28
13	Kontribusi Sektor Pertanian	%	24,53
14	Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi	Poin	1,39
15	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	2±1
16	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	2,1
17	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Tana Tidung	%	84,86
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	30,59
19	Indeks Infrastruktur Dasar	Poin	77,85
20	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	55,20
21	Ekspor Barang dan Jasa	%	56,18
22	Akses Hunian Layak	%	88,9
23	Tingkat Inflasi (%)	%	2±1
24	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,6
25	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	9,50
26	Kontribusi PDRB KTT terhadap Kalimantan Utara (%)	%	6,53
27	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%	24,74
28	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	57,4
29	Persentase Desa Mandiri	%	40,62 (13 desa)
30	Indeks Desa	Poin	79,01

No	Indikator	Satuan	Target 2027
31	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,26
32	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	3,56
	Aspek IV: Pelayanan Umum		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,50
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	89,04
3	Nilai SAKIP	Poin	73,05
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,83
5	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,07
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah	Poin	87,65
7	Indeks Integritas Nasional	Poin	76,76
8	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	Sedang
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,22
10	Angka Konflik	Poin	0,534
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	65,46
12	Angka Kriminalitas	Kasus	11
13	Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	26,47
14	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	Nilai	5.596.308
15	Total Kredit/PDRB	%	17,72
16	Rasio Pajak Daerah	%	0,73
17	Laju Penurunan Pelanggaran Perda	%	14,50
18	Indeks Rasa Aman	Poin	80
19	Persentase Nilai Kinerja Pemerintahan Desa	%	84
20	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	77
21	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	3,78

Tabel 6.5 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
a. Pendidikan			
1	Indeks iklim inklusivitas sekolah SMP	Nilai	65,2
2	Indeks iklim keamanan sekolah SD	Nilai	76,3
3	Indeks iklim keamanan sekolah SMP	%	77,5
4	Indeks iklim kebhinekaan sekolah SD	Nilai	72,97
5	Indeks iklim kebhinekaan sekolah SMP	Nilai	75,1
6	Jumlah anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	99,45
7	Jumlah anak usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,23
8	Jumlah anak usia 7–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	21

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
9	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	72,7
10	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	63,14
11	Rata-rata kemamouan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	62,26
12	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	76,06
13	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	56,34
14	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	68,1
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	63,7
b. Kesehatan			
1	Persentase Prevalensi stunting	%	7,1
2	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 KH	175
3	Angka kematian bayi	per 1.000 KH	8
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks	84,57
5	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15–19 tahun	per 1000 WUS	20,05
6	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100
7	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	70
8	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100
9	Persentase merokok penduduk 10–21 tahun	%	10,4
10	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	50
11	Persentase Sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	70
12	Persentase Tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	72
13	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan sesuai standar	%	86
14	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	71
15	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	86,27
16	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 tahun	%	1,4
17	Prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun	%	23,4
18	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	85

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
19	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	20,22
20	Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
21	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	50
23	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	70
24	Cakupan penemuan kasus TB	%	90
25	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	85
26	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
27	Pemeriksaan kesehatan	%	83
28	Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	55
29	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100
30	Anak usia 23 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	90
31	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100
32	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100
33	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100
34	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100
35	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100
36	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100
37	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
38	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	73
39	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	70
40	Skrining anemia	%	100
41	Terpantau kasus pneumonia	%	67,5

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
42	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100
43	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	%	83,7
44	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	67,5
45	Anak usia 0-23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	%	65,4
46	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	85,5
47	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI beragam	%	74
48	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM)	%	67,5
49	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90
50	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	71
51	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	83
52	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	90
53	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	96,73
54	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	85,5
55	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	54
56	Gizi buruk mendapat tata laksana	%	100
57	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	100
58	Jumlah kematian balita	%	5
59	Jumlah kematian ibu	%	3
60	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	%	75,62
61	Kepemilikan JKN	%	100
62	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	87
63	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	76,5
64	Mendapat obat cacing (POPM)	%	67,5
65	Pelayanan KB pasca persalinan	%	48
66	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil KEK	%	100
67	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	96,75
68	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	100
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan kabupaten/kota	%	46
2	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota	%	100
3	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kabupaten/kota	%	-
4	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	%	8,87
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	55
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	72
7	Persentase kepatuhan PBG dan SLF kabupaten/kota	%	93
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	60,52
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	100
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	30
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	33
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	54,59

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	4,17
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100
e. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase Perda dan Perkada Ditegakkan	%	46,35
2	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	40
3	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100
4	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	57
6	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100
8	Persentase penanganan pra bencana	%	100
9	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100
10	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
11	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
12	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100
13	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82
f. Sosial			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	67,5
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca rencana sesuai standar	%	63
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100
12	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	63
13	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	40
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
a. Tenaga Kerja			
1	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/Orang/ Bulan	650
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	40
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	6,03
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	50,36
b. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	82,63
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,285
3	Persentase ARG Daerah	%	15,47
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	84,59
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
c. Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82,02
2	Desa / Kelurahan yang memiliki Program Pemanfaatan Perkarangan untuk peningkatan Pangan (Asupan Gizi)	%	87,5
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12,5
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/kota	%	79,2
5	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	96
d. Pertanian			
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	0
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	22
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	22
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	22

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	60
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	60
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	60
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	60
e. Lingkungan Hidup			
1	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	%	0,43
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	47,5
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	83
f. Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil			
1	Jumlah Data Profil kependudukan yang Disusun	%	100
2	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
3	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	13
6	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	95,4
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100
8	Anak usia 0-59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	%	95,3
g. Pemberdayaan Masyarakat & Desa			
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	9,38
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatatan Desa	%	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100
h. Pengendalian Penduduk & KB			
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun	rata-rata	1,75
2	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	%	32,9
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (proportion of demand safisfied by modern meyhods)	%	92,07
i. Perhubungan			
1	Rasio konektivitas	angka	0,28
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	70
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	50
j. Komunikasi & Informatika			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	85
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	85
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	5,88
k. Koperasi, UMKM			
1	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,18
2	Pertumbuhan wirausaha	%	2,68
l. Penanaman Modal			
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0,8
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	57
m. Kepemudaan & Olahraga			
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,7
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	2,5
n. Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	poin	3
o. Persandian			
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	indeks	415
p. Kebudayaan			

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
1	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang di daftarkan	%	62
2	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang kebudayaan	%	7,5
3	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	45,47
q. Perpustakaan			
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	indeks	50,95
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai	82,98
r. Kearsipan			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	indeks	
3. Urusan Pilihan			
Kelautan & Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	1.158,73
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	8.084,15
Pariwisata			
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	7,4
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	1,67
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	5,6
Pertanian			
1	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	3,59
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	3,59
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2,9
4	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	%	97,15
5	Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan menular strategis (diperoleh dari surveilans penyakit dari 5 PHMS)	%	10,67
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,2
Perdagangan			
1	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	20
Perindustrian			

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
1	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	6
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	2
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	5,05
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	1
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	100
6	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	%	2,49
7	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	2,49
8	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	2,27
9	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	5
10	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	7
Transmigrasi			
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
a. Perencanaan			
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100
b. Keuangan			
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	23
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	3,89
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	52
4	Persentase Penurunan SILPA	%	38

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	85,3
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4,97
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan			
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	indeks	65
d. Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	16,36
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	rasio	0,68
e. Fungsi Pengawasan			
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	kategori	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	poin	5
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	poin	5
4	Manajemen Risiko Indeks	poin	5
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	70
f. Fungsi Pengadaan			
1	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	18
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	24
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	38
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	tepat waktu	tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	50
h. Pelayanan Publik			
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	nilai	83,25
Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Ringkasan Utama 2027)			
Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui			
1	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	77,4
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/MMS sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	84,6
3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	%	76,5
4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	76,5
5	Pelayanan KB pasca persalinan	%	3,6
Anak Usia 0-23 Bulan			
1	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	54

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
2	Bayi usia <6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	%	71,1
3	Anak usia 6–23 bulan mendapatkan MPASI beragam	%	71,1
4	Anak usia 6–23 bulan masih mendapat ASI	%	71,1
5	Anak usia 0–23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana	%	83,7
6	Anak usia 0–23 bulan dipantau pertumbuhan & perkembangan	%	54
7	Anak usia 0–23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	67,5
8	Anak usia 0–23 bulan mendapat imunisasi rutin lengkap	%	72
9	Anak usia 6–23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	85,5
10	Anak usia 6–23 bulan mendapat obat cacing (POPM)	%	67,5
Anak Usia 24–59 Bulan			
1	Gizi buruk mendapat tata laksana	%	83,7
2	Dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	54
3	Gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	67,5
4	Diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	%	85,5
5	Terpantau kasus pneumonia	%	67,5
6	Mendapat obat cacing (POPM)	%	67,5
Remaja Putri			
1	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	%	60,3
2	Skrining anemia	%	72
Calon Pengantin			
1	Pemeriksaan kesehatan	%	54
2	Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	54
Rumah Tangga Masyarakat			
1	Akses terhadap air minum aman	%	100
2	Akses terhadap sanitasi aman	%	77,45
3	Kepemilikan JKN	%	82
4	Kelompok sasaran mendapat pendampingan	%	75,62
5	Anak usia 0–59 bulan mendapat akta lahir dan KIA	%	85,19
6	Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	%	70
Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan (2027)			
1	Usia harapan hidup	Tahun	73,66
2	Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	%	1,75

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
3	Angka kematian ibu	per 100.000 KH	175
4	Angka kematian balita	per 1.000 KH	13
5	Prevalensi stunting	%	7,1
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	55
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	90
8	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	94,29
9	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	90
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
11	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	70
12	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	1,26
13	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	85,5
14	Prevalensi obesitas >18 tahun	%	12,6
15	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90
16	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	81,9
17	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	81
18	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	90
19	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	27
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	90
21	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	71,1
22	Persentase merokok penduduk 10–21 tahun	%	9,36
23	Cakupan penemuan kasus TB	orang	316,8
24	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	49,5
25	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	49,5
26	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	3,6
27	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	%	71,26
28	Angka kelahiran menurut usia tertentu / Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 tahun	%	2
29	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	3,6

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target 2027
30	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	76,5
31	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	70,2
32	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	72
33	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	90
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	76,5

**Tabel 6.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2027**

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Target 2027
Pendidikan			
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SD/MI	%	100
3	Precentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar jenjang SMP/MTs	%	100
4	Precentase Pendidikan Kesetaraan (Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	100
Kesehatan			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81,1
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	87,13
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	86,19
4	Pelayanan kesehatan balita	%	94,48
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	82,27
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	82,38
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100
10	Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa berat	%	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	%	100

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Target 2027
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100
Sosial			
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah WN	127
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah WN	1
4	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah WN	1202
6	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
7	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandang pengemis terlantar di luar panti	Jumlah WN	1
8	Persentase (%) gelandang pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
9	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten	Jumlah WN	50
10	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	95,84
Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum (SPAM) Sehari-hari	%	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	%	100
Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	100
Trantibumlinmas			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	%	93,89
2	Pelayanan informasi rawan bencana	%	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	97,5

No	Mutu Layanan SPM	Satuan	Target 2027
4	Pelayanana penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	98,54

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2027 dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah diarahkan untuk memperkuat landasan strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu Tana Tidung yang berdaya saing, berkeadilan, dan sejahtera. Seluruh perumusan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun sebagai bagian dari upaya nyata dalam merespons berbagai isu dan tantangan pembangunan, sekaligus mendorong terjadinya perubahan struktural yang berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan tetap menempatkan prinsip keadilan sosial dan pemerataan manfaat pembangunan sebagai landasan utama.

Pendekatan pembangunan yang diterapkan tidak semata-mata menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, namun juga mengintegrasikan upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, serta penguatan kohesi sosial masyarakat. Kebijakan dan program pembangunan dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah. Pelibatan aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat akseptabilitas kebijakan, serta mendorong lahirnya inovasi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi riil daerah.

Sebagai upaya memperkuat daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran pembangunan diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Reformasi birokrasi, percepatan transformasi digital, serta penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan berlandaskan pada nilai-nilai daya saing, keadilan, dan kesejahteraan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 diharapkan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah optimis bahwa dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan Kabupaten Tana Tidung yang mandiri, berdaya saing, adil, dan sejahtera.